2023

Laporan Kinerja
Balai Besar POM di Makassar



BADAN POM
Badan Pengawas Obat dan Makanan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Highlight
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

I Pendahuluan
Latar Belakang
Gambaran Umum Organisasi
Struktur Organisasi
Aspek Strategis Organisasi
Analisis Lingkungan strategis
Isu Strategis

II Perencanaan Kinerja
Rencana Strategis
Rencana Kerja Tahun 2023
Rencana Kinerja Tahun 2023
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Metode Pengukuran

III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja

Evaluasi dan Analis capaian kinerja

Realisasi Anggaran

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

IV Penutup

Kesimpulan

Saran

Lampiran

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Memasuki tahun keempat periode Renstra BBPOM Makassar 2020-2024, BBPOM Makassar sebagai bagian dari Unit Kerja Badan POM telah ikut berperan dalam mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan kinerja.



Sejalan dengan Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, kebijakan belanja Badan POM diarahkan untuk menjadi momentum transisi menuju adaptasi kebiasaan baru secara bertahap. Selain itu kebijakan harus menjadi instrumen untuk menyelesaikan permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi Indonesia kebijakan belanja Badan POM TA 2023 diarahkan antara lain untuk peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan,

peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, serta pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melakukan penguatan pengawasan premarket dan post-market obat dan makanan yang komprehensif berbasis risiko. Juga peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan melalui penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan dari hulu ke hilir, peningkatan efektivitas penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Balai Besar POM di Makassar menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi, inovasi, dan achievement Balai Besar POM di Makassar. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2023, Balai Besar POM di Makassar mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar 103,10.

Hasil pengukuran kinerja ini diharapkan dapat digunakan dalam monitoring dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan tahun 2023. Disamping itu, laporan ini berfungsi sebagai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* sesuai Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi serta sebagai sarana evaluasi mandiri (Self evaluation) atas pencapaian Kinerja BBPOM di Makassar dalam upaya penyempurnaan kinerja pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 yang merupakan tahun keempat Rencana Strategis BBPOM di Makassar periode 2020-2024.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada hasil capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2023 berdasarkan Reviu Rencana Strategi BBPOM Makassar 2020-2024, terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan kegiatan di tahun berjalan yaitu tahun 2023 serta secara umum untuk tahun mendatang

Semoga kerja sama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya Balai Besar POM di Makassar meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik lagi.

Tentunya diharapkan melalui kerja sama yang baik ini, akan mewujudkan Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Balai Besar POM di Makassar, khususnya pada para pegawai yang ada di garda terdepan. Terus jaga integritas dan profesionalisme. Tetap nyalakan semangat untuk berbuat terbaik bagi bangsa kita dan mari kita kawal Obat dan Makanan aman, bermutu di provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ITahun 2023 ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Makassar dan umpan balik bagi

organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja, serta dapat menjadi gambaran bagi generasi mendatang tentang bagaimana Balai Besar POM dalam berkarya dan berkinerja.

Makassar, 28 Februari 2024

K e p a l a



Dra. Hariani, Apt.

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023 ini merupakan bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas disamping sebagai evaluasi atas pencapaian kinerja BBPOM di Makassar dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berfungsi untuk menerjemahkan keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik *(good governance)*

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Tahun 2023 memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2023,

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Reviu Renstra BBPOM Makassar 2020-2024, Pengukuran Kinerja tahun 2023, Pengukuran efisiensi kegiatan tahun 2023. Terdapat 11 sasaran Strategis dengan 29 indikator kinerja Utama yang harus dicapai Balai Besar POM di Makassar selama tahun 2023 dimana frekuensi target dan capaian indikator kinerja ada yang bulanan dan tahunan.

Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 29 indikator kinerja Utama, dimana dari 11 sasaran strategis yang dapat dinilai Tahun 2023. Dari 29 IKU ini semuanya merupakan Indikator

Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar

Capaian kinerja pada laporan kinerja ini merupakan capaian kinerja Balai Besar POM di Makassar selama Tahun 2023. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, seluruh sasaran kegiatan yang capaiannya dapat dihitung pada Tahun 2023.

pada *Stekholders Perspective terdapat* 3 sasaran strategis dimana sasaran strategis pertama Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar 110,32 ; Sasaran Strategis kedua Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar capaian 101,02 serta sasaran strategis ketiga Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar 104,94 Kategori "**Sangat Baik**".

Persepctive *Internal Proses* terdapat empat sasaran strategis pada perspective ini, yaitu Sasaran Strategis empat Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar 99,89 Kategori "**Cukup**" ; Sasaran Strategis lima Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar 100,22 Kategori "**Sangat Baik**"; Sasaran Strategis Enam Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar 99,69 dan Sasaran Strategis Tujuh Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar 92,90 dimana Sasaran Strtegis keenam dan tujuh pada perspective ini Kategori "**Cukup**"

Pada learning and growth perspective terdapat empat Sasaran Strategis, Sasaran Strategis Delapan Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal 105,75; Sasaran Strategis Sembilan Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal 116,42; Sasaran Strtegis Sepuluh Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan 107,07 dimana tiga dari empat Sasaran Strategis pada perspective ini kategori **"Sangat Baik";** serta Sasaran Strategis Sebelas Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel 93,47 kategori "**Cukup**"

HIGHLIGHT

Selama tahun 2023, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain :

Juara 1

Juara 1 Regional Timur Lomba Desa Pangan Aman, yaitu Kelurahan Galung Maloang, Kota Parepare


PEMERINTAH KOTA PAREPARE

HUT KE-64 KOTA PAREPARE

TERIMA KASIH

Kepada :

BALAI BESAR POM DI MAKASSAR

Atas Intervensi dan Pendampingan Dalam Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman sehingga Kelurahan Galung Maloang meraih Juara 1 Regional Timur "LOMBA DESA PANGAN AMAN" Tahun 2023

Dr. Drs. AKBAR ALI, AP., MS.i

Pj. Wali Kota Parepare




BADAN POM

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

BALAI BESAR POM DI MAKASSAR

Sebagai:

UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK BPOM TAHUN 2023

Dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori

"PELAYANAN PRIMA"

Jakarta, 20 September 2023

Sekretaris Utama

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Drs. Rita Mahyona, Apt., M.Si.

Pelayanan Prima

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima

PJAS

Nominator Lomba Sekolah dengan Pangan Jajanan Aman Sekolah (PJAS) Tingkat Sekolah Menengah Pertama / Sederajat yaitu SMP Negeri 1 Kahu, Kabupaten Bone,


BADAN POM

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada:

SMP NEGERI 1 KAHU

KABUPATEN BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sebagai:

NOMINATOR

LOMBA SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ SEDERAJAT

Jakarta, Oktober 2023

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes.

IP ASN

JSertifikat penghargaan Peringkat III Pengukuran IP ASN Badan POM Tahun 2022 kategori Balai Besar





Pegawai Berprestasi

Piagam Penghargaan Andi Ilham Pamussureng, S.Si., Apt sebagai Pegawai Berprestasi di Unit Kerja Tahun 2024

Inovasi Aplikasi "SAPPAI"

Apresiasi atas inovasi aplikasi "SAPPAI" bahwa inovasi direplikasi di Tingkat Nasional ~ Badan POM ~



SNI ISO 9001:2015

Certficate SNI ISO 9001:2015 Quality Management System-Requirements (Sucofindo)



CERTIFICATE

SUCOFINDO

Certificate No. QSC 01883

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Menyatakan bahwa
Certify that

Balai Besar POM di Makassar

Jl. Baji Minasa No. 2, Makassar, Sulawesi Selatan 90126, Indonesia

telah menerapkan Sistem manajemen mutu yang memenuhi
has implemented quality management system that comply with

SNI ISO 9001:2015
Quality Management Systems-Requirements

Ruang lingkup sertifikasi
The scope of certification

Pengawasan Obat dan Makanan pada Wilayah Kerja Balai Besar POM di Makassar
Drug and Food Control of Provincial Office in Makassar

KODE SEKTOR / *SECTOR CODE* : 34; 36

Sertifikat ini berlaku dengan ketentuan bahwa organisasi selalu memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
This certificate is valid provided that the organization continues to meet the criteria asslaid down by SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Nurbeta Kurniawan
Vice President

Sertifikat ini berlaku dari 18 November 2021 sampai 17 November 2024
This certificate is valid from November 18, 2021 until November 17, 2024

4003151

ISO (IEC) 17025:2017

Sertifikat Akreditasi ISO (IEC) 17025:2017 LP-199-IDN (Komite Akreditasi Nasional)



ilac-MRA

KAN
Komite Akreditasi Nasional

SERTIFIKAT AKREDITASI

LP-199-IDN

Ditetapkan tanggal : 24 November 2021

Diberikan kepada

Berlaku hingga : 22 November 2026

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar

di

Jl. Baji Minasa No. 2, Makassar, Sulawesi Selatan

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai

LABORATORIUM PENGUJI

dengan menerapkan secara konsisten

SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)
Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi

untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Drs. KUKUH S. ACHMAD, M.Sc

KETUA



Julang sulawesi menghuni hutan primer dan hutan rawa. Julang Sulawesi biasa terbang di atas dan sekeliling tajuk dalam kelompok-kelompok kecil yang terpisah, tetapi terkadang berkelompok sampai lima puluh individu atau lebih. Ketika terbang sayapnya berbunyi berisik seperti mesin uap

BAB I

Pendahuluan



Bab I

Pendahuluan

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Makassar berkomitmen melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

1.1. Latar Belakang

Tahun 2023 merupakan tahun keempat yang penuh tantangan, tidak hanya di bidang ekonomi, namun di seluruh aspek kehidupan., Tahun 2023 juga merupakan tahun keempat masa Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2020-2024 yang memiliki visi Presiden "Terwujudnya indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut dalam 7 Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020- 2024.

Pencapaian visi Presiden tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Dukungan Balai Besar POM di Makassar terhadap 7 Agenda Pembangunan sesuai RPJMN periode 2020-2024 dituangkan dalam Rencana strategis (Renstra) Balai Besar POM di Makassar.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal akibat berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian aspek keamanan, mutu, dan khasiat obat dan makanan sepanjang *product life cycle* yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.
Siklus ini dimulai dari pencegahan (sertifikasi dan pembinaan), pengawasan *post market*, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus juga memperkuat industri obat dan makanan
Sejalan dengan proses produksi yang lebih intensif, distribusi produk obat dan makanan semakin masif tidak hanya melalui jalur *offline* tetapi juga *online*. Dinamika lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BBPOM di Makassar harus terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah tindak kejahatan obat dan makanan. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Badan POM mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya diwilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Besar POM di Makassar dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

"Belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda ekonomi, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan. Lakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember 2023 setelah DIPA diserahkan sehingga bisa menggerakkan ekonomi di kuartal III tahun 2023," pesan Presiden Joko Widodo. Presiden menginstruksikan agar pemerintah bekerja lebih cepat karena dalam kondisi krisis, semangat harus berbeda menjadi extraordinary agar program stimulus berdampak dan berdaya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi. "Lakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan ekonomi nasional dan daerah sehingga bisa menggerakkan ekonomi di kuartal III tahun 2023, Sesuai arahan Presiden dengan memanfaatkan APBN secara cermat, efektif, dan tepat sasaran. Seluruh rupiah yang ada di APBN harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, Presiden juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penggunaan anggaran untuk memecahkan masalah dan membantu rakyat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, sebagai bagian integral pelaksanaan APBN.
Sesuai dengan arahan presiden tersebut, Badan POM memastikan DIPA Badan POM sangat mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional, dan Badan POM akan terus mengawal implementasinya, dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Maju.

Pada TA 2023, Badan POM memiliki 16 Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) pada Satker pusat dan 9 proyek Prioritas Nasional pada lingkup Balai Besar/Balai POM termasuk BBPOM di Makassar sebagai salah satu UPT dari Badan POM. Kepala Balai Besar POM di Makassar berkomitmen untuk mengawal seluruh pelaksanaan kegiatan di terutama Pro-PN, baik realisasi anggaran dan fisik maupun kemajuan pencapaian target serta memastikan agar hingga akhir tahun 20223 kinerja Pro-PN mencapai target, sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2023.

Balai Besar POM di Makassar sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan good governance yang

tercantum dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Tahun 2023 di Balai Besar POM Makassar disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Makassar atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Balai Besar POM Makassar. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Balai Besar POM Makassar, serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Balai Besar POM Makassar

Selain itu, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pengawas Obat dan Makanan.



1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Makassar merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Kedudukan Balai Besar POM di Makassar berada di bawah dan bertanggung jawab oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 2 UPT BPOM di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (terdiri dari 24 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

a. Balai Besar POM di Makassar, cakupan pengawasan meliputi 17 kabupaten/kota (Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Selayar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Barru, Kabupaten Takalar, Kota Pare-Pare
b. Balai POM di Kota Palopo, cakupan pengawasan meliputi 7 kabupaten/kota (Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Enrekang)

Tugas

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Makassar telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Makassar) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota

tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 25 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Makassar dalam rangka mengawal pencapaian 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

Struktur Organisasi
Balai Besar POM di Makassar



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi BBPOM di Makassar

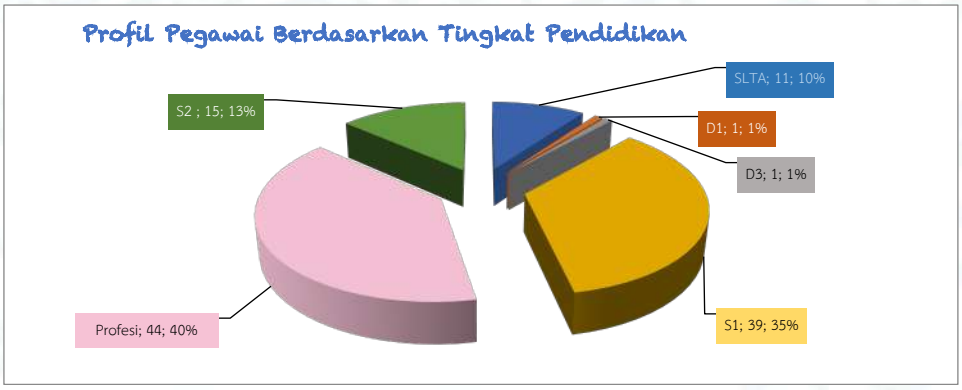
1.4. Analisis Lingkungan Strategis

INTERNAL

Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang dimiliki BBPOM di Makassar untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan per 31 Desember 2023 adalah sejumlah 108 orang yang tersebar di Bagian, Sub Bagian, Bidang dan Seksi Balai Besar POM di Makassar. Jumlah SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di Makassar telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja.



*Keterangan: data Nominatif Pegawai 2023

Gambar 1.2

Profil Pegawai Berdasarkan Pendidikan BBPOM di Makassar

BBPOM di Makassar harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir(*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah Sulawesi Selatan. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sarana Prasarana

BBPOM di Makassar memiliki 4 (empat) gedung bangunan dengan total luas bangunan sebesar 4.929 m2 diatas total luas tanah 19.662 m

Sarana Transportasi

BBPOM di Makassar untuk memenuhi kebutuhan operasional kegiatan didukung sarana transportasi sebanyak, 6 unit mobil operasional, 3 unit mobil laboratorium keliling dan 1 unit mobil increnator

Sarana Komunikasi

(Instagram BBPOM di Makassar (@bbpom_makassar), Twitter BBPOM di Makassar (@BBPOM_Makassar), Facebook BBPOM di Makassar (@Bbpom Makassar), Youtube BBPOM di Makassar (BBPOM di Makassar), Whatsapp Grup (0852 11111 533), 0411-871115

Anggaran

Sesuai Surat Pengesahan DIPA No. SP DIPA - 063.01.2.432923/2023, Pagu anggaran pada DIPA awal yang diterbitkan per 30 Nopember 2022 sebesar **Rp. 61,103,863,000**. dimana mengalami dan telah 11 kali dilaksanakan 6 kali revisi DIPA kewenangan DJA antara lain :

- Revisi 1 (Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 Tanggal 9 Desember 2022 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 yaitu Pemblokiran Mandiri (Selfblocking) Dalam Rangka Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) TA 2023 terdapat *Automatic Adjustment* TA 2023) tanggal 27 Desember 2022 dengan pagu 61.103.863.000 jumlah yang ditidak dapat dicairkan 6.779.103.000

  51 Belanja Pegawai Rp. 2.340.003.000

  52 Belanja Barang Rp. 4.439.100.000
- Revisi 4 (Usulan revisi anggaran berupa revisi pergeseran anggaran dari Satker BBPOM Makassar ke Satker BBPOM Yogyakarta sebesar Rp4.439.100.000 yaitu adanya perubahan lokasi penyelenggaraan KIE Bersama Tokoh Masyarakat)

  tanggal 20 Juni 2023 dengan pagu 56.664.763.000 jumlah yang ditidak dapat dicairkan 4.559.553.000

  51 Belanja Pegawai Rp. 2.340.003.000

  52 Belanja Barang Rp. 2.219.550.00
- Revisi DIPA 5 Revisi Anggaran dalam Rangka Revisi Anggaran Badan POM Buka Blokir Anggaran Automatic Adjusment TA 2023
- Revisi DIPA 6 Revisi Anggaran dalam Rangka Realokasi Anggaran Belanja Pegawai Badan POM TA 2023 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
- Revisi DIPA 7 Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah sesua iSurat Sekretaris Utama Badan POM RI Nomor B-PR.05.03.2.21.08.23.579 tentang Revisi Anggaran Redistribusi Alat Laboratorium TA 2023
- Revisi DIPA 8 Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tentang Usulan Revisi Pemenuhan Anggaran Belanja Pegawai TA 2023 dari Optimalisasi Anggaran pada DIPA Badan POM dan tambahan anggaran dari BA BUN, untuk BBPOM Makassar tambahan anggran pada belanja Pegawai adalah sebesar = 486,699,000

Dan 5 kali revisi DIPA kewenangan Kanwil Perbendaharaan Sulawesi Selatan antara lain :

- Revisi 2 (revisi Kanwil Perbendaharaan dalam rangka mengajukan revisi hal III DIPA) tanggal 16 Februari 2023 dengan pagu 61.103.863.000 jumlah yang ditidak dapat dicairkan 6.779.103.000
  - Belanja Pegawai Rp. 2.340.003.000
  - Belanja Barang Rp. 4.439.100.000

- Revisi 3 (revisi Kanwil Perbendaharaan dalam rangka mengajukan revisi hal III DIPA) tanggal 17 April 2023 dengan pagu 61.103.863.000 jumlah yang ditidak dapat dicairkan 6.779.103.000
  - Belanja Pegawai Rp. 2.340.003.000
  - Belanja Barang Rp. 4.439.100.000
- Revisi DIPA 9 Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sesuai Surat Kepala Balai POM Makassar Nomor B-PR.05.03.26A.26A5.12.23.953 tentang Usulan Revisi Anggaran DIPA TA 2023
- Revisi DIPA 10 Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sesuai Surat Kepala Balai POM Makassar Nomor B-PR.05.03.26A.26A5.12.23.1031 tentang Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan
- Revisi DIPA 11 Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sesuai Surat Kepala Balai POM Makassar Nomor B-PR.05.03.20A.20A5.01.24.38 tentang P Usulan Revisi Anggaran DIPA TA 2023 dalam rangka Revisi Anggaran memenuhi Belanja Operasional (Belanja Pegawai)

total pagu setelah revisi menjadi Rp 55.506.110..000,- dan total realisasi anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 55.081.318.876,- atau 99,23 %.

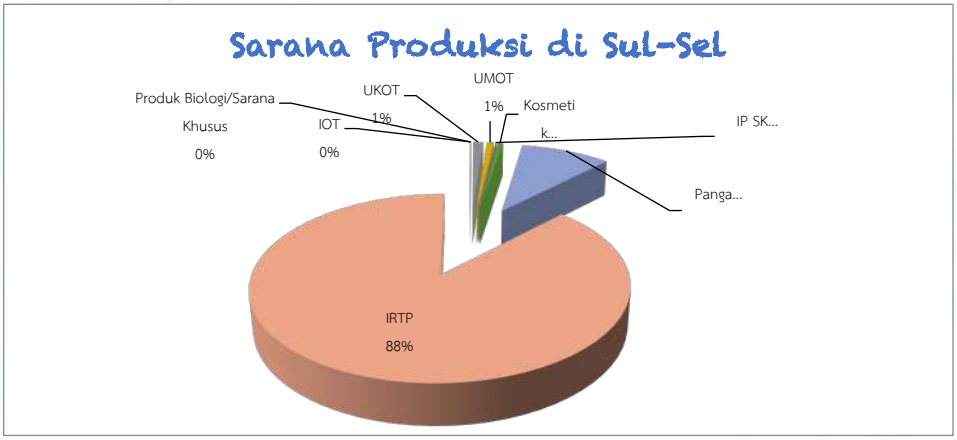
EKSTERNAL

KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

Wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota dan Balai POM di Kota Palopo (7 kabupaten/kota) yang dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Makassar.

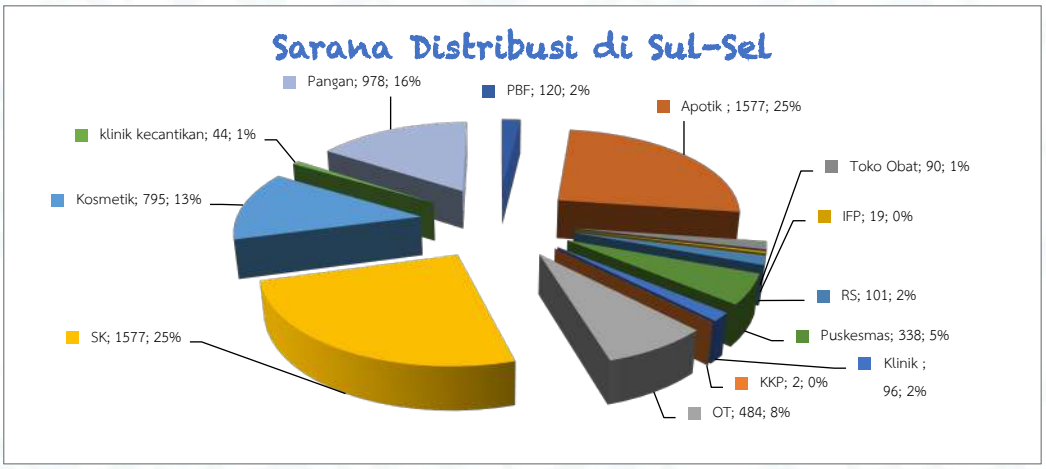
Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana pada gambar 3. tersebut di bawah ini



Gambar 1.3

Sarana Produksi di wilayah Kerja BBPOM di Makassar



Gambar 1.4

Sarana distribusii di wilayah Kerja BBPOM di Makassar

1.5. Isu Strategis

Dalam Renstra Balai Besar POM di Makassar 2020-2024, Balai Besar POM di Makassar telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai Besar POM di Makassar dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra Balai Besar POM di Makassar tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Makassar antara lain:

a. Pandemi Covid-19

Potensi:

1) Balai Besar POM di Makassar di perlukan perannya dalam pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.
2) Peran BBPOM di Makassar dalam mengawal pengembangan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan Covid-19.
3) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi informasi tentang keamanan dan mutu produk obat, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang digunakan dalam penanganan Covid-19.

Permasalahan:

1) kapasitas SDM BBPOM di Makassar terbatas untuk melakukan pengawalan dalam rangka memastikan keamanan dan mutu vaksin sampai didaerah pelosok dan kapasitas SDM pada sarana distribusi(GFK) dan pada sarana pelayanan kesehatan masih belum memadai serta sarana dan prasarana penyimpanan kurang.
2) keterbatasan pengetahuan pelaku usaha dan informasi masyarakat dalam pengembangan obat tradisional dalam rangka penanganan covid-19

3) Meningkatnya produksi dan peredaraan obat-obatan seperti suplemen, vitamin dan obat-obat untuk penyembuhan Covid-19 sehingga perlu peran BPOM dalam intensifikasi pengawasan baik *pre/postmarket* obat-obatan tersebut.

b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

BBPOM di Makassar sebagai bagian dari UPT Badan POM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BBPOM di Makassar mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

1) **Area ke-4 "Pengendalian Penyakit dan Imunisasi"**

Penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat COVID-19, intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan peningkatan *Monitoring* Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).

Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak

Dalam penanganan kasus cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang ditemukan dalam sirup obat sejak Oktober 2022, BPOM telah melakukan langkah- langkah antisipatif, seperti intensifikasi surveilans mutu produk, penelusuran dan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi, hingga pemberian sanksi administratif, termasuk melakukan verifikasi pemastian mutu terhadap sirup obat yang beredar. Upaya - upaya penindakan juga terus dilakukan terhadap sarana produksi dan distribusi jika terdapat unsur pidana bidang kesehatan. Balai Besar POM di Makassar turut berkontribusi dalam penanganan kasus Gangguan Gagal Ginjal dengan melakukan pemeriksaan sarana produksi, pengujian sampel melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana produksi. Pengujian terhadap sampel EG DEG tidak hanya dilakukan pada sampel obat sirup, namun juga pada produk bahan tambahan pangan dengan bahan utama pelarut sorbitol, polietilen glikol.

Generasi Stunting Mengancam Masa Depan Bangsa

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak- anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari World Health Organization (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Makassar melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

BBPOM di Makassar sebagai bagian dari UPT Badan POM berperan serta dalam mendukung Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Makassar meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan/inspeksi pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, Penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan peningkatan Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), melakukan sampling dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Implementasi Inpres 3 tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Makassar sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 20 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian ijin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaran bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan keferamasian dalam pemenuhan stadart dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, monitoring tindak lanjut pengawasan sarana. BBPOM Makassar melaksanakan pendampingan dan monitoring pelaksanaan DAK di Provinsi Sulawesi Selatan.

2) **Area ke-5 "Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan"** dukungan/ pengawalan dalam produksi Obat Tradisional yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam penanganan Covid-19; Pengawalan pengembangan produksi Fraksionasi Plasma Konvalesen darah dalam rangka penerapan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) di Unit transfusi darah

3) **Area ke-6 "Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)"** khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Balai Besar POM di Makassar dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium Balai Besar POM di Makassar; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium Balai Besar POM di Makassar; pemenuhan sarana prasarana laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.

Keamanan pangan di masyarakat desa, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha pangan desa

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di perdesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk perdesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader- kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Hingga tahun 2021 Balai Besar POM di Makassar baru dapat mengintervensi 25 desa dari 3.051 desa yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kecilnya jumlah desa yang diintervensi ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait agar dapat ikut serta menggalakkan sosialisasi tentang keamanan pangan di seluruh desa. Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam memilih. dan menggunakan produk sehingga kesehatannya tetap terjaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi produk-produk yang kemungkinan dapat merugikan kesehatan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Balai Besar POM di Makassar sehingga masyarakat terhindar dari produk yang tidak memenuhi syarat.

4) **Area ke-8 "Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat"** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini BPOM dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Produksi terhadap komoditi Obat dan Makanan yang lebih intensif serta distribusi produk obat dan makanan semakin masif tidak hanya melalui jalur offline tetapi juga online. Dinamika lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BPOM terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan karena hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan illegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa).

Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, untuk mencegah tindak kejahatan obat dan makanan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online juga menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Balai Besar POM di Makassar yaitu melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara on-line, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

UMKM di Sulawesi Selatan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, sektor industri pengolahan merupakan sektor pendukung utama perekonomian Sulawesi Selatan dengan konstribusi terbesar yaitu sekitar 30% pada tahun 2019. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan pertumbuhan di atas 4% untuk lima tahun terakhir, di mana industri pengolahan pangan memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp 21,97 triliun dengan pertumbuhan 4,26 %, termasuk di dalamnya UMKM di bidang pangan.

Melihat data tersebut, tampak bahwa sektor UMKM merupakan sektor andalan di Sulawesi Selatan sehingga peran UMKM dalam proses pembangunan di Sulawesi Selatan patut diberi perhatian lebih. Jangkauan pemasaran komoditas hasil olahan makanan dan minuman adalah pasar lokal Sulawesi Selatan, antar daerah di luar Sulawesi Selatan (ekspor antar daerah), serta sebagian kecil diekspor ke luar negeri. Sebagai salah satu upaya penguatan daya saing produk, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat baru sekitar 525.000 UMKM di Sulawesi Selatan yang memanfaatkan teknologi digital dalam membangun usaha. Angka tersebut hanya 35 persen dari total 1,5 juta UMKM yang ada di Sulsel. jumlah ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya peran teknologi digital di sektor UMKM Sulsel, padahal digitalisasi sangat diperlukan dalam pengembangan UMKM di era sekarang. Penerapan teknologi digital di sektor UMKM yang ada di Sulsel masih terkendala, rata-rata kendalanya karena tidak semua pelaku UMKM mengetahui teknologi. Selain itu, tingkat inovasi dan kreatifitas para pelaku UMKM juga belum maksimal. Oleh karena itu, akan mulai mendorong peningkatan kualitas UMKM dengan melakukan berbagai penyuluhan, dimulai dari cara membuat kemasan yang menarik. Tahap modernisasi akan mengacu pada beberapa aspek, mulai dari kemasan hingga branding produk. Selanjutnya skema digitalisasi, dimana pelaku UMKM akan diarahkan untuk menjual produknya di media sosial atau e-commerce yang tersedia. Sehingga penjualannya bisa meluas menjangkau semua wilayah. Hal ini mendorong BBPOM di Makassar untuk turut serta membantu mewujudkan UMKM yang dapat menghasilkan produk yang berdaya saing sehingga dapat meningkatkan perekonomian rakyat dengan membuat inovasi program pendampingan Pedang Puang Baso (Pendampingan Pelaku UMKM Pangan,

Obat Tradisional dan Kosmetik) yaitu Kegiatan pendampingan dengan memberikan fasilitas dan informasi yang tajam kepada UMKM sehingga dapat mengangkat dan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan dengan adanya legalitas berupa nomor izin edar produk.

Reformasi Birokrasi (WBK/WBBM)

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada tahun 2022 serta untuk tahun 2024 Balai Besar POM di Makassar berkomitmen untuk dapat meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).



Gambar 1.5.. Delapan Area Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Permasalahan:

1) Kesadaran *stakeholder* dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping obat dan makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmokovigilans masih relatif rendah.
2) Kemampuan laboratorium pengujian obat dan makanan dalam penerapan teknologi dan metode pengujian tidak sebanding dengan kemajuan teknologi yang diterapkan dalam industri obat dan makanan sehingga pengujian terhadap beberapa produk belum bisa dilakukan
3) Kemampuan Laboratorium pengujian obat dan makanan masih belum dapat menjangkau seluruh wilayah cakupan BBPOM di Makassar
4) Masih terbatasnya kapasitas BPOM dari sisi pemenuhan sumberdaya yang diperlukan untuk menyempurnakan sistem informasi yang andal.

Potensi

1. Sumber daya alam melimpah (hasil laut, perkebunan, pertanian) yang melimpah sebagai sumber bahan baku produk lokal spesifik UMKM di Sulawesi Selatan dalam rangka peningkatan daya saing produk.
2. Keterbukaan / komitmen pemerintah daerah untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam pelaksanaan program prioritas nasional dan program pengawasan obat dan makanan.

Permasalahan:

- Produk pangan olahan luar negeri yang masuk ke wilayah Sulwesi-Selatan melalui jalur illegal seperti melalui Kalimantan Utara.
- Produk kosmetik racikan yang dibuat dengan mencampur produk kosmetik jadi kemudian diedarkan secara online.
- Kurangnya pemahaman masyarakat dan lintas sektor terkait tentang pembagian kewenangan pengawasan produk obat dan makanan

  Terbatasnya pemahaman pelaku usaha dalam menggunakan aplikasi pendaftaran produk secara online sehingga memanfaatkan pihak ketiga dalam prosesnya.

Agar pelaksanaan Renstra BBPOM di Makassar 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:



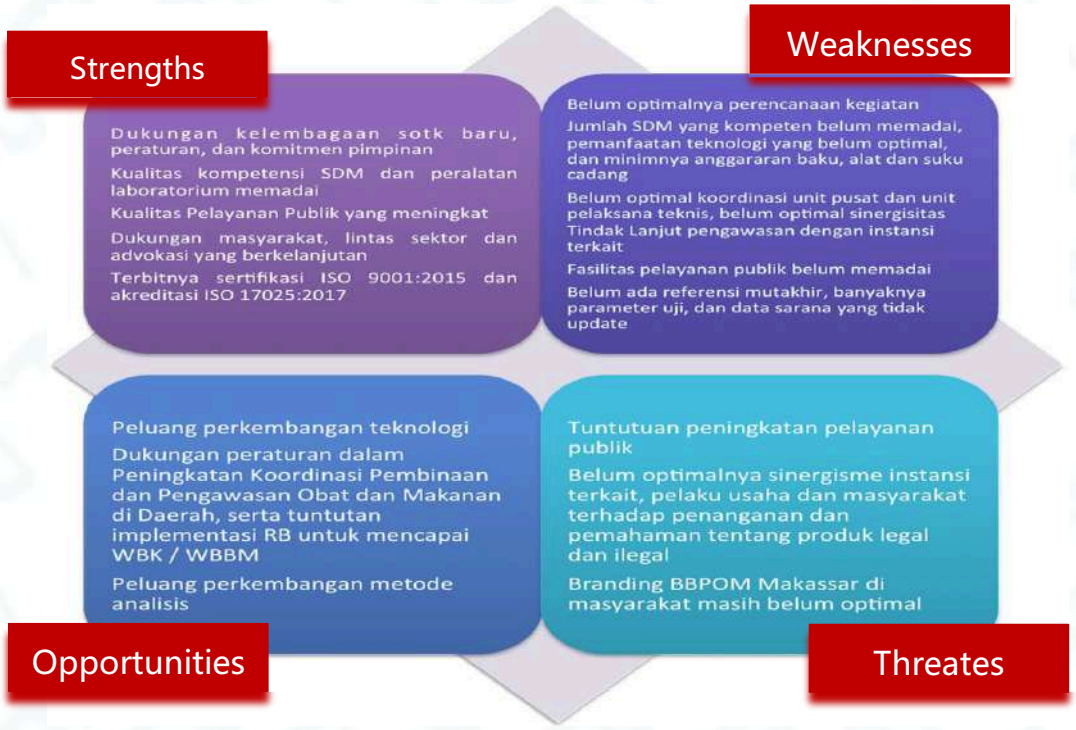
Gambar 1.6

Roadmap Strategi BBPOM di Makassar 2020-2024

- Tahun 2023 :

  Peningkatan integrasi pengawasan premarket-postmarket termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemenuhan people, process, infrastructure), serta pembenahan database pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.

BBPOM di Makassar dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar melakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal menggunakan analisis SWOT Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman). Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Identifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), kesempatan (opportunities), dan ancaman (threats) telah memberikan pandangan bagi BBPOM di Makassar terkait permasalahan yang timbul dari keadaan lingkungan dalam dan luar BBPOM di Makassar tertuang dalam tabel berikut ini:



Gambar 1.7. Hasil Analisis SWOT



Pohon Lontar (Borassus flabellifer Linn) merupakan flora identitas atau simbol flora dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pohon Lontar dapat tumbuh dengan baik hingga setinggi 10-30 meter, dengan daun yang berbentuk seperti kipas bisa memiliki lebar mencapai satu sampai tiga meter.

BAB II

Perencanaan Kinerja



Bab II

Perencanaan Kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Makassar berkomitmen melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar periode 2020-2024 telah mengacu pada Rencana Strategis Badan POM periode 2020-2024 dimana Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020, maka telah dilakukan reviu terhadap Renstra BBPOM di Makassar Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Penyelarasan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan yang karenanya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas BPOM sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Makassar 2020-2024.

Renstra BBPOM di Makassar sebagai bagian dari UPT Badan POM periode 2020-2024 merupakan dokumen indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BBPOM di Makassar yang disusun dengan mengacu pada Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka Balai Besar POM di Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan tersebut sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk itu, Balai Besar POM di Makassar telah menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasarannya, yang sesuai dengan visi dan misi Badan POM.



Visi

"Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong"

Penjelasan Visi:

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Balai Besar POM di Makassar untuk mewujudkan Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta

dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek sebagai berikut::

Aman

Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu

Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing

Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu *Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :

Misi

1. ***Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan Kualitas Manusia Indonesia***
2. ***Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa***
3. ***Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga***
4. ***Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan***

Penjelasan misi :

1. ***Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia***

   Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia.** Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

   Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

   Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia.

   Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.1 *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: *https://pentahelix.eu*.

2. ***Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.** Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sector industry itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen tergadap total ekspor dan 60 persen tenaga kerja industry ada di lima sector tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kepasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. ***Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan

dalam beberapa tahapan: ***1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.***

4. ***Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan***

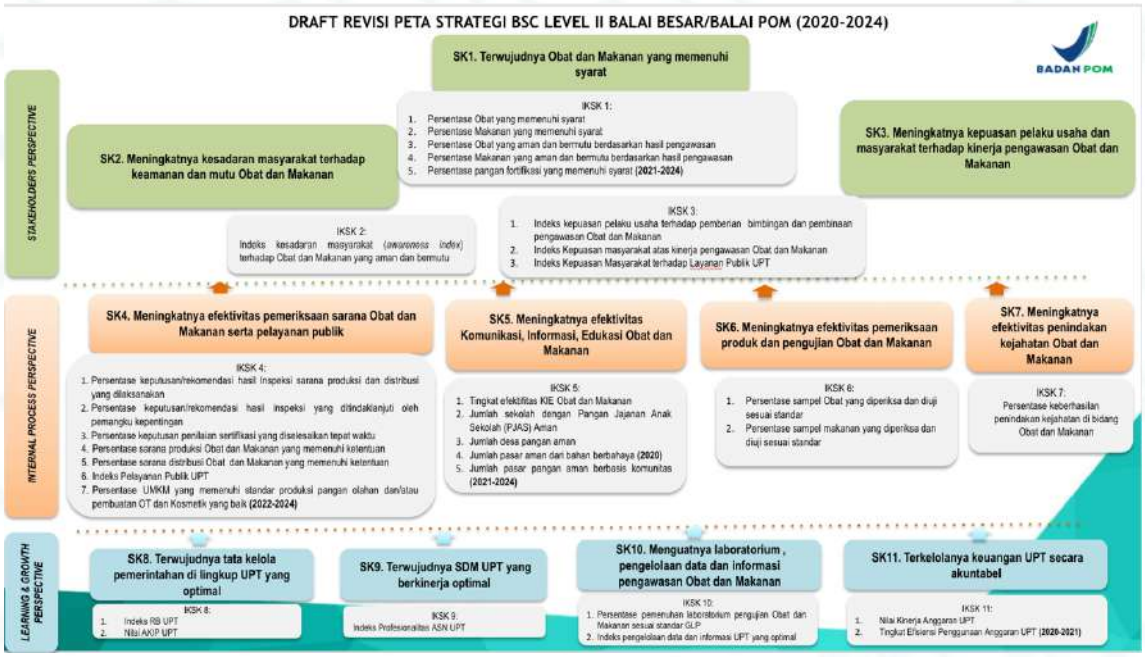
   Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.** Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

Misi Balai Besar POM di Makassar merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Makassar. Pengawasan pre- dan post-market berstandar internasional didukung dengan perkuatan dari aspek laboratorium terakreditasi sesuai ISO:IEC 17025 tahun 2017 yang diterapkan dalam rangka memperkuat Balai Besar POM di Makassar menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk obat dan makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, bermutu dan berdaya saing , diharapkan Balai Besar POM di Makassar mampu melindungi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan khususnya, dan Indonesia pada umumnya dengan optimal.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan public yang prima

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth, Internal Process, Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Makassar berdasarkan **Reviu Renstra 2020-2024** dimana Tidak ada perubahan peta strategi Balai Besar POM di Makassar yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020-2024 karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Makassar, namun demikian dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja IKU Balai Besar POM di Makassar. Adapun sasaran strategis dan IKU Balai Besar POM di Makassar tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam peta strategi BPOM sebagai berikut :



Gambar 2.2 Peta Strategis Level II BBPOM di Makassar

Sumber: Reviu Rencana Stretegis BBPOM di Makassar 2020 - 2024, 2022

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Makassar maka Balai Besar POM di Makassar Tahun 2022 menggunakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Makassar tahun 2020-2024.

SASARAN STRATEGIS KEGIATAN DI BALAI POM MAKASSAR

Sasaran Strategis berdasarkan pada Rencana Strategis BBPOM di Makassar peiode 2020-2024

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Makassar

Perspective	Sasaran Strategis		Indikator	
Stakeholder	SS.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSS.1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSS.1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSS.1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSS.1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat
	SS.2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Makassar
	SS.3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IKSS.3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
			IKSS.3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
Internal Process	SS.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSS.4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSS.4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSS.4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS.4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

			IKSS.4.6	Indeks Pelayanan Publik
			IKSS.4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan. Olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
	SS.5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
			IKSS.5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			IKSS.5.3	Jumlah desa pangan aman
			IKSS.5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
	SS.6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar .	IKSS.6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSS.6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SS.7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
Learning and Growth	SS.8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	IKSS.8.1	Indeks RB BBPOM di Makassar
			IKSS.8.2	Nilai AKIP BBPOM di Makassar
	SS.9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	IKSS.9.1	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar
	SS.10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSS.10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IKSS.10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal
	SS.11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	IKSS.11.1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar
			IKSS.11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar

Stakeholder Perspective :

1. **Sasaran Strategis 1 :**

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Makassar tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Makassar merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

Pertama, pengawasan setelah beredar (*post-market control)* untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara terpadu, konsisten, dan terstandar.

Kedua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Ketiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

1) **Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 91,00 pada akhir tahun 2023;**
2) **Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 88,50 di tahun 2023;**
3) **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan , dengan target sebesar 89,00 pada akhir tahun 2023;**
4) **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 80,00 pada akhir tahun 2023.**
5) **Persentase Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 77,00 pada akhir tahun 2023.**

Indikator ini sekaligus sebagai salah salah ukuran keberhasilan tujuan BPOM "Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat".

2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BBPOM di Makassar bertugas melakukan pengawalan terhadap kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Makassar melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 83,00 pada akhir tahun 2023.

3. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BBPOM di Makassar berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BBPOM di Makassar, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BBPOM di Makassar bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai Besar POM di Makassar perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai Besar POM di Makassar perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui

berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

1) **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 85,60 pada akhir tahun 2023;**
2) **Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target sebesar 78,50 pada akhir tahun 2023;**
3) **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 93,50 pada akhir tahun 2023.**

Internal Process Perspective:

4. **Sasaran Strategis 4**

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Makassar mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Makassar, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Makassar akan meningkat efektivitasnya apabila BBPOM di Makassar mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BBPOM di Makassar perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator :

1) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan, dengan target sebesar 93 pada akhir tahun 2023;**
2) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 70 pada akhir tahun 2023;**
3) **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu , dengan target sebesar 99 pada akhir tahun 2023;**
4) **Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 65 pada akhir tahun 2023;**

5) **Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 78 pada akhir tahun 2023.**
6) **Indeks Pelayanan Publik, dengan target sebesar 4,40 pada akhir tahun 2023.**
7) **Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik 79,00 pada akhir tahun 2023.**

5. **Sasaran Strategis 5**

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Makassar mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Makassar, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini.

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar akan meningkat efektivitasnya apabila mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Makassar perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan Inpres No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

1) **Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 94,00 pada akhir tahun 2023;**
2) **Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target sebesar 98 pada akhir tahun 2023;**
3) **Jumlah desa pangan aman, dengan target sebesar 25 pada akhir tahun 2023;**
4) **Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target sebesar 18 pada akhir tahun 2023.**

6. **Sasaran Strategis 6**

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BBPOM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Makassar mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Makassar, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

1) **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100 pada akhir tahun 2023;**
2) **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100 pada akhir tahun 2023.**

7. **Sasaran Strategsi 7**

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BBPOM di Makassar melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu

Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 94 pada akhir tahun 2023.

Learning and Growth Perspective

8. **Sasaran Strategis 8**

Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BBPOM Makassar berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi

(RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BBPOM Makassar akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM BBPOM di Makassar agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BBPOM di Makassar untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BBPOM di Makassar, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Makassar. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1) **Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 81,80 pada akhir tahun 2023;**
2) **Nilai AKIP BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 80,30 pada akhir tahun 2023.**

9. Sasaran Strategis 9

Terwujudnya SDM BBPOM di Makasssar yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 77 pada akhir tahun 2023.

10. Sasaran Strategis 10

Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium serta sistem operasional teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan di era *internet of things.*

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1) **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target sebesar 86 pada akhir tahun 2023**.
2) **Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal, dengan target sebesar 2,5 pada akhir tahun 2023.**

11. Sasaran Strategis 11

Terkelolanya keuangan BBPOM di Makassar secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BBPOM di Makassar dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 96,20 pada akhir tahun 2023;

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023

Pada akhir tahun 2022, Balai Besar POM di Makassar telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar tahun 2020-2024. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut.

Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 1 pada Laporan Kinerja ini.

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,50
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
		Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	77
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,60
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	93,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
		Indeks Pelayanan Publik	4,4
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	98
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	18
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

	Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	Indeks RB BBPOM di Makassar	81,80
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	80,30
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2020-2024 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2023 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2023	86
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2,50
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	96,20

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Makassar sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024. Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini adalah :

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabiltas, transparansi, dan kinerja aparatur :
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi);
4. untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;
5. penetapan sasaran kerja pegawai.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2022

Sebelum perubahan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,50
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
		Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	77
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,60
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	93,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
		Indeks Pelayanan Publik	4,4
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	98
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	18
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

	Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	Indeks RB BBPOM di Makassar	81,80
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	80,30
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2,50
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	96,20

Kegiatan	Anggaran
Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	Rp 61.103.863.000

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023 sesuai pada Tabel 2.3 inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2023.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran). Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Untuk itu perlu disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detil aktivitas pendukung. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM Makassar selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap bulannya melalui aplikasi BOC dan setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan bulan berikutnya

Sebagai bentuk *continuous improvement*, setiap tahun dilakukan reviu berkala terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, sebagai dasar penetapan PK dan RAPK yang selanjutnya dituangkan dalam kertas kerja sebagai Lampiran PK dan RAPK.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, PK level organisasi harus didukung dengan PK level individu (SKP). Tatacara penyusunan dan penetapan PK level individu diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM Makassar Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Makassar
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	582.588.600, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	493.374.600, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	388.392.400, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	328.916.400, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	53.596.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												83	94.986.000, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												85.60	280.391.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												78.5	135.040.000, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												93.50	29.696.000, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	38.240.000, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	80.080.000, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	148.424.000, 00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	335.711.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Makanan yang memenuhi ketentuan													
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	1.765.256.000, 00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	396.710.000, 00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	79	93.917.000, 00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	12.641.240.000, 00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5	20	30	35	40	45	60	70	80	90	95	98	971.911.000, 00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	20	20	25	40	50	65	70	70	85	95	25	847.722.000, 00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	5	15	20	25	40	50	60	70	80	90	100	1.577.359.800, 00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	5	15	20	25	40	50	60	70	80	90	100	1.051.573.200, 00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	10	25	35	40	45	50	60	70	75	80	94	1.250.972.000, 00
23.	Indeks RB UPT												81.80	26.479.942.000, 00
24.	Nilai AKIP UPT												80.30	251.207.000, 00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												77	847.624.000, 00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												86	8.899.165.000, 00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	280.820.000, 00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		10	20	30	40	50	55	65	75	80	87	96.20	289.875.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	25	25	35	55	65	75	75	80	95	98	18	469.133.000, 00
Total														61.103.863.000, 00

Makassar, 20 Desember 2022

Plt. Kepala Balai Besar POM di Makassar

Dra. Sriyani Rasyid, Apt

2.5. Metode Pengukuran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Sebagai reviu dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan.
2. Pemanfaatan *monitoring* kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai Sasaran Strategis (NSS) adalah nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Strategis (SS). Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama dengan rumus:

$$NP = \sum NSS / \sum SS$$

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS :

$$NPSS = \sum NP / \sum P$$

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	
Sangat Kurang	<50	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Makassar adalah sebagai berikut:

a. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Makassar yang disahkan dalam SK Kepala BPOM
b. Kepala BBPOM di Makassar menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Makassar

c. Penanggung jawab data di setiap bidang meng-*input* data kinerja pada kertas kerja sesuai Indikator Kinerja secara rutin setiap bulan dan mengirimkan data pada Group Whatsup Monev Makassar diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai. Verifikasi data kinerja juga dilakukan saat rapat evaluasi kinerja setiap bulan.
d. Apabila terjadi kesalahan data, pemilik data menyampaikan perbaikan data kepada penaggungjawab data balai, lalu mengisi form perubahan data dan melakukan input perubahan data.
e. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-*input* data setiap bulan pada Aplikasi SMART DJA, monev Bappenas dan aplikasi *e-performace* dan aplikasi BOC.
f. Data Capaian Kinerja Per Bulan dan Data Realisasi Anggaran secara Real Time, dapat diakses informasinya melalui Makassar.pom.go.i pada menu Dasikuka atau pada tautan https://sites.google.com/view/dasikuka
g. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang sedang dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC) serta pengukuran kinerja secara *cascading* dari level eselon 2 hingga individu untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun akan diintegrasikan dengan aplikasi Simakin (Aplikasi Manajemen Kinerja) pada aplikasi SIASN aplikasi BOC, yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
h. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.



Burung Julang Sulawesi (Rhyticeros cassidix) merupakan fauna identitas atau simbol fauna dari Provinsi Sulawesi Selatan. Panjang tubuh dapat mencapai 100 cm pada jantan, dan 88 cm pada betina. Julang Sulawesi memiliki tanduk (casque) yang besar di atas paruh, berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Paruh berwarna kuning dan memiliki kantung biru pada tenggorokan

BAB III

Akuntabilitas Kinerja



Bab III

Akuntabilitas Kinerja

17 Dari 29 indikator untuk penilaian Kinerja
Tahun 2023 pada 11 sasaran strategis, dinyatakan
"Sangat Baik" terhadap target yang telah ditetapkan, sedangkan
4 indikator dinyatakan "Baik" serta 7 indikator dinyatakan
"Cukup "

3.1. Capaian Kinerja

Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), seluruh sasaran strategis. Kinerja Tahun 2023 merupakan kinerja Tahun keempat Renstra BBPOM di Makassar 2020-2024. Capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 103,10 % dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja berdasarkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis NPSS. Nilai NPSS Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2022 sebesar 103,09.

Gambar 3.1 Dashboard Peta Strategi BBPOM di Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian
Stakeholder Perspective			
	Capaian Perspective sakeholder	**105,43**	**105,43**
Internal Process Perspective			
	Capaian Internal Process Perspective	**98,18**	**98,18**
Learning & Growth Perspective			
	Capaian Learning & Growth Perspective	**105,69**	**105,69**
	NPS TOTAL	**103,10**	**103,10**

diperoleh nilai NPSS di Tahun 2023 sebesar 103,10 % dengan kategori Istimewa yaitu NPS perspektif stakeholder sebesar 105,43 % ; NPS perspektif sebesar internal proses 98,18 dan NPS perspektif *learning & growth* sebesar 105,69 %. Dengan demikian disimpulkan bahwa di BBPOM di Makassar **telah berhasil** mencapai target yaitu 103,10 dengan kategori kinerja organisasi istimewa.

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara : Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023; Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun sebelumnya.; Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra; Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis atau dengan sektor swasta yang melakukan fungsi sejenis atau dengan standar nasional/internasional jika ada (Benchmark Kinerja). Khusus untuk UPT di lingkungan BPOM, unit pembanding ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT.; Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).; Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal); Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dari 29 indikator yang dievaluasi pada 11 sasaran strategis, terdapat 17 indikator mencapai target dengan kategori " **Sangat Baik**" , 4 indikator dengan kategori **"Baik**" dan 7 indikator capaian kurang dari 100 % dengan kategori "**Cukup**"

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023 belum seluruhnya tercapai terhadap 11 sasaran strategis Tahun 2023. Pada 11 sasaran strategis yang dievaluasi 7 sasaran strategis kategori " Sangat Baik", 4 sasaran strategis kategori " Cukup", dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) masing-masing sasaran strategis sebagai berikut seperti tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Capaian sasaran kegiatan BBPOM di Makassar Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	% Capaian	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	110,32	Sangat Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	101,02	Sangat Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	104,94	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	99,89	Cukup
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	100,22	Sangat Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	99,69	Cukup
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	92,90	Cukup
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	105,79	Sangat Baik
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	116,42	Sangat Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	107,07	Sangat Baik
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	93,47	Cukup

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa BBPOM di Makassar pada *Stekholders Perspective* pada sasaran pertama sampai dengan ketiga yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar 110,32 berada pada kategori **"Sangat Baik"** ; Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar 101,01 berada pada kategori **"sangat Baik"** ; Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar 104,94 berada pada kategori **"Sangat Baik"** .

Persepctive *Internal Proses* Sasaran strategis keempat yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan public di wilayah kerja BBPOM di Makassar yaitu dengan nilai 99,89; sasaran strategis kelima yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar yaitu 100,22; Sasaran strategis keenam "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar" yaitu 99,69 ; dan Sasaran strategis ketujuh "Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar" , dengan nilai 92,90. Dimana empat sasaran strategis pada perspektif ini hanya Sasaran stratrgis kelima bearada pada kategori **"Sangat Baik"**.

Pada learning and growth perspective terdapat empat sasaran strategis dan hanya satu sasaran strategis yaitu sasaran strategis kesebelas "Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel' dengan nilai 93,47 kategori **"Cukup"** sedangkan sasaran strategis Delapan, dan Sembilan dan Sepuluh masing-masing "Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal" 105,79; Sasaran strategis "Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal" 116,42; dan sasaran strategis "Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan" 107,07.

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja 2 Balai lain dengan beban kerja yang setara yaitu BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta, dan BBPOM di Bandung, maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.2. Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis

Perspective	No.	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Makassar			Jakarta			Yogyakarta		
			SS	NSS	NPSS	SS	NSS	NPSS	SS	NSS	NPSS
Stakeholder	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	110,32	105,43	103,1	99,72	102,64	103,87	96,42	102,32	98,62
	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	101,02			103,25			104,60		
	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing -masing wilayah kerja UPT	104,94			104,96			105,94		
Internal Process	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	99,89	98,18		105,75	103,98		108,57	92,44	
	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	100,22			100,02			100,14		
	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	99,69			109,26			99,97		
	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	92,91			100,89			61,08		
Learning and Growth	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	105,79	105,69		104,39	104,99		94,61	101,12	
	9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	116,42			107,28			105,86		
	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	107,07			109,59			109,84		
	11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	93,47			98,72			94,17		

Berdasarkan tabel diatas, Stekholders Perspective dengan nilai tertinggi pada BBPOM di Makassar dengan capaian 105,43 dibandingkan BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta . Pada Sasaran Strategis pertama yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Makassar 110,32 kategori "Sangat Baik"; Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Yogyakarta 104,60 kategori "Sangat Baik"; serta Sasaran Strategis ketiga yaitu Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Yogyakarta 105,94 kategori "Sangat Baik", secara rata-rata sasaran strategis satu, dua dan ketiga pada tertinggi adalah BBPOM di Makassar 105,43 ; selanjutnya BBPOM Jakarta 102,64 dan BBPOM Yogyakarta 102,32 berada pada kategori "Sangat Baik".

Persepctive *Internal Proses* dengan nilai tertinggi pada BBPOM di Jakarta dengan capaian 103,98 dibandingkan BBPOM Makassar dan BBPOM di Yogyakarta. Pada Sasaran Strategis keempat yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Yogyakarta 108,57 kategori "Sangat Baik"; Sasaran Strategis kelima yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Makassar 100,22 kategori "Sangat Baik"; Sasaran Strategis keenam yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Jakarta 109,26 kategori "Sangat Baik", serta Sasaran Strategis

ketujuh yaitu Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM dengan nilai Tertinggi pada BBPOM Jakarta 100,89 kategori "Sangat Baik", secara rata-rata sasaran strategis empat, lima, enam dan tujuh hanya BBPOM Jakarta berada pada kategori "Sangat Baik".

Pada learning and growth perspective, nilai tertinggi pada BBPOM di Makassar dengan capaian 105,69 tertinggi dibandingkan BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta. sasaran Strategis kedelapan yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM yang optimal dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Makassarg 105,79 kategori "Sangat Baik"; Sasaran Strategis kesembilan yaitu Terwujudnya SDM BBPOM yang berkinerja optimal dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Makassar 116,42 kategori "Sangat Baik"; Sasaran Strategis kesepuluh yaitu Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Yogyakarta 109,84 kategori "Sangat Baik"; serta Sasaran Strategis kesebelas yaitu Terkelolanya Keuangan BBPOM secara Akuntabel dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Jakarta 98,72 kategori "Cukup", secara rata-rata sasaran strategis delapan, Sembilan, sepuluh dan sebelas pada BBPOM Makassar, BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta berada pada kategori "Sangat Baik".

Sesuai perhitungan NPS total diperoleh bahwa NPS tertinggi adalah BBPOM Jakarta 103,87 Kategori Istimewa dan BBPOM di Makassar 103,10 kategori Istimewa selanjutnya BBPOM di Yogyakarta Kategori Baik.

Tabel 3.3
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BBPOM di Makassar Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian
Stakeholder Perspective							
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	98,18	107,90	107,90
		IKSS2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,5	93,28	105,40	105,40
		IKSS3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	92,71	104,16	104,16
		IKSS4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	95,45	119,32	119,32
		IKSS5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	77	88,42	114,83	114,83
		Capaian SS1				**110,32**	**110,32**
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	83	83,85	101,02	101,02

			Capaian SS2			**101,02**	**101,02**
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,6	97,6	114,02	114,02
		IKSS7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,5	77,96	99,31	99,31
		IKSS8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93,5	94,90	101,50	101,50
			Capaian SS3			**104,94**	**104,94**
			Capaian Perspective sakeholder			**105,43**	**105,43**
Internal Process Perspective							
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	95,24	102,41	102,41
		IKSS10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	58,42	83,46	83,46
		IKSS11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	97,42	98,41	98,41
		IKSS12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	71,12	109,42	109,42
		IKSS13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	78,25	100,32	100,32
		IKSS14	Indeks Pelayanan Publik	4,4	4,61	104,77	104,77
		IKSS15	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	79,37	100,47	100,47
			Capaian SS4			**99,89**	**99,89**
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94	94,84	100,89	100,89
		IKSS16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	98	98,00	100,00	100,00
		IKSS17	Jumlah desa pangan aman	25	25,00	100,00	100,00
		IKSS18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	18	18,00	100,00	100,00

			Capaian SS5			**100,22**	**100,22**
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,00	100,00	100,00
		IKSS20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	99,37	99,37	99,37
			Capaian SS6			**99,69**	**99,69**
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94	87,33	92,90	92,90
			Capaian SS7			**92,90**	**92,90**
			Capaian Internal Process Perspective			**98,18**	**98,18**
Learning & Growth Perspective							
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	IKSS22	Indeks RB BBPOM di Makassar	81,8	90,51	110,65	110,65
		IKSS23	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	80,3	81,05	100,93	100,93
			Capaian SS8			**105,79**	**105,79**
SS9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	IKSS24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	77	89,64	116,42	116,42
			Capaian SS9			**116,42**	**116,42**
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSS25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86	84,40	98,14	98,14
		IKSS26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2,5	2,90	116,00	116,00
			Capaian SS10			**107,07**	**107,07**
SS11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	IKSS26	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	96,2	89,92	93,47	93,47
			Capaian SS11			**93,47**	**93,47**
			Capaian Learning & Growth Perspective			**105,69**	**105,69**
			NPS TOTAL			**103,10**	**103,10**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa BBPOM di Makassar pada *Stekholders Perspective* , capaian kinerja pada perspektif ini adalah sebesar 105,43 kategori "Sangat Baik" dan terdapat tiga sasaran strategis, sasaran

strategis pertama yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar 110,32 terdapat lima indikator kinerja utama yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat = 107,90 ; Persentase Makanan yang memenuhi syarat = 105,40; Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = 104,16 ; Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan =119,32 ; Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat = 114,83 dimana lima indikator kinerja utama pada Sasaran Strategis pertama di Tahun 2023 berada pada kategori **"Sangat Baik"**.

Sasaran Strategis kedua Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar hanya terdapat satu Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dengan persentase capaian 101,02 Kategori **"Sangat Baik".**

Sasaran Strategis ketiga yaitu Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar terdiri dari tiga Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 114,02 dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar 101,50 keduanya berada pada kategori **"Sangat Baik"** sedangkan Indikator Kinerja Utama Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan 99,31 kategori **"Cukup".**

Persepctive *Internal Proses* , capaian kinerja pada perspektif ini adalah sebesar 98,18 kategori "**Cukup**" dimana terdapat empat sasaran strategis, pada. Sasaran strategis keempat Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar berada pada kategori **"Cukup"** yaitu dengan nilai 99,89 terdapat tujuh indikator kinerja utama yaitu

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan = 102,41; Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = 109,42; Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = 100,32 ; Indeks Pelayanan Publik = 104,77; Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik = 100,47 dan kategori **"Sangat Baik",** sementara Indikator Kinerja Utama Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = 83,46 Indikator Kinerja Utama, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = 98,41 Kategori **"Cukup".**

Sasaran Strategis kelima "Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar" berada pada kategori **"Sangat Baik"** yaitu dengan nilai 100,22 terdapat empat indikator yaitu Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan = 100,89 berada pada kategori **"Sangat Baik"**; sementara Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman = 100; Jumlah desa pangan aman = 100; Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya = 100 berada pada kategori **" Baik"**.

Sasaran strategis keenam "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar" berada pada kategori **"Cukup"** yaitu dengan nilai 99,69 terdapat dua indikator yaitu Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = 100 kategori **"Baik"** dan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = 99,37, kedua indikator Kinerja Utama berada pada kategori **"Cukup"**.

dan Sasaran strategis ketujuh "Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar", yaitu indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan = 92,90 kategori **"Cukup"**

Pada learning and growth perspective, capaian kinerja pada perspektif ini adalah sebesar 105,69 kategori "Sangat Baik" dan terdapat empat sasaran strategis. Sasaran strategis kedelapan "Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM Makassar yang optimal", yaitu indikator Indeks RB BBPOM di Makassar = 110,65 kategori "Sangat Baik" dan Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP BBPOM di Makassar = 100,93 kategori **"Sangat Baik"**. Sasaran Strategis kesembilan Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal terdapat satu Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar dengan persentase capaian 116,42 Kategori **"Sangat Baik"**.
sasaran strategis kesepuluh "Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan" terdapat dua Indikator Kinerja Utama yaitu Indikator kinerja utama Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP = 98,14 kategori **"Cukup"** ; Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal = 116,00 kategori **"Sangat Baik"** dan Sasaran strategis kesebelas "Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel" yaitu indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar = 93,47 kategori **"Cukup".**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 22 dari 29 Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh Balai Besar POM di Makassar pada Tahun 2023, memiliki Realisasi kinerja 100 % dan lebih dari 100 % dari yang telah ditargetkan kategori "Baik" dan "Sangat Baik".

Tabel 3.4
Capaian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	98,18	107,89
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,5	93,28	105,40
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	92,71	104,17
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	95,45	119,31
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	77	88,42	114,83

2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83	83,85	101,02
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,6	97,60	114,02
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,5	77,96	99,31
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	93,5	94,90	101,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	95,24	102,41
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	58,42	83,46
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	97,42	98,40
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	71,12	109,42
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	78,25	100,32
		15	Indeks Pelayanan Publik	4,4	4,61	104,77
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	79,37	100,47
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94	94,84	100,89
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	98	98,00	100,00
		19	Jumlah desa pangan aman	25	25,00	100,00
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	18	18,00	100,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,00	100,00

	produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	99,37	99,37
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94	87,33	92,90
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB BBPOM di Makassar	81,8	90,51	110,65
		25	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	80,3	81,05	100,93
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	77	89,63	116,40
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86	84,40	98,14
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2,5	2,900	116,00
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	96,2	89,92	93,47

Pembahasan dan Analisa Capaian Kinerja

Pembahasan dan analisa capaian kinerja masing-masing Sasaran Strategis Balai Besar POM di Makassar dapat dijelaskan sebagai berikut:



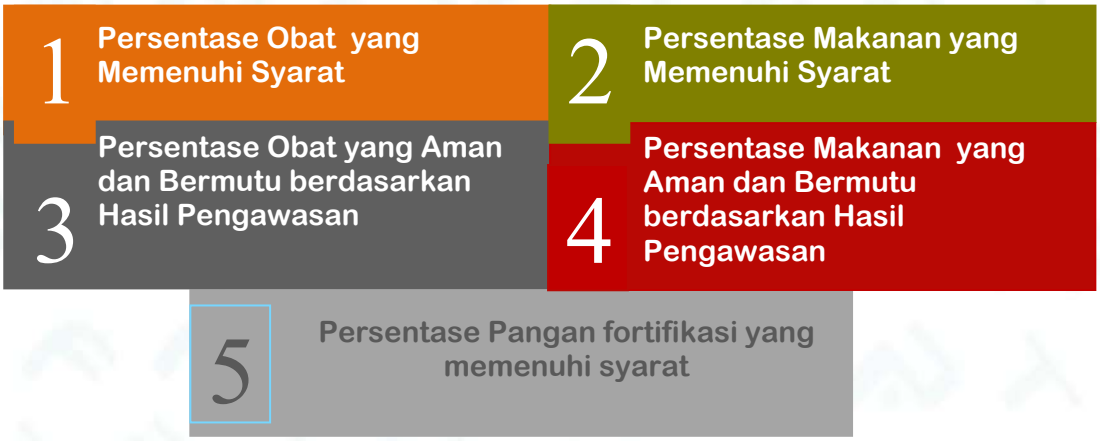


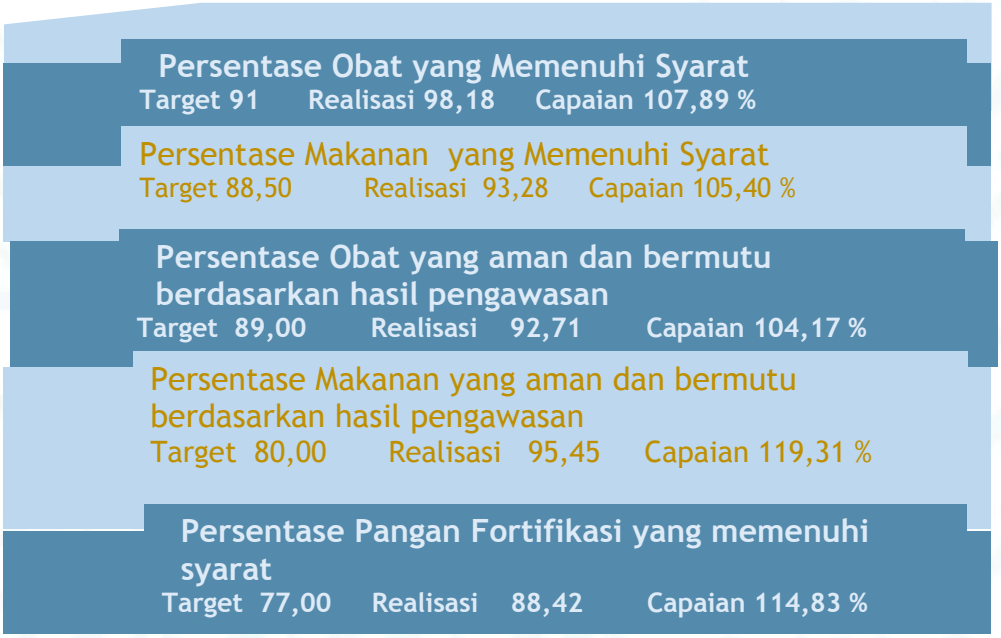
Sasaran 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar

\

Tahun 2023, BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan nilai NPSS 108,79 dengan kategori "Sangat Baik". Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar diukur dengan 5 Indikator sebagai berikut :





Pada sasaran strategis pertama "Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar " lima indikator nilai capaiannya diatas dari target mencapai lebih dari 100 % yaitu indikator pertama sampai dengan indikator kelima yaitu indikator persentase Obat yang memenuhi syarat; Persentase Makanan yang memenuhi syarat ; Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan serta indikator kelima yaitu Persentase Pangan Fortifikasi kategori "Memenuhi Ekspektssi" capaiannya diatas 100 %.



1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan Jumlah Sampel Acak Obat mencakup (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pemeriksaan dan pengujian dibagi dengan Total sampel Acak

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar antara lain adalah persentase Obat yang Memenuhi Syarat.

Pada Tahun 2023 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan obat dan makanan yang memenuhi syarat diwilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 98,18 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Acak Obat MS}}{\text{Total sampel Acak Obat yang diperiksa dan di uji}} \times 100\ \%$$

Terdapat beberapa kategori untuk menentukan obat memenuhi syarat yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

cara sampling pada sampel obat yaitu target produk Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2023, Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat Tahun ke-n dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji Tahun ke-n. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika**.** Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di Tahun berjalan. Kategori Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi : (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kedaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kategori poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kategori poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kategori poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kategori poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2023 adalah 107,89 % dengan realisasi sebesar 98,18 % Obat yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar telah memenuhi syarat **diatas dari target** yang dietentukan dengan kategori **"Sangat Baik" .**

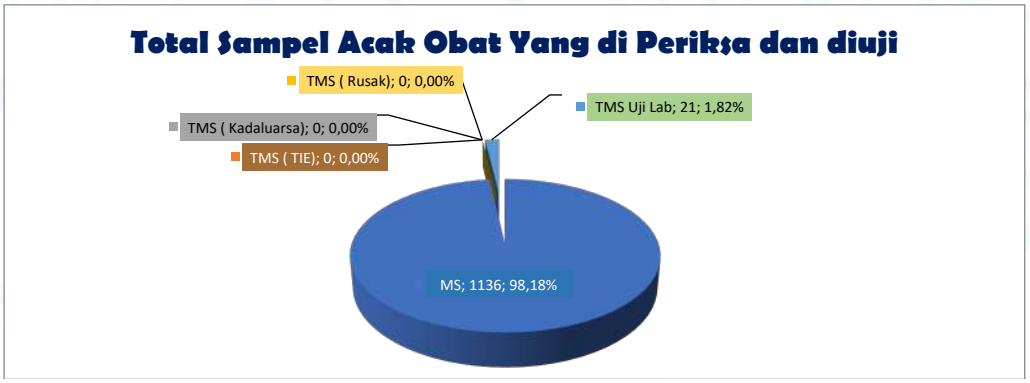
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase obat yang memenuhi syarat	91	98,18	107,89	Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan Jumlah sampel acak produk Obat Memenuhi Syarat yang diperiksa dan di uji sebanyak 1.136 sampel terhadap total sampel acak Obat yang diperiksa dan diuji sebanyak 1.157 sampel. Jenis Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada Tahun 2023, yaitu Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di Tahun berjalan. Kategori Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5)Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Jumlah keseluruhan Sampel Obat yang diperiksa adalah 1.157 sampel terdiri atas 367 sampel obat, 237 sampel Obat tradisional, 16 Obat Kuasi, 63 sampel suplemen Kesehatan dan 474 sampel kosmetik, dari 1.157 sampel tersebut terdapat 21 sampel Obat tidak memenuhi syarat yang terdiri atas:

- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori TIE/Ilegal palsu : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori Kadaluarsa : `0 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori rusak : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Hasil Uji) : 21 Sampel (6 Obat, 7 Obat Tradisional, 4 Suplemen Kesehatan, 4 Kosmetik)



Gambar 3.2

Jumlah Sampel Obat yang diperiksa dan diuji Tahun 2023

Jumlah sampling Obat sampai dengan Tahun 2023 adalah 1.157 dimana tidak ada sampel Obat TIE/Ilegal/Palsu sehingga jumlah sampel yang masuk Laboratorium sebesar sama dengan jumlah sampling yaitu sebesar 1.157 sampel yang selesai diperiksa dan diuji di Tahun 2023.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	80,8	88,09	109,02	Sangat Baik
Tahun 2021	89	95,45	107,25	Sangat Baik
Tahun 2022	90	96,67	107,41	Sangat Baik
Tahun 2023	91	98,18	107,89	Sangat Baik

capaian kinerja indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat BBPOM Makassar untuk Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020. Tahun 2021 berada pada angka 95,45 lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2020 dengan nilai 88,09 kategori "Sangat Baik" ; Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021. Tahun 2022 berada pada angka 96,67 lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2021 dengan nilai 95,45 kategori "Sangat Baik" ; sedangkan ; Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022. Tahun 2023 berada pada angka 98,18 lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2022 dengan nilai 96,67 kategori "Sangat Baik".

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2022 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori capaian terhadap Tahun 2024
Persentase obat yang memenuhi syarat	91	92	98,18	106,71	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat Tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra Tahun 2024, serta capaian yang diperoleh sudah masuk kategori Sangat Baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra Tahun 2024 dapat mempertahankan kategori Sangat Baik.

d. Perbandingan Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Bandung Tahun 2022 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

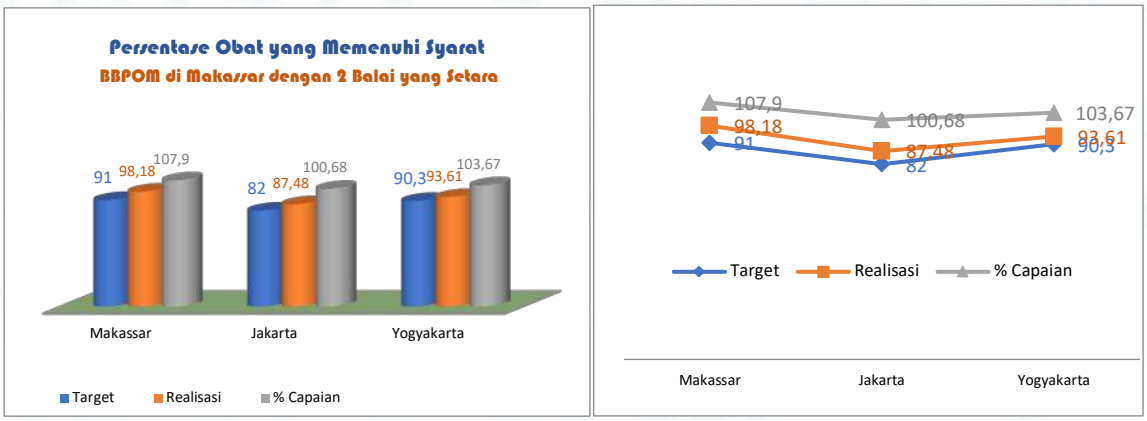
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta,, BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Bandung Tahun 2022

Indikator Kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	91	98,18	107,90	Sangat Baik
BBPOM di Jakarta	82	87,48	100,68	Sangat Baik
BBPOM di Yogyakarta	90,30	93,61	103,67	Sangat Baik

Target indikator persentase obat yang memenuhi syarat BBPOM Makassar, BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta pada angka yang berbeda adapun hasil capaian realisasi persentase obat yang memenuhi syarat BBPOM Makassar telah mencapai target dengan nilai 107,90 kategori "Sangat Baik" lebih tinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM di Jakarta dan BBPOM Yogyakarta dengan nilai kategori yang sama yaitu "Sangat Baik" ketiga Balai ini mencapai target.

serta hanya BBPOM Makassar yang mencapai target Nasional IKU BPOM. Berikut ini perbandingan capaian realisasi persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta,, dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan Target BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2023 dengan target Nasional Badan POM

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase obat yang memenuhi syarat	91	92,25	98,18	107,89	Sangat Baik

Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat Tahun 2023 BBPOM di Makassar **telah mencapai** target Badan POM secara nasional, dengan nilai 107,89 dengan kategori "Sangat Baik".

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori baik antara lain:

- Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada Tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 98,18 %. Pelaksanaan sampling obat oleh Balai Besar POM di Makassar.
- Jumlah sampel acak Obat Balai Besar POM di Makassar adalah 1.157 sampel, terdiri atas 1.136 sampel memenuhi syarat dan 21 sampel yang tidak memenuhi syarat (0 TIE/Ilegal/Palsu; 0 TMK Kedaluarsa, 0 TMK Rusak, 21 TMS Uji Laboratorium)
  Total 21 sampel Obat TMS uji terdiri atas 6 obat. 7 obat tradisional, 4 suplemen Kesehatan, 4 kosmetik
- Secara persentase penyumbang tertinggi hasil uji tidak memenuhi syarat adalah pada
- Fasilitas penyimpanan obat di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian telah tersedia dan penyimpanannya sesuai dengan kondisi (suhu) yang direkomendasikan.
- Pembinaan kepada sarana produksi dan sarana distribusi obat yang secara terus menerus dilakukan oleh petugas / inspektur balai untuk meningkatkan mutu kualitas produk dan kepatuhan produsen/pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.
- Adanya keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2022 yang telah ditetapkan bahwa Sampel yang memiliki nomor izin edar, merk dan nomor bets yang sama dengan yang telah pernah disampling sebelumnya (sehubungan dengan keterbatasan jumlah dan jenis sampel di daerah/kabupaten), dimana parameter uji diatur secara mandiri oleh Balai Besar / Balai / Loka POM yang bersangkutan, berdasarkan analisis resiko. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi

dengan parameter uji sebelumnya serta dapat digambarkan profil keamanan dan mutu produk secara keseluruhan.

- kepatuhan produsen dalam penggunaan penandaan/label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku diwilayah sampling BBPOM Makassar juga mempengaruhi tingginya persentase obat yang memenuhi syarat yang dicapai pada Tahun 2023 hal ini disebabkan karena telah mencantumkan interaksi obat pada brosur komoditi obat; klaim yang tidak sesuai pada Obat Tradisional dan Kosmetik. sehingga berimplikasi tidak ada te
- muan TMK penadaan terhadap total sampling Obat Acak
- Penandaan 10 sampel Obat tidak memenuhi ketentuan (TMK) atau 0,008 % memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tercapainya target dari persentase obat yang memenuhi syarat. Penandaan Obat tidak memenuhi ketentuan pada triwulan II, triwulan III dan IV sebagian besar adalah tidak mencantumkan interaksi Obat dan tidak mencantumkan peringatan dan perhatian dan kontra indikasi.
- Sampling Obat Acak dilaksanakan mengacu Pedoman Sampling dan sesuai Renlak
- Komoditi Obat Acak yang disampling telah memenuhi ketentuan penandaan dan mutu produk

f. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator persentase obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir Tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 98,18 % dengan capaian 107,90 % pada Tahun 2023. Indikator persentase obat yang memenuhi syarat kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,09) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 107,90 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 98,87 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2021

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
107,90	582.588.600	576.019.816	98,87	1,09	0,09	Efisien

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori baik antara lain :

- melakukan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu sertak aspek kesesuaian penandaannya.
- Dari proses sampling : melakukan proses perecanaan sampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling
- Proses pengujian : melakukan proses pengujian parameter uji wajib dan/atau pilihan sesuai dengan pedoman

sampling

- Inovasi Pedang Puang Basok yang memastikan pengawalan dan pendampingan pelaku usaha obat tradisional dan kosmetik.
- Kompetensi penguji ditingkatkan melalui Bimtek Pendampingan Pengujian Unggul, yang dilaksanakan oleh PPPOMN dan PPSDM
- Kompetensi petugas sampling juga ditingkatkan dengan mengikuti workshop yang diselenggarakan ditwas terkait
- Terlaksananya monev Region Makassar 14-15 Desember 2023 yang menyepakati rekomendasi untuk peningkatan kinerja Region dan Perencanaan 2024

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Dari proses sampling : melakukan proses perecanaan sampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling	Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Obat tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Obat tanpa izin edar dan substandar		Desember 2023	Jumlah Obat yang disampling 1.117	Jumlah Obat yang disampling 1.157
2.	Proses pengujian : melakukan proses perncanaan pengujian sesuai dengan pedoman sampling	Pada bulan Oktober, November dan Desember Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat telah mencapai target	.	Desember 2023	Jumlah sampel selesai uji 1.067	Jumlah sampel selesai uji 1.157
3.	Dari 1.117 sampel yang masuk laboratorium, sebanyak 50 sampel yang belum diuji laboratorium sampai bulan November	Percepatan pengujian sisa sampel sebanyak 50 sampel Dari 1.157 sampel yang masuk laboratorium, seluruh sampel selesai diuji laboratorium sampai dengan bulan Desember		Desember 2023	Jumlah sampel selesai uji 1.067	Jumlah sampel selesai uji 1.157
4.	Pembinaan kepada sarana produksi dan sarana distribusi obat yang secara	Pengawasan kepatuhan fasilitas produksi dan dsitribusi untuk				

	terus menerus dilakukan oleh petugas / inspektur balai	meningkatkan/menjaga mutu dan keamanan obat				
5.	Penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, serta Penyebaran informasi keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile	Pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat tentang pengetahuan obat aman				
6.	Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar menerapkan cara distibusi yang baik terhadap produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut	Tindaklanjut melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi berdasarkan Pengawasan penandaan yang dilakukan BBPOM di Makassar secara rutin dan di evaluasi oleh pusat				
7.	1. Melaksanakan Monev Region Makassar secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul di setiap UPT, baik dalam melakukan sampling maupun pengujian, dan mengupayakan penyelesaian dan solusi terbaik, serta menyusun perencanaan sampling dan	1. Monev Regional Makassar sudah dilaksanakan tanggal 14-15 Desember 2023 dan telah disepakati rekomendasi untuk perencanaan sampling dan pengujian 2024 2. Peningkatan kapasitas laboratorium dengan pengadaan instrumen untuk pengujian unggul	Penyusunan Renlak Sampling dan Pengujian semua komoditi untuk seluruh UPT anggota Region makassar untuk meningkatkan	Desember 2023	Masing-masing UPT membuat Renlak tanpa mempertimbangkan load Balai penguji sehingga sampel tidak dapat diuji tepat waktu	Sampling dan pengujian berjalan tertib dan sesuai rencana

	pengujian 2024 2. Menyelesaikan proses peningkatan kompetensi pengujian Unggul dengan bimtek pendampingan dari PPPOMN dan PPSDM	dan bimtek Pendampingan	efisiensi dan kinerja masing-masing UPT, utamanya terkait pengujian unggula sesuai Konsep baru Regionalisasi Laboratorium			

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Persentase obat yang memenuhi syarat dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Penacapain kinerja untuk indicator Persentase obat yang memenuhi syarat serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.



2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Persentase Makanan yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan Jumlah Sampel Acak Makanan mencakup (makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pemeriksaan dan pengujian dibagi dengan Total sampel Acak Makanan yang dipeiksa dan diuji

Pada Tahun 2023 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan makanan yang memenuhi syarat, hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 93,28 %, menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\%\ Makanan\ MS = \frac{Jumlah\ Sampel\ Acak\ Makanan\ \ MS\ yang\ diperiksa}{Total\ Sampel\ Acak\ Makanan\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \quad X\ 100\ \%$$

Persentase makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 Tahun 2012) Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di Tahun berjalan.

Kategori Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2) Produk kedaluwarsa
3) Produk rusak
4) Tidak memenuhi ketentuan label
5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kategori poin 1 hingga poin 5 (kategori pada poin c). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kategori poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kategori poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kategori poin 5.

f. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.

g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2022 adalah 105,40 % dengan realisasi sebesar 93,28 % Makanan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar telah memenuhi syarat.

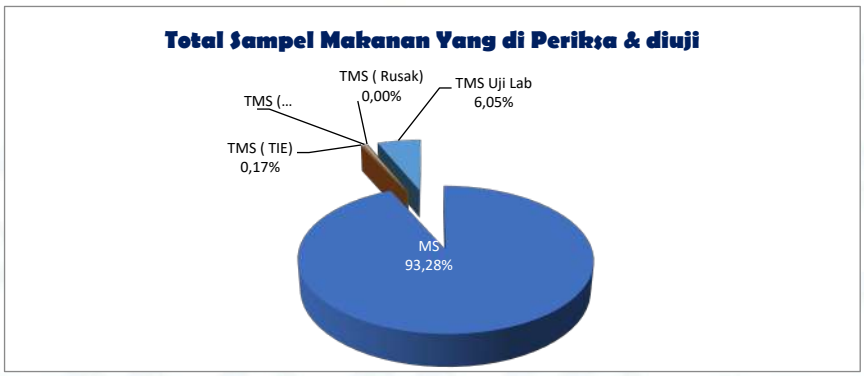
Tabel 3.10
Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,50	93,28	105,40	Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan sampel acak produk Makanan MS yang diperiksa dan di uji 555 sampel terhadap total sampel acak makanan yang diperiksa dan diuji sebanyak 595 sampel. Jenis makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada Tahun 2023. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 Tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di Tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kategori Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Jumlah keseluruhan Sampel makanan yang diperiksa adalah 595. Dari 595 sampel tersebut terdapat 40 sampel makanan tidak memenuhi syarat yang terdiri atas :

- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori TIE/Ilegal palsu : 1 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori Kadaluarsa : 3 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori rusak : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat Uji Laboratorim : 36 Sampel



Grafik 3.3
Jumlah Sampel makanan yang memenuhi syarat Tahun 2023

Jumlah sampling Makanan sampai dengan Tahun 2023 adalah 595 dimana terdapat 4 sampel Makanan TIE/Ilegal/Palsu/ kedaluarsa dan 36 TMS uji Laboratorium dimana jumlah sampel yang masuk Laboratorium sebesar 591 dan seluruh sempel sebanyak 591 sampel yang selesai diperiksa dan diuji dengan jumlah sampel yang memenuhi syarat 563 sampel.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.11.. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	78	85,86	110,08	Sangat Baik
Tahun 2021	85,50	86,04	100,63	Sangat Baik
Tahun 2022	87	93,83	107,85	Sangat Baik
Tahun 2023	88,50	93,28	105,40	Sangat Baik

capaian kinerja indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat BBPOM Makassar untuk Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020. Tahun 2021 berada pada angka 86,04 lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2020 dengan nilai 85,86 kategori "Sangat Baik" , sedangkan Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021. Tahun 2022 berada pada angka 93,83 lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2021 dengan nilai 86,04 kategori "Sangat Baik"; serta Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022. Tahun 2023 berada pada angka 93,28 lebih rendahi apabila dibandingkan Tahun 2022 dengan nilai 86,04 kategori "Sangat Baik".

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.12. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori capaian terhadap Tahun 2024
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,50	90	93,28	102,64	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat Tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra Tahun 2024, serta capaian yang diperoleh sudah masuk kategori **Sangat Baik**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra Tahun 2024 dapat mempertahankan kategori Sangat Baik.

d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

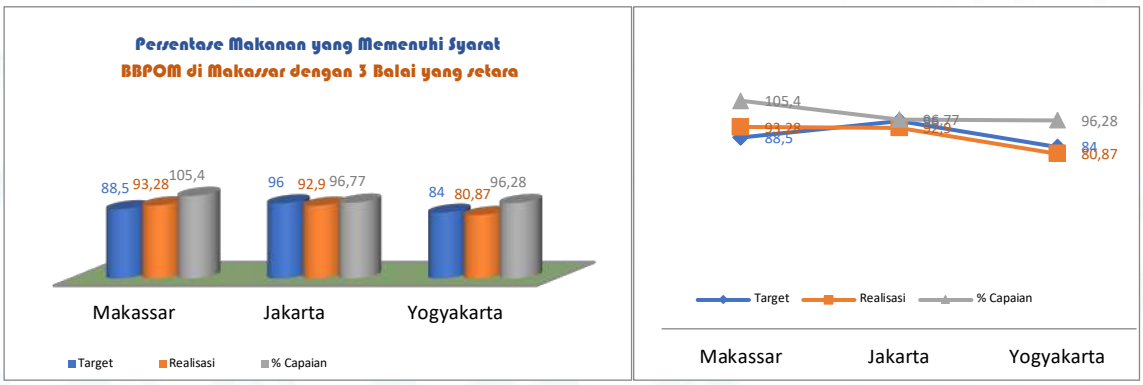
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Bandung Tahun 2022

Indikator Kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	88,50	93,28	105,40	Sangat Baik
BBPOM di Jakarta	96	92,90	96,77	Cukup
BBPOM di Yogyakarta	84	80,87	96,28	Cukup

Target indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat BBPOM Jakarta 96,77 dan BBPOM Yogyakarta 96,28 pada kategori yang sama yaitu "Cukup", sementara realisasi BBPOM Makassar 93,28 lebih tinggi dibandingkan dengan 2 Balai lainnya. Hasil capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat BBPOM Makassar telah mencapai target dengan nilai 105,40 lebih tinggi dibandingkan BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta kategori "Sangat Baik .

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta,, dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Target BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2023 dengan target Nasional Badan POM

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,50	86	93,28	108,46	Sangat Baik

Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat Tahun 2023 BBPOM di Makassar **telah mencapai** target Badan POM secara nasional, dengan nilai 108,46 dengan kategori "Sangat Baik".

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor kendala /Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase makanan yang memenuhi syarat kategori baik antara lain:

- Fasilitas penyimpanan Makanan di sarana distribusi telah tersedia dan penyimpanannya sesuai dengan kondisi penyimpanan yang direkomendasikan.
- Pembinaan kepada sarana produksi dan sarana distribusi pangan yang secara terus menerus dilakukan oleh petugas / inspektru balai untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk
- Adanya keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman sampling Tahun 2022 yang telah ditetapkan.
- Meningkatknya monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk Tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian pada hasil pengawasan.
- Pengawasan terhadap produk makanan yang beredar lebih intensif, disertai dengan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan dan ritel, mengurangi peredaran Makanan tanpa izin edar.

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase makanan yang Memenuhi Syarat semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pelaksanaan sistem sampling berpedoman pada keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman sampling Tahun 2022 yang telah ditetapkan.
- Parameter uji kritis berpedoman pada pedoman sampling 2022
- Koordinasi dengan P3OMN dan Ditwas Pangan dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi terkait pegujian parameter uji kritis

- Pembinaan kepada sarana produksi dan sarana distribusi pangan yang secara terus menerus dilakukan oleh petugas / inspektru balai untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk dan kepatuhan produsen/pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku sehingga temuan TMK penadaan Tahun 2022 terhadap total sampling Makanan Acak menurun untuk Tahun berikutnya.
- *Sampling* Makanan dilakukan Balai Besar POM di Makassar sepenuhnya mengacu pada pedoman *sampling* yang telah ditetapkan Kepala BPOM. Selain itu akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap Pedoman *Sampling* dan Pengujian Makanan agar sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan.
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk Tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian pada hasil pengawasan.
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha sarana produksi pangan olahan terkait pemenuhan CPPOB.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan.
- Melaporkan hasil evaluasi penandaan ke pusat untuk ditindaklanjuti ke produsen.
- Sampling Pangan Acak dilaksanakan mengacu Pedoman Sampling dan sesuai Renlak
- Komoditi Pangan Acak yang disampling telah memenuhi ketentuan penandaan dan mutu produk

f. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir Tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 93,28 % dengan capaian 105,40 % pada Tahun 2023. Indikator persentase obat yang memenuhi syarat kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,06) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 105,40 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 99,07 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2023

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
105,40	493.374.600	488.783.477	99,07	1,06	0,06	Efisien

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori baik antara lain :

- Dari proses sampling : melakukan proses perecanaan sampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling
- Proses pengujian : melakukan proses perncanaan pengujian sesuai dengan pedoman sampling
- Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.
- Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Makanan tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Makanan tanpa izin edar dan substandar.
- Pembinaan terhadap sarana distribusi Makanan untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga semakin minimnya yaitu 0,48 % Makanan yang TMS karena rusak;
- Penyebaran informasi keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile;
- Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku
- Penerapan Sistem Manejemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten
- Kompetensi penguji ditingkatkan melalui Bimtek Pendampingan Pengujian Unggul, yang dilaksanakan oleh PPPOMN dan PPSDM
- Kompetensi petugas sampling juga ditingkatkan dengan mengikuti workshop yang diselenggarakan ditwas terkait
- Terlaksananya monev Region Makassar 14-15 Desember 2023 yang menyepakati rekomendasi untuk peningkatan kinerja Region dan Perencanaan 2024

h. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Dari proses sampling : melakukan proses perecanaan sampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling	Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Makanan tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Makanan tanpa izin edar		Desember 2023	Jumlah Obat yang disampling 1.117	Jumlah Obat yang disampling 1.157

		dan substandar				
2.	Proses pengujian : melakukan proses perncanaan pengujian sesuai dengan pedoman sampling	Pada bulan Oktober, November dan Desember Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat telah mencapai target		Desember 2023	Jumlah sampel selesai uji 1.067	Jumlah sampel selesai uji 1.157
3.	Dari 586 sampel yang masuk laboratorium, sebanyak 141 sampel yang belum diuji laboratorium sampai bulan November	Percepatan pengujian sisa sampel sebanyak 141 sampel Makanan Dari 591 sampel yang masuk laboratorium, seluruh sampel selesai diuji laboratorium sampai dengan bulan Desember		Desember 2023	Jumlah sampel selesai uji 1.067	Jumlah sampel selesai uji 1.157
4.	Pembinaan kepada sarana produksi i Makanan yang secara terus menerus dilakukan oleh petugas / inspektur balai	- Meningkatkan kualitas produk pangan olahan melalui pendampingan dan edukasi terhadap pelaku usaha pangan Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk lebih melakukan pembinaan terhadap sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) mengenai CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sehingga produk pangan yang dihasilkan bermutu, aman dan bermanfaat				
5.	Penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Makanan Ilegal, serta Penyebaran informasi keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM	- Edukasi yang masif melalui KIE kepada masyarakat tentang pengetahuan Makanan aman Merekomendasikan kepada sarana distributor agar tersedia tempat penyimpanan pangan sesuai dengan kondisi penyimpanan sesuai ketentuan.Meningkatkan kualitas produk pangan olahan melalui				

	atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile	pendampingan dan edukasi				
6.	Pembinaan ke pemilik sarana produksi dn distribusi agar menerapkan cara distibusi yang baik terhadap produk Pangan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut	- Tindaklanjut melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi berdasarkan Pengawasan penandaan yang dilakukan BBPOM di Makassar secara rutin dan di evaluasi oleh pusat Melakukan monitoring Tindak Lanjut pada sarana produksi MD terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar agar sarana produksi melakukan perbaikan terkait hasil temuan				
7.	1. Melaksanakan Monev Region Makassar secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul di setiap UPT, baik dalam melakukan sampling maupun pengujian, dan mengupayakan penyelesaian dan solusi terbaik, serta menyusun perencanaan sampling dan pengujian 2024 2. Menyelesaikan proses peningkatan kompetensi pengujian Unggul dengan bimtek pendampingan dari PPPOMN dan PPSDM	1. Monev Regional Makassar sudah dilaksanakan tanggal 14-15 Desember 2023 dan telah disepakati rekomendasi untuk perencanaan sampling dan pengujian 2024 2. Peningkatan kapasitas laboratorium dengan pengadaan instrumen untuk pengujian unggul dan bimtek Pendampingan	Penyusunan Renlak Sampling dan Pengujian semua komoditi untuk seluruh UPT anggota Region makassar untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja masing-masing UPT, utamanya terkait pengujian unggula sesuai Konsep baru Regionalisasi Laboratorium	Desember 2023	Masing-masing UPT membuat Renlak tanpa mempertimbangkan load Balai penguji sehingga sampel tidak dapat diuji tepat waktu	Sampling dan pengujian berjalan tertib dan sesuai rencana

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Persentase makanan yang memenuhi syarat dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas reviuw Rencana Strategis Tahun 2020-2024, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Persentase makanan yang memenuhi syarat pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Penacapain kinerja untuk indicator Persentase makanan yang memenuhi syarat serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya



3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan Jumlah Sampel Targeted Obat mencakup (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pemeriksaan dan pengujian dibagi dengan Total sampel Targeted Obat yang dipeiksa dan diuji

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar adalah Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Pada Tahun 2023 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan obat dan makanan yang memenuhi syarat diwilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 92,71 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Obat aman \& Bermutu} = \frac{\text{Jumlah sampel Targeted Obat IAS}}{\text{Total sampel Targeted Obat diperiksa \& diuji}} \times 100\ \%$$

Terdapat beberapa kategori untuk menentukan obat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2023 adalah 104,16 % dengan realisasi sebesar 92,71 % Obat yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

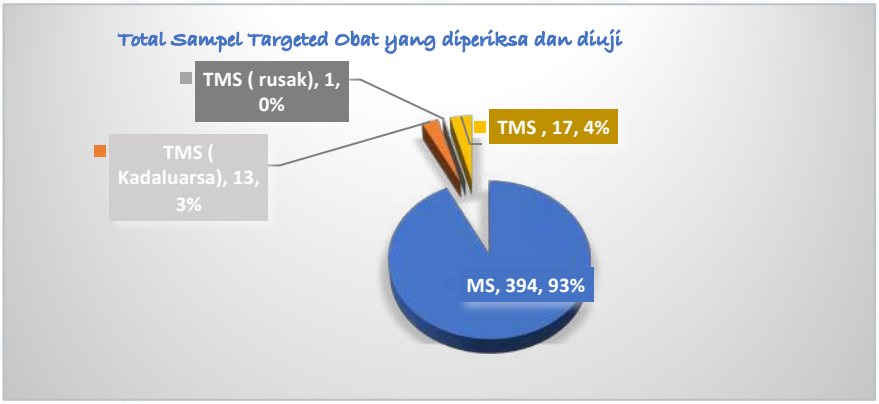
Tabel 3.16
Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	92,71	104,14	Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan sampel targeted produk Obat Memenuhi Syarat yang diperiksa dan di uji sebanyak 394 sampel terhadap sampel targeted obat yang diperiksa dan diuji sebanyak 425 sampel. Jenis Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2023, yaitu Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di Tahun berjalan. Kategori Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Jumlah keseluruhan Sampel Obat yang diperiksa dan diuji adalah 425 sampel terdiri atas 83 sampel obat, 101 sampel 0bat tradisional, 7 sampel obat kuasi, 27 sampel suplemen Kesehatan dan 203 sampel kosmetik, 4 sampel Rokok, dari 425 sampel tersebut terdapat 31 Sampel Sampel Obat yang tidak memenuhi syarat :

- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori TIE/Ilegal/Palsu : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori Kadaluarsa : 13 Sampel obat
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori rusak : 1 Sampel obat
- Tidak Memenuhi Syarat (Uji Laboratorim) : 17 Sampel (7 Obat tradisional; 1 Obat Kuasi; 4 Suplemen Kesehatan; 4 kosmetik; 1 rokok)



Grafik 3.6 Jumlah Sampel targeted Obat yang diperiksa dan diuji Tahun 2023

cara sampling pada sampel obat yaitu target produk Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2022, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel Targeted memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 Tahun 2017). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kategori Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di Tahun berjalan.

Kategori Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak ; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian; d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kategori poin 1 hingga poin 5 (kategori pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kategori poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kategori poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kategori poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets dan Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.16. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	80,60	83,42	103,50	Sangat Baik
Tahun 2021	87,00	92,58	106,41	Sangat Baik
Tahun 2022	88,,00	92,60	105,23	Sangat Baik

Tahun 2023	89,00	92,71	104,14	Sangat Baik

capaian kinerja indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM Makassar untuk Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020. Tahun 2021 berada pada angka 92,58 lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2020 dengan nilai 83,42 kategori "Sangat Baik" ; Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021. Tahun 2022 berada pada angka 92,60 lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2021 dengan nilai 92,58 kategori "Sangat Baik"; sedangkan Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022. Tahun 2023 berada pada angka 92,71 lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2022 dengan nilai 92,60 kategori "Sangat Baik"

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.17. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori capaian terhadap Tahun 2024
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	91	92,71	101,87	Tercapai/ Melampaui

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra Tahun 2024, serta capaian yang diperoleh sudah masuk kategori Sangat Baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra Tahun 2024 tetap dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Bandung Tahun 2022 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

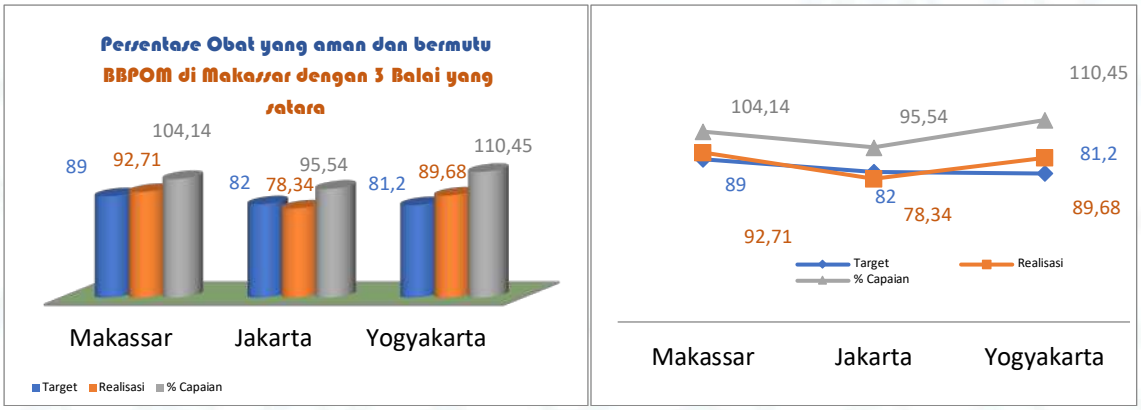
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan , BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023

Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	89,00	92,71	104,14	Sangat Baik
BBPOM di Jakarta	82,00	78,34	95,54	Cukup
BBPOM di Yogyakarta	81,20	89,68	110,45	Sangat Baik

Target indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Makassar, BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta pada angka yang berbeda, sementara target BBPOM Makassar lebih tinggi dibandingkan dengan 2 Balai lainnya. Hasil capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM Makassar telah mencapai target dengan nilai 92,71 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM Yogyakarta dan BBPOM di Jakarta kategori "Sangat Baik" serta persentase capaian tertinggi adalah BBPOM di Yogyakarta dengan capaian 110,45 kategori "Sangat Baik" lebih tinggi dibandingkan BBPOM Makassar kategori "Sangat Baik" dan BBPOM Jakarta kategori "Cukup".

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan Target BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2023 dengan target Nasional Badan POM

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	88,5	92,71	104,75	Sangat Baik

Realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2023 BBPOM di Makassar **telah mencapai** target Badan POM secara nasional, dengan nilai 104,75 dengan kategori "Sangat Baik".

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori sangat baik antara lain :

- Fasilitas penyimpanan obat di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian telah tersedia dan penyimpanannya sesuai dengan kondisi (suhu) yang direkomendasikan.
- Pembinaan kepada sarana produksi dan sarana distribusi obat yang secara terus menerus dilakukan oleh petugas / inspektur balai untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk dan kepatuhan produsen/pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku sehingga berimplikasi rendahnya temuan TMK penadaan sebesar 0,65 % terhadap total sampling Obat targeted
- Adanya keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman sampling Tahun 2023 yang telah ditetapkan.
- Keberhasilan Pembinaan kepada pelaku usaha dalam Implementasi Perka BPOM No. 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan *mandatory Sertifikasi* CDOB
- Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Obat tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Obat tanpa izin edar dan substandar.
- Terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan disebabkan oleh kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap implementasi label produk Obat Tradisional yang sudah disetujui oleh Deputi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

- Terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang tidak memenuhi syarat pengujian laboratorium sebanyak 17 Sampel yaitu sampel 7 Obat Tradisional, 4 Suplemen Kesehatan dan 4 Kosmetik dan 1 rokok
- Terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Sampel TIE = 14 (obat), rusak = 1 (obat).
- Sampling Obat Targetted dilaksanakan mengacu Pedoman Sampling dan sesuai Renlak
- Komoditi Obat Targetted yang disampling telah memenuhi ketentuan penandaan dan mutu produk
- Sarana produksi dan distribusi Obat Targetted telah sesuai ketentuan sehingga mutu dan keamanan produk terjamin
- Alat yang ditransfer dari BPOM di Jayapura belum berfungsi karena membutuhkan suku cadang dan tambahan fitur lain, yang anggarannya akan dibebankan di DIPA tahun 2024
- Ada Balai penguji terlambat melaporkan hasi uji secara rutin melalui SIPT sehingga berpengaruh ke capaian kinerja balai penyampling

f. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di iukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 92,71 % dengan capaian 104,17 % pada tahun 2023. Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,05) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 104,17 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 98,87 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2023

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
104,17	388.392.400	384.013.211	98,87	1,05	0,05	Efisien

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori baik antara lain :

- Dari proses sampling : melakukan proses perecanaan sampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling
- Proses pengujian : melakukan proses perncanaan pengujian sesuai dengan pedoman sampling Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Implementasi *Sampling* Obat Program Nasional/JK
- Pengawasan Intensif Tindak Lanjut Perintah Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat
- Penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.

- Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* Obat yang diterbitkan oleh Badan POM.
- Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU persentase obat yang memenuhi syarat antara lain: melakukan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya.
- Kegiatan Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Makassar, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Jayapura, BPOM Kendari, BPOM Manokwari, BPOM Mamuju, BPOM Palopo, Loka POM Kota Bau-Bau, Loka POM di Kota Sorong, Loka POM di Kabaputen Marauke, Loka POM di Kabupaten Mimika.
- Kompetensi penguji ditingkatkan melalui Bimtek Pendampingan Pengujian Unggul, yang dilaksanakan oleh PPPOMN dan PPSDM
- Kompetensi petugas sampling juga ditingkatkan dengan mengikuti workshop yang diselenggarakan ditwas terkait

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Dari proses sampling : melakukan proses perecanaan sampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling	Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Obat tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Obat tanpa izin edar dan substandar		Desember 2023	Jumlah Obat yang disampling 415	Jumlah Obat yang disampling 425
2.	Proses pengujian : melakukan proses perncanaan pengujian sesuai dengan pedoman sampling	Pada bulan Oktober, November dan Desember Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat telah mencapai target	.	Desember 2023	Jumlah sampel selesai uji 388	Jumlah sampel selesai uji 425

3	Dari 415 sampel yang masuk laboratorium, sebanyak 27 sampel yang belum diuji laboratorium sampai bulan November	Percepatan pengujian sisa sampel sebanyak 27 sampel Untuk bulan Desember dari 411 sampel yang masuk laboratorium, seluruh sampel selesai diuji laboratorium sampai dengan bulan Desember		Desember 2023	Jumlah sampel selesai uji 388	Jumlah sampel selesai uji 425
4.	Pembinaan kepada sarana produksi dan sarana distribusi obat yang secara terus menerus dilakukan oleh petugas / inspektur balai	- Pengawasan kepatuhan fasilitas produksi dan dsitribusi untuk meningkatkan/menjaga mutu dan keamanan obat Peningkatan pendampingan terhadap pelaku usaha Obat Tradisional dan Kosmetik di propinsi Sulawesi Selatan				
5	Penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, serta Penyebaran informasi keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile	- Edukasi yang masif melalui KIE kepada masyarakat tentang pengetahuan Obat aman Merekomendasikan kepada sarana distributor agar tersedia tempat penyimpanan Obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuian penandaan.				
6	Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar menerapkan cara distibusi yang baik terhadap produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya	Tindaklanjut melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi berdasarkan Pengawasan penandaan yang dilakukan BBPOM di Makassar secara rutin dan di evaluasi oleh pusat				

	harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut					
	1. Pendampingan dan pengawalan pelaku usaha dan sarana distribusi kosmetik dan obat tradisional di Sulsel untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas produknya 2. Komunikasi internal antara fungsi pengujian dan pemeriksaan untuk kelancaran pelaksanaan sampling dan pengujian	1. Monev Regional Makassar sudah dilaksanakan tanggal 14-15 Desember 2023 dan telah disepakati rekomendasi untuk perencanaan sampling dan pengujian 2024 2. Peningkatan kapasitas laboratorium dengan pengadaan instrumen untuk pengujian unggul dan bimtek Pendampingan	Penyusunan Renlak Sampling dan Pengujian semua komoditi untuk seluruh UPT anggota Region makassar untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja masing-masing UPT, utamanya terkait pengujian unggula sesuai Konsep baru Regionalisasi Laboratorium	01/12/2023	Masing-masing UPT membuat Renlak tanpa mempertimbangkan load Balai penguji sehingga sampel tidak dapat diuji tepat waktu	Sampling dan pengujian berjalan tertib dan sesuai rencana

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan acuan atas penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan

- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Penacapain kinerja untuk indicator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya



4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan Jumlah Sampel Targeted makanan mencakup (makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pengujian dibagi dengan Total sampel Targeted makanan yang dipeiksa dan diuji

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Makassar antara lain adalah Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Pada Tahun 2023 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 95,45 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\%\ \text{makanan aman \& bermutu} = \frac{\text{Jumlah sampel Targeted makanan MS}}{\text{Total Sampel targeted makanan diperiksa dan diuji}} \times 100\ \%$$

Terdapat beberapa kategori untuk menentukan Kategori Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

cara sampling pada sampel makanan yaitu target produk makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2023, Persentase makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted memenuhi syarat sampai dengan tahun n dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan,

perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 Tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kategori Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di Tahun berjalan.

Kategori Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kategori MS/TMS.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2023 adalah 119,32 % dengan realisasi sebesar 95,45 % makanan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

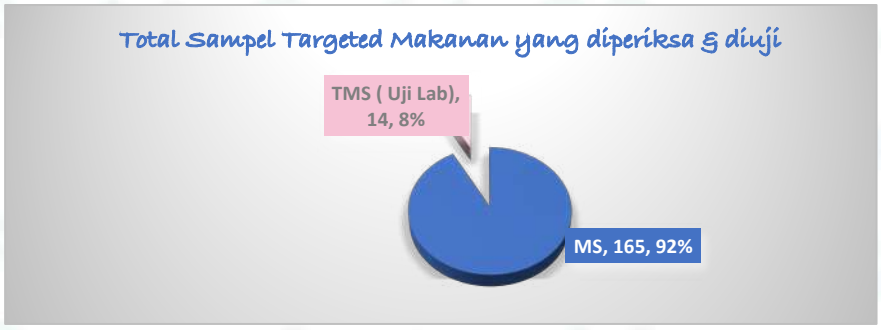
Tabel 3.21

Capaian Kinerja Indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	95,45	119,31	Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan sampel targeted produk makanan MS yang diperiksa dan di uji sebanyak 126 sampel terhadap total sampel makanan targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 132 sampel. Jenis makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada Tahun 2023, yaitu Sampling dilakukan terhadap makanan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di Tahun berjalan. Kategori Makanan Tidak aman dan bermutu adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Jumlah keseluruhan Sampel targeted makanan yang diperiksa dan diuji adalah 132 sampel yang selesai diperiksa dan diuji , dari 132 sampel tersebut terdapat 6 sampel makanan tidak aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan



Gambar 3.8

Jumlah Sampel targeted makanan yang diperiksa dan diuji Tahun 2023

Jumlah sampling makanan targeted sampai dengan Tahun 2022 adalah 179 dimana tidak ada sampel Kosmetik TIE/Ilegal/Palsu sehingga jumlah sampel yang masuk Laboratorium sebesar 179 dan sebesar 179 sampel yang selesai diperiksa dan diuji Tahun 2023.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.22. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	78	77,42	99,26	Belum Sangat Baik
Tahun 2021	77	79,02	102,62	Sangat Baik
Tahun 2022	78	92,18	118,18	Sangat Baik
Tahun 2023	80	95,45	119,31	Sangat Baik

capaian kinerja indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM Makassar untuk tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Tahun 2021 berada pada angka 79,02 lebih tinggi apabila dibandingkan tahun 2020 dengan nilai 77,42 kategori "Cukup", sedangkan tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 berada pada angka 92,18 lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2021 dengan nilai 79,02 kategori "Sangat Baik";
tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Tahun 2023 berada pada angka 95,45 lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2022 dengan nilai kategori "Sangat Baik"

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.23. Perbandingan realisasi Indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	81	95,45	117,83	Sangat Baik

Realisasi Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra Tahun 2024, serta capaian yang diperoleh sudah termasuk kategori "Sangat Baik", Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra Tahun 2024 tetap dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

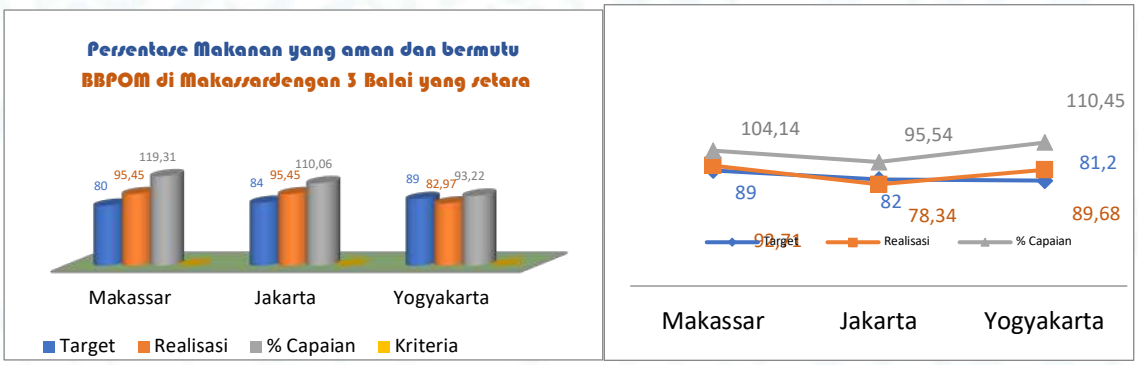
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023

Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	80	95,45	119,31	Sangat Baik
BBPOM di Jakarta	84	95,45	110,06	Sangat Baik
BBPOM di Yogyakarta	89	82,97	93,22	Cukup

Target indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM Makassar, BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta masing-masing berada pada angka yang berbeda, sementara target BBPOM Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan dengan 2 Balai lainnya. Hasil capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM Makassar dan BBPOM Jakarta telah mencapai target dengan nilai tertinggi 95,45 kategori "Sangat Baik" lebih tinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta 82,97 kategori "Cukup", sementara persentase capaian tertinggi adalah BBPOM di Makassar dengan capaian 119,31 % lebih tinggi dibandingkan BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta dengan kategori "Sangat Baik".

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Target BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.25. Perbandingan realisasi Indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu Tahun 2023 dengan target IKU Badan POM

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	82,58	95,45	115,58	Sangat Baik

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2023 BBPOM di Makassar **telah mencapai** target IKU Badan POM secara nasional, atau diatas dari rata-rata Nasional Badan POM, dengan nilai 115,58 kategori "Sangat Baik".

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor kendala /Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori baik antara lain :

- Fasilitas penyimpanan pangan di sarana distribusi telah tersedia dan penyimpanannya sesuai dengan kondisi penyimpanan yang direkomendasikan.
- Pembinaan kepada sarana produksi dan sarana distribusi pangan yang secara terus menerus dilakukan oleh petugas / inspektru balai untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk
- Adanya keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman sampling Tahun 2023 yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan sistem sampling berpedoman pada keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman sampling Tahun 2023 yang telah ditetapkan.
- Capaian Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu berdasarkan pengawasan hingga tahun 2023 telah mencapai target yaitu 119,32 % dengan kategori "Sangat Baik".
  Dari pemeriksaan 132 sampel targeted makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Makassar, dengan hasil 126 sampel MS (memenuhi syarat) dan 6 sampel tidak memenuhi syarat hasil uji.
  Sesuai Pedoman Sampling, bahwa sampel targeted tidak dilakukan evaluasi penandaan sehingga kesimpulan hasil uji tergantung dari hasil uji laboratorium.
- Konsisten untuk melakukan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pengawasan rutin sehingga sarana produksi tetap konsisten untuk menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik) agar produk pangan yang dihasilkan sesuai standar keamanan dan mutu serta aspek penandaannya

- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang aman dan bermutu.
- Koordinasi dengan petugas sampling untuk tidak menyampling produk TMK Penandaan
- Edukasi pelaku usaha Pangan targetted
- Sampling Pangan Targetted dilaksanakan mengacu Pedoman Sampling dan sesuai Renlak
- Komoditi Pangan Targetted yang disampling telah memenuhi ketentuan penandaan dan mutu produk
- Sarana produksi dan distribusi Pangan Targetted telah sesuai ketentuan sehingga mutu dan keamanan produk terjamin

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori baik antara lain :

- Pelaksanaan KIE ke masyarakat tentang Pengetahuan terkait keamanan pangan
- pendampingan ke pelaku usaha Pangan dan IRTP untuk peningkatan kualitas dan keamanan produk pangan
- Pelaksanaan sampling serta pengujian pangan targetted sesuai Pedoman Sampling triwulan IV Tahun 2022Penyebaran informasi keamanan makanan yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile;
- Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan.
- Penerapan Sistem Manejemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten
- Kompetensi penguji ditingkatkan melalui Bimtek Pendampingan Pengujian Unggul, yang dilaksanakan oleh PPPOMN dan PPSDM
- Kompetensi petugas sampling juga ditingkatkan dengan mengikuti workshop yang diselenggarakan ditwas terkait

g. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 92,18 % dengan capaian 118,18 % pada tahun 2022. Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,19) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 118,18 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 99,58 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2022

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
118,18	342.983.200	341.553.530	99,58	1,19	0,19	Efisien

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Dari proses sampling : melakukan proses perecanaan sampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling	Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Makanan tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Makanan tanpa izin edar dan substandar				
2.	Proses pengujian : melakukan proses perncanaan pengujian sesuai dengan pedoman sampling	Pada bulan Oktober, November dan Desember Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat telah mencapai target	.			
3	Dari 157 sampel yang masuk laboratorium, sebanyak 28 sampel yang belum diuji laboratorium sampai bulan November	Percepatan pengujian sisa sampel sebanyak 28 sampel Makanan Dari 179 sampel yang masuk laboratorium, seluruh sampel selesai diuji laboratorium sampai dengan bulan Desember				
4.	Pembinaan kepada sarana produksi Makanan yang secara terus menerus dilakukan oleh petugas / inspektur balai	- Meningkatkan kualitas produk pangan olahan melalui pendampingan dan edukasi terhadap pelaku usaha pangan untuk menambah daya saing terhadap produk lokal spesifik Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk lebih melakukan pembinaan terhadap sarana IRTP				

		(Industri Rumah Tangga Pangan) mengenai CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sehingga produk pangan yang dihasilkan bermutu, aman dan bermanfaat				
5.	Penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Makanan Ilegal, serta Penyebaran informasi keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile	- Edukasi yang masif melalui KIE kepada masyarakat tentang pengetahuan Makanan aman - Merekomendasikan kepada sarana distributor agar tersedia tempat penyimpanan pangan sesuai dengan kondisi penyimpanan sesuai ketentuan serta eningkatkan kualitas produk pangan olahan melalui pendampingan dan edukasi.				
6.	Pembinaan ke pemilik sarana produksi dn distribusi agar menerapkan cara distibusi yang baik terhadap produk Pangan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut	- Melakukan intervensi melalui pemeriksaan sarana produksi pangan agar sarana produksi tetap konsisten menerapkan CPPOB dan tetap meningkatkan pengawasan Penandaan Pangan di sarana distribusi pangan Melakukan monitoring Tindak Lanjut pada sarana produksi MD terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar agar sarana produksi melakukan perbaikan				

		terkait hasil temuan				
	1. Pendampingan dan pengawalan pelaku usaha dan sarana distribusi Pangan di Sulsel untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas produknya 2. Komunikasi internal antara fungsi pengujian dan pemeriksaan untuk kelancaran pelaksanaan sampling dan pengujian	1. Monev Regional Makassar sudah dilaksanakan tanggal 14-15 Desember 2023 dan telah disepakati rekomendasi untuk perencanaan sampling dan pengujian 2024 2. Peningkatan kapasitas laboratorium dengan pengadaan instrumen untuk pengujian unggul dan bimtek Pendampingan	Penyusunan Renlak Sampling dan Pengujian semua komoditi untuk seluruh UPT anggota Region makassar untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja masing-masing UPT, utamanya terkait pengujian unggula sesuai Konsep baru Regionalisasi Laboratorium		Renlak yang dibuat oleh masing-masing UPT masih selalu diubah tanpa mempertimbangkan load Balai penguji	Sampling dan pengujian berjalan tertib dan sesuai rencana

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas reviuw Rencana Strategis tahun 2020-2024, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional

- Penacapain kinerja untuk indicator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.



5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan Jumlah Sampel pangan fortifikasi adalah pangan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat, pangan fortifikasi yang memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan pedoman sampling pada Tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Makassar antara lain adalah Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Pada Tahun 2022 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Makassar, hal ini ditunjukkan belum dicapainya target Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sebesar 80 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\%\ \text{Pangan fortifikasi MS} = \frac{\text{Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\ \%$$

Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada Tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan, Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian

Pengambilan keputuan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan..

Terdapat beberapa kategori untuk menentukan Kategori pangan fortifikasi Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan fortifikasi yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2023 adalah 114,83 % dengan realisasi sebesar 88,42 % pangan fortifikasi yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Tabel 3.27
Capaian Kinerja Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	77	88,42	114,83	Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sebanyak 84 sampel terhadap total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji sebanyak 95 sampel. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.

Jumlah keseluruhan Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji adalah 95 sampel yang selesai diperiksa dan diuji, dari 95 sampel tersebut terdapat 11 sampel pangan fortifikasi tidak aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, yaitu Tidak Memenuhi uji laboratorium : 11 Sampel.



Gambar 3.10
Jumlah Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji Tahun 2023

Jumlah sampel pangan fortifikasi sampai dengan Tahun 2023 yang diperiksa adalah 95 sampel dan sebesar 95 sampel yang selesai diperiksa dan diuji,

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.28. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	-	-	-	-
Tahun 2021	75	60	80	Cukup
Tahun 2022	76	80	105,26	Sangat Baik
Tahun 2023	77	88,42	114,83	Sangat Baik

Perbandingan realisasi capaian kinerja indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di BBPOM Makassar untuk tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020, karena indikator ini belum ada di tahun 2020 dan merupakan tambahan indikator baru berdasarkan hasil Reviu Renstra tahun 2021. Tahun 2021 realisasi berada pada nilai 60 dengan capaian 80 kategori "Belum Sangat Baik"; Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021. Realisasi tahun 2022 berada pada angka 80 dan capaian 105,26 lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2021 dengan nilai 60 dan capaian 80 kategori "Sangat Baik"; Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Realisasi tahun 2023 berada pada angka 88,42 dan capaian 114,83 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan nilai 80 dan capaian 105,26 kategori "Sangat Baik".

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.29. Perbandingan realisasi Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori capaian terhadap Tahun 2024
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	77	78	88,42	113,36	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2023 **Telah mencapai** target Renstra Tahun 2024, serta capaian yang diperoleh telah termasuk kategori "Sangat Baik", Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

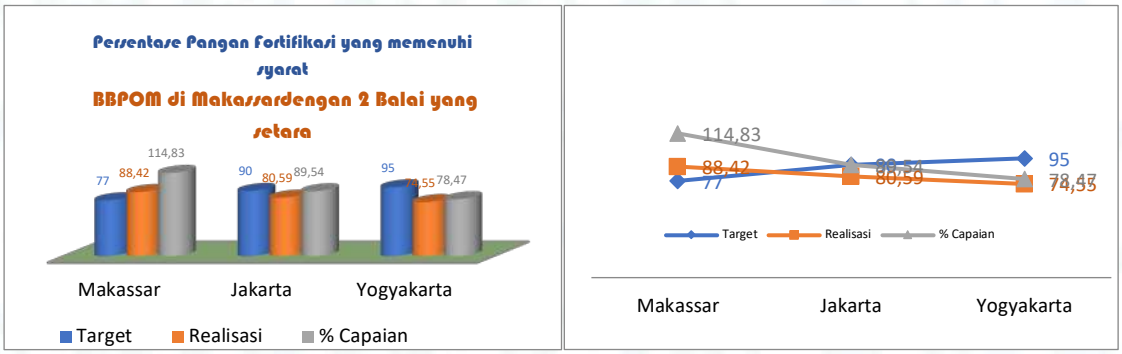
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023

Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	77	88,42	114,83	Sangat Baik
BBPOM di Jakarta	90,00	80,59	89,54	Cukup
BBPOM di Yogyakarta	95,00	74,55	78,47	Cukup

Target indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat BBPOM Makassar, BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta masing-masing pada angka yang berbeda. Hasil capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat tertinggi pada BBPOM Makassar yaitu 88,42, BBPOM Jakarta 80,59 dan BBPOM Yogyakarta 74,55, namun BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta belum memenuhi target. Sementara BBPOM di Makassar telah mencapai target dengan nilai 88,42. Adapun persentase capaian tertinggi adalah BBPOM di Makassar dengan capaian 114,83 lebih tinggi dibandingkan BBPOM Jakarta dengan kategori "Sangat Baik", BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Jakarta kategori "Cukup"

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta dan BBPOM di Yogyaka [=]rta Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Target BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.31 Perbandingan realisasi Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2023 dengan target IKU Badan POM

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	77,00	90	88,42	98,24	Cukup

Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2023 BBPOM di Makassar **belum mencapai** target IKU Badan POM secara nasional, dengan nilai 89,88 dengan kategori "Cukup".

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor kendala /Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat kategori "Sangat Baik" antara lain :

- Sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun 2022, sampling pangan fortifikasi di peredaran untuk pemilihan tempat sampling kabupaten/kota dilakukan secara acak sesuai daftar kabupaten/kota dari ditentukan oleh pusat
- Adanya perubahan ketentuan TMS sesuai DO, yakni hanya berdasarkan kadar fortifikannya
- Produk pangan fortifikasi lokal, yang disamping cukup reprentif telah memenuhi ketentuan
- Pendampingan dan edukasi ke pelaku usaha pangan fortifikasi, telah lebih efektif dibandingkan Tahun sebelumnya
- Sampling Pangan Fortifikasi dilaksanakan mengacu Pedoman Sampling dan sesuai Renlak
- Komoditi Sampel Fortifikasi yang disampling telah memenuhi ketentuan penandaan dan mutu produk

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha garam beriodum
- Pelaku usaha sudah semakin tinggi kepatuhan dan pengetahuan dalam menjaga mutu dan keamanan produk, serta kadar fortifikan yang ditambahkan
- Mengusulkan dalam pedoman sampling agar jumlah persentase produk fortifikasi lebih proporsional
- Meningkatkan kompetensi sebagai laboratorium spesifik pengujian secara LCMSMS, lab air, dan cemaran logam
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk pangan fortifikasi yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk psngsn fortifiksdi mengenai Makanan yang aman dan bermutu.

f. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator persentase obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 88,42 % dengan capaian 114,83 % pada tahun 2023. Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,06) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 105,26 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 99,41 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2023

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
114,83	53.596.000	48.389.083	90,28	1,27	0,27	Efisien

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian peryataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan kategori “Sangat Baik ” antara lain :

- Edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha garam beriodum.
- Pelaksanaan sampling dilakukan selama seTahun tidak terpusat pada triwulan tertentu.
- Reagen - reagen dan baku pembanding dipersiapkan di awal tahun sehingga saat sampel masuk sudah langsung siap diuji.
- Kompetensi penguji ditingkatkan dengan cara mengikuti bimtek pengujian dan sharing ilmu dengan rekan sesama penguji ataupun penyelia.
- Kompetensi petugas sampling juga ditingkatkan dengan mengikuti workshop yang diselenggarakan ditwas terkait.

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Dari proses sampling : melakukan proses perencanaan sampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling.	Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan pangan tanpa izin edar dan substandar Perubahan komposisi sampling pangan fortifikasi sesuai Pedoman Sampling 2023.			Belum optimalnya Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan pangan tanpa izin edar.	Rutin dilaksanakannya Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan pangan tanpa izin edar.
2.	Pembinaan kepada sarana produksi pangan fortifikasi yang secara terus menerus dilakukan oleh petugas / inspektur balai.	Pengawasan kepatuhan fasilitas produksi dan dsitribusi untuk meningkatkan/menjaga mutu dan keamanan pangan fortifikasi. Meningkatkan kualitas produk pangan fortifikasi melalui pendampingan dan edukasi untuk menambah daya saing terhadap produk lokal spesifik.			Belum optimalnya Pengawasan kepatuhan fasilitas produksi dan dsitribusi untuk meningkatkan/ menjaga mutu dan keamanan pangan fortifikasi.	Rutin dilakukannya pengawasan kepatuhan fasilitas produksi dan dsitribusi untuk meningkatkan/ menjaga mutu dan keamanan pangan fortifikasi.
3.	Penyebaran informasi kepada masyarakat yang optimal secara langsung maupun melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile.	Pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat tentang pengetahuan Pangan aman.			Belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat yang optimal secara langsung maupun melalui media sosial.	Rutin dilakukannya kegiatan KIE kepada masyarakat tentang pengetahuan Pangan aman.

4.	Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar menerapkan cara distibusi yang baik terhadap produk pangan fortifikasi sesuai dengan ketentuan.	Tindaklanjut melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi berdasarkan Pengawasan yang dilakukan BBPOM di Makassar secara rutin dan di evaluasi oleh pusat.			Belum optimalnya pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar menerapkan cara distibusi yang baik terhadap produk pangan fortifikasi sesuai dengan ketentuan.	Rutin dilakukannya pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar menerapkan cara distibusi yang baik terhadap produk pangan fortifikasi sesuai dengan ketentuan.
5.	Pendampingan dan pengawalan pelaku usaha Makanan di Sulsel untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas produknya.	Sampling dan pengujian pangan fortifikasi telah selesai dan terlapor 100%.			Belum maksimalnya pendampingan dan pengawalan pelaku usaha makanan di SulSel untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas produknya.	Telah dilakukan upaya maksimal untuk pendampingan dan pengawalan pelaku usaha makanan di SulSel sehingga sampling dan pengujian pangan fortifikasi telah selesai dan terlapor 100%.
6.	Untuk sampel minyak goreng diusahakan ada yang disampling di sarana produksi, karena jika semua disampling di sarana distribusi , berapapun kadar hasil uji vit A nya akan dianggap MS (Memenuhi Syarat). Kendala: tergantung lokus samplingnya.	Sampling dan pengujian pangan fortifikasi telah selesai dan terlapor 100%.			Belum adanya sampling minyak goreng di sarana produksi.	Telah melakukan sampling minyak goreng di sarana produksi.
7.	Komunikasi internal antara fungsi pengujian dan pemeriksaan untuk kelancaran pelaksanaan sampling dan pengujian.	Sampling dan pengujian pangan fortifikasi telah selesai dan terlapor 100%.			Belum maksimalnya komunikasi internal secara rutin antara fungsi pengujian dan pemeriksaan.	Aktif dan rutinnya komunikasi internal antara fungsi pengujian dan pemeriksaan, sehingga sampling dan pengujian pangan fortifikasi telah selesai dan terlapor 100%.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja, serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi publik terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Penacapaian kinerja untuk indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.





Sasaran 2

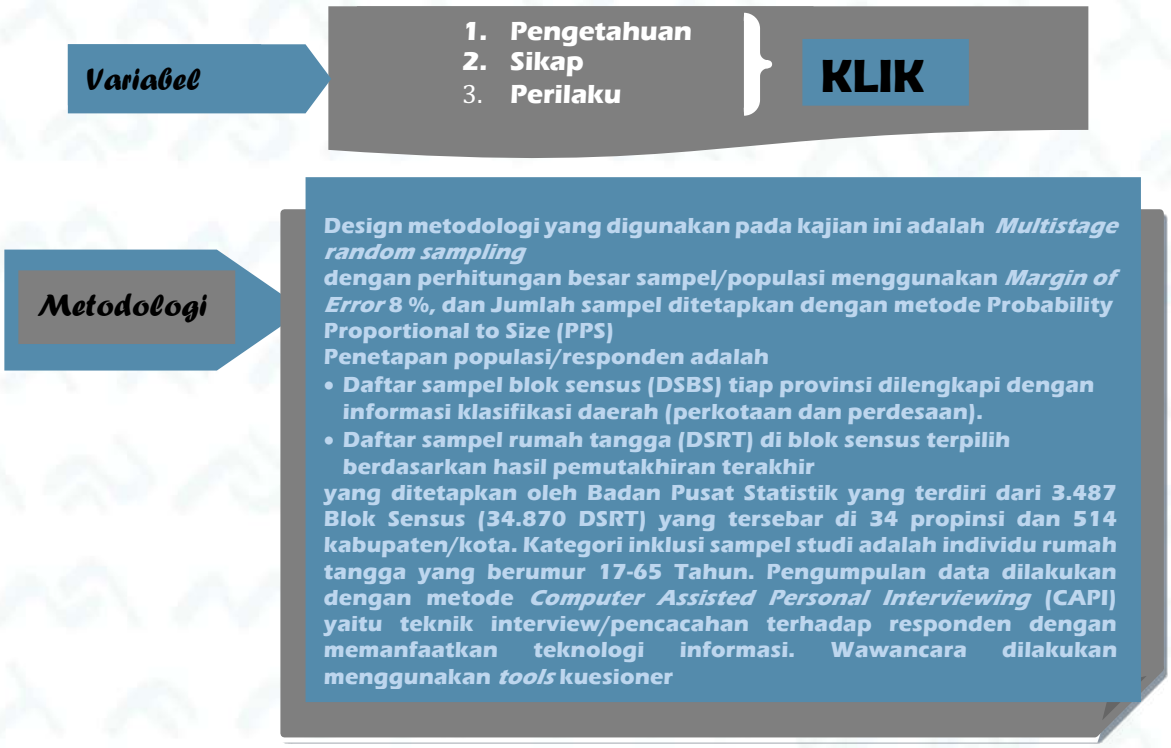
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Sasaran Strategis Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar diukur dengan Indikator :



1. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awarness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan bermutu

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.



Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Kajian yang bertujuan untuk mengukur nilai indeks kesadaran dan kepuasan masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat pada skala Nasional, Regional. Design metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah *Stratified two stage sampling*) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *Margin of Error* 8 %, dengan tahapan ;

- Memilih blok sensus secara ***systematic sampling***dari blok sensus terpilih Susenas Maret 2022, di setiap strata provinsi (urban/rural)
- Memilih 10 ruta secara ***systematic***padasetiap blok sensusterpilih berdasarkan daftar populasi ruta Susenas Maret 2022 dengan ***implicit stratification*** tingkat pendidikan kepala rumah tangga
- Memilih 1(satu) responden ART usia 17-65 Tahun secara acak dari setiap ruta terpilih sampel

Adapun cakupan Survei :

- 34 Provinsi
- 506 Kabupaten/Kota
- 1597 Kecamatan
- 1817 Desa/Kelurahan
- 1822 Blok Sensus
- 18.220 Rumah Tangga

Waktu Penelitain : Januari – Desember 2022, waktu pengumpulan data Juli – September 2022. **Analisis Data**: Perhitungan Indeks, Analisis Deskriptif, Analisis Lanjutan (Anova dan Korelasi), Analisis SEM & Analisis Kualitatif

Kategori responden adalah kepala/anggota rumah tangga berusia 17-65 Tahun,sehat jasmani dan rohani dan menggunakan Obat dan Makanan**.**. Pengumpulan data dilakukan dengan metode teknologi *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis online dan offline yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan *tools* kuesioner, monitoring data secara realtime dilakukan melalui dashboard survei **surveiskkm.pom.go.id.**

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Masyarakat adalah konsumen terhadap 5 komoditi yang menjadi lingkup pengawasan BPOM yaitu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM.

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah

- pengetahuan (Knowledge)
  menggali sejauh mana pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, sejauh mana sumber informasi dan pengaruh sosialisasi/KIE dari BPOM terhadap pengetahuan responden.
- sikap (Attitude)
  untuk menggali sikap dan persepsi masyarakat terkait Obat dan Makanan.
- perilaku masyarakat
  untuk mengetahui perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memilih/membeli/menggunakan/mengonsumsi Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. **Perilaku yang di ukur adalah perilaku melalui pengakuan verbal.**

Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan

Tabel 3.34
Kategori Indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023

Kategori	Interval Indeks	Lebar Interval	%
Tidak Baik	<45	45	0,3
Kurang Baik	45 – 60	15	12,82
Cukup Baik	60 – 75	15	64,4
Baik	75 – 90	15	21,69
Sangat Baik	≥ 90	10	0,79

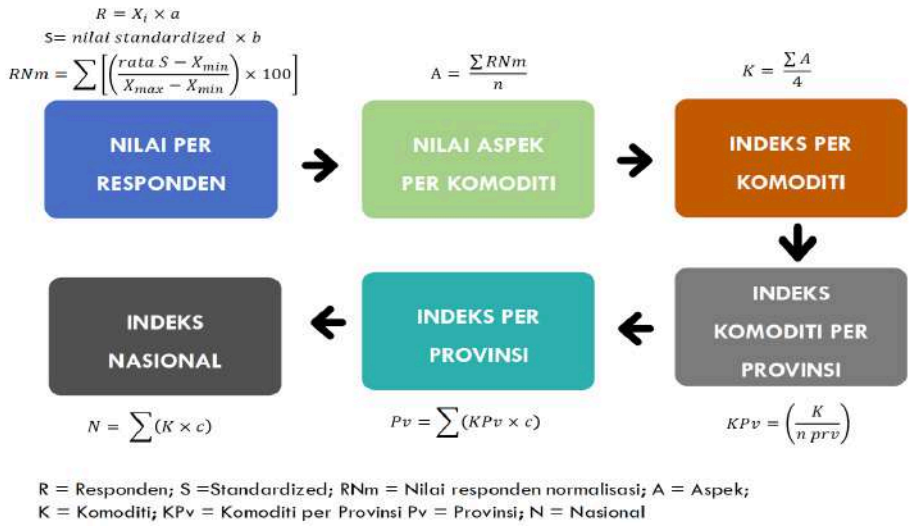
Perhitungan indeks diukur dengan mempertimbangkan bobot berikut :

a = Bobobt penduduk (BPS)

b = Bobot pertanyaan

c = Bobot Komoditi

Alur perhitungan



R = Responden; S =Standardized; RNm = Nilai responden normalisasi; A = Aspek; K = Komoditi; KPv = Komoditi per Provinsi Pv = Provinsi; N = Nasional

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase Capaian indikator Indeks kesadaran masyarakat *(Awareness index)* terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar pada Tahun 2023 adalah 101,02 % dengan realisasi sebesar 83,85 % Indeks kesadaran masyarakat *(Awareness index)* terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar **dibawah dari target** yang dietentukan dengan kategori **"Sangat Baik".**

Tabel 3.33

Capaian Kinerja Indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awarness index) terhadap Obat dan makanan aman bermutu	83	83,85	101,02	Sangat Baik

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	-	-	-	-
Tahun 2021	75	60	80	Cukup
Tahun 2022	81	79,41	98,04	Cukup
Tahun 2023	83	83,85	101,02	Sangat Baik

Perbandingan realisasi capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Makassar untuk tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020, karena indikator ini belum ada di tahun 2020 dan merupakan tambahan indikator baru berdasarkan hasil Reviu Renstra tahun 2021. Tahun 2021 realisasi berada pada nilai 60 dengan capaian 80 kategori "Belum Sangat Baik"; Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021. Realisasi tahun 2022 berada pada angka 79,41 dan capaian 98,04 lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2021 dengan nilai 60 dan capaian 80 kategori "Belum Sangat Baik"; Realisasi tahun 2023 berada pada angka 83,85 dan capaian 101,02 lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2022 dengan nilai realisasi 79,41 dan capaian 98,04 kategori "Sangat Baik".

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori capaian terhadap Tahun 2024
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83	85	83,85	98,65	Akan Tercapai

Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra Tahun 2024, serta capaian yang diperoleh kategori "Akan Tercapai". Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra Tahun 2024 dapat ditingkatkan menjadi kategori "Sangat Baik.".

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

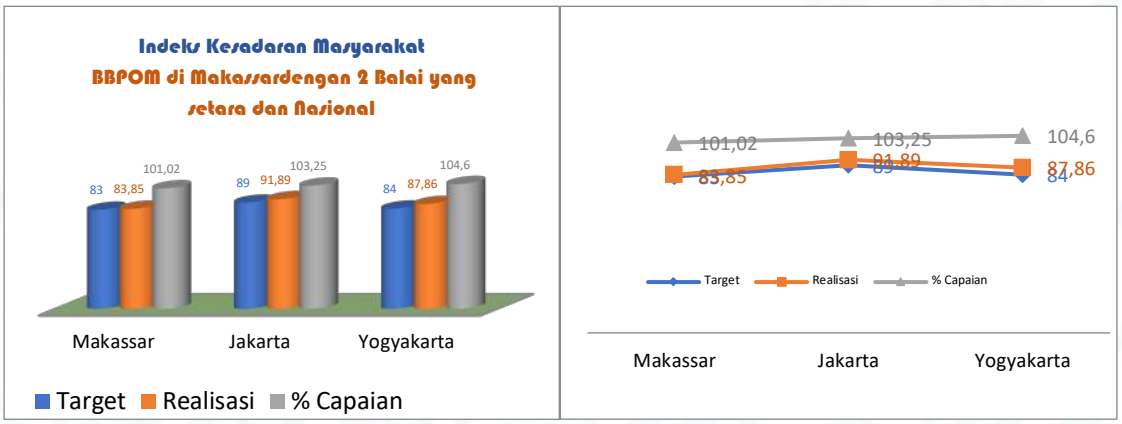
Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Bandung Tahun 2022 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023

Indikator Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	83	83,85	101,02	Sangat Baik
BBPOM di Jakarta	89,00	91,89	103,25	Sangat Baik
BBPOM di Yogyakarta	84,00	87,86	104,60	Sangat Baik

Target indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu BBPOM Makassar, BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta pada angka yang berbeda, sementara target BBPOM Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan 2 Balai lainnya. Hasil realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu BBPOM Yogyakarta telah mencapai target dengan nilai 87,86 dan capaian 104,60 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM Jakarta dan BBPOM Makassar dengan kategori "Sangat Baik".



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Target BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Tahun 2023 dengan target Nasional Badan POM

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83	83	83,85	101,02	Sangat Baik

Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Tahun 2023 BBPOM di Makassar **telah mencapai** target Badan POM secara nasional, dengan nilai 83,85 dengan kategori "Sangat Baik".

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu kategori "Sangat Baik" antara lain:

Berdasarkan hasil survey kesadaran (*awareness*) masyarakat yang dilaksanakan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada Tahun 2023 secara nasional didapatkan bahwa nilai pengetahuan masyarakat adalah 89,32 (Baik); nilai sikap masyarakat adalah 88,16 (Baik) dan nilai perilaku masyarakat adalah 76,51 (Baik).

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam memilih obat dan makanan yang aman, namun perlu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan aman dan bermutu.

Hasil pengukuran indeks per komoditi adalah 1) Obat 87,12; 2) Obat Tradisional 83,19; 3) Suplemen Kesehatan 82,58; 4). Kosmetik 83,47; dan 5) Pangan Olahan 85,53. Indeks kesadaran masyarakat per komoditi seluruhnya berada pada kategori Baik.

Dari survey diketahui bahwa :

- pengetahuan masyarakat cenderung meningkat, terutama terkait variable kedaluwarsa dan informasi label tetapi perlu peningkatan pengetahuan terkait produk dengan NIE.
- Tingkat persepsi masyarakat terhadap informasi KLIK pada produk memiliki nilai yang tinggi (Sikap yang positif), hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap penting adanya infromasi yang terdapat pada produk.
- Perilaku masyarakat cenderung meningkat pada semua variable, tetapi perlu peningkatan pada perilaku membaca informasi pada label/kemasan produk.

Pengetahuan masyarakat tentang BPOM sebagai lembaga yang mengawasi Obat dan Makanan semakin meningkat dari Tahun ke Tahun. Tren ini menunjukkan bahwa program yang dilakukan oleh BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan semakin diketahui oleh masyarakat, terutama setelah terjadi pandemi Covid 19 maupun kejadian kejadian lain yang terjadi di masyarakat misalnya kasus EG DEG, dll.

Beberapa variabel yang ditanyakan saat survey kesadaran masyarakat antara lain adalah :

1) pengetahuan masyarakat terhadap obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Pertanyaan yang diajukan antara lain tentang :
   - pengetahuan masyarakat terkait logo obat,
   - pengetahuan masyarakat terkait makanan/minuman yang mengandung bahan berbahaya untuk dikonsumsi,
   - pengetahuan masyarakat terkait obat tradisional yang mengandung BKO,
   - pengetahuan masyarakat terkait kosmetik yang mengandung merkuri,
   - pengetahuan masyarakat terkait cara membuang sisa obat yang benar.
2) Dari hasil survey tersebut diketahui bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu misalnya dengan memperhatikan izin edar, kemasan dan tanggal kedaluwarsa. Namun masih banyak juga yang belum mengetahui produk yang tidak terdaftar di BPOM atau membeli produk yang memiliki NIE. Masyarakat telah memperhatikan bagaimana menyimpan produk dengan aman dan menggunakan sesuai petunjuk yang ada di label. Namun masih juga ditemui masyarakat yang belum mengetahui adanya produk Obat dan Makanan berbahaya yang beredar. Masyarakat juga tidak mengetahui logo obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter.
3) sikap masyarakat merupakan indikator pembentuk indeks kesadaran yang nilainya paling tinggi yaitu pengetahuan masyarakat 89,32 selanjutnya sikap masyarakat 88,16 dan yang paling rendah adalah faktor perilaku yaitu 76,51. Perubahan perilaku memang tidak dapat terjadi dalam jangka pendek. Karena itu harus ada upaya terus menerus untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat yang nantinya akan berdampak pada perilaku masyarakat terutama pada Membeli produk yang terdaftar di BPOM serta membaca informasi label/kemasan produk. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan BBPOM Makassar dalam melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat. Metode yang dipilih dan waktu pelaksanaan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan peningkatan perilaku masyarakat. Penggunaan media sosial meskipun dirasa paling efektif untuk beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu menyentuh semua segmen masyarakat. Masyarakat Sulawesi Selatan yang sebagian besar tinggal di pedesaan ternyata tidak banyak memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Pertemuan dan tatap muka secara langsung apalagi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama tetap mempunyai manfaat yang tidak dapat digantikan oleh media sosial. Karena itu BBPOM di Makassar tetap melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di Sulawesi selatan agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan yang aman dan bermutu.

Kendala : Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan publikasi melalui media secara umum lancar sesuai anggaran yang tersedia. Hanya saja masih ada beberapa daerah yang belum pernah mendapatkan paparan publikasi dari BBPOM Makassar.

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

BBPOM Makassar memanfaatkan semua komunitas yang telah dibentuk untuk menyebarkan infografis tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pada Triwulan IV Tahun 2023, BBPOM Makassar telah menyebarkan infografis melalui berbagai komunitas misalnya Pramuka, PKK, Pramuka SAKA, Asprindo, dll. Semua komunitas tersebut merupakan agent of Change BBPOM Makassar yang telah dibentuk dan mempunyai ikatan yang erat dengan BBPOM Makassar. Infografis yang disebarluaskan oleh BBPOM Makassar diharapkan menjadi dan menjadi counter informasi yang efektif untuk menangkal informasi yang menyesatkan (HOAX) yang banyak beredar di masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan sumber informasi dan hanya mempercayai informasi yang disampaikan oleh BBPOM Makassar.

f. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Makassar diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 83,85 % dengan capaian 101, 02 % pada tahun 2023. Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,01).

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Tahun 2023

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
101,02	44.478.000	44.476.140	100,00	1,01	0,01	Efisien

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu kategori belum Sangat Baik antara lain :

- Sampai dengan Tahun 2023 BBPOM Makassar tetap melakukan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) bersama tokoh masyarakat.
- Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan (Kotler & Keller, 2009) Konsep pengukurannya adalah Kesadaran (Awareness) bertujuan untuk menggali sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap keamanan produk Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi "pengetahuan" dari masyarakat. Ketertarikan (Interest) bertujuan untuk menggali ketertarikan masyarakat untuk mengetahui dan mempelajari tentang keamanan produk. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi "sikap" dari masyarakat. Keinginan (Desire)

bertujuan untuk menggali keinginan masyarakat untuk mendapatkan produk yang aman. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi "sikap" dari masyarakat. Tindakan (Action) bertujuan untuk menggali tindakan masyarakat saat memilih dan mengkonsumsi produk Obat dan Makanan dengan benar. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi "perilaku" dari masyarakat. Respondennya sebanyak 550 orang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan. Pencapaian indikator ini ditunjang oleh pengukuran diatas, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas KIE dan pengawasan obat dan makanan untuk mencapai kesadaran masyarakat terkait obat dan pangan aman.

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Perencanaan terhadap penyebaran informasi terkait obat dan makanan pada seluruh Lapisan Masyarakat.	Terlaksananya kegiatan KIE s.d. Bulan Desember diharapkan melalui edukasi ini mendorong terciptanya perilaku yang lebih baik terkait pemilihan/ penggunaan/ konsumsi produk obat dan makanan melalui upaya pembentukan perilaku yang lebih baik perlu difokuskan diantaranya menumbuhkan kebiasaan untuk membaca informasi yang tertera pada label dan membeli atau menggunakan produk yang memiliki nomor izin edar.			Belum akuratnya Perencanaan yang jelas terhadap penyebaran informasi terkait obat dan makanan pada seluruh Lapisan Masyarakat.	Perencanaan telah dibuat sesuai dengan kondisi lapangan dan petugas sehingga telah terlaksananya kegiatan KIE s.d. Bulan Desember.
2.	Meningkatkan sinergi dengan kementerian/lembaga/stakeholder, Meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan dengan cara memfokuskan tujuan dan tema KIE dengan mengacu pada pedoman strategi KIE;	Peningkatan sinergi dengan kementrian/Lembaga/stakeholder dimulai dengan pelaksanaan MOU dengan pemerintah kabupaten/ kota untuk tahun 2023 mou telah dilaksanakan penandatanganan PKS dengan : KPID Sulawesi Selatan IWAPI Sulawesi Selatan PD IAI Sulawesi Selatan PD PAFI Sulawesi Selatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alaudin Makassar Prodi Diploma III Sanitasi Poltekes Muhammadiyah Makassar Poltekes Kemenkes Makassar Dinas PTSP Kabupaten Pinrang Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan kab/kota pelaksanaan KIE melalui Dana DAK.	.		Belum maksimal terciptanya hubungan sinergi dengan kementerian/ lembaga/ stakeholder.	Telah terciptanya hubungan sinergi dengan kementerian/ lembaga/ stakeholder dengan MOU dan penandatanganan PKS serta kolaborasi dengan DinKes Kab/ kota dalam pelaksanaan KIE melalui Dana DAK.
3.	Penyampaian KIE dengan	Peningkatan efektivitas KIE tahun			Masyarakat	Masyarakat mulai

	memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat, media penyampaian yang tepat dan target penerima KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target audience seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah; Mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing- masing misalnya KIE dengan menggunakan bahasa daerah; melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi dan komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, dsb);	2023 KIE Bersama Tokoh Masyarakat anggota Komisi IX DPR RI dilaksanakan sebanyak 55 titik dan Penyebaran Informasi produk obat dan makanan Bersama organisasi kemasyarakatan dengan total peserta 28.704.			belum sepenuhnya terpapar obat dan makanan yang aman.	terpapar obat dan makanan aman berdasarkan survei kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan aman realisasi 101,02% dengan kategori sangat baik.
4.	Menggunakan media yang banyak diakses masyarakat yakni media televisi, kemasan produk dengan cara pencantuman Nomor Izin Edar (NIE) yang lebih jelas dan mudah terlihat serta mencantumkan logo BPOM pada kemasan, media sosial disesuaikan dengan usia dan platform media sosial, serta media luar ruang; Menggencarkan promosi penggunaan tagline cek KLIK, Kata BPOM dan BPOM Mobile melalui berbagai media.	Tag line "Kata BPOM" dan "Cek Klik" melalui perlengkapan peserta yang mengikuti kegiatan KIE/penyuluhan termasuk melalui sosial media dan videotron.			Tidak rutinnya penggunaan Tag line "Kata BPOM" dan "Cek Klik" melalui perlengkapan peserta yang mengikuti kegiatan KIE/penyuluhan termasuk melalui sosial media dan videotron.	Selalu menggunakan Tag line "Kata BPOM" dan "Cek Klik" melalui perlengkapan peserta yang mengikuti kegiatan KIE/penyuluhan termasuk melalui sosial media dan videotron.
5.	Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat seperti pengenalan logo obat pada kemasan dan membaca informasi pada label produk Obat dan Makanan.	Penyusunan materi KIE untuk komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetika dan pangan olahan.			Penyusunan materi secara umum sesuai dengan target peserta KIE.	Penyusunan materi secara detail dan lengkap yang mencakup komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetika dan pangan olahan sesuai dengan target peserta KIE.
6.	Melakukan pembaharuan website BPOM agar lebih menarik dan user friendly bagi masyarakat, diantaranya meningkatkan kualitas informasi, cara penyajian informasi dan tampilan website.	Tampilan website makassar.pom.go.id telah dilakukan peningkatan kualitas dan pembaruan informasi.			Belum dilakukan peningkatan kualitas dan pembaharuan informasi tampilan website.	Telah dilakukan dilakukan peningkatan kualitas dan pembaharuan informasi tampilan website.

7.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program permberdayaan masyarakat dan tindak lanjut hasil dan rekomendasi peningkatan kesadaran tahun sebelumnya.	Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin terhadap program permberdayaan masyarakat dan tindak lanjut hasil dan rekomendasi peningkatan kesadaran tahun sebelumnya.			Belum dilakukan Monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap program permberdayaan masyarakat dan tindak lanjut hasil dan rekomendasi peningkatan kesadaran tahun sebelumnya.	Telah dilakukan Monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap program permberdayaan masyarakat dan tindak lanjut hasil dan rekomendasi peningkatan kesadaran tahun sebelumnya.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market.

- Capaian kinerja terkait Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas reviuw Rencana Strategis tahun 2020-2024, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi publik terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi kinerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional.
- Penacapain kinerja untuk indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.





Sasaran 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Capaian indkator Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar adalah sebagai berikut :

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
Target 87,00 Realisasi 97,60 Capaian 114,02

Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
Target 80 Realisasi 77,96 Capaian 99,31

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar
Target 94,00 Realisasi 94,90 Capaian 101,50



1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM

Aspek Pengukuran

1). **Aspek bimbingan dan pembinaan**
2). **Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan**
3). **Aspek penanganan saran dan masukan**
4). **Aspek manfaat**
5). **Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.**
6). **Aspek pengetahuan dan pemahaman**

Kepuasan adalah perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan (Kotler, 1997).

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance)

Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP) terhadap pelaku usaha adalah bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan regulasi (*regulatory assistance*).

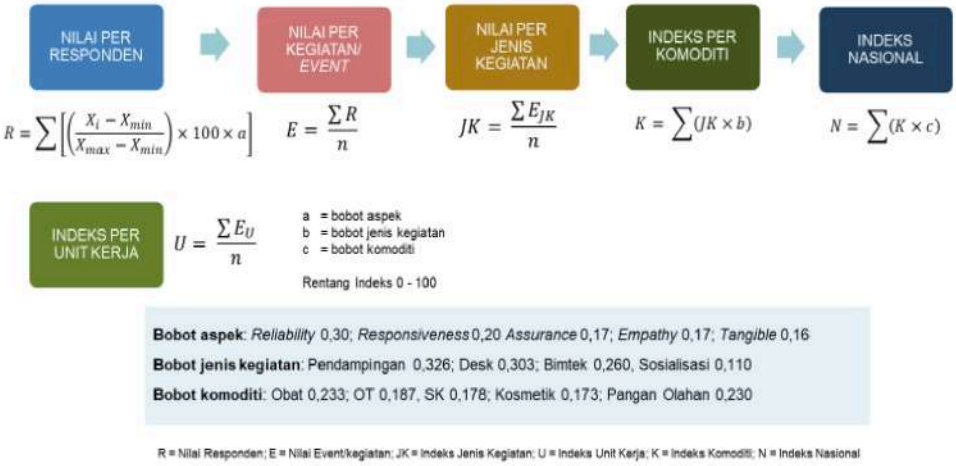
Jenis KBP (Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan) dikelompokkan menjadi :

- Pendampingan
  Layanan KBP (Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan) yang dilakukan terhadap pelaku usaha secara intensif dalam serangkaian aktivitas tatap muka langsung atau online dan/atau kunjungan lapangan, individual, serta berdampak langsung terhadap proses perizinan/ sertifikasi yang sedang dijalani pelaku usaha.
- Desk
  Layanan KBP (Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan) yang dilakukan terhadap pelaku usaha secara intensif, individual, tatap muka secara langsung atau online, dan berdampak langsung terhadap proses perizinan / sertifikasi yang sedang dijalani pelaku usaha.
- Bimbingan Teknis
  Layanan KBP (Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan) yang dilakukan terhadap beberapa pelaku usaha dalam jumlah tertentu atau kelompok dengan materi bimbingan umumnya bersifat teknis untuk membantu mengatasi masalah yang sama.
- Sosialisasi.
  Layanan KBP (Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan) yang dilakukan kepada pelaku usaha secara luas dengan peserta relatif banyak biasanya mengenai isu terbaru, dan keikutsertaannya lebih bersifat sukarela

Pelaku usahayang dimaksud meliputi: Produsen, Distributor, Importir, Eksportir, Pelayanan (Apotek, RS, dll.), Lainnya (ritel, stockiest, depot dll.)
Pengukuran kepuasan mengacu pada konsep *Service Quality* (ServQual).
Kepuasan terdiri dari 5 aspek: *Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, & Responsiveness.*
Survei terdiri dari 10 pertanyaan yang mewakili tiap aspek, menggunakan skala Likert 1-4 dalam bentuk simbol bintang.
Survei dilakukan secara online (***surveiprkom.pom.go.id***)saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha.
Skala Kepuasan:

- Tidak Puas (0 -25)
- Kurang Puas (26 -50)
- Puas (51 -75)
- Sangat Puas (76 -100)

Rumusan Perhitungan Indeks



a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase Capaian indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan pada Tahun 2022 adalah 114,02 % dengan realisasi sebesar 97,60 % Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan **diatas dari target 87** yang ditentukan dengan kategori **"Sangat Baik"** .

Tabel 3.40

Target Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,6	97,60	114,02	Sangat Baik

Metodologi pengukuran menggunakan kerangka teori *Customer Satisfaction* dan konsep *Service Quality* (ServQual) meliputi aspek *reliability*, *assurance*, *responsiveness*, *empathy*, dan *tangible*. Pertanyaan kuesioner terdiri atas data diri responden, 10 pertanyaan inti, dan saran/masukan. Jawaban pertanyaan menggunakan skala Likert 1-4 yang kemudian dikonversi menjadi indeks skala 0-100 dengan kategori kepuasan sebagai berikut: 0-25 (Tidak Puas), 26-50 (Kurang Puas), 75-100 (Sangat Puas). Survei dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi berbasis *web* dan juga terhubung dengan BPOM *Operation Center* (BOC). Penghitungan indeks dilakukan secara berjenjang dengan mengikutsertakan bobot aspek kepuasan, jenis kegiatan, dan komoditi.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	83	82,50	99,40	Cukup
Tahun 2021	83,5	87,30	104,55	Sangat Baik
Tahun 2022	84,60	90,60	107,09	Sangat Baik
Tahun 2023	85,6	97,60	114,02	Sangat Baik

Terdapat peningkatan realisasi indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 dibanding tahun 2020 dari nilai 82,50 menjadi 87,30 capaiannya mengalami peningkatan 4,8 point, pada kategori Sangat Baik. Tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 berada pada angka 90,60 lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2021 dengan nilai 87,30 mengalami peningkatan 3,3 point kategori "Sangat Baik". Tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Tahun 2023 berada pada angka 97,60 lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2022 dengan nilai 90,60 mengalami peningkatan 7 point kategori "Sangat Baik".

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori capaian terhadap Tahun 2024
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	**85,6**	**87**	**97,60**	**112,18**	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Indeks Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra Tahun 2024, serta capaian yang diperoleh kategori Sangat Baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra Tahun 2024 dapat dipertahankan pada kategori Sangat Baik.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

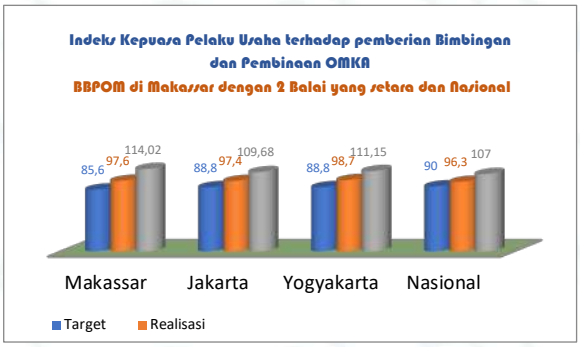
Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini.

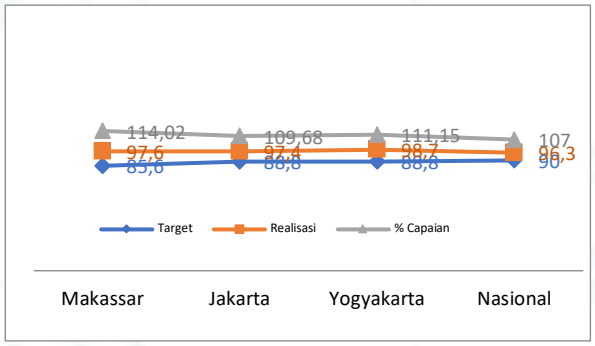
Tabel 3.7
Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023

Indikator Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	85,6	97,60	114,02	Sangat Baik
BBPOM di Jakarta	88,80	97,4	109,68	Sangat Baik
BBPOM di Yogyakarta	88,80	98,70	111,15	Sangat Baik
Nasional	90	96,3	107,0	Sangat Baik

Hasil Nasional tahun 2023 adalah 96,3 (Sangat Puas) atau capaian target sebesar 107,0 %. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha per komoditi yaitu: (1) Obat 96,3, (2) Obat Tradisional 95,9, (3) Suplemen Kesehatan 95,7, (4) Kosmetik 96,5, dan (5) Pangan Olahan 96,5.

Target kinerja indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Makassar, BBPOM Jakarta, BBPOM Yogyakarta dan Nasional masing-masing berada pada angka yang berbeda, adapun hasil capaian realisasi kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM Makassar dengan nilai 114,02 tertinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta, serta capaian BBPOM di Makassar lebih tinggi dibandingkan dengan Capaian Nasional. Berikut ini perbandingan capaian indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta serta Nasional Tahun 2023 sebagai berikut:





Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Target BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan target Nasional Badan POM

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,60	90	97,60	108,44	Sangat Baik

Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022 BBPOM di Makassar **telah mencapai** target Badan POM secara nasional, dengan nilai 108,44 % dengan kategori "Sangat Baik".

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan kategori "Sangat Baik" antara lain:

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) dilakukan memalui survei dengan mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BBPOM Makassar dalam 4 kategori jenis kegiatan berupa pendampingan, desk, bimbingan teknis dan sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan kefarmasian.

Metodologi pengukuran menggunakan kerangka teori customer statisfaction dan konsep service Quality (ServQual) meliputi aspek *realibility, assurance, responsiveness, empathy* dan *tangible*. Pertanyaan kuesioner terdiri atas data diri

responden, 10 pertanyaan inti dan saran/masukan. Jawaban pertanyaan menggunakan skala Likert 1-4 yang kemudian dikonversi menjadi indeks skala 0-100, survei dilakukan secara online menggunakan aplikasi berbasis web dan juga terhubung dengan BPOM Operation Center (BOC). Perhitungan dilakukan secara berjenjang dengan mengikutsertakan bobot aspek kepuasan, jenis kegiatan dan komoditi.

Adapun jumlah KBP (Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan) di BBPOM Makassar adalah sebanyak 6 kali dengan jumlah 78 responden. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Nasional adalah 96,3 (Sangat Puas) atau capaian target 107,0 sedangkan Indeks kepuasan pelaku usaha per komoditi sebagai berikut :

- Obat = 96,30 %
- Obat Tadisional = 95,90 %
- Suplemen Kesehatan = 95,70 %
- Kosmetik = 96,50 %
- Pangan Olahan = 96,50 %

BBPOM di Makassar selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan prima. Terhadap pelaku usaha yang diberikan layanan dalam rangka membantu pemenuhan terhadap regulasi, berupa kegiatan pendampingan, desk, bimbingan teknis dan sosialisasi, dan telah dibuatkan inovasi inovasi yang menunjang pelayanan publik serta meningkatkan ekspektasi dari pelaku usaha. Untuk Tahun 2023 dengan kategori Sangat Baik.

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Sampai dengan Tahun 2023 BBPOM di Makassar telah memberikan 6 KBP (Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan).

1. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindaklanjut atas hasil survei maupun hasil pengukuran indeks.
2. Menindaklanjuti saran/ masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BPOM.
3. Melakukan identifikasi/ pemetaan responden survei IKEPU untuk meminimalkan irisan dengan surveilainnya.
4. Melakukan inovasi atau perbaikan untuk mengatasi isu kecukupan waktu , layanan pasca KBP, video/ infografis materi, media komunikasi dengan pelaku usaha, teknik komunikasi sesuai karakteristik pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat literasi, dan cakupan pelaku usaha yang mendapatkan KBP.

f. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 97,60 % dengan capaian 107,09 % pada tahun 2023. Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,07) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 114,02 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 94,75 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
114,02	215.912.000	204.585.528	94,75	1,20	0,20	Efisien

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu kategori belum Sangat Baik antara lain :

- Sampai dengan Tahun 2023 BBPOM Makassar tetap melakukan Kegiatan bimbingan dan pembinaan yang dilakukan BBPOM di Makassar sampai dengan triwulan ke IV meliputi Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan *Desk Consultation* Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) untuk UMK Pangan Olahan dalam rangka Pedang Puang Baso' yaitu pendampingan UMK Pangan Olahan.
- Pendampingan UMKM obat tradisional yang meliputi bimbingan teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap (CPOTB Bertahap) untuk UKOT dan UMOT, *Desk Consultation* denah dan penyelesaian temuan pemeriksaan sarana (CAPA). Pendampingan bagi UMKM kosmetik juga telah dilakukan melalui inovasi Jatim Glowing dengan berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), *Desk Consultation* denah dan penyelesaian temuan pemeriksaan sarana (CAPA). Untuk mendukung percepatan penerbitan ijin edar maka Balai Besar POM di Makassar bekerja sama dengan Direktorat Pangan Olahan Badan POM menyelenggarakan *Desk* Registrasi Pangan Olahan. Kegiatan pendampingan sangat bermanfaat bagi pelaku usaha untuk memahami proses bisnis di Badan POM terkait penerbitan izin edar obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan.
- Program yang menunjang keberhasilan kinerja adalah intensitas dan frekuensi bimbingan dan pembinaan yang diberikan terhadap pelaku usaha. Untuk kegiatan pendampingan dan desk, pelaku usaha akan lebih puas jika didampingi secara personal. Sedangkan untuk kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi, pelaku usaha perlu diingatkan sesering mungkin untuk partisipasinya mengisi survei.

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Mengoptimalkan layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui whatsapp dan SMS.	Meningkatkan frekuensi layanan informasi konsumen melalui whatsapp, SMS.			Belum optimalnya layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui whatsapp dan SMS	Meningkatnya frekuensi layanan informasi konsumen melalui whatsapp, SMS.

2.	Meningkatkan inovasi-inovasi berupa materi kegiatan bimbingan dan pembinaan yang benar-benar berdampak secara langsung terhadap percepatan pemenuhan kebutuhan perijinan/ sertifikasi dari pelaku usaha serta meningkatkan *awareness* dan efektifitas survei yang dilakukan terhadap kelancaran penyelenggaraan survei indeks kepuasan pelaku usaha.	Pemberian bimbingan teknis kepada pelaku usaha.			Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala. Menyiapkan survei paperbased bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi survei online.	Nilai indeks kepuasan pelaku usaha tercapai dengan capaian 114,02%.
	Kendala : Tidak semua peserta mengisi survei kepuasan pelaku usaha sehingga hasil yang diperoleh tidak mencerminkan seluruh peserta terutama untuk kegiatan secara daring (online) dan pelaku usaha UMK.					

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas reviuw Rencana Strategis tahun 2020-2024, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan pada lingkup pengawasan

Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional

- Penacapain kinerja untuk indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.



2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM

Indikator Pembentuk

- ***tangibles,***
- ***realibility,***
- ***responsiveness,***
- ***assurance dan***
- ***emphaty***

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 indikator yaitu *tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty*.

Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 pengukuran indeks:

- Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 pada tingkat nasional diperoleh nilai 80,45 (Kategori Puas) dengan target yaitu 80 (100,57%). Realisasi indeks kepuasan masyarakat tahun ini telah mencapai target dengan peningkatan sebesar 4,07 poin dari tahun 2022 yaitu 76,39. Hasil kepuasan per komoditi adalah 1) Obat 81,19; 2) Obat Tradisional 79,69; 3) Suplemen Kesehatan 79,93; 4) Kosmetik 80,07; Pangan Olahan 80,67. Keseluruhan indeks kepuasan berdasarkan komoditi membentuk indeks nasional dengan kategori Puas.

Berdasarkan variabel pembentuk indeks maka kepuasan terhadap tindakan BPOM merupakan nilai variabel yang tertinggi, sedangkan variabel dengan nilai yang terendah adalah pemberian informasi terkait keamanan dan mutu produk yang dilakukan oleh BPOM.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase Capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan pada Tahun 2023 adalah 99,31 % dengan realisasi sebesar 77,96 % Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan **dibawah dari target** yang dietentukan dengan kategori **"Cukup" .**

Tabel 3.33

Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,5	77,96	99,31	Cukup

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	69	73,94	107,16	Sangat Baik
Tahun 2021	75,50	70,84	93,83	Cukup
Tahun 2022	77	73,84	95,90	Cukup
Tahun 2023	78,5	77,96	99,31	Cukup

Perbandingan target realisasi kinerja indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Makassar untuk tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Terdapat penurunan indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 dibanding tahun 2020 dari nilai 73,94 menjadi 70,84 capaiannya mengalami penurunan 3,1 point, pada kategori "Belum Sangat Baik" , sedangkan tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 berada pada angka 73,84 lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2021 dengan

nilai 70,84 kategori "Belum Sangat Baik". Tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Tahun 2023 berada pada angka 77,96 lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2022 dengan nilai 73,84 kategori "Cukup".

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,5	80	77,96	97,45	Akan Tercapai

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra Tahun 2024, serta capaian yang diperoleh kategori Akan Tercapai. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra Tahun 2024 dapat ditingkatkan menjadi kategori Tercapai/Melampaui.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

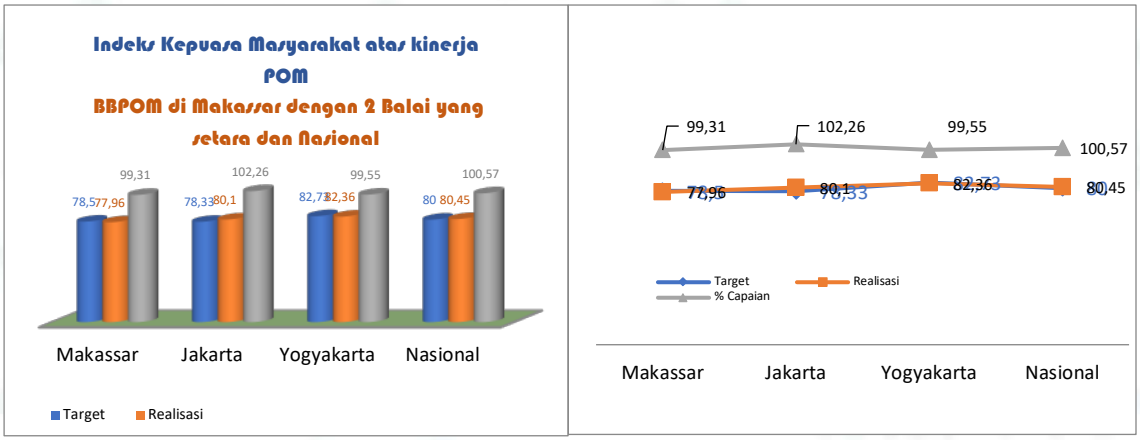
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	78,5	77,96	99,31	Cukup
BBPOM di Jakarta	78,33	80,1	102,26	Sangat Baik
BBPOM di Yogyakarta	82,73	82,36	99,55	Cukup
Nasional	80	80,45	100,57	Sangat Baik

Target indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Makassar, BBPOM Jakarta, BBPOM Yogyakarta dan Nasional masing-masing berada pada angka yang berbeda. Hasil capaian Indeks

Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Yogyakarta, BBPOM Jakarta dan Nasional telah mencapai target dengan nilai masing-masing 82,36 kategori "Cukup", 80,1 kategori "Sangat Baik" dan 80,45 kategori "Sangat Baik" apabila dibandingkan dengan BBPOM di Makassar dengan nilai 77,96 kategori "Cukup", dengan capaian terendah adalah BBPOM di Makassar dengan capaian 99,31 % sementara persentase capaian tertinggi adalah BBPOM di Jakarta dengan capaian 102,26 %.



Gambar 3.3
Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023

e. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Target BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan target Nasional Badan POM

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,5	80	77,96	97,45	Cukup

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 BBPOM di Makassar **belum mencapai** target Badan POM secara nasional, dengan nilai 77,96 dan Capaian 97,45 % dengan kategori "Cukup".

f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan kategori "Cukup" antara lain:

a. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan cenderung fluktuatif, dimana Tahun 2021 mengalami penurunan untuk semua komoditi. Sementara Indeks kepuasan untuk semua kategori produk mengalami kenaikan di Tahun 2022 (+/-8 poin) dan di tahun 2023 Indeks kepuasan untuk semua kategori produk mengalami kenaikan (4,12 poin).
b. Berdasarkan evaluasi Badan POM Indeks Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan pada Tahun 2023 adalah 77,96% Perhitungan indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan evaluasi Badan POM. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan Indeks Kesadaran Masyarakat dari tahun 2022.
c. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 pada tingkat nasional sebesar 80,45 (Kategori Puas) dengan target yaitu 80 (100,57%), nilai ini mengalami peningkatan dari Tahun 2022 yaitu sebesar 4,07 poin (76,39).
d. Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM terhadap Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan :
    - Kepuasan terhadap upaya pengawasan BPOM
    - Kepuasan terhadap tindakan BPOM
    - Kepuasan terhadap kemampuan BPOM melindungi masyarakat
    - Kepuasan terhadap perhatiannya BPOM atas jaminan keamanan Obat dan Makanan
e. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM berdasarkan 5 (lima) komoditi
    - Obat dengan nilai sebesar 81,19 kategori Puas.
    - Obat Tradisional dengan nilai sebesar 79,69 kategori Puas.
    - Suplemen Kesehatan dengan nilai sebesar 79,93 kategori Puas.
    - Kosmetik dengan nilai sebesar 80,07 kategori Puas.
    - Pangan Olahan dengan nilai sebesar 80,67 Puas.

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan BPOM melalui kegiatan public relation dan publikasi (liputan media massa) berbagai aktivitas BBPOM di Makassar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seprti Razia Obat dan Makananyang kedaluarsa, tidak memiliki Izin Edar dan produk illegal. Pesan/tema utama yang disampaikan adalah BPOM melindungi Masyarakat.
- Intensifikasi Program KIE kepada masyarakat dalam bentuk program yang lebih dipahami oleh masyarakat
- Mensosialisasikan hasil pengawasan secara inovatif sesuai dengan keunikan daerah masing-masing sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. BPOM dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat pada program pengabdian masyarakat
- Konsisten memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penindakan produk-produk yang berbahaya
- Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk sosialisasi hasil pengawasan kepada masyarakat untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat
- Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil dan rekomendasi pengukuran indeks
- Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kinerja pengawasan di Tahun mendatang

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang pencapaian capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan antara lain :

- BBPOM di Makassar sebagi narasumber telah memberikan informasi/ sosialisasi/ bimbingan teknis, adapun topik yang disampaikan antara lain Pelatihan keamanan pangan, Tata Cara Registrasi Pangan, Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, sosialisasi strategi peningkatan kompetensi bagi pelaku usaha, Pembinaan Sarana Kefarmasian, Bimbingan Teknis dan Pengembangan Sarana Standar Pengawasan Mutu Ijin Edar Produk Makanan dan Minuman, , dan materi materi lain yang dibutuhkan oleh lintas sektor.
- Intensifikasi Program KIE kepada masyarakat dalam bentuk program yang lebih dipahami oleh masyarakat
- Konsisten memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penindakan produk-produk yang berbahaya
  Antara lain informasi melalui media cetak dan elktronik terkait operasi penindakan terhadap sarana illegal yang memproduksi dan mengedarkan komoditi seperti obat, kosmetik, suplemen Kesehatan dan obat tradisional dimana pada triwulan I Tahun 2022 operasi penindakan yang ditemukan dari produk sebanyak 724 jenis dengan total 66.100 pieces, nilai ekonomis barang temuan mencapai Rp 1,632 M, kegiatan ini adalah bentuk perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan penyalahgunaan Obat dan Makanan.
- Sampai dengan Tahun 2023 telah dilakukan 10 kali kegiatan Penyebaran Informasi bersama stakeholder/lintas sektor antara lain Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi, Dinas Kesehatan Kab Jeneponto, Dinas PTSP Kabupaten Jeneponto, Kesyahbandaran Utama Makassar Kementerian Perhubungan, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan. Topik yang disampaikan antara lain rencana aksi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika (P4GN) edukasi kepada seluruh karyawan untuk menjaga keluarga dari penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Dinas Kesehatan terhadap Produk UMK Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik di Kabupaten Jeneponto, Kegiatan Car Free Day serta Penyebaran Informasi Obat dan Makanan bersama Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan dan materi materi lain yang dibutuhkan oleh lintas sektor.
- Pengukuran indeks kepuasan masyarakat menyadur konsep pengukuran kepuasan pelanggan atau konsumen terhadap kualitas layanan. Menurut Tjiptono (2011:157), kualitas layanan itu sendiri ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Parasuraman mengemukakan bahwa perwujudan kepuasan pengguna layanan dapat di identifikasikan menjadi 5 dimensi kualitas layanan menurut Zeintahml, Pasuraman & Berry yang dikenal dengan Servqual (service quality). Servqual adalah alat yang digunakan untuk mengukur persepsi dan harapan pelanggan serta kesenjangan yang ada dalam model kualitas jasa. Metode ini mengukur kualitas secara kuantitatif dalam bentuk kuesioner yang mengandung dimensi-dimensi kualitas jasa, yaitu Tangibles, Reability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy yang dapat digambarkan seperti pada Aspek Tangibles (Berwujud), Bukti konkret kemampuan untuk menampilkan yang terbaik bagi masyarakat. Baik dari sisi fisik tampilan bangunan perkantoran, fasilitas, perlengkapan teknologi pendukung (kualitas pelayanan nyang berupa tampilan bukti fisik). Aspek Reliability (Kehandalan), Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen terkait kecepatan, ketepatan waktu, tidak ada kesalahan, sikap simpatik, dan lain sebagainya (kemampuan kehandalan dalam mewujudkan janji). Aspek Responsiveness (Respon Ketanggapan), Tanggap memberikan pelayanan yang cepat atau responsif serta diiringi dengan cara penyampaian yang jelas dan mudah dimengerti (ketanggapan dalam memberikan layanan). Aspek Assurance (Jaminan), Jaminan dan kepastian yang diperoleh dari sikap

sopan santun karyawan, komunikasi yang baik, dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya pelanggan. (kemampuan untuk memberikan jaminan dan kepastian). Aspek Emphaty (Empati), Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi kepada pelanggan, hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan konsumen secara akurat dan spesifik (kemampuan memahami kebutuhan pelangan). Pencapaian indikator ini ditunjang oleh pengukuran diatas, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas KIE dan pengawasan obat dan makanan untuk mencapai Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan.

g. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 77,96 % dengan capaian 99,31 % pada tahun 2023. Indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,34).

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
99,31	38.940.000	28.950.000	74,35	1,34	0,34	Efisien

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Aktif memberikan informasi kepada masyarakat terutama terkait bahaya produk illegal (tidak memiliki izin edar) terhadap dampak kesehatan jangka panjang melalui Televisi, Radio dan Media sosial sehingga memberikan pesan BPOM konsisten melindungi masyarakat.	Mengoptimalkan layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui whatsapp, SMS, telepon maupun media sosial sehingga lebih memperluas jaringan informasi ke masyarakat, serta Membuat infografis yang lebih inovatif, kreatif dan tersebar secara massif.			Masyarakat belum sepenuhnya paham tupoksi dan kinerja BBPOM di makassar.	Masyarakat mulai paham tupoksi dan kinerja BBPOM di Makassar.
2.	Membangun komunikasi yang efektif antara petugas sertifikasi dan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran	Adanya bimbingan dan komunikasi yang efektif antara petugas sertifikasi dan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran			Pelaku usaha belum sepenuhnya paham persyaratan pendaftaran produk.	Pelaku usaha mulai paham tata cara pemenuhan persyaratan pendaftaran produk.

	produk.	produk.				
3.	Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tata cara dan persyaratan pendaftaran produk melalui sistem yang telah terintegrasi di OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)	Melalui inovasi Pedang Puang Basok, Telah Dilaksanakan pendampingan dalam proses pengajuan izin usaha melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) pada kegiatan Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan.	.		Pelaku usaha belum sepenuhnya paham persyaratan pendaftaran produk melalui sistem yang telah terintegrasi di OSS RBA.	Pelaku usaha mulai paham tata cara pemenuhan persyaratan pendaftaran produk pada sistem yang telah terintegrasi di OSS RBA.
4.	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan BPOM melalui kegiatan *public relation* dan publikasi (liputan media massa) berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti razia Obat dan Makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal. Pesan/tema utama yang disampaikan adalah BPOM melindungi masyarakat.	Publikasi kinerja BBPOM di Makassar dalam kegiatan KIE/Penyuluhan dengan diawali dengan materi Profil Balai Besar POM di Makassar serta publikasi kinerja melalui sosial media dan subsite BBPOM di Makassar.			Belum rutinnya publikasi kinerja BPOM dalam kegiatan . KIE/Penyuluhan dengan diawali dengan materi Profil Balai Besar POM di Makassar serta publikasi kinerja melalui sosial media dan subsite BBPOM di Makassar.	Publikasi Kinerja BBPOM Makassar dalam kegiatan KIE/Penyuluhan dan Sosial Media/Subsite sudah diawali dengan materi Profil BBPOM di Makassar.
5.	Intesifikasi program KIE kepada masyarakat dengan bentuk program yang lebih dipahami oleh masyarakat.	Materi cegah tangkal obat dan makanan dalam inovasi Molkika +.			Masyarakat belum sepenuhnya paham tupoksi dan kinerja BBPOM di makassar.	Masyarakat mulai paham tupoksi dan kinerja BBPOM di Makassar.
6.	Mendorong UPT di daerah untuk mensosialisasikan hasil pengawasan secara inovatif sesuai dengan keunikan daerah masing masing sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. BPOM dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi Ilmu Kesehatan setempat pada program	Mengikuti pameran dalam sulsel expo yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus – 3 september untuk publikasi kinerja BBPOM di makassar.			Belum mengikuti pameran dalam sulsel expo untuk publikasi kinerja BBPOM di makassar.	Telah mengikuti pameran dalam sulsel expo yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus – 3 september untuk publikasi kinerja BBPOM di makassar.

	pengabdian masyarakat. Konsisten memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penindakan produk-produk yang berbahaya.					
7.	Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk sosialisasi hasil pengawasan kepada masyarakat untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	Mengoptimalkan layanan informasi melalui whatsapp, SMS, telepon maupun media sosial sehingga lebih memperluas jaringan informasi ke masyarakat, serta Membuat infografis yang lebih inovatif, kreatif dan tersebar secara massif.			Belum optimalnya layanan informasi melalui whatsapp, SMS, telepon maupun media sosial sehingga lebih memperluas jaringan informasi ke masyarakat, serta Membuat infografis yang lebih inovatif, kreatif dan tersebar secara massif.	Meningkatnya layanan informasi melalui whatsapp, SMS, telepon maupun media sosial sehingga lebih memperluas jaringan informasi ke masyarakat, serta Membuat infografis yang lebih inovatif, kreatif dan tersebar secara massif.

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas reviuw Rencana Strategis tahun 2020-2024, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan.
- Hasil informasi kinerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Penacapain kinerja untuk indikator Persentase obat yang memenuhi syarat serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Acuan

Peratuan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini Permen PAN No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Makassar terhadap penerima layanan informasi, penerima layanan Surat Keterangan Impor/Ekspor (SKI/SKE), dan penerima layanan pengujian sampel pihak ketiga (lintas sektor). Data hasil survei diolah oleh Inspektorat Utama melalui aplikasi SAPA APIP.

Pada triwulan IV Tahun 2022, telah diperoleh hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dari aplikasi SAPA APIP sebesar 91,90. Data ini diperoleh pada akhir triwulan III dan tidak berubah sampai akhir Tahun 2022 dengan kategori Belum Sangat Baik.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Makassar pada Tahun 2023 adalah 101,50 % dengan realisasi sebesar 94,90 % Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Makassar **di atas dari target** yang dietentukan dengan kategori **"Sangat Baik" .**

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	93,50	94,90	101,50	Sangat Baik

Pada Tahun 2023, target dan capaian dihitung Tahunan untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM. Pada triwulan pertama hingga ketiga Tahun 2023 belum ada realisasi untuk indikator ini, dimana target akhir Tahun 2023 adalah 93,50.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	89	93,31	104,84	Sangat Baik
Tahun 2021	90	92,04	102,27	Sangat Baik
Tahun 2022	93	91,90	98,82	Cukup
Tahun 2023	93,50	94,90	101,50	Sangat Baik

Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik untuk tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Terdapat penurunan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik tahun 2021 dibanding tahun 2020 dari nilai 104,84 menjadi 102,27 capaiannya mengalami penurunan 2,57 point, pada kategori "Sangat Baik". Tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 berada pada angka 91,90 kategori "Belum Sangat Baik" lebih rendah apabila dibandingkan Tahun 2021 dengan nilai 92,04 kategori "Sangat Baik". Tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Tahun 2023 berada pada angka 94,90 kategori "Sangat Baik" lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2022 dengan nilai 91,90 kategori "Belum Sangat Baik".

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	93,50	94	94,90	100,95	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar Tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra Tahun 2024, serta capaian yang diperoleh kategori Tercapai/ Melampaui. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra Tahun 2024 dapat dipertahankan kategori Tercapai/ Melampaui.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

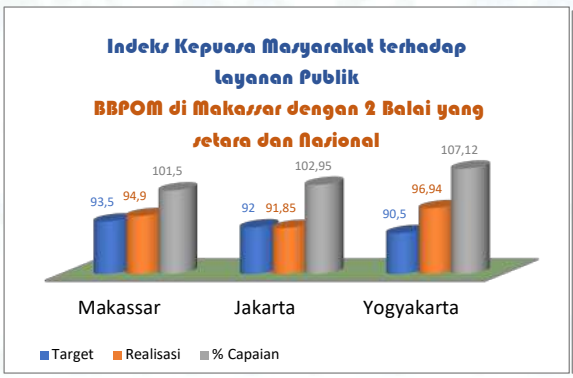
Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

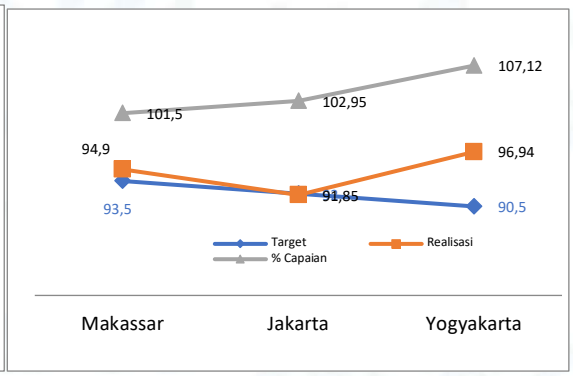
Tabel 3.7
Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	93,50	94,90	101,50	Sangat Baik
BBPOM di Jakarta	92,00	91,85	102,95	Sangat Baik
BBPOM di Yogyakarta	90,50	96,94	107,12	Sangat Baik

Target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM Yogyakarta, BBPOM di Jakarta dan BBPOM Makassar memiliki angka yang berbeda. Hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada BBPOM Makassar telah mencapai target dengan nilai 94,90 serta untuk BBPOM Jakarta, BBPOM Bandung dan BBPOM Yogyakarta telah mencapai target dengan realisasi 91,85 dan 96,94. Persentase capaian tertinggi adalah BBPOM di Yogyakarta dengan capaian 107,12 lebih tinggi dibandingkan BBPOM Jakarta dan BBPOM Makassar dengan kategori "Sangat Baik".

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut :





Gambar 3.3
Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023

e. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Target BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik B BPOM di Makassar Tahun 2022 dengan target Nasional Badan POM

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	93,50	90,35	94,90	105,03	Sangat Baik

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2023 BBPOM di Makassar **telah mencapai** target Badan POM secara nasional, dengan nilai 94,90 dengan kategori "Sangat Baik".

f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM kategori "Sangat Baik" antara lain:

Berdasarkan evaluasi Mandiri BBPOM di Makassar Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Makassar pada Tahun 2023 adalah 94,90%. Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik diukur berdasarkan 9 unsur pelayanan terhadap 9 jenis layanan publik BBPOM di Makassar.

- Tahun 2023, layanan tatap muka mulai dilakukan secara penuh dan para pelaku usaha mulai memanfaatkan layanan ini dengan datang langsung ke kantor BBPOM Makassar dan para petugas pemberi layanan publik dapat memberikan layanan.
- Telah disediakan nomor whatsapp khusus untuk konsultasi SKI/SKE dan konsultasi denah sarana produksi.
- Kurangnya minat pengguna layanan untuk meluangkan waktu dalam mengisi survei disamping itu kurangnya pemahaman pengguna layanan terhadap narasi yang dimasud dalam survei.
- Kurangnya pemahaman pengguna layanan terhadap standar pelayanan publik UPP BBPOM di Makassar

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sinergi degan kementrian/Lembaga/stakeholder antara lain dengan :
   - Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkolaborasi dalam upaya mempublikasikan program BPOM dan mendesiminasikan materi terkait keamanan Obat dan Makanan, antara lain melalui TV dan Radio.
   - Kementrian Dalam Negeri : bekerjasama dalam memberdayakan masyarakat terkait Keamanan Obat dan Makanan diantaranya melalui penggerakan Posyandu.
   - Kementrian Kesehatan : berkolaborasi untuk menyebarkan informasi keamanan Obat melalui sarana layanan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, dll).
   - Kementrian Pendidikan : bekerjasama untuk mendesiminasikan materi KIE melalui kurikulum mata pelajaran atau melalui ekstra kurikuler.
2. Meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan dengan cara :
   - Memfokuskan tujuan dan tema KIE dengan mengacu pada pedoman strategi KIE;
   - Menyampaikan KIE dengan memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat, media penyampaian yang tepat dan target penerima KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target audience seperti gender, usia Pendidikan dan cakupan wilayah;
   - Mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing, misalnya KIE dengan menggunakan Bahasa daerah;
   - Melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tohoh agama/organisasi dan komunitas masyarakat (PKK,POsyandu, dsb);
   - Menggunkan media yang banyak diakses masyarakat yakni media televisi, kemasan produk dengan pencantuman logo BPOM pada kemasan , media social disesuaikan dengan usia dan platform media social serta media luar ruang.
3. Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi Kesehatan masyarakat seperti pengenalan logo obat pada kemasan Obat sebagai penanda klasifikasi Obat dan membaca informasi yang tertera pada label produk Obat dan Makanan tertutama pada masyarakt diwilayah rural.
4. Menggencarkan promosi penggunaan tagline cek KLIK, Kata BPOM dan BPOM Mobile melalui berbagai Media.
5. Melakukan pembaharuan website BPOM agar lebih menarik dan user friendly bagi masyarakat, diantatanya meningkatkan kualitas informasi, cara penyajian informasi dan tampilan website.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil dan rekomendasi pengukuran indeks.
7. perlu pendampingan saat pengisian survei untuk menjelaskan maksud dalam narasi yang tertuang dalam survei.
8. sosialisasi standar pelayanan publik perlu ditingkatkan agar pengguna layanan lebih memahami SOP pelayanan publik UPP BBPOM di Makassar.
9. Responden kurang paham dengan tools penilaian dalam survei.

f. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 94,90 % dengan capaian 101,50 % pada tahun 2023. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,02).

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2023

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
101,50	31.937.000	31.864.400	99,77	1,02	0,02	Efisien

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar kategori belum Sangat Baik antara lain :

Sampai dengan Tahun 2023 BBPOM telah menyelesaikan 619 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikandan terhadap Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Makassar terhadap penerima layanan informasi, penerima layanan Surat Keterangan Impor/Ekspor (SKI/SKE), dan penerima layanan pengujian sampel pihak ketiga (lintas sektor) menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Makassar sebesar 94,90. Berdasarkan nilai tersebut disimpulkan bahwa mutu layanan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023 mendapat kategori A (Sangat Baik).

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama Tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Besar POM secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 94,90 Meskipun demikian, nilai SKM Balai Besar POM di Makassar menunjukkan penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari Tahun 2020 hingga 2022 walaupun tetap dalam kategori sangat baik.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Sistem mekanisme dan prosedur, persyaratan serta sarana dan prasarana.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu, kompetensi petugas, perilaku petugas serta penanganan pengaduan saran dan masukan.
- Kurang sosialisasi Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Makassar
- Meningkatkan layanan kepada pelanggan dengan percepatan waktu layanan.
- Demi kenyamanan konsumen yang membutuhkan layanan publik, Balai Besar POM di Makassar terus meningkatkan sarana dan prasarana di ruang layanan seperti menyediakan perangkat scanner dan fotocopy, charging station, area bermain anak, dan minuman kopi serta teh untuk pelanggan.

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Meningkatkan layanan SKI terkait Persyaratan; Sistem mekanisme dan prosedur; Sarana dan prasaran	Sosialisasi SKM dan standar pelayanan UPP BBPOM di Makassar. Melaksanakan Publikasi standar pelayanan melaui subsite dan sosial media; Publikasi system mekanisme dan prosedur layanan SKI melalui subsite dan media sosial serta Pendampingan pelaku usaha dalam layanan SKI.			Belum rutin terlaksananya sosialisasi dan publikasi standar pelayanan.	Telah dilakukan sosialisasi dan publikasi standar pelayanan.
2.	Meningkatkan layanan Pengujian terkait Biaya dan tarif; sitem mekanisme dan prosedur; Produk spesifikasi dan jenis layanan.	Sosialisasi SKM dan standar pelayanan UPP BBPOM di Makassar Melaksanakan Standar biaya pengujian di publikasikan melalui subsite; Publikasi system mekanisme dan prosedur layanan pengujian melalui subsite dan media sosial; serta Publikasi spesifikasi dan jenis layanan melalui subsite dan sosial media.			Belum optimalnya peningkatan layanan pengujian terkait Biaya dan tarif; sitem mekanisme dan prosedur; Produk spesifikasi dan jenis layanan.	Telah dilakukan Sosialisasi SKM dan Standar Pelayanan UPP serta Publikasi melalui subsite dan sosial media mengenai Biaya dan tarif; sitem mekanisme dan prosedur; Produk spesifikasi dan jenis layanan.
3.	Melaksanakan Kebijakan Pelayanan; Meningkatkan Profesionalitas SDM; Meningkatkan fasilitas Sarana Prasarana; Meningkatkan pelayanan Konsultasi dan Pengaduan; dan meningkatkan Inovasi	Telah dilaksanaan forum konsultasi publik pada bulan mei untuk mendapatkan masukan terhadap standar pelayanan UPP BBPOM di Makassar : • Sosialisasi Standar Pelayanan melalui sosial media dan subsite BBPOM			Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik BBPOM di Makassar 91,90 %.	Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Makassar pada Tahun 2023 94,90% Capaian kategori sangat baik.

	baik untuk mempermudah pelayanan ataupun memenuhi kebutuhan dari pelanggan.	di makassar. • Sosialisasi Standar pelayanan dengan menyalurkan standar pelayanan UPP BBPOM di Makassar ke perpustakaan daerah prov sulsel dan DMPTSP MPP Prov Sulsel. • Sosialisasi standar pelayanan dalam kegiatan media gathering.				

k. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Makassar telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market.

- Capaian kinerja terkait Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas reviuw Rencana Strategis tahun 2020-2024, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Penacapain kinerja untuk indicator Persentase obat yang memenuhi syarat serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya



Sasaran 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan dan pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar sebagai berikut :

1. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan
6. Indeks Pelayanan Publik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
Target 93 Realisasi 95,24 Capaian 102,41 %

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
Target 70 Realisasi 58,42 Capaian 83,46 %

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
Target 98 Realisasi 96,96 % Capaian 98,94 %

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
Target 65 Realisasi 71,12 % Capaian 109,42 %

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
Target 78 Realisasi 78,25 Capaian 100,32 %

Indeks Pelayanan Publik
Target 4,4 Realisasi 4,61 Capaian 104,77

Persentase UMKM yang memenuhi standar
Target 79 Realisasi 79,37 Capaian 100,47 %

Pada sasaran strategis keempat Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan 7 indikator antara lain :



1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi / distribusi.

Pada Tahun 2023 BBPOM di Makassar telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan capaian 100 %, menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Rasio} = \frac{\text{Jumlah Tindak lanjut Hasil Pengawasan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan yang diberikan}}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Jumlah rekomendasi yang dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah 300 keputusan dibandingkan dengan Jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan adalah 301 dengan realisasi 95,24 %. Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 93, dengan capaian 102,41 % kategori “Sangat Baik”.

Tabel 3.58

Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	95,24	102,41	Sangat Baik

Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah 102,41 % dengan kategori “Sangat Baik”.

Keputusan / Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi / distribusi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras ataur ekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindaklanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/ rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasihasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasihasi inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat
- Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha;
- Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/ lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keseluruhan jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan pada Tahun 2023 adalah 301 keputusan/rekomendasi, dari 300 jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan tersebut keseluruhan jumlah rekomendasi yang dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 293, Tindak lanjut = 293
  - Obat 73 keputusan/rekomendasi, 73 Tindak lanjut
  - Obat Tadisional; 47 keputusan/rekomendasi, 47 Tindak lanjut
  - Suplemen Kesehatan; 1 keputusan/rekomendasi, 1 Tindak lanjut
  - Kosmetik; 71 keputusan/rekomendasi, 71 Tindak lanjut
  - Pangan; 101 keputusan/rekomendasi, 101 Tindak lanjut
- Rekomendasihasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 7, Tindak lanjut = 6
  - Obat 1 keputusan/rekomendasi, 1 Tindak lanjut
  - Obat Tadisional; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Kosmetik; 3 keputusan/rekomendasi, 2 Tindak lanjut
  - Pangan; 3 keputusan/rekomendasi, 3 Tindak lanjut
- Rekomendasi hasi inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat/UPT lain = 1, Tindak lanjut = 1

- Obat 1 keputusan/rekomendasi, 1 Tindak lanjut
- Obat Tadisional; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
- Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
- Kosmetik; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
- Pangan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut

- Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 0, Tindak lanjut = 0
  - Obat 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Obat Tadisional; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Kosmetik; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Pangan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.59.. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tahun 2020	87	68,19	78,37	Caukup
Tahun 2021	89	100	112,36	Sangat Baik
Tahun 2022	91	100	109,89	Sangat Baik
Tahun 2023	93	95,24	102,41	Sangat Baik

Perbandingan capaian kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan BBPOM Makassar untuk tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Tahun 2021 berada pada angka 112,36 kategori "Sangat Baik" lebih tinggi apabila dibandingkan tahun 2020 dengan nilai 78,37. Sementara Tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 berada pada angka 109,89 lebih rendah apabila dibandingkan Tahun 2021 dengan nilai 112,36 kategori "Sangat Baik". Tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Tahun 2023 berada pada angka 102,41 lebih rendah apabila dibandingkan Tahun 2022 dengan nilai 109,89 kategori "Sangat Baik".

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.60. Perbandingan realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	95	95,24	100,25	Tercapai/ Melampaui

indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Makassar Tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra Tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori "TercPi/Melampaui". Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan dan sistematis agar target Renstra Tahun 2024 dapat dapat dipertahankan dengan kategori "Sangat Baik' atau "Tercapai/Melampaui".

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

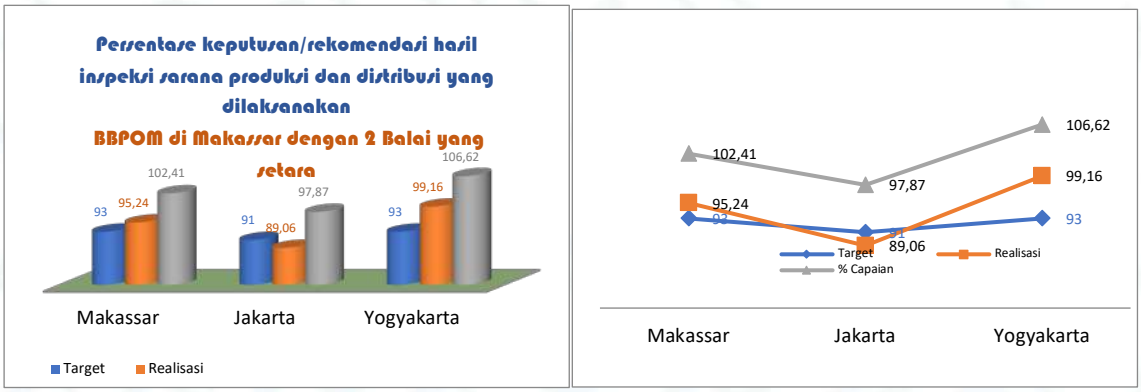
Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	93,00	95,24	102,41	Sangat Baik
BBPOM di Jakarta	91,00	89,06	97,87	Cukup
BBPOM di Yogyakarta	93,00	99,16	106,62	Sangat Baik

Target indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan BBPOM Makassar dan BBPOM Yogyakarta memiliki target yang sama dan BBPOM Jakarta pada angka yang berbeda. Hasil capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan BBPOM Makassar dan BBPOM Yogyakarta telah mencapai target, sedangkan BBPOM Jakarta belum mencapai target. Capaian BBPOM di Yogyakarta merupakan capaian tertinggi dibandingkan dengan BBPOM Makassar dan BBPOM Jakarta dengan capaian 106,62 kategori "Sangat Baik".

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023

e. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Target BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.62.. Perbandingan realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2023 dengan target IKU Badan POM

Indikator	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Indikator
indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	95,24	102,40	Sangat Baik

Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2022 BBPOM di Makassar **telah mencapai** target IKU Badan POM secara nasional, atau diatas dari rata-rata Nasional Badan POM, dengan nilai 102,40 dengan kategori "Sangat Baik".

f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Analisis Penyebab Capaian Kinerja dan Alternatif Solusi

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar "Sangat Baik" disebabkan pada 301 jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan sebanyak 300 jumlah rekomendasi yang dilaksanakan. Hal ini terjadi karena :

- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yaitu rekomendasi perbaikan temuan pada saat pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dalam bentuk corretive action preventive action (CAPA).

- Memasuki Tahun terakhir perode Renstra 2020-2024 sehingga telah tersedia baseline data untuk menentukan target yang mampu dicapai BBPOM di Makassar, perlu dilakukan review terhadap target pada Tahun penyusunan Renstra selanjutnya .
- Dalam melaksanakan tindakan perbaikan (CAPA) terhadap temuan ketidaksesuaian masih banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam pelaksanaannya terutama untuk perbaikan temuan yang membutuhkan anggaran dengan alasan tidak adanya anggaran.
- Perlu strategi khusus dalam menetapkan jenis dokumen yang dihitung sebagai tindak lanjut ataupun rekomendasi yang diberikan seperti surat perintah pengawasan dari Badan POM berupa pengawasan sarana dari pusat atau tindak lanjut yang disampaikan oleh UPT Badan POM.
- Memperkuat monitoring dan pengawalan terhadap rekomendasi yang diberikan baik tindak lanjut yang disampaikan oleh Badan POM, UPT Badan POM dan Lintas sector untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- Melakukan komunikasi yang baik dengan pemilik sarana dan pihak yang terkait dalam pengawasan.
- Memberikan informasi dan edukasi yang baik kepada pemilik sarana pada saat melakukan pengawasan.
- Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha dalam menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian pada saat pemeriksaan.
- Kompetensi petugas pemeriksaan yang sudah sesuai standar.
- Pengaturan jadwal pendampingan terhadap penyelesaian temuan hasil pengawasan mengharuskan petugas menyesuaikan dengan jadwal pengawasan rutin yang padat.

Alternatif Solusi

- Meningkat kegiatan pengawasan baik secara langsung maupun secara daring.
- Meningkatkan kompetensi petugas pengawas
- Memberikan layanan konsultasi kepada pelaku usaha
- Melakukan koordinasi yang baik dengan pihak terkait dalam pengawasan
- Pelaksanaan desk CAPA untuk mempercepat penyelesaian tindakan perbaikan temuan hasil pemeriksaan.
- Melakukan komunikasi yang baik dengan pihak terkait dalam pengawasan
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dalam perbaikan Tindakan ketidaksesuaian CAPA dari pelaku usaha
- Petugas juga membuka diri dalam melakukan layanan konsultasi terhadap sarana terkait pembuatan CAPA kepada pelaku usaha sehingga temuan hasil pengawasan bisa diperbaiki sesuai waktu yang ditetapkan

g. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 95,24 % dengan capaian 102,41 % pada tahun 2023. Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,02) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 102,41 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 100 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2023

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
102,41	9.670.000	9.670.000	100	1,02	0,02	Efisien

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan antara lain :

1. Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi adalah meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi serta melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.
2. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM terkait produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) .
3. Selama Tahun 2023 dilakukan inspeksi rutin sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sebanyak 301 sarana dan pengawasan terhadap iklan dan penandaan obat dan makanan di BBPOM Makassar dengan keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan sebagai berikut :
   - Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 293, Tindak lanjut = 293
   - Rekomendasihasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 7, Tindak lanjut = 6
   - Rekomendasihasi inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat/UPT lain = 1, Tindak lanjut = 1
   - Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 0, Tindak lanjut = 0
4. Melakukan pembinaan secara intens dengan pelaku usaha melalui kegiatan pengawalan tindak lanjut hasil pengawasan.

i. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai *	Belum **		

			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Meningkatkan monitoring dan evaluasi CAPA.	Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Obat tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Obat tanpa izin edar dan substandar. Telah ditunjuk PIC untuk merekap hasil Pelaksanaan kegiatan setiap bulan berjalan.			Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi CAPA.	Telah ada PIC untuk merekap hasil Pelaksanaan kegiatan setiap bulan berjalan. Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan meningkat.
2.	Meningkatkan intensitas tindak lanjut hasil pengawasan.	Balai Besar POM di Makassar sudah melakukan komunikasi dengan Badan POM (Kedeputian I, II dan III) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai Besar POM di Makassar yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.			Belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan dari Pusat.	Belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan dari Pusat.
3.	Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan.	Telah dilaksanakan koordinasi dengan Pemangku kepentingan terkait tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan.			Belum optimalnya Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi dengan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan.	Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan meningkat.
4.	Lebih aktif melakukan pengawalan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.	-	Tetap menjaga konsistensi petugas untuk memberikan pelayanan perbaikan CAPA kepada pelaku usaha.	2024	Beberapa temuan hasil pengawasan belum direspon dengan cepat dan tepat oleh pelaku usaha.	-

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi publik terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Telah dilakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran tahun 2023 untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Pencapaian kinerja untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.



2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi / distribusi.

Pada Tahun 2023 BBPOM di Makassar belum berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan belum tercapainya target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan capaian 83,46 %, menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Rasio} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang Tindak lanjuti oleh pemangku kepentingan}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan}}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Jumlah tindaklanjut rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan pada Tahun 2023 adalah 249 keputusan dibandingkan dengan Jumlah rekomendasi yang diberikan oleh pemangku kepentingan adalah 300 dengan realisasi 58,42 % rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan, di bawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 70 %.

Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada Tahun 2023 adalah 83,46 % dengan kategori tidak "Cukup".

Tabel 3.64
Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	58,42	83,46	Cukup

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/ distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

1) Pelaku usaha;
2) Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback/* respon dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Dasar penerbitan keputusan/ rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Keseluruhan jumlah Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan pada Tahun 2023 adalah 300 keputusan/rekomendasi diwilayah kerja BBPOM di Makassar, dari 300 Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan tersebut hanya 249 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut :

- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha = 276, Tindak lanjut = 242
  - Obat 68 keputusan/rekomendasi, 52 Tindak lanjut
  - Obat Tadisional; 39 keputusan/rekomendasi, 37 Tindak lanjut
  - Suplemen Kesehatan; 1 keputusan/rekomendasi, 1 Tindak lanjut
  - Kosmetik; 71 keputusan/rekomendasi, 71 Tindak lanjut
  - Pangan; 97 keputusan/rekomendasi, 81 Tindak lanjut
- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor = 24, Tindak lanjut = 7
  - Obat 13 keputusan/rekomendasi, 3 Tindak lanjut
  - Obat Tadisional; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Kosmetik; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Pangan; 11 keputusan/rekomendasi, 4 Tindak lanjut

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.65. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tahun 2020	55	51,91	94,39	Cukup
Tahun 2021	60	74,89	124,82	Tidak Dapat Disimpulkan
Tahun 2022	65	72,81	112,02	Sangat Baik
Tahun 2023	70	58,42	83,46	Cukup

Perbandingan capaian kinerja kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan BBPOM Makassar untuk tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Tahun 2021 berada pada

angka 124,82 kategori "Tidak dapat disimpulkan" lebih tinggi apabila dibandingkan tahun 2020 dengan nilai 94,39 kategori "Belum Sangat Baik" . Sedangkan tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 berada pada angka 112,02 kategori "Sangat Baik" lebih rendah apabila dibandingkan Tahun 2021 dengan nilai 124,82 kategori "Tidak dapat disimpulkan". Tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Tahun 2023 berada pada angka 83,46 kategori "Cukup" lebih rendah apabila dibandingkan Tahun 2022 dengan nilai 112,02 kategori "Sangat Baik".

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.25. Perbandingan realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	75	58,42	77,89	Akan Tercapai

indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Makassar Tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra Tahun 2024, serta capaian yang diperoleh kategori "Akan Tercapai". Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan dan sistematis agar target Renstra Tahun 2024 dapat tercapai dengan kategori Tercapai/ Melampaui.

d. Perbandingan Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

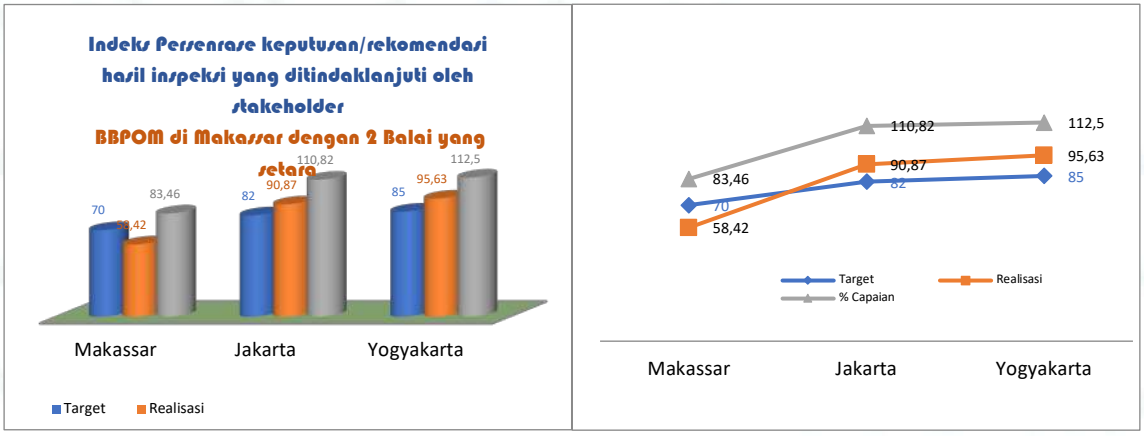
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023

Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	70	58,42	83,46	Cukup
BBPOM di Jakarta	82,00	90,87	110,82	Sangat Baik
BBPOM di Yogyakarta	85,00	95,63	112,50	Sangat Baik

Target indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan BBPOM Makassar, BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta pada angka yang berbeda, sementara target BBPOM Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan dengan 2 Balai lainnya. Hasil capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan BBPOM Makassar belum mencapai target dengan nilai 83,46kategori "Cukup" lebih rendah apabila dibandingkan dengan BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta, sementara persentase capaian tertinggi adalah BBPOM di Yogyakarta dengan capaian 112,50 dengan kategori "Sangat Baik.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023

e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Target Nasional

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2023 dengan target IKU Badan POM

Indikator	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Indikator
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70.00	70.00	58,42	83,46	Cukup

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2023 BBPOM di Makassar **belum mencapai** target IKU Badan POM secara nasional, atau di bawah dari rata-rata Nasional Badan POM, dengan nilai 83,46 dengan kategori "Cukup".

f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Analisis Penyebab Capaian Kinerja dan Alternatif Solusi

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Makassar Cukup disebabkan menurunnya Jumlah tindaklanjut yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Hal ini terjadi karena :

- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu rekomendasi perbaikan temuan pada saat pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam bentuk corretive action preventive action (CAPA).
- Dalam melaksanakan tindakan perbaikan (CAPA) terhadap temuan ketidaksesuaian untuk sarana pemerintah (PKM, RS dan GFK/IFK) yang membutuhkan anggaran untuk perbaikan sarana atau penambahan peralatan dibutuhkan kebijakan di level yang lebih di atas sehingga menyulitkan perbaikan secara utuh.
- Masih adanya lintas sektor yang tidak *aware* merespon temuan hasil pengawasan BPOM.
- Pengaturan jadwal pendampingan terhadap penyelesaian temuan hasil pengawasan mengharuskan petugas menyesuaikan dengan jadwal pengawasan rutin yang padat.

Alternatif Solusi

- Memberikan layanan konsultasi terhadap sarana dalam pembuatan CAPA.
- Meningkatkan monitoring terhadap sarana dalam perbaikan tindakan ketidaksesuaian (CAPA).
- Meningkatkan koordinasi dengan stokeholder terkait.
- Secara intens melakukan koordinasi dengan kepala dinas terkait dalam hal menindak lanjuti temuan hasil pengawasan.
- Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi hasil pengawasan dengan lintas sektor.

g. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 58,42 % dengan capaian 83,46 % pada tahun 2023. Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan kategori tidak efisen dengan tingkat efisiensi (-0,16) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 83,46 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 99,43 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2023

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
83,46	8.700.000	8.650.000	99,43	0,84	-0,16	Tidak Efisien

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan kategori Baik antara lain :

1. Melakukan sosialisasi ke pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar agar memberikan feedback atas hasil pemeriksaan sarana maksimal.
2. Penggunaan _aplikasi Smart POM yang berfungsi untuk mempercepat rekomendasi hasil pemeriksaan dan feedback lintas sector (Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten) atas temuan hasil pemeriksaan oleh petugas Balai Besar POM di Makassar belum optimal.
3. Melakukan pembinaan secara intens dengan pelaku usaha melalui kegiatan pengawalan tindak lanjut hasil pengawasan.
4. Secara intens melakukan koordinasi dengan kepala dinas terkait dalam hal menindak lanjuti temuan hasil pengawasan.

i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi kinerja triwulan sebelumnya, untuk meningkatkan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diwilayah kerja BBPOM Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap *feedback* yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar.
2. Advokasi dan Koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam penggunaan Anggaran Dana Alokasi Khusus bidang obat dan makanan, untuk kabupaten/kota yang mendapatkan DAK non Fisik bidang obat dan makanan pada triwulan IV Tahun 2023.
3. Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dengan menggunakan aplikasi smart POM serta melakukan evaluasi dan monitoring feedback dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.
4. Melakukan koordinasi dengan baik dengan pemangku kepentingan yang ada untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BBPOM di Makassar.

i. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi.	Melakukan evaluasi timeline pelayanan.			Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi.	Telah ada evaluasi timeline pelayanan yang rutin.
2.	Melakukan pembinaan UMKM secara berkelanjutan dalam pemenuhan persyaratan pemenuhan CPPOB dalam rangka sertifikasi.	Telah dilakukan kegiatan pendampingan UMKM dalam rangka pemenuhan persyaratan CPPOB dan Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan.			Belum dilakukannya kegiatan pendampingan UMKM dalam rangka pemenuhan persyaratan CPPOB dan emput Bola Registrasi Pangan Olahan.	Telah dilakukan kegiatan pendampingan UMKM dalam rangka pemenuhan persyaratan CPPOB dan Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan.
3.	Mendorong kemampuan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk agar memenuhi persyaratan untuk ekspor.	Meningkatkan kualitas produk dari pelaku usaha dengan melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai standar keamanan dan mutu produk.			Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam peningkatan kualitas produk agar memenuhi persyaratan untuk ekspor.	Bertambahnya pemahaman pelaku usaha terhadap standar keamanan dan mutu produk.
4.	Mengkomunikasikan kepada atasan langsung apabila ada temuan hasil pengawasan di fasilitas pemerintah yang lambat atau tidak direspon perbaikannya sehingga bisa diambil langkah yang tepat untuk menindaklanjuti.	-	Aktif berkomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait temuan hasil pemeriksaan balai.	2024	Beberapa temuan hasil pengawasan belum direspon dengan cepat dan tepat oleh pelaku usaha.	Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan meningkat.

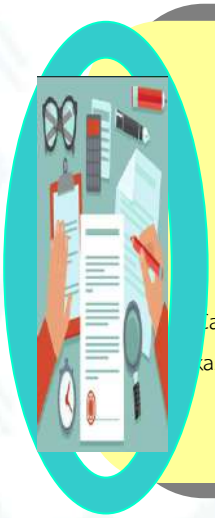
l. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market.

- Capaian kinerja terkait Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja, serta sebagai masukan

bagi masyarakat dan informasi publik terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan.

- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional.
- Telah dilakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran tahun 2023 untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Pencapaian kinerja untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.



3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil Pemeriksaan sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan, Rekomendasi atas hasil pemeriksaan sarana dalam rangka perijinan Industri Kosmetik dan pendirian PBF pada Tahun berjalan.
yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan.

$$\text{Presentase Keputusan penilaiaan Sertifikasi} = \frac{\text{keputusan penilaian sertifikasi pada Tahun berjalan diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada Tahun berjalan}} \times 100\ \%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023 adalah 98,40% dengan realisasi sebesar 97,42 keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dibawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 99 % dengan kategori “Cukup”.

Tabel 3.25

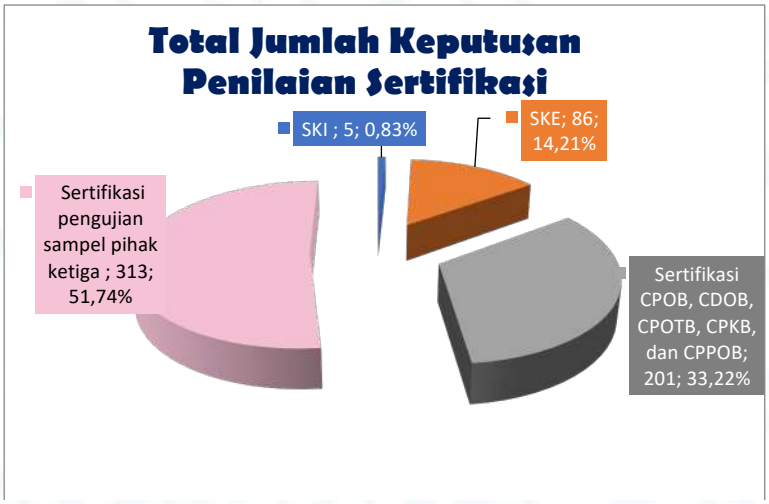
Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	97,42	98,40	Cukup

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan keputusan penilaian sertifikasi pada Tahun 2023 yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 605 keputusan terhadap jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada Tahun 2023 sebanyak 621 Jumlah permohonan penilaian sertifikasi.

Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 605 terdiri atas :

- Surat Keterangan Impor (SKI) : 5
- Surat Keterangan Ekspor (SKE) : 86
- Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB : 201
- Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga : 313



Gambar 3.19.
Jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada Tahun 2023

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil Pemeriksaan :

- sarana produksi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk,
- pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB,
- penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan,
- Rekomendasi atas hasil pemeriksaan sarana dalam rangka perijinan Industri Kosmetik dan pendirian PBF.
- hasil pengujian sampel pihak ketiga

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.26. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya.

Indikator Persentase keputusan penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tahun 2020	85	96,43	113,45	Sangat Baik
Tahun 2021	96	94,08	98	Cukup
Tahun 2022	98	96,96	98,94	Cukuo
Tahun 2023	99	97,42	98,40	Cukup

Terdapat penurunan realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2021 dibanding tahun 2020 dari nilai 113,45 kategori "Sangat Baik" menjadi 98, kategori "Belun Sangat Baik" capaiannya mengalami penurunan 15,45 point. Sedangkan Pada tahun 2022 terdapat peningkatan realisasi dan peningkatan capaian dibandingkan tahun 2021. Hal ini disebabkan perubahan target untuk indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM Makassar sesuai dengan hasil reviu Renstra dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Makassar dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Capaian tahun 2023 dibanding tahun 2022 dari nilai 98,40 kategori "Cukup" menjadi 98,94, kategori "Belum Sangat Baik" capaiannya mengalami penurunan 0,54 point.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.27. Perbandingan realisasi indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	100	97,42	97,42	Akan Tercapai

Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra Tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori "Akan Tercapai". Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini.

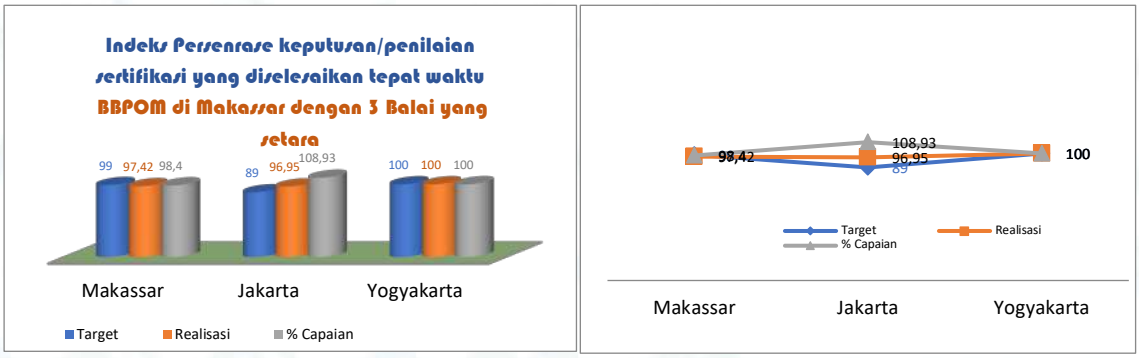
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023

Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	99	97,42	98,40	Cukup
BBPOM di Jakarta	89,00	96,95	108,93	Sangat Baik
BBPOM di Yogyakarta	100,00	100,00	100,00	Baik

Target indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM Makassar, BBPOM Jakarta, BBPOM Yogyakarta pada angka yang berbeda. Hasil capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM Makassar belum mencapai target dengan nilai 98,40 lebih rendah apabila dibandingkan dengan BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta kategori "Sangat Baik", sementara persentase capaian tertinggi adalah BBPOM di Jakarta dengan capaian 108,93 kategori "Sangat Baik" lebih tinggi dibandingkan BBPOM Yogyakarta, dengan kategori "Baik", adapun BBPOM Makassar kategori "Cukup".

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023

e. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Target BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2022 dengan target IKU Badan POM

Indikator	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Indikator
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00	94,00	97,42	103,63	Sangat Baik

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023 BBPOM di Makassar **telah mencapai** target IKU Badan POM secara nasional, atau diatas dari rata-rata Nasional Badan POM, dengan nilai 103,63 dengan kategori "Sangat Baik".

f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung Capaian kinerja .

Hal yang mempengaruhi capaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan kategori sangat baik disebabkan :

- Capaian kinerja persentase kepetusan penilaian sertifikasi untuk Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK untuk lingkup BBPOM di Makassar sebanyak 621 jumlah pemohon terdapat 605 Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu atau sebanyak 98,41 % yang sesuai dengan time line.
- Faktor yang juga berkontribusi terhadap nilai capaian persentase keputusan penilaian serrtifikasi dari target yang diperjanjikan adalah Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB yang sesuai dengan timeline yaitu 201 dari 204 jumlah pemohon atau mencapai 98,53 % sesuai timeline.
- Permohonan masuk di akhir bulan sehingga pelaporan hasil dilakukan pada bulan berikutnya.
- Penyelesaian penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) melewati time line, hal ini dikarenakan permohonan yang masuk melalui aplikasi e-bpom.pom.go.id tidak ada sistem notifikasi

pemeritahuan secara otomatis, dan petugas tidak konsisten dalam memantau permohonan yang masuk dalam aplikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- Gangguan jaringan ketika petugas evaluator sedang melaksanakan tugas di daerah sehingga tidak dapat melakukan pengecekan permohonan pada aplikasi e-bpom dan tidak dapat melakukan evaluasi permohonan SKJ/SKK yang masuk sehingga tidak dapat dan tidak dapat melakukan evaluasi permohonan.

Alternatif Solusi

- Melakukan Forum Konsultasi Publik secara berkala kepada pelanggan layanan pengujian pihak ke 3 agar dalam menentukan kebjakan Layanan Pengujian Pihak ke 3 dapat dilibatkan dan dikomuikasikan kepada seluruh pelanggan sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara transparan kepada pihak ke 3.
- Koordinasi dengan Instansi Terkait/ Pemerintah Daerah dalam hal pengujian melalui Jejaring Laboratorium di daerah Peningkatan kompetensi personil Laboratorium dalam hal pengujian.
- Koordinasi dengan dinas terkait di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM di wilayah Sulawesi Selatan Petugas memastikan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi GMP sarana produksi Pelaksanaan Bimtek Percepatan Penerapan Mandatori CDOB dan Pelayanan *Desk* CAPA
- Petugas melakukan konfirmasi kembali kepada pelaku usaha tentang kesiapan dan komitmennya dalam memenuhi persyaratan CPPOB/CPOTB/CPKB, persyaratan audit sertifikasi.Peningkatan pemahaman dan pengawalan terhadap sarana distribusi terutama sarana distribusi obat terkait persyaratan minimal yang wajib dipenuhi oleh sarana distribusi (CDOB)
- Melaksanakan Desk CAPA untuk membantu sarana dalam membuat CAPA
- Petugas melakukan fasilitasi/pendampingan UMKM dalam memenuhi persyaratan sarana produksinya.
- Perkuatan kompetensi SDM Bidang Pemeriksaan terkait pendampingan dan inspeksi pada sarana distribusi yang tidak tertib administrasi CDOB di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar
- Pemberian layanan konsultasi sebelum dilakukan pemeriksaan sarana akan lebih ditingkatkan
- Penunjukkan satu orang penanngung jawab yang bertugas untuk memantau / mengecek setiap hari ada tidaknya permohonan dalam aplikasi e-bpom.
- Penetapan definisi permohonan yang masuk.
- Penambahan jumlah petugas ealuator SKI / SKE dan pengaturan jadwal pelaksanaan tugas di daerah.
- Pengaturan pembagian tugas pengujian sampel pihak III yang lebih teratur.

g. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 97,42 % dengan capaian 98,40 % pada tahun 2023. Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,01) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 98,40 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 97,78 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
98,40	212.903.000	208.172.799	97,78	1,01	0,01	Efisien

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu kategori Sangat Baik antara lain :

- Peningkatan kompetensi SDM petugas dengan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis seiring dengan peningkatan Indeks Profesionalisme pegawai
- Peningkatan koordinasi lintas sektor agar dapat meningkatkan daya ungkit kegiatan pendampingan pelaku usaha obat dan makanan
- Peningkatan monitoring timeline penyelesaian keputusan sertifikasi
- Pemberlakuan jadwal petugas dalam memantau/ mengecek ada tidaknya permohonan dalam aplikasi tidak berjalan secara optimal karena petugas yang bertugas tidak konsisten (kadang lupa) melakukan pengecekan
- Penunjukkan petugas dalam mengecekan adanya permohonan tidak dilakukan secara konsisten (kadang lupa).
- Permohonan yang masuk diakhir Tahun akana dihitung sebagai capaian Tahun berikutnya.
- Pengaturan jadwal pelaksanaaan pengujian sampel piha III dengan lebih teratur.
- Penerapan notifikasi kepada petugas jika ada permohonan, pengecekan aplikasi secara konsisten.

i. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, untuk meningkatkan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diwilayah kerja BBPOM Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar.
2. Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dengan menggunakan aplikasi smart POM serta melakukan evaluasi dan monitoring feedback dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.
3. Peningkatan konsistensi dan komitmen petugas yang diberi tanggungjawab untuk melakukan pemantauan aplikasi.
4. Pengaturan pembagian sampel untuk pengujian sampel pihak ketiga telah diatur dengan baik sehingga waktu pengujian telah memenuhi timeline yang ditetapkan.
5. penunjukan petugas yang bertanggungjawab dalam melakukan pemantauan aplikasi.

j. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan pembimbingan teknis Pendampingan pelaku usaha UMKM dalam penerapan persyaratan CPPOB.	Melakukan pendampingan melalui inovasi Pedang Puang Basok' kepada pelaku usaha produksi Obat dan Makanan dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan dengan melaksanakan cara produksi Obat dan Makanan yang baik.			Masi terbatasnya pemahaman pelaku usaha UMKM dalam penerapan persyaratan CPPOB.	Bertambahnya pemahaman pelaku usaha UMKM dalam penerapan persyaratan CPPOB.
2.	Mengawal tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan dari aspek mutu/label, administrasi, higiene/sanitasi pada sarana baik dengan melakukan pembinaan atau pemberian sanksi administratif agar pelaku usaha memiliki komitmen untuk menerapkan pemenuhan CPPOB.	Monitoring dan evaluasi secara Berkesinambungan pada sarana produksi.	.		Belum optimalnya monitoring dan evaluasi sarana produksi pangan.	Telah adanya Monitoring dan evaluasi secara Berkesinambungan pada sarana produksi.
3.	Peningkatan konsistensi dan komitmen petugas yang diberi tanggungjawab untuk melakukan pemantauan aplikasi pengajuan permohon SKI-SKE (e-bpom) setiap hari.	1. Setiap personel diinstruksikan untuk saling mengingatkan dalam melakukan pengecekan permohonan pada aplikasi. 2. Melaksanakan pengujian sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. 3. Melakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada			Beberapa penerbitan SKI-SKE melewati time line.	Penerbitan SKI - SKE memenuhi time line.

		pelaku usaha sehingga pelaku usaha mampu mengimplementasikan pedoman cara produksi yang baik melalui kegiatan sosialiasi maupun pertemuan teknis.				

k. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan.
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional.
- Pencapaian kinerja untuk indikator Persentase obat yang memenuhi syarat serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.



4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

- Sarana Produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, sel punca dan rumah sakit).
- Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.
- Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal.

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.
- TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
- TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan 4.
- Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT
-Untuk sarana produksi IOT tidak memennuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.
- Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.
- Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B
- TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
- Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
- Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.
- TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
- TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan 4.

3. Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT
   - Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.
   - Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.
4. Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B
   - TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
5. Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis /5 major.

Pada Tahun 2023 BBPOM di Makassar telah optimal Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah tercapainya target Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan capaian 109,42 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan} = \frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan untuk diperiksa}} \times 100\ \%$$

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	71,12	109,42	Sangat Baik

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2023 adalah 109,42 % dengan realisasi sebesar 71,12 % sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar di atas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 65% dengan kategori "Sangat Baik"

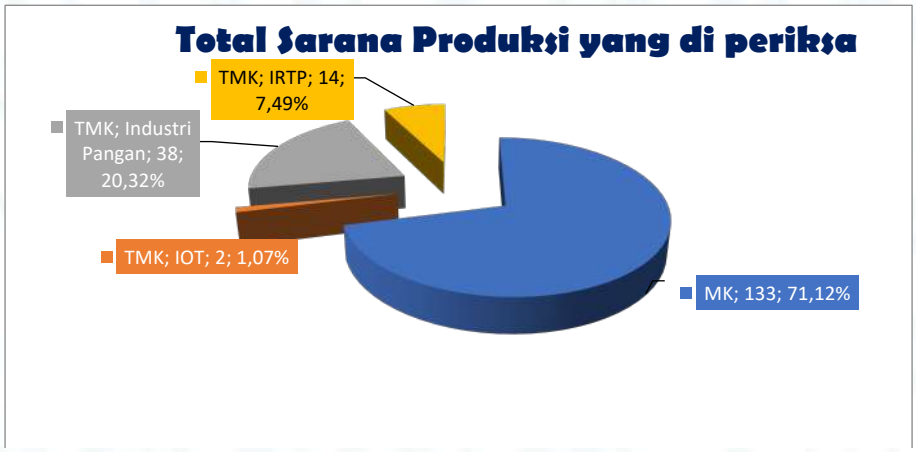
Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan sebanyak 133 sarana terhadap target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan untuk diperiksa sebanyak 188 sarana.

Jenis sarana produksi yang disampling yaitu :

- Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.
  a. TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
  b. TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan 4.
- Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT
  a. Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.
  b. Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.
- Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B
  - TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
- Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.

Keseluruhan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada Tahun 2023 adalah 187 sarana produksi diwilayah kerja BBPOM di Makassar yang selesai diperiksa, dari 187 sarana tersebut terdapat 54 Sarana produksi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan terdiri atas :

- Industri Kosmetik : 0 Sarana
- Industri Obat Tradisional : 0 Sarana
- Usaha Kecil Obat Tradisional : 0 Sarana
- Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan : 2 Sarana
- Industri Pangan : 38 Sarana
- Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) : 14 Sarana



Grafik 3.6

Jumlah Sarana Produksi yang diperiksa Tahun 2023

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.29. Perbandingan realisasi dan capaian indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tahun 2020	46	47,81	103,93	Sangat Baik
Tahun 2021	55	65,60	119,09	Sangat Baik
Tahun 2022	60	60,00	100	Sangat Baik
Tahun 2023	65	71,12	109,42	Sangat Baik

Terdapat penurunan realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2021 dibanding tahun 2020. Tahun 2021 berada pada angka 119,09 lebih tinggi apabila dibandingkan tahun 2020 dengan nilai 103,93 kategori "Sangat Baik" mengalami peningkatan 15,16 point. Sedangkan Pada tahun 2022 terdapat penurunan realisasi dan penurunan capaian dibandingkan tahun 2021. Hal ini disebabkan perubahan target untuk indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diselesaikan tepat waktu BBPOM Makassar sesuai dengan hasil reviu Renstra dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Makassar dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Terdapat peningkatan capaian pada tahun 2023 dengan nilai 109,42 kategori "Sangat Baik" jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan nilai 100 kategori "sangat baik".

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.30. Perbandingan realisasi indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diwilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	70	71,12	101,6	Tercapai/ Melampaui	

Realisasi indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra Tahun 2024 dan capaian yang diperoleh kategori "Sangat Baik" Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan dan sistematis agar target Renstra Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini**.**

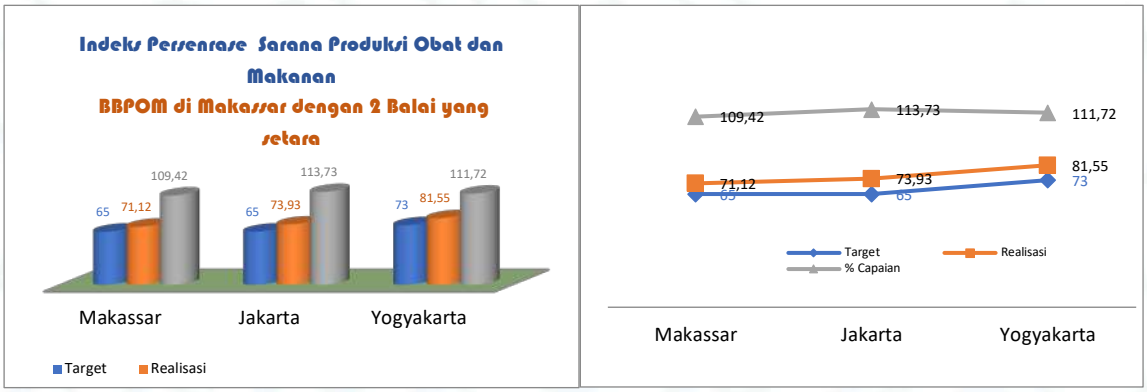
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023

Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	65	71,12	109,42	Sangat Baik
BBPOM di Jakarta	65,00	73,93	113,73	Sangat Baik
BBPOM di Yogyakarta	73,00	81,55	111,72	Sangat Baik

Target indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM Makassar dan BBPOM Jakarta pada angka yang sama, sementara target BBPOM Yogyakarta lebih tinggi. Hasil capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM Makassar telah mencapai target dengan nilai 71,12 lebih rendah apabila dibandingkan dengan BBPOM Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta kategori "Sangat Baik" sementara persentase capaian tertinggi adalah BBPOM di Jakarta dengan capaian 113,73 lebih tinggi dibandingkan BBPOM Yogyakarta dan BBPOM Makassar dengan kategori "Sangat Baik".

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023

e. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Target BPOM

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan target kinerja indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan secara Nasional Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 dengan target IKU Badan POM

Indikator	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Indikator
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	71,12	109,42	Sangat Baik

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 BBPOM di Makassar **telah mencapai** target IKU Badan POM secara nasional, sama dengan rata-rata Nasional Badan POM, dengan nilai 109,42 dengan kategori "Sangat Baik".

f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Analisis Penyebab Capaian kinerja

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori Sangat Baik :

- Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hingga Tahun 2023 adalah 109,42% **sudah mencapai target** yang ditetapkan dengan kategori **"Sangat Baik"**.

- Peningkatan pemahaman, pengawalan dan pendampingan yang intens terhadap sarana produksi terutama sarana industri pangan dan industri rumah tangga pangan terkait persyaratan minimal yang wajib dipenuhi oleh sarana produksi/pelaku usaha.
- Perkuatan kompetensi SDM seksi sertifikasi terkait pendampingan pada sarana Industri pangan dan IRTP tentang pemenuhan standar minimal hygine sanitasi pada sarana produksi industri pangan diwilayah kerja Balai Besar POM di Makassar.
- Koordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten lebih ditingkatkan dalam melakukan pembinaan bagi pelaku usaha sarana produksi IRTP yang berada di wilayah kerjanya.
- Meningkatkan kompetensi petugas inspeksi dalam melakukaan pemeriksaan sarana produksi.
- Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha sarana produksi untuk tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan usaha peningkatan kemampuan petugas dalam melakukan pengawasan secara optimal.

g. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 71,12 % dengan capaian 109,42 % pada tahun 2023. Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,01) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 100 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 99,99 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
109,42	420.291.000	385.005.500	91,60	1,19	0,19	Efisien

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori Sangat Baik antara lain :

1. Telah diadakan forum komunikasi untuk inspektur CPOTB, forum Manajemen Inspeksi CPOB selain itu juga diadakan kegiatan pembelajaran daring peraturan dibidang pangan olahan yang dIVkuti oleh inspektur pangan di seluruh UPT Badan POM dan sosialisasi tools inspeksi CPPOB. Adanya kegiatan-kegiatan tersebut juga membantu menyamakan persepsi para inspektur dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan menyampaikan permasalahan dilapangan yang perlu dibahas ke tingkat nasional dalam rangka perbaikan norma, standar dan kebijakan.

2. Kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha mampu mengimplementasikan pedoman cara produksi yang baik.
3. Optimalisasi pertemuan teknis secara rutin dengan pelaku usaha dan mencarikan solusi penyelesaian temuan dari hasil pemeriksaan merupakan salah satu upaya yang efektif.
4. Aktif memberikan informasi yang up date terkait cara produksi yang baik kepada *stakeholder*.

i. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi	Beberapa Personil dengan gap kompetensi tinggi mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior . Meningkatkan kompetensi petugas dengan mengikuti pelatihan/ bimtek tentang inspeksi cara produksi yang baik			Tingginya gap kompetensi personil pemeriksaan.	Telah dilakukan pengembangan kompetensi kepada petugas yang memiliki gap kompetensi tinggi.
2.	Mengawal tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan dari aspek mutu/label, administrasi, higiene/sanitasi pada sarana baik dengan melakukan pembinaan atau pemberian sanksi administratif agar pelaku usaha memiliki komitmen untuk menerapkan pemenuhan CPPOB.	Monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan pada sarana produksi.			Belum optimalnya monitoring dan evaluasi sarana produksi pangan.	Telah adanya Monitoring dan evaluasi secara Berkesinambungan pada sarana produksi.

3.	Mendorong pelaku usaha produksi Obat dan Makanan dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan dengan melaksanakan cara produksi Obat dan Makanan yang baik.	Telah dilaksanakan Sosialisasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Bagi Pelaku Usaha Industri Pangan Olahan. Yang bertujuan agar pelaku usaha dapat melaksanakan semua aspek – aspek cara produksi yang baik sehingga menghasilan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.			Belum optimalnya pemahaman pelaku usaha dalam melaksanakan semua aspek-aspek cara produksi yang baik.	Bertambahnya pemahaman pelaku usaha dalam melaksanakan semua aspek-aspek cara produksi yang baik.
4.	Melakukan pengawasan secara lebih optimal	-	Melakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha mampu mengimplementasikan pedoman cara produksi yang baik melalui kegiatan sosialiasi maupun pertemuan teknis.	2024	Belum optimalnya pelaku usaha dalam mengimplementasikan pedoman cara produksi yang baik.	Diharapkan Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan meningkat.
	Kendala : Kesadaran pelaku usaha di sektor produksi OMKA yang rendah.					

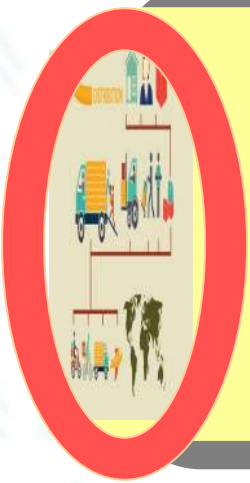
j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja serta sebagai masukan

bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan.

- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional.
- Telah dilakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran tahun 2023 untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Penacapain kinerja untuk indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.



2. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Sarana yang diperiksa setiap Tahun ditetapkan berdasarkan kategori Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.

Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.
Sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dihitung terhadap sarana distribusi yang diprioritaskan.
Sarana distribusi yang diprioritaskan adalah sarana distribusi yang ditetapkan melalui analisa risiko. Analisa risiko dilakukan mengacu pedoman tindak lanjut hasil pengawasan (SK Deputi Tahun 2016) yang berlaku.
Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pada Tahun 2023 BBPOM di Makassar sudah optimal Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan sudah tercapainya target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan capaian 100,32 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase sarana Distribusi yang Memenuhi Ketentuan} = \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana Distribusi Obat Dan Makanan yang di diprioritaskan untuk diperiksa}} \times 100\ \%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 adalah 100,32 % dengan realisasi sebesar 78,25 % sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, di atas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 78 % dengan kategori "Sangat Baik".

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	78,25	100,32	Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan sebanyak 885 sarana terhadap target jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan untuk diperiksa sebanyak 1.131 sarana.

Jenis sarana distribusi yang diperiksaa yaitu :

a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

b. Sarana yang diperiksa setiap Tahun ditetapkan berdasarkan kategori Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.

c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.

d. Sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dihitung terhadap sarana distribusi yang diprioritaskan.

e. Sarana distribusi yang diprioritaskan adalah sarana distribusi yang ditetapkan melalui analisa risiko. Analisa risiko dilakukan mengacu pedoman tindak lanjut hasil pengawasan (SK Deputi) yang berlaku.

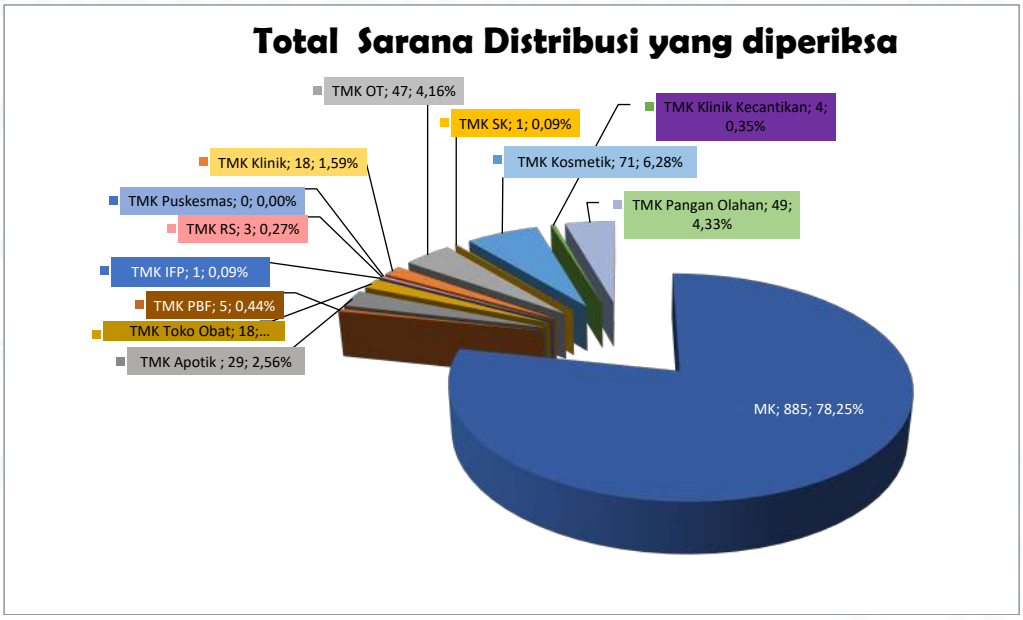
f. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

g. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Capaian indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada Tahun 2023 adalah 78,25 % di atas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 78 % dengan kategori "Sangat Baik".

Keseluruhan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada Tahun 2023 adalah sarana diwilayah kerja BBPOM di Makassar yang selesai diperiksa, dari 1.131 tersebut terdapat 246 Sarana distribusi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan terdiri atas :

- Pedagang Besar Farmasi (PBF) : 5 Sarana
- Apotik : 29 Sarana
- Toko Obat : 18 Sarana
- Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) : 1 Sarana
- Rumah Sakit (RS) : 3 Sarana
- Puskemas : 0 Sarana
- Klinik : 18 Sarana
- Fasilitas Distribusi Obat Tradisional : 47 sarana
- Fasilitas Distribusi Suplemen : 1 sarana
- Fasilitas Distribusi Kosmetik : 71 sarana
- Fasilitas Distribusi Pangan Olahan : 49 sarana



Gambar 3.7

Jumlah Sarana Distribusi yang diperiksa Tahun 2023

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.32. Perbandingan realisasi dan capaian indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tahun 2020	55	72,95	132.64	Tidak dapat disimpulkan
Tahun 2021	75	80,26	107,01	Sangat Baik
Tahun 2022	76	75,46	99,29	Cukup
Tahun 2023	78	78,25	100,32	Sangat Baik

Terdapat penurunan capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2021 dibanding tahun 2020 dari nilai 132,64 kategori "Tidak dapat disimpulkan" menjadi 107,01 kategori "Sangat Baik" capaiannya mengalami penurunan 25,64 point. Pada tahun 2022 terdapat penurunan realisasi dan penurunan capaian dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 berada pada angka 99,29 kategori "Belum Sangat Baik" lebih rendah apabila dibandingkan Tahun 2021 dengan nilai 107,01 kategori "Sangat Baik". Hal ini disebabkan perubahan target untuk Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM Makassar sesuai dengan hasil reviu Renstra dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Makassar dengan menggunakan realisasi tahun 2021 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Capaian 2023 mengalami kenaikan dengan nilai 100,32 kategori "Sangat Baik" dibandingkan tahun 2022 dengan capaian 99,29 kategori "Belum Sangat Baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.33. Perbandingan realisasi indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	80	78,25	97,81	Akan Tercapai	

indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Makassar Tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra Tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Akan Tercapai. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan dan sistematis agar target Renstra Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini.

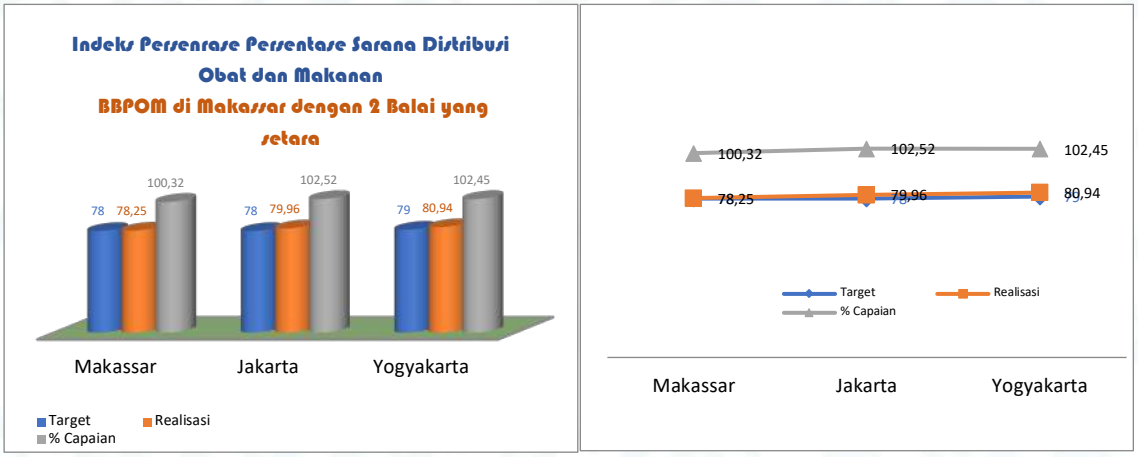
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023

Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	78	78,25	100,32	Sangat Baik
BBPOM di Jakarta	78,00	79,96	102,52	Sangat Baik
BBPOM di Yogyakarta	79,00	80,94	102,45	Sangat Baik

Target indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM Makassar dan BBPOM di Jakarta pada angka yang sama, sementara target BBPOM Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan dengan 2 Balai lainnya. Hasil realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM Makassar sudah mencapai target dengan nilai 78,25 namun capaian realisasi lebih rendah apabila dibandingkan dengan BBPOM Yogyakarta dan BBPOM di Jakarta. Sementara persentase capaian tertinggi adalah BBPOM di Jakarta dengan capaian 102,52 lebih tinggi dibandingkan BBPOM Yogyakarta dan BBPOM Makassar dengan kategori "Sangat Baik".

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023

e. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Target BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 dengan target IKU Badan POM

Indikator	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	68	78,25	115,07	Sangat Baik

Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 BBPOM di Makassar **telah mencapai** target IKU Badan POM secara nasional, atau diatas dari rata-rata Nasional Badan POM, dengan nilai 114,33 dengan kategori "Sangat Baik".

f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor Pendukung Capaian kinerja dan alternatif solusi

Faktor Pendukung Capaian Kinerja

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori Sangat Baik:

- Pada Tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat (PBF, IF Kab/Kota, Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Distribusi OT, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan). Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 885 sarana (78,24 %) memenuhi ketentuan dan 246 sarana (21,76 %) tidak memenuhi ketentuan. Sarana yang memiliki persentase memenuhi ketentuan dibawah target 78 % adalah Apotek (70,40 %), Toko Obat (57,14), Fasilitas Distribusi Obat Tradisional (72,02), Fasilitas Distribusi Kosmetik (68,30 %), dan Fasilitas Distribusi Pangan Olahan (75,37 %).

  Hal ini disebabkan karena penetapan sarana pemeriksaan sarana distribusi obat telah menggunakan analisis resiko, dimana sarana dengan analisis resiko tertinggi yang akan diperiksa. Beberapa hal ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat pemeriksaan antara lain terdapat sarana yang masa berlaku ijin nya sudah habis tetapi masih tetap melakukan penjualan obat, terdapat beberapa audit komprehensif dari PBF ke apotek dan diperoleh hasil apotek yang bertindak seperti distributor dan menyalurkan obat dalam jumlah besar ke paramedis dan perorangan, selain itu ditemukan juga PBF dan apotek yang melakukan panel penjualan obat.

- Selain pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat, pada Tahun 2023 BBPOM di Makassar juga telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan sebanyak 1.131 sarana. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 885 sarana (78,24 %) memenuhi ketentuan

dan 246 sarana (21,76 %) tidak memenuhi ketentuan. Keseluruhan sarana memiliki persentase memenuhi ketentuan diatas target 78 % adalah distribusi PBF (82,75 %), Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) (94,44 %), Rumah sakit (96,84 %), Puskesmas (100 %), Klinik (81,44 %), distribusi Suplemen Kesehatan (97,87 %), Klinik Kecantikan (87,09 %). Tingginya angka kepatuhan ini disebabkan sudah adanya efek jera kepada pelaku usaha, sehingga minimnya ditemukan produk tanpa ijin edar (TIE) dan kedaluwarsa di pasaran.

- Masih Rendahnya kesadaran pelaku usaha di sektor distribusi dalam menerapkan pedoman cara distribusi yang baik.
- Kesadaran pelaku usaha di sektor distribusi OMKA yang rendah dan Gap kompetensi petugas yang tidak merata.

Alternatif Solusi

- Tejadinya penyesuaian cara pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan, dimana untuk sarana dengan risiko tinggi (*high risk*), maka pemeriksaan sarana dilakukan secara intensif.
- Bimbingan teknis tentang cara distribusi yang baik bagi pelaku usaha guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran sarana/pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Asistensi Kepada Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan dana alokasi khusus untuk meningkatkan pengawasan sarana distribusi/ pelayanan kefarmasian.
- Senantiasa memberikan informasi dan edukasi kepada pelaku usaha pada saat melakukan pengawasan serta Pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha terkait penerapan sanksi baik administrasi maupun *projustisia* sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan.
- Mendorong pelaku usaha untuk melakukan *self assesment* guna memastikan kepatuhan terhadap Undang - Undang.
- Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha di sektor distribusi dalam menerapkan pedoman cara retail yang baik sehingga mendistribusikan produk obat dan makanan yang aman bermutu dan berkhasiat.
- Melakukan usaha peningkatan kemampuan petugas dalam melakukan pengawasan secara optimal melalui Peningkatan kompetensi Inspektur untuki pendidikan dan pelatihan yang berjenjang.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori Tidak dapat disimpulkan antara lain :

- Meningkatkan kompetensi petugas inspeksi dalam melakukaan pemeriksaan sarana Distribusi.
- Kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha mampu mengimplementasikan pedoman cara retail yang baik melalui kegiatan sosialiasi maupun pertemuan teknis.

- Melakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha mampu tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengimplementasikan pedoman cara distribusii yang baik.
- Senantiasa memberikan informasi dan edukasi kepada pelaku usaha pada saat melakukan pengawasan.

h. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 78,25 dengan capaian 100,32 % pada tahun 2023. Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,01) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 100,32 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 99,00 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
100,32	1.876.726.000	1.857.910.022	99,00	1,01	0,01	Efisien

i. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku.	Melakukan pengawasan terhadap sarana distribusi secara maksimal disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Obat tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Obat tanpa izin edar dan substandar.			Belum sadarnya pelaku usaha terhadap kepatuhan aturan yang berlaku.	Sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan meningkat.

2.	Penekanan kepada petugas balai untuk senantiasa memberikan edukasi dan masukan perbaikan pada saat melaksanakan pemeriksaan pada sarana distribusi.	- Sharing knowledge antara petugas yang sudah berpengalaman dengan petugas baru. - Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil baru. - Petugas telah mengikuti pelatihan secara berjenjang untuk kompetensi inspektur terkait Pengawasan.			Belum rutinnya dilakukan sharing konowledge antar petugas senior dan baru.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman petugas baru.
3.	Tetap menjalin kerja sama dengan lintas sektor dalam mengimplementasikan peraturan di bidang pengawasan dan pengelolaan Obat dan Makanan baik yang dilakukan secara mandiri maupun terpadu.	Telah dilakukan koordinasi terkait hasil pengawasan dengan lintas sektor antara lain dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.				
4.	Melakukan pengawasan secara lebih optimal.	-	Melakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha mampu mengimplementasikan pedoman cara distribusi yang baik melalui kegiatan sosialiasi maupun	2024	Belum optimalnya pelaku usaha dalam mengimplementasikan pedoman cara distribusi yang baik.	Diharapkan Sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan meningkat.

			pertemuan teknis.			

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas reviuw Rencana Strategis tahun 2020-2024, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi publik terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan.
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional.
- Telah dilakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran tahun 2023 untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Penacapain kinerja untuk indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.

6. Indeks Pelayanan Publik

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Aspek Pengukuran

a. **Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);**
b. **Profesionalitas SDM (18%);**
c. **Sarana Prasarana (15%);**
d. **Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);**
e. **Konsultasi dan Pengaduan (15%);**
f. **Inovasi (7%).**

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Target Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 adalah 4,40. Capaian Realisasi indeks pelayanan publik Tahun Tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 4,61 dengan kategori "Sangat Baik".

Tabel 3.55

Target Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik	4,40	4,61	104,77	Sangat Baik

Indeks Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
b. Profesionalitas SDM (18%);
c. Sarana Prasarana (15%);
d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
f. Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks Indeks Pelayanan Publik (IPP) Badan POM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM.

Cara perhitungan indikator ini

a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)
b. Kategori nilai:

***Range* Nilai**	**Kategori**	**Makna**
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Target dan capaian dihitung Tahunan untuk indikator Indeks Pelayanan Publik dan Pada Tahun 2023 realisasi Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makakassar adalah 4,61 dengan persentase capaian 104,77 % kategori "Sangat Baik".

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik	4,40	4,61	104,77	Sangat Baik

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.56. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Indeks Pelayanan Publik	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tahun 2020	3,51	3,95	112,54	Sangat Baik
Tahun 2021	4,20	4,35	103,57	Sangat Baik
Tahun 2022	4,30	4,56	106,05	Sangat Baik
Tahun 2023	4,40	4,61	104,77	Sangat Baik

Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM Makassar untuk tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Tahun 2021 berada pada angka 103,75 Kategori "Sangat Baik" lebih rendah apabila dibandingkan tahun 2020 dengan nilai 112,54 kategori "Sangat Baik".

Sedangkan target capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM Makassar untuk Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021. Tahun 2022 berada pada angka 106,045 Kategori "Sangat Baik" lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2021 dengan nilai 103,57 kategori "Sangat Baik".

Adapun, capaian tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Tahun 2023 berada pada angka 104,77 kategori "Sangat Baik" lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang berada pada angka 106,05 kategori "Sangat Baik".

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.57. Perbandingan realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Makassar Tahun 2022 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Indeks Pelayanan Publik	4,40	4,55	4,61	101,31	Tercapai/ Melampaui	▲

indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra Tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Tercapai/ Melampaui, sehingga diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra hingga Tahun 2024 tetap dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.7

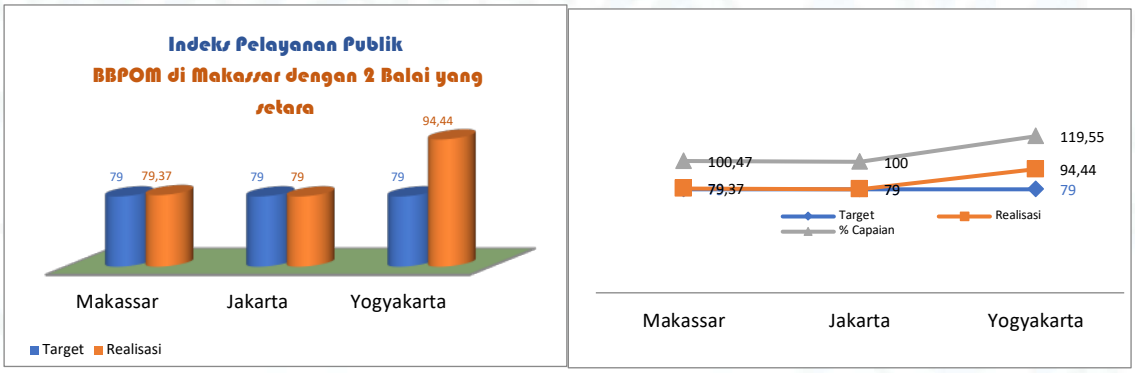
Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta danBBPOM di Yogyakarta tahun 2023

Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	4,60	4,61	104,77	Sangat Baik
BBPOM di Jakarta	4,55	4,84	106,37	Sangat Baik
BBPOM di Yogyakarta	4,60	4,93	107,17	Sangat Baik
Nasional	4,39	4,65	105,92	Sangat Baik

Target indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM Makassar, BBPOM Yogyakarta pada angka yang sama, sementara target BBPOM Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan 2 Balai lainnya. Hasil capaian Indeks Pelayanan Publik BBPOM Makassar telah mencapai target dengan nilai 104,77 lebih rendah apabila dibandingkan dengan BBPOM Yogyakarta dan BBPOM di Jakarta kategori "Sangat Baik" serta persentase capaian tertinggi adalah BBPOM di Yogyakarta dengan capaian 107,17 lebih tinggi dibandingkan BBPOM Jakarta dan BBPOM Makassar dengan kategori "Sangat Baik".

Realisasi indikator BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta sudah berada diatas rata-rata capaian nasional sebesar 4,65.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Indeks Pelayanan Publik syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023

e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Target BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan target Nasional Badan POM

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase Indeks Pelayanan Publik	4,40	4,39	4,61	105,01	Sangat Baik

Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 BBPOM di Makassar **telah mencapai** target Badan POM secara nasional, dengan nilai 105,01 dengan kategori "Sangat Baik".

f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makakassar kategori Sangat Baik antara lain :

- Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator sasaran strategis meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik. Dari hasil penilaian Unit Pelayanan Publik Tahun 2023 yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik 4,61 bagi BBPOM di Makassar menunjukkan masih banyak aspek yang belum maksimal. Aspek Kebijakan Pelayanan, Prosfesionalisme SDM, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, SPIP, serta Inovasi merupakan aspek aspek yang masih harus ditingkatkan. Beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan antara lain sbb :
    - Aspek kebijakan : pada saat menyusun Standar Kebijakan Pelayanan Publik BBPOM Makassar belum melibatkan pihak pihak terkait misalnya OPD Pemerintah Daerah, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, masyarakat umum, dll.
    - Aspek Profesionalisme SDM : belum menerapkan mekanisme reward and punishment untuk SDM pemberi layanan publik. Selain itu respon pelayanan publik BBPOM Makassar masih perlu ditingkatkan.
    - Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik : BBPOM Makassar belum melakukan update data dan informasi yang ada di Sistem Informasi Pelayanan Publik secara terjadwal.
    - Aspek Konsultasi dan Pengaduan : BBPOM Makassar belum melakukan pengarsipan proses pengaduan dan hasilnya sehingga terdokumentasi dan mudah diakses.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM Makassar untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan Badan POM. Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan Badan POM untuk memberikan kepastian bagi pemberi layanan dan penerima layanan berusaha dipenuhi oleh BBPOM Makassar, bahkan beberapa hal dapat dipenuhi dengan sangat baik oleh BBPOM Makassar misalnya timeline untuk rekomendasi SKI dan SKE. Sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pemberi layanan dilakukan peningkatan kompetensi SDM secara terencana dan terstruktur. Mengantisipasi lingkungan strategis yang semakin dinamis diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi paripurna dalam memberikan layanan. Kebutuhan SDM secara kuantitas sebagian dapat digantikan dengan pemanfaatan Sistem Informasi yang dapat mempercepat layanan, memberikan layanan yang konsisten, transparan dan akuntabel.

Sistem informasi yang dikembangkan BBPOM Makassar ditujukan untuk memberikan kemudahan dan transparansi serta kepastiaan kepada pelanggan. Telah dikembangkan tracking system untuk layanan pengujian pihak ketiga sehingga konsumen mengetahui dengan pasti status progress sample yang sedang diuji di laboratorium BBPOM Makassar

- Perbaikan kebijakan pelayanan, sarana dan parasana pelayanan publik dan inovasi pelayanan publik
- Tersedianya pemberian layanan konsultasi, sosialisasi dan pendampingan tentang Tata Cara Registrasi Produk kepada pelaku usaha sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan sarana.
- Tersedianya layanan konsultasi online terkait registrasi obat dan makanan 24 jam 7 hari,
- Tersedianya sarana dan prasarana ruang pelayanan publuk yang lengkap dan nyaman

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pelayanan publik BBPOM Makassar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menyusun dan mereview Standar Pelayanan Publik BBPOM Makassar dengan melibatkan stake holder terkait misalnya OPD Pemerintah Daerah, asosiasi pelaku usaha, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dll
- Melakukan survey pelayanan publik sebagai masukan peningkatan kualitas layanan publik dan menentukan reward untuk SDM. Survey dilakukan setiap bulan dan hasilnya akan digunakan untuk memilih employee of the month pelayanan public.
- Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, telah dikembangkan subsite yang berisi berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam bentuk video tutorial sehingga memudahkan pelaku usaha memahami standar dan prosedur yang harus dipenuhi. Saat ini pengembangan sub site ini telah dimulai dengan mengembangkan aplikasi pendukung antara lain aplikasi telusur pihak ketiga, Sistem Tamu Digital, Sistem Registrasi dan Sertifikasi. Selain itu BBPOM Makassar akan mereview kebijakan pelayanan publik yang lebih mempermudah pelanggan dalam mendapatkan layanan publik dari BBPOM Makassar.
- Pengelolaan arsip pengaduan dan layanan akan dilakukan dengan lebih baik menggunakan system informasi sehingga terdokumentasi lebih baik dan mudah telusur serta mudah diakses.
- Meningkatkan Kompetensi petugas dalam melakukan pelayanan publik.
- Meningkatkan serta Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kualitas pelayanan publik dengan pemenuhan sarana prasarana layanan publik, transformasi SDM aparatur baik kemampuan teknis maupun

softskill, serta transformasi digital untuk menjadikan pelayanan BPOM yang efektif dan efisien serta Inovasi pelayanan publik lebih di tingkatkan

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi pelayanan publik dan pembenahan fasilitas pada ruang layanan publik sebagai upaya peningkatan pelayanan publik sehingga terjadi peningkatan indeks pelayanan publik dari Tahun sebelumnya disebabkan karena beberapa aspek telah ditangani secara maksimal. Beberapa aspek yang telah dilakukan perbiaikan antara lain sbb :

- Aspek kebijakan : pada saat menyusun Standar Kebijakan Pelayanan Publik BBPOM Makassar telah melibatkan pihak pihak terkait misalnya OPD Pemerintah Daerah, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, masyarakat umum, dll.
- Aspek Profesionalisme SDM : telah menerapkan mekanisme *reward and punishment* untuk SDM pemberi layanan publik. Namun respon pelayanan publik BBPOM Makassar masih perlu ditingkatkan.
- Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik : BBPOM Makassar telah melakukan update data dan informasi yang ada di Sistem Informasi Pelayanan Publik secara terjadwal.
- Aspek Konsultasi dan Pengaduan : BBPOM Makassar telah melakukan pengarsipan proses pengaduan dan hasilnya sehingga terdokumentasi dan mudah diakses.
- Pemanfaatan system informasi di semua aspek tersebut merupakan kunci peningkatan pelayanan publik BBPOM di Makassar saat ini, system informasi merupakan solusi untuk tetap memberikan pelayanan publik yang prima.

g. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Indeks Pelayanan Publik diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 4,61 dengan capaian 104,77 % pada tahun 2023. Indikator Indeks Pelayanan Publik kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,07) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 104,77 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 98,10%.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
104,77	692.753.000	679.588.337	98,10	1,07	0,07	Efisien

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

- Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi pelayanan publik dan renovasi ruang layanan publik sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, namun masih ada beberapa aspek yang

belum ditangani secara maksimal. Beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan antara lain :

- Aspek kebijakan : pada saat menyusun Standar Kebijakan Pelayanan Publik BBPOM Makassar belum melibatkan pihak pihak terkait misalnya OPD Pemerintah Daerah, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, masyarakat umum, dll.
- Aspek Profesionalisme SDM : belum menerapkan mekanisme *reward and punishment* untuk SDM pemberi layanan publik. Selain itu respon pelayanan publik BBPOM Makassar masih perlu ditingkatkan.
- Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik : BBPOM Makassar belum melakukan update data dan informasi yang ada di Sistem Informasi Pelayanan Publik secara terjadwal.
- Aspek Konsultasi dan Pengaduan : BBPOM Makassar belum melakukan pengarsipan proses pengaduan dan hasilnya sehingga terdokumentasi dan mudah diakses.

Pemanfaatan system informasi di semua aspek tersebut merupakan kunci peningkatan pelayanan publik BBPOM di Makassar.

- Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang nyaman, lengkap dan mudah diakses.
- Peningkatan kompetensi petugas untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik (Pelayanan Prima).

i. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Sebagai upaya perbaikan pelayanan publik BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Menyusun dan mereview Standar Pelayanan Publik BBPOM Makassar dengan melibatkan *stakeholder* terkait.
- Melakukan survey pelayanan publik sebagai masukan peningkatan kualitas layanan publik dan menentukan *reward* untuk SDM. Survey dilakukan setiap bulan dan hasilnya akan digunakan untuk memilih *employee of the month* pelayanan publik.
- Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, akan dikembangkan subsite yang berisi berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam bentuk video tutorial sehingga memudahkan pelaku usaha memahami standar dan prosedur yang harus dipenuhi. Selain itu BBPOM Makassar akan mereview kebijakan pelayanan publik yang lebih mempermudah pelanggan dalam mendapatkan layanan publik dari BBPOM Makassar.
- Pengelolaan arsip pengaduan dan layanan akan dilakukan dengan lebih baik menggunakan system informasi sehingga terdokumentasi lebih baik dan mudah telusur serta mudah diakses.
- Akan dikembangkan layanan *live chat* di website BBPOM di Makassar sehingga masyarakat dapat terlayani lebih baik.
- Peningkatan Sarana dan prasarana untuk pemenuhan standar pelayanan publik sehingga memberikan pelayanan publik secara optimal
- Melakukan pelatihan pelayanan publik kepada petugas terkait pelayanan prima.
- Memperluas pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik Propinsi Sulawesi Selatan

j. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai *	Belum **		

			Rencana Aksi	Timeline	Rencana Aksi	
1.	Kebijakan Pelayanan : - Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik agar mengacu pada PermenPANRB No.16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan FKP	Kebijakan Pelayanan : - Malaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang melibatkan (a) tokoh masyarakat; (b) akademisi; (c) dunia usaha; (d) LSM serta melibatkan media massa - publikasi Standar Pelayanan memuat minimal 6 komponen service delivery pada seluruh media publikasi baik non elektronik dan elektronik. - Penetapan maklumat pelayanan diperbaharui dengan menyesuaikan narasi berupa janji instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. - Pengaturan mengenai sistem istirahat bergilir bagi petugas layanan tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat istirahat dan penambahan ekstra pelayanan.			Nilai IPP tahun 2022 4,56 kategori pelayanan prima.	Terjadi peningkatan nilai IPP menjadi 4,61 kategori pelayanan prima.
2.	Profesonalisme SDM : - Peningkatan kompetensi - Waktu	- Peningkatan kompetensi menyesuaikan kebutuhan petugas pelayanan yang disertai data dukung berupa informasi mengenai kompetensi SDM, posisi penugasan, masa kerja, pendidikan, pelatihan, dan sertifikat. - Mencantumkan Waktu pelayanan publik pada standar pelayanan secara jelas serta jadwal pelayanan ekstra. - Penetapan kompetensi SDM melalui Keputusan Kepala BBPOM di Makassar tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik. - Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai khususnya bagi petugas layanan publik.			Nilai IPP tahun 2022 4,56 kategori pelayanan prima.	Terjadi peningkatan nilai IPP menjadi 4,61 kategori pelayanan prima.
3.	Sarana Prasarana	- Terdapat CCTV disertai dengan pemeriksaan karcis untuk memberi rasa aman pada pengguna layanan. - Terdapat toilet duduk/jongkok untuk pengguna layanan. - Tersedia Pada sarana font office untuk layanan konsultasi dan pengaduan berada pada ruangan khusus yang mudah diakses pengguna layanan. - Tersedia sarana prasarana berkebutuhan khusus yang mendukung dalam pemberian			Nilai IPP tahun 2022 4,56 kategori pelayanan prima.	Terjadi peningkatan nilai IPP menjadi 4,61 kategori pelayanan prima.

		layanan bagi kelompok rentan seperti petugas khusus, kursi roda, toilet khusus disabilitas, SP huruf braille dan lain sebagainya.				
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	- Telah melengkapi unsur unsur sistem informasi (unsur profil penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja lembaga) pada subsite UPP BPOM. - Dalam rangka keamanan data elektronik, BBPOM di Makassar telah menggunakan subsite yang telah disediakan Pusdatin dengan domain pom.go.id. - Penyebarluasan informasi secara elektronik serta penyebarluasan informasi non elektronik untuk memberi akses bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan IT. - BBPOM Makassar telah pro aktif mewujudkan dan berpartisipasi dalam Mall Pelayanan Publik. - Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT.			Nilai IPP tahun 2022 4,56 kategori pelayanan prima.	Terjadi peningkatan nilai IPP menjadi 4,61 kategori pelayanan prima.
5.	Konsultasi dan Pengaduan	- BBPOM Makassar telah mendokumentasikan hasil konsultasi dan pengaduan baik secara fisik maupun elektronik, dan secara berkala untuk mempublikasikan hasil layanan konsultasi dan pengaduan baik secara elektronik maupun fisik dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan informasi melalui media sosial dan FAQ pada subsite UPP. - Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster /spanduk /leaflet/buku/dokumen/ bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT. Untuk konsultasi dan pengaduan yang			Nilai IPP tahun 2022 4,56 kategori pelayanan prima.	Terjadi peningkatan nilai IPP menjadi 4,61 kategori pelayanan prima.

		sering ditanyakan dibentuk FAQ pada menu di subsite unit kerja.				
6.	Inovasi	- Setiap inovasi pelayanan publik dilengkapi dengan laporan pelaksanaan inovasi. - Dalam pelaksanaan replikasi, BBPOM di Makassar mendokumentasikan setiap inovasi yang yang telah direplikasi oleh organisasi pelayanan publik lain.			Nilai IPP tahun 2022 4,56 kategori pelayanan prima.	Terjadi peningkatan nilai IPP menjadi 4,61 kategori pelayanan prima.

k. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Indeks Pelayanan Publik dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas reviuw Rencana Strategis tahun 2020-2024, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional.
- Penacapain kinerja untuk indikator Indeks Pelayanan Publik serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.



Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Ruang Lingkup UMKM :
- UMK pada Pangan (Usaha Mikro dan Kecil)
- UMK pada OBat Tradisional (UKOT dan UMOT)
- UMK pada Kosmetik

Ruang Lingkup UMKM:

- UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan Tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

b) Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan Tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

- UMKM pada OT mencakup
  UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golonganB

b. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
  1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
  2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
  3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
  4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

c. Kategori UMKM yang didampingi:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT :
  1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
  2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum Tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
  3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
  4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
  5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- Untuk UMKM Kosmetik :
  1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)

2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Perhitungan di atas merupakan persentase progres pendampingan UMKM yang akan dilakukan mulai bulan Januari hingga November 2023. Persentase UMKM yang memenuhi standar dapat dihitung pada bulan Desember 2023.

Persentase progress tahapan pendampingan UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik pada triwulan IV sebesar 79,37 % dengan capaian 100,47% dengan kategori **Sangat Baik**.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2023 adalah 100,47 % dengan realisasi sebesar 79,37 % Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik telah memenuhi syarat **diatas dari target** yang dietentukan sebesar 79 dengan kategori **"Sangat Baik" .**

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	79,37	100,47	Sangat Baik

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2021	-	-	-	-
Tahun 2022	77	89,33	116,01	Sangat Baik
Tahun 2023	79	79,37	100,47	Sangat Baik

Realisasi Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT Dan Kosmetik Yang Baik tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru. Sedangkan tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Realisasi tahun 2023 sebesar 79,37 dengan capaian 100,47 % kategori "Sangat Baik" lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 dengan realisasi sebesar 89,33 capaian 116,01 % kategori "Sangat Baik".

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	81	79,37	97,98	Akan Tercapai	

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra Tahun 2024, serta capaian yang diperoleh masuk kategori Akan Tercapai. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra Tahun 2024 dapat ditingkatkan kategori menjadi Sangat Baik.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.7

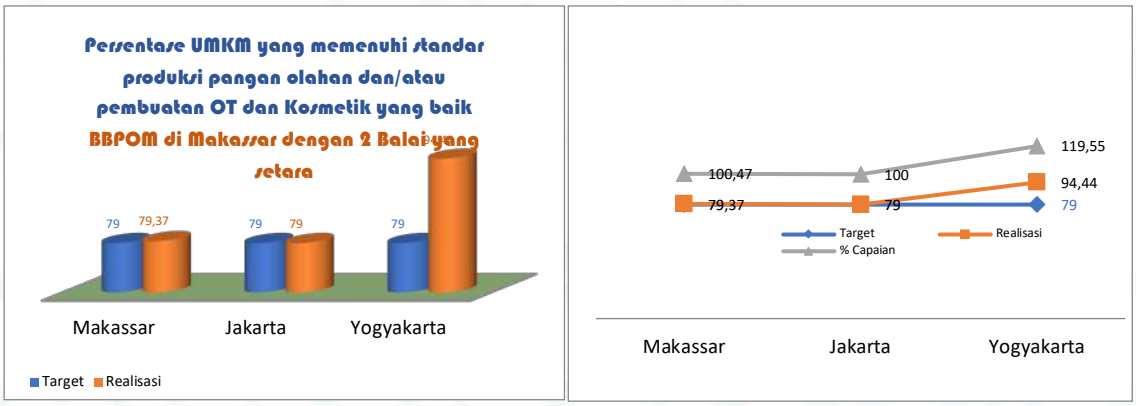
Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023

Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	79	79,37	100,47	Sangat Baik
BBPOM di Jakarta	79,00	79,00	100,00	Sangat Baik
BBPOM di Yogyakarta	79,00	94,44	119,55	Sangat Baik

Target indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik BBPOM Makassar, BBPOM Jakarta, dan BBPOM Yogyakarta pada angka yang sama. Hasil capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

BBPOM Yogyakarta telah mencapai target dengan nilai 94,44 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM Makassar dan BBPOM di Jakarta kategori "Sangat Baik", sementara persentase capaian tertinggi adalah BBPOM di Yogyakarta dengan capaian 119,55 lebih tinggi dibandingkan BBPOM Makassar dan BBPOM Jakarta dengan kategori "Sangat Baik".

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023

e. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Target BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2023 dengan target Nasional Badan POM

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	79	79,37	100,47	Sangat Baik

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2023 BBPOM di Makassar **telah mencapai** target Badan POM secara nasional, dengan nilai 100,47 dengan kategori "Sangat Baik".

f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik kategori "Sangat Baik" antara lain:

- Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi, diperoleh capaian lebih dari 100%, hal ini terjadi dikarenakan pendampingan UMKM Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dengan berbagai upaya. Kegiatan pendampingan yang telah dilakukan meliputi bimbingan teknis, layanan konsul denah bangunan produksi, desk konsultasi terkait pemenuhan aspek cara produksi/pembuatan yang baik, desk konsultasi terkait pemenuhan dokumen, desk konsultasi terkait pemilihan bahan baku dan produk yang memenuhi ketentuan, serta desk konsultasi terkait akses melalui sistem e-sertifikasi, e-registrasi pangan olahan.

  Dengan dilaksanakan bimtek, pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan pemenuhan dokumen persyaratan dan ketentuan terkait sarana produksi pangan, obat tradisional dan kosmetik menjadi meningkat. Bimbingan teknis dan pendampingan intensif sangat diperlukan oleh pelaku usaha agar dapat segera memenuhi persyaratan sehingga izin edar dapat segera diperoleh.
- Sampai dengan Tahun 2023 capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik melebihi target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat sarana UMKM Pangan yang belum memenuhi persyaratan dan memerlukan waktu lebih lama untuk memperbaiki sarana produksi serta mempersiapkan dokumen terkait pemenuhan cara produksi yang baik dan dokumen administrasi yang diwajibkan sebagai persyaratan pengajuan pendaftaran produk. Hal ini disebabkan oleh permasalahan di hulu perizinan sebelum melakukan pengurusan ijin edar Badan POM dan beberapa permasalahan internal / kendala ekonomi bagi para pelaku usaha.
- Kompetensi, komitmen dan ketekunan fasilitator dalam membina dan mendampingan pelaku UMK.
- Kemauan dan komitmen pelaku UMK untuk mengikuti program pendampingan.
- Kerjasama lintas sektor dalam fasilitasi UMK
- Melaksanakan kegiatan pendampingan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Pelaksananaan Inovasi Pedang Puang Basok (Pendampingan Pelaku UMK Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik). Pedang Puang Baso merupakan inovasi yang memberi pendampingan kepada para pelaku UMKM di bidang pangan, kosmetik dan obat tradisional. Pendampingan diberikan agar pelaku usaha dapat memperoleh izin edar produk.

g. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 79,37 dengan capaian 100,47 % pada tahun 2023. Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,08) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 100,47 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 93,23 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2023

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
100,47	93.917.000	87.560.000	93,23	1,08	0,08	Efisien

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori baik antara lain :

- Pelaksanaan PAGC (Pangan Aman Goes to Campus).
- Kolaborasi desk perizinan dengan PTSP
- Layanan konsultasi online dilaur jam kerja.
- Target pendampingan UMKM sesuai DIPA yaitu 25 UMKM, hingga akhir 2023, BBPOM di Makassar telah berhasil mendampingi sebanyak 25 UMKM sesuai tahapan yang telah ditentukan pusat Dalam rangka pendampingan UMKM, BBPOM di Makassar membuat inovasi Pedang Puang Basok (Pendampingan Pelaku UMK Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik). Pedang Puang Baso merupakan inovasi yang memberi pendampingan kepada para pelaku UMKM di bidang pangan, kosmetik dan obat tradisional. Pendampingan diberikan agar pelaku usaha dapat memperoleh izin edar produk.

k. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan koordinasi dengan organisasi profesi dan lintas sektor dalam	Mengadakan pertemuan Dengan organisasi profesi dan lintas sektor (al. Pelaksanaan PAGC (Pangan Aman Goes to Campus),			Belum adanya koordinasi dengan organisasi profesi dan lintas sektor dalam pemenuhan	Telah ada kegiatan pertemuan dengan organisasi profesi dan lintas sektor dalam pemenuhan

	pemenuhan persyaratan.	Kolaborasi desk perizinan dengan PTSP).			persyaratan.	persyaratan.
2.	Pendampingan kepada pelaku usaha terkait persyaratan pengajuan pendaftaran, termasuk dalam proses pengajuan izin usaha melalui OSSRBA (Online Single Submission Risk Based Approach).	Telah dilaksanakan pendampingan dalam proses pengajuan izin usaha melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) pada kegiatan Jemput Bola Registrasi Pangan.	.		Kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai persyaratan pengajuan pendaftaran, termasuk pengajuan izin usaha melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach).	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha mengenai persyaratan pengajuan pendaftaran, termasuk pengajuan izin usaha melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach).
3.	Memotivasi pelaku usaha untuk proaktif dalam melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang dipersyaratkan.	Telah diberikan motivasi kepada pelaku usaha untuk proaktif dalam melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang dipersyaratkan setiap kali dilakukannya pengawasan dan pembinaan.			Respon pelaku usaha lambat dan kurang proaktif.	Respon pelaku usaha lebih cepat dan proaktif.

l. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas reviuw Rencana Strategis tahun 2020-2024, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan.
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional.

- Penacapain kinerja untuk indicator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.





Sasaran 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Makassar sebagai berikut :

1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	3 Jumlah desa pangan aman
2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

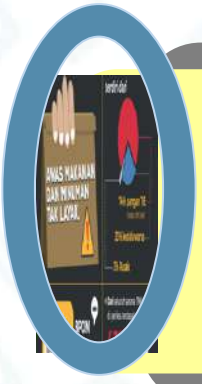
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
Target 94,00 Realisasi 94,84 Capaian 100,89 %

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
Target 98 Realisasi 98 Capaian 100 %

Jumlah desa pangan aman
Target 25 Realisasi 25 Capaian 100 %

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
Target 18 Realisasi 18 Capaian 100 %

Pada sasaran strategis keenam “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan 4 indikator antara lain :



1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

1) KIE melalui media cetak dan elektronik
2) KIE langsung ke masyarakat dan
3) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kategori:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *faceto face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*.

Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar , menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada Tahun berjalan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 3.34

Target Kinerja Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,00	94,84	100,89	Sangat Baik

Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada Tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kategori:

a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;

b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;

c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;

d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE (langsung, webinar, dll) atau penerima KIE (follower media social, subscriber youtube, dll) Balai Besar POM di Makassar dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dilakukan dengan menggunakan tools pada link survei/ QR Code via https://evaluasikie.pom.go.id serta menggunakan kuesioner fisik Jika kondisi tidak memungkinkan (terkendala sinyal, internet, dsb). Setelah kuesioner terisi lengkap, maka Enumerator dapat menginput pada aplikasi Evaluasi KIE secara online minimal 30 orang responden yang telah mengikuti/menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai Media. Hasil survei ditampilkan dalam Aplikasi Evaluasi KIE https://evaluasikie.pom.go.id/

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.60. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indeks Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tahun 2020	85,16	92,41	108,51	Sangat Baik
Tahun 2021	92	92,85	100,92	Sangat Baik
Tahun 2022	93	93,13	100.14	Sangat Baik
Tahun 2023	94	94,84	100,89	Sangat Baik

Perbandingan target capaian kinerja indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan BBPOM Makassar untuk tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Tahun 2021 berada pada angka 100,92 lebih rendah apabila dibandingkan tahun 2020 dengan nilai 108,51 kategori "Baik" Terdapat penurunan target indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar tahun 2021 dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar 7,59 point; tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 berada pada angka 93,13 lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2021 dengan nilai 92,85 kategori "Sangat Baik"
tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Tahun 2023 berada pada angka 94,84 lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2022 dengan nilai 93,13 kategori "Sangat Baik"

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.61. Perbandingan realisasi Indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indeks Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Target 2024 Renstra	93	95	94,84	99,83	Akan Tercapai
Target 2024 Reviu (Rorenkeu/Unit Pengampu)		95,7		99,10	Akan Tercapai

Berdasarkan data pada table indikator Indeks Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan capaian tahun 2023 BBPOM di Makassar jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yang tertuang pada renstra awal / Reviu Renstra serta dibandingkan dengan reviu target Biro Perencanaan dan Keuangan bersama Unit Pengampu keduanya belum melampaui target tahun 2024, dengan kategori Akan Tercapai, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Tahun 2024 dapat lebih meningkat menjadi kategori "Sangat Baik".

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta dan Nasional Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

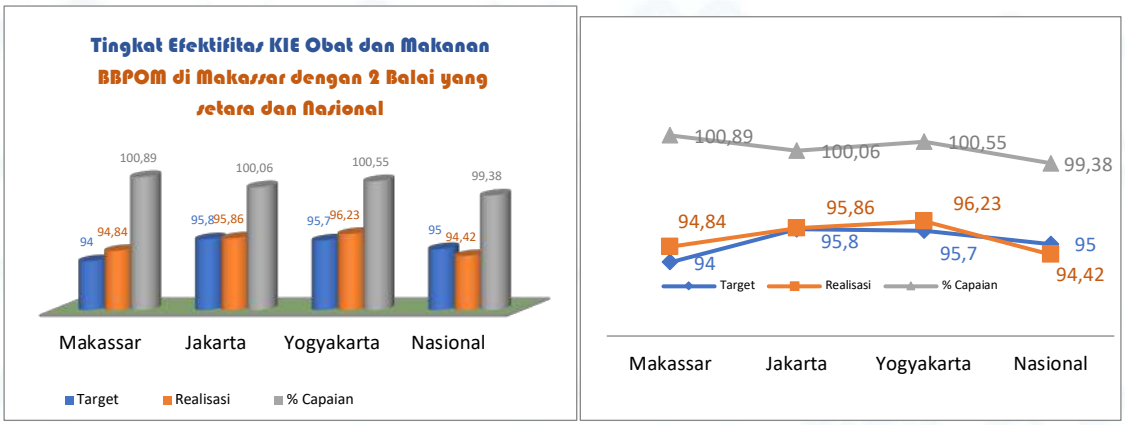
Tabel 3.7
Capaian Kinerja Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta,, BBPOM di Yogyakarta dan secara Nasional tahun 2023

Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	94	94,84	100,89	Sangat Baik
BBPOM di Jakarta	95,80	95,86	100,06	Sangat Baik
BBPOM di Yogyakarta	95,70	96,23	100,55	Sangat Baik
Nasional	95	94,42	99,38	Cukup

Berdasarkan data pada tabel, realisasi tertinggi diperoleh BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Jakarta, dan yang terendah adalah BBPOM di Makassar. Unit yang melampaui ralisasi nasional adalah di Yogyakarta, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Makassar serta Unit yang melampaui target nasional adalah BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Jakarta.

Hanya BBPOM Makassar elum mencapai target nasional dibandingkan dengan Balai sejenis /setara yang berada dalam kluster sama , maka BBPOM di Makassar perlu meningkatkan strategi, kolaborasi, inovasi, dan pengembangan ide dan kreatifitas sehingga kegiatan KIE yang dilakukan melalui berbagai media benar-benar menyentuh seluruh Masyarakat hingga kepelosok daerah diwilayah kerja Sulawesi Selatan.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta,, BBPOM di Yogyakarta dan Nasional Tahun 2023

Perbandingan Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan realisasi BPOM atau capaian nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan target IKU Badan POM

Indikator	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan	94	95	94,84	99,83	Cukup

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 BBPOM di Makassar **Belum mencapai** target IKU Badan POM secara nasional atau dibawah dari rata-rata Nasional Badan POM, dengan nilai 99,83 dengan kategori "Cukup", namun realisasi BBPOM Makassar 94,84 lebih tinggi dibandingkan realisasi Badan POM secara nasional 94,42.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Sangat Baik antara lain :

- Pelaksanaan pengukuran tingkat Efektiviatas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan pada tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali pada TW I, TW II, TW III dan TW IV Adapun aspek yang dinilai terdiri atas:
  a) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
  b) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima
  c) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE
  d) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan
- Kegiatan KIE yang dilaksanakan di Balai Besar POM di Makassar bertujuan untuk memberikan pengatahuan tentang Obat dan Makanan aman kepada seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai forum dan Media diantaranya melalui Iklan Televisi, Brosur, koran, Baliho, Media Sosial (Facebook, Instagram dan Twitter), Talkshow Televisi, Talkshow Radio, Penyuluhan dan Webinar.
- Sampai dengan Desember tahun 2023 juga dilaksanakan kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat sebanyak 55 (empat puluh empat) titik yang dilaksanakan di Kabupaten Barru, Bantaeng, Selayar, Bone, Soppeng, Pangkep, Jeneponto dan Kota Makassar dengan menyasar masyarakat umum sebanyak 28704 peserta.
- Pembuatan konten KIE di media social dalam berbagai bentuk seperti infografis dan video sehingga interaksi dengan masyarakat meningkat
- Layanan informasi melalui media social ditingkatkan (facebook, Instagram, tweeter)
- Telah dilakukan kegiatan KIE obat dan makanan sebanyak 55 kegiatan melalui KIE bersama tokoh masyarakat, Penyebaran Informasi serta Talkshow bak di radio maupun televisi.

- Kontributor indeks tertinggi adalah indikator :
  - Pemahaman, yang artinya masyarakat dapat memahami konten informasi yang diterima, kemudian
  - Manfaat artinya masyarakat merasakan manfaat kegiatan KIE
  - Ragam Media yang merupakan penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE antara lain : Penyuluhan, Media Sosial, Berita/Iklan di TV
  - Minat : Mayoritas Masyarakat Berminat dan Sangat berminat mengikuti Kegiatan KIE
    3 tipok KIE yang paling diminati : Pangan Olahan, Obat dan Kosmetik.

Target	Ragam Kegiatan	Pemahaman	Manfaat	Minat	Indeks Ef KIE	Capaian Target	Jumlah Responden
94	93,9	97,35	94,78	91,41	94,84	100,89	230

Di tiap titik kegiatan KIE dihadiri oleh kurang lebih 500 orang orang. Indeks efektifitas KIE pada Tahun 2023 sebesar 94,84 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing masing aspek adalah : aspek ragam kegiatan; aspek pemahaman; aspek manfaat dan aspek minat. Aspek pemahaman dan manfaat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indek efektifitas KIE dari hasil survey ini harus menjadi kajian dan masukan bagi BBPOM di Makassar untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekwensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Hasil survey Tingkat Efektifitas KIE yang jauh melebihi target merupakan hasil kerja keras selama Tahun 2023. Namun BBPOM Makassar harus tetap konsisten melaksankan program intensitas pelaksanaan KIE. Berbagai upaya KIE dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial harus terus dilakukan. Demikian juga dengan pelibatan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan BBPOM Makassar tetap terjalin
- Pelayanan informasi melalui media lebih ditingkatkan, bukan hanya melalui infografis juga melakukan Ig Live dan Webwinar
- Hingga Tahun 2023 BBPOM Makassar telah melaksanakan sebanyak 55 kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI di berbagai Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Di tiap titik kegiatan KIE dihadiri oleh kurang lebih 500 orang. Indeks efektifitas KIE sebesar 94,84 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing masing aspek adalah : aspek ragam kegiatan; aspek pemahaman; aspek manfaat dan aspek minat.
- Meningkatkan kompetensi narasumber.
- Memperluas cakupan KIE hingga ke Kabupaten/Kota yang frekuensi pelaksanaan KIE pada masyarakat masih rendah
- Melakukan Update materi secara berkala sesuai dengan peraturan perundangan yang terbaru.

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 94,84 dengan capaian 100,89 % pada tahun 2023. Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,01) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 100,89 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 99,73 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2022

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
100,89	7.906.097.000	7.884.776.661	99,73	1,01	0,01	Efisien

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

- Nilai indikator “Pemahaman” sebagai kontribusi terbesar pada pencapaian indeks dapat disebabkan beberapa hal antara lain:
  a. Pembuatan konten KIE di media sosial dalam berbagai bentuk seperti infografis, videografis, video, dan kuis sehingga interaksi dengan masyarakat meningkat.
  b. Telah dilaksanakan KIE di berbagai daerah dengan jumlah peserta rata-rata 500 Orang.
  c. Penyebaran produk informasi kepada masyarakat dalam cakupan yang sangat besar.
- Kontributor pertama pada pencapaian indeks Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan “Manfaat”, yang artinya masyarakat merasakan manfaat kegiatan KIE.
- Melakukan pengambilan data survei dalam setaip kegiatan KIE
- Mengusahakan agar kegiatan KIE dapat dilaksanakan tepat waktu
- Jenis media KIE yang digunakan memiliki pengaruh terhadap efektivitas KIE BPOM, untuk jenis penyuluhan, Virtual (Webinar/seminar online/daring), Media Sosial (Instagram BBPOM di Makassar (@bbpom_makassar), Twitter BBPOM di Makassar (@BBPOM_Makassar), Facebook BBPOM di Makassar (@Bbpom Makassar), Youtube BBPOM di Makassar (BBPOM di Makassar), Whatsapp Grup (0852 11111 533), Telegram) memiliki indeks yang lebih tinggi dibanding media yang lain. Hal ini disebabkan karena Jenis media penyuluhan dan Virtual memiliki kedekatan komunikasi dua arah antara BBPOM di Makassar dengan masyarakat/ audiens.
- Mayoritas masyarakat ‘Berminat” dan “sangat berminat” mengikuti kegiatan KIE BPOM. Informasi/topik yang paling banyak diminati adalah Pangan Olahan, karena terkait dengan kebutuhan pokok, topik berikutnya yang diminati adalah mengenai Obat dan Kosmetik. Topik lainnya yang diminati masyarakat diantaranya mengenai tata cara registrasi, informasi tentang air minum isi ulang, Alkes dan PKRT, isu terkini dll.
- Kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat secara langsung ternyata masih merupakan kegiatan KIE yang berdampak paling besar pada pencapaian pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Hal ini

disebabkan antara lain karena sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan tinggal di pedesaan dan kegiatan KIE secara langsung ini merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat, apalagi jika dihadiri oleh tokoh masyarakat atau pemuka agama. Hal ini di lakukan agar kehadiran BBPOM di Makassar dapat dirasakan oleh masyarakat di pedesaan.

- Pencapaian indikator ini ditunjang oleh kegiatan KIE secara langsung Bersama tokoh masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI. Kegiatan penyebaran informasi secara langsung serta KIE melalui talkshow radio serta inovasi parellui (Penyebaran informasi melalui infografis)

g. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai *	Belum **			
				Rencana Aksi	Timeline		
1.	Hingga bulan November telah dilaksanakan KIE sebanyak 52 Titik, perencanaan 3 titik KIE akan dilaksanakan bulan Desember, hal ini terkendala dengan Pelaksanaan KIE dengan tokoh masyarakat yang mendekati akhir tahun sehingga terbatasnya waktu penyelesaian administrasi keuangan akhir tahun dan resiko terdapat anggaran yang tidak dioptimalkan	Menjadwalkan 3 titik KIE pada awal Desember hingga paling lambat minggu kedua Desember, agar penyelesaian administrasi keuangan melalui TUP maupun LS dapat selesai sebelum batas penetapan pertangungjawaban Keuangan	kolaborasi dan komunikasi dengan para PIC KIE dengan tomas, agar menjadi perbaikan terhadap perencanaan jadwal KIE Tomas			Jumlah titik KIE tomas belum mencapai target sd bulan November 52 titik KIE dilakukan di Awal sd pertengahan Desember	Jumlah titik KIE tomas telah mencapai target sd bulan Desember 55 titik Penyusunan POA pelaksanaan KIE tahun depan tidak berakhir di akhir tahun
2.	Pelaksanaan KIE	Berdasarkan pada	KIE melalui sosial media			Pelaksanan kegiatan	Pelaksanaan

	tidak merata di wilayah kerja BBPOM di Makassar sebagian besar dilaksanakan di Dapil Tomas serta jadwal p[elaksanaan yang menyesuikan jadwal dari Tokoh masyarakat	hasil evaluasi sebelumnya, Balai Besar POM di Makassar meningkatkan pelaksanaan KIE, dengan memperbanyak pilihan sumber informasi KIE serta konten informasi yang disampaikan mencakup semua lapisan masyarakat.	dan videotron			KIE bersama Tokoh Masyarakat dilaksanakan sampai akhir Desember	semua titik KIE diselesaikan sesuai dengan target pelaksanaan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Upaya yang dilakukan pada tahun 2023 antara lain yaitu terdapat penambahan titik pelaksanaan KIE dengan tokoh masyarakat dan penambahan jumlah peserta tiap titik dari 250 orang per titik menjadi 500 orang per titik. Penambahan jumlah peserta ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap hasil survey efektifitas KIE.
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Telah dilakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran tahun 2022 untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Penacapain kinerja untuk indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya



2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan.

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memliki kategori memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA.

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan :

- advokasi lintas sektor keamanan PJAS,
- sosialisasi keamanan PJAS,
- Bimtek kader keamanan pangan sekolah,
- pemberian paket edukasi keamanan pangan,
- monitoring pemberdayaan kader
- keamanan pangan sekolah,
- sertifikasi PJAS Aman.

Koordinasi dengan Pemda:

1. Advokasi Lintas Sektor PJAS
2. Integrasi terpadu program PJAS dengan dengan program Pemda Kab/ Kota (penetapan lokus sekolah/madrasah, audit/pengawasan PJAS terpadu)

Kemandirian Sekolah:

1. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan
2. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman
3. Sampling dan pengujian PJAS

4. Sosialisasi Keamanan PJAS bagi Komunitas sekolah (medsos, webinar, dll)

Peningkatan kompetensi petugas:

1. Workshop Keamanan Pangan Nasional Terpadu
2. Pelatihan Auditor Piagam Bintang bagi petugas UPT
3. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah

Peran Aktif Kader:

- Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah

Pendampingan UMKM :

- Bimtek Keamanan PJAS untuk UMKM Produsen/Penyedia PJAS

Kategori Sekolah dengan PJAS Aman adalah :

1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya dikantin sekolah.

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Januari-April (TW 1 – TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10%	Maret-April (TW 1-TW 2)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April-Juni (TW 2-TW 3)
4	Pemberian Paket Edukasi / Produk Informasi Keamanan Pangan	10%	April-November (TW 2-TW 4)
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	Juli-September (TW 3-TW 4)
	Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah		
	Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah		
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20%	Agustus-November (TW 4)
7	Pengawalan	10%	Oktober-Desember (TW 4)
	Total Skor	100%	

Pada Tahun 2023 seluruh tahapan kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman telah selesai dilakukan sampai dengan tahap pengawalan, realisasi progress tahapan jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman pada Tahun 2023 adalah 98 sekolah. Capaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman telah mencapai target yaitu 100 % dengan kategori “Baik”.

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar, menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

TARGET PENGAWALAN / TARGET DIINTERVENSI TAHUN 2020 – 2021

JUMLAH KAB/KOTA	KAB/KOTA INTERVENSI		TARGET SEKOLAH YANG DIBERIKAN PENGAWALAN		CAPAIAN SEKOLAH YANG DIBERIKAN PENGAWALAN	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
8	Kota Makassar, Kab. Pinrang	Kota Pare pare Kab. Maros Kab. Barru Kab Sidrap Kab. Soppeng Kab. Sinjai	16	24	16	24

TARGET DIINTERVENSI TAHUN 2022

TARGET INTERVENSI A		TARGET INTERVENSI C	
KABUPATEN	JUMLAH SEKOLAH	KABUPATEN	JUMLAH SEKOLAH
JENEPONTO	7	JENEPONTO	52
BULUKUMBA	7	BULUKUMBA	17
BONE	7	BONE	25
WAJO	7	WAJO	24
JUMLAH	28	JUMLAH	118

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah target kumulatif dari tahun 2020, yaitu 68 sekolah, sekolah yang diintervensi di tahun 2022 sebanyak 28 Sekolah

No	UPT	Target Sekolah yang diintervensi				Capaian Sekolah yang disertifikasi			
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total
1	Kab. Luwu Utara	5	3	0	**8**	5	3	0	**8**
2	Kab. Luwu Timur	3	5	0	**8**	3	5	0	**8**
3	Kab. Pangkep	4	3	0	**7**	4	3	0	**7**
4	Kab. bantaeng	4	3	0	**7**	4	3	0	**7**
Total					**30**				**30**

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI dan SMP/MTS, di 4 Kabupaten/Kota yaitu Luwu Utara, Luwu Timur, Pangkep dan Bantaeng. Target tahun 2023 adalah 30 sekolah baru dan 68 sekolah pengawalan yang merupakan target intervensi tahun 2020-2022.

Hingga akhir tahun 2023, semua tahapan intervensi program PJAS telah dilaksanakan sampai pengawalan sekolah yang diintervensi tahun sebelumnya dan persiapan mengikuti Lomba Nasional Sekolah dengan PJAS aman. Salah satu tahapan yang dilaksanakan adalah Sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman. Dari 30 sekolah yang diintervensi semuanya memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat sekolah dengan PJAS Aman. Diharapkan sekolah yang telah mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS Aman dapat meneruskan program ini secara berkesinambungan dengan melahirkan inovasi inovasi yang dapat dilaksanakan oleh kader keamanan pangan sekolah junior (siswa sekolah) dan menyebarluaskan ke sekolah sekitar yang belum mendapatkan program PJAS. Dengan demikian program PJAS akan semakin berkembang.

Pada Tahun 2023, frekuensi target dan capaian dihitung Tahunan untuk indikator sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman. Dengan realisasi 98 sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Tahun 2023

Progres capaian jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman **telah tercapai** yaitu 100% atau 98 sekolah yang menjadi target intervensi telah mendapatkan Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman dengan kategori **Baik**.

Tabel 3.63

Target Kinerja Indikator sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	98	98	100	Baik

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.64. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tahun 2020	16	16	100	Baik
Tahun 2021	40	40	100	Baik
Tahun 2022	68	68	100	Baik
Tahun 2023	98	98	100	Baik

Capaian kinerja indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman BBPOM Makassar untuk tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah sama pada angka 100 kategori "Baik", sementara terdapat kenaikan relisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman BBPOM Makassar tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Target inidikator sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman memang ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.65. Perbandingan realisasi Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Target 2024 Renstra	98	130	98	75,38	Akan Tercapai
Target 2024 Reviu (Rorenkeu/Unit Pengampu)		124		79,03	Akan Tercapai

Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023 **tidak dapat dibandingkan** dengan target Renstra tahun 2024, baik pada target Renstra awal maupun setelah direviu oleh Biro Perencanaan dan Keuangan bersama Unit Pengmpu Tahun 2024 dengan kategori Akan Tercapai. Target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode renstra Tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

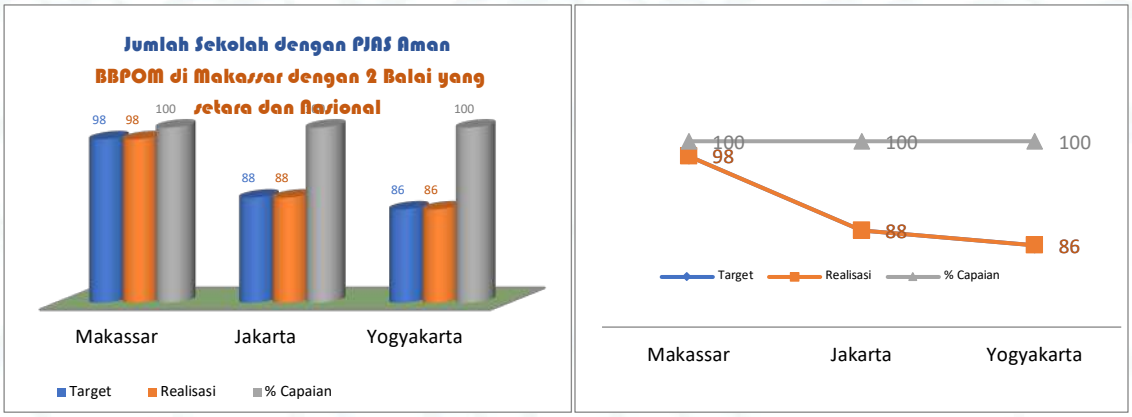
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta, dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023

Indikator Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	98	98	100	Baik
BBPOM di Jakarta	88	88	100	Baik
BBPOM di Yogyakarta	86	86	100	Baik
Nasional	2.769	2.792	100,83	Sangat Baik

Target indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman BBPOM Makassar, BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta pada angka yang berbeda, sementara target BBPOM Makassar lebih tinggi dibandingkan dengan 2 Balai lainnya. Persentase hasil capaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman BBPOM Makassar, BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta seluruhnya telah mencapai target yaitu 100 % kategori "Baik". Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 3.3
Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta, dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023 dengan target IKU Badan POM

Indikator	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Indikator
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	98	2.769	98	-	-

Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023 BBPOM di Makassar tidak dapat dibandingkandengan target IKU Badan POM secara nasional karena merupakan target komulatif jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman seluruh unit kerja di Badan POM.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Realisasi Tahun 2023 Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman adalah sudah terlaksana dengan realisasi 100% Pencapain kinerja 100% pada Tahun 2023 karena tahapan kegiatan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan

Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023 dilaksanakan di 5 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bantaeng. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 30 sekolah, 6 desa dan 5 pasar yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Makassar akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirmya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan :

1. audiensi/advokasi koordinasi lintas sector kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survey pasar.

   Intervensi keamanan pangan pada kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM yang bertujuan menggugah komunitas desa, komunitas pasar dan komunitas sekolah agar dapat berdaya, berpartisipasi

dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing. Selain itu kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal keberlanjutan program pada desa, pasar dan sekolah yang telah diintervensi dan mereplikasi program pada Kabupaten/Kota secara mandiri.

2. Sosialisasi PJAS

   BBPOM Makassar dalam rangka upaya penyebaran informasi keamanan pangan kepada masyarakat termasuk komunitas sekolah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Sekolah dan Pemberian Produk Informasi Keamanan Pangan. Melalui kegiatan ini diharapkan komunitas sekolah dapat memperoleh akses informasi keamanan pangan yang valid sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah terhadap keamanan pangan.
3. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat Bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk pengujian sederhana menggunakan tes kit untuk mengetahui keberadaan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow.
4. Setelah dilakukan Bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Makassar. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan
5. intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan
6. Pemberian paket edukasi
7. monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain.
8. Pada tahap akhir kegiatan Pengawasan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS), akan dilakukan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman terhadap 30 sekolah target intervensi tahun 2023. Sertifikasi dilakukan untuk melihat komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan di sekolah. Verifikasi dilakukan oleh petugas BBPOM Makassar. Diharapkan sekolah yang diintervensi dengan program PJAS Aman dapat meneruskan program ini secara berkesinambungan dengan melahirkan inovasi inovasi yang dapat dilaksanakan oleh kader keamanan pangan sekolah junior (siswa sekolah) dan menyebarluaskan ke sekolah sekitar yang belum mendapatkan program PJAS. Dengan demikian program PJAS akan semakin berkembang.
9. Pada tahun 2023 juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program PJAS ini untuk mendapatkan masukan dan kendala kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan program PJAS.
10. Pengawalan Lomba PJAS

f. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator persentase obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 98 dengan capaian 100 % pada tahun 2023. Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,01) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 100 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 99,33 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2023

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
100	971.911.000	965.423.059	99,33	1,01	0,01	Efisien

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Pada tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah target kumulatif dari tahun 2020, yaitu 98 sekolah, sekolah yang diintervensi 16 sekolah di tahun 2020, 24 sekolah di tahun 2021, 28 sekolah di tahun 2022 dan 30 sekolah ditahun 2023. Realisasi indikator kinerja Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajajan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada tahun2023 sebesar 100%
- Pencapaian indikator ini karena semua tahapan yang selesai yaitu tahap advokasi, sosialisasi kemanan pangan, pemberian paket edukasi dan bimtek kader keamanan pangan sekolah, Monitoring dan Evaluasi, sertifikasi dan pengawalan sekolah dan Lomba PJAS.
- Tujuan dari Program PJAS adalah Mengawal PJAS aman, bermutu, dan bernutrisi. Serta Memberdayakan Komunitas Sekolah agar mampu dan mandiri melindungi diri dan keluarganya dari produk pangan yang berisiko terhadap kesehatan termasuk menerapkan hygiene dan sanitasi, Adapun kegiatan Intervensi Keamanan PJAS antara lain :
    a. Koordinasi dengan Pemda:
        1. Advokasi Lintas Sektor PJAS
        2. Integrasi terpadu program PJAS dengan dengan program Pemda Kab/ Kota (penetapan lokus sekolah/madrasah, audit/pengawasan PJAS terpadu)
    b. Kemandirian Sekolah:
        1. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan
        2. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman
        3. Sampling dan pengujian PJAS
        4. Sosialisasi Keamanan PJAS bagi Komunitas sekolah (medsos, webinar, dll)
    c. Peningkatan kompetensi petugas:
        1. Workshop Keamanan Pangan Nasional Terpadu
        2. Pelatihan Auditor Piagam Bintang bagi petugas UPT
        3. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah
    d. Peran Aktif Kader:

Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah

e. Pendampingan UMKM :

Bimtek Keamanan PJAS untuk UMKM Produsen/Penyedia PJAS

- Dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program Pangan Jajanan Anak Sekolah. Kegiatan bimtek yang dilaksanakan secara langsung, demikian juga tahapan kegiatan yang harus disesuaikan serta adanya komitmen dari kepala sekolah, guru, pengelola kantin yang tetap mendukung pelaksanaan program ini mengakibatkan program dapat tetap dilaksanakan. Pemberian paket edukasi dan paket untuk kader sekolah membuat komunitas sekolah semakin bersemangat meneruskan program PJAS sampai selesai dan mencapai tujuan yang ditetapkan.
- Perencanaan Pelaksaan seluruh tahapan program PJAS dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang di tetapkan.

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai *	Belum **			
				Rencana Aksi	Timeline		
1.	Pada seluruh tahapan pelaksanaan PJAS terdapat Pelaksanaan yaitu tahapan Sosialisasi PJAS aman lewat time line	Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya untuk pelaksanaan tahapan monitoring dan evaluasi program PJAS	telah dilaksanakan pada bulan november 2023 di 4 kabupaten yang diintervensi tahun 2023			Pemerintah daerah yang diintervesni kurang memahami tujuan program	Pemerintah daerah yang diintervensi lebih m,emahami tujuan program dengan dilaksanakannya tahapan pra advokasi untuk mengkomunikasikan tujuan dari program prioritas nasional ini
2	Sampai dengan Bulan September tahapan pelaksanaan yang belum diselesaikan adalah Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	BBPOM di Makassar mengagendakan Audit Sertifikasi dengan PJAS Aman Bersama dengan Tim Keamanan Pangan Sekolah (KPS) untuk memeriksa dan melakukan verifikasi dokumen kegiatan Pangan	telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 di 4 kabupaten yang diintervensi tahun 2023			Belum terdapat kompilasi/rekapitulasi hasil self assessment terkait pemetaan hasil prosentase pemenuhan parameter Sekolah dengan PJAS Aman	Sekolah melakukan kompilasi/rekapitulasi hasil self asessment sehingga dapat terlihat pemetaan hasil prosentase pemenuhan parameter Sekolah dengan PJAS Aman.

		Jajanan Anak Sekolah (PJAS) setiap sekolah yg telah di Intervensi.					

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Upaya yang dilakukan pada tahun 2023 antara lain yaitu terdapat penambahan 30 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, sebelumnya 60 menjadi 98 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar.
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Telah dilakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran tahun 2023 untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Penacapain kinerja untuk indikator Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.



3. Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain .

Desa yang dIVntervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata

Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain

Pada Tahun 2023, frekuensi target dan capaian dihitung Tahunan untuk indikator Jumlah desa pangan aman. Tahapan Kegiatan GKPD, yaitu :

1. Advokasi Kelembagaan Desa yang bertujuan untuk menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah.
2. Pengadaan gimmick, rapid test, dll
3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)
4. Bimtek Komunitas
5. Fasilitas Keamanan Pangan
6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan

Gap Asessment merupakan penilaian awal terhadap pengetahuan kader dan komunitas desa mengenai keamanan pangan dan kemampuannya dalam melaksanakan praktek keamanan pangan.

Gap asessment dilakukan untuk melihat permasalahan keamanan pangan yang selama ini terjadi di masyarakat. Dalam rangka *gap asessment* Gerakan Keamanan Pangan Desa, Tim GKPD BBPOM di Makassar bersama fasilitator lapangan dan 6 enumerator melaksanakan survei terhadap kader dan komunitas desa yang berlokasi di 12 desa yang akan dIVntervensi program gerakan keamanan pangan desa. Responden yang diambil datanya merupakan calon kader dan calon komunitas desa/usaha pangan desa yang akan mengikuti bimtek dan fasilitasi keamanan pangan. Hasil *gap assessment* dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan strategi intervensi yang tepat untuk masyarakat desa sehingga program ini dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Pelatihan korlap dan kader KPD (Kompetensi Keamanan Pangan)

Setelah diperoleh data *baseline* pengetahuan komunitas desa yang akan dIVntervensi, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan Korlap dan kader KPD (Kompetensi Keamanan Pangan). Pelatihan kader desa merupakan kegiatan untuk membekali kemampuan kader tentang keamanan pangan.

Pelatihan untuk kader ini penting dilakukan agar kader tersebut dapat mendampingi komunitas desanya dalam menerapkan prinsip keamanan pangan serta dapat melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan pada praktek keamanan pangan di lingkungannya. Indikator keluaran kegiatan ini adalah jumlah kader keamanan pangan yang dilatih di bidang keamanan pangan . Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* terdapat peningkatan pengetahuan kader yang dilatih

Bimtek Komunitas dan Usaha Pangan Desa

Kader berkewajiban membina komunitasnya dalam menerapkan keamanan pangan dilingkungan desa. Pembinaan oleh kader dilaksanakan dalam bentuk Bimtek Komunitas dan Usaha Pangan Desa dan kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan Desa. Pelaksanaan Bimtek dimulai dengan koordinasi fasilitator lapangan ke masing-masing desa yang akan dIVntervensi. Bimtek keamanan pangan dilakukan terhadap komunitas masyarakat yang terlebih dahulu telah diambil datanya pada kegiatan *gap assessment*. Komunitas masing-masing terdiri dari 10 orang. Pada kegiatan Bimtek ini juga dilakukan *pre-test* dan *post-test*. Berdasarkan data nilai *pre-test* dan *post-test* peserta Bimteknkomunitas desa dan usaha pangan desa, dapat dilihat adanya peningkatan nilai setelah dilakukan Bimtek, hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan komunitas desa dan usaha pangan desa setelah mengikuti Bimtek ini.

Fasilitasi keamanan pangan

Dilaksanakan sebagai bentuk pengawalan kepada komunitas desa dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan, sekaligus memastikan bahwa ilmu dan pengetahuan yang dibagikan kepada komunitas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mengubah kebiasaan masyarakat desa untuk lebih mengutamakan keamanan dalam mengelola dan mengolah pangan baik dalam rumah tangga maupun dalam usaha pangan yang dijalankannya.
Pengawasan terhadap pangan yang beredar di desa dilakukan dengan pengambilan dan pengujian sampel dalam kegiatan Intensifikasi pengawasan keamanan pangan (*pre* dan *post* intervensi). Petugas BBPOM di Makassar bersama dengan kader melaksanakan pengujian produk pangan menggunakan *rapid test kit* dengan parameter pengujian *Methanyl yellow, Rhodamine B, Boraks dan Formalin.* Dari hasil pengujian tidak ditemukan sampel yang mengandung bahan berbahaya.
Bagi desa yang menerapkan keamanan pangan secara mandiri, Badan POM memberikan apresiasi dalam Desa Pangan Aman *Award* yang diumumkan pada puncak perayaan ulang Tahun Badan POM RI setiap Tahunnya. Penilaian dilaksanakan setelah intervensi GKPD. Untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan GKPD di Kabupaten yang telah dIVntervensi pada Tahun sebelumnya, dilaksanakan pengambilan data dalam rangka Monev dilaksanakan secara langsung terhadap seluruh kader keamanan pangan desa dan komunitas desa yang dIVntervensi di setiap desa/kelurahan. Kader dan komunitas desa (masyarakat desa maupun usaha pangan desa) yang telah diintervensi diambil data mengenai pengetahuan, persepsi dan perilaku tentang penerapan prinsip keamanan pangan selama menangani pangan. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dan dijadikan acuan dalam melaksanakan dan melakukan perbaikan pada program GKPD Tahun berikutnya.

Selain Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pula kegiatan. Pengawalan terhadap desa/kelurahan yang sudah dIVntervensi dalam rangka pembentukan Desa Paman Pratama agar dapat dikembangkan menjadi Desa Paman Madya dan selanjutnya menjadi Desa Paman Mandiri. Kegiatan pengawalan ini dilaksanakan oleh petugas BBPOM di Makassar agar desa menjalankan program keamanan pangan secara berkelanjutan.
Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar, menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Dihitung dari Jumlah desa yang :
Desa pangan aman adalah desa yang memenuhi kategori poin C

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Pada Tahun 2023 seluruh tahapan kegiatan Desa Pangan Aman telah selesai dilakukan sampai dengan tahap Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan. Realisasi tahapan progress Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor) ; Lomba Desa Pangan Aman serta Pengawalan pada Tahun 2023 adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) desa. Capaian progress Jumlah desa pangan aman telah mencapai target yaitu 100 % dengan kategori "Baik".

Tabel 3.67
Jumlah desa pangan aman di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	19	19	100	Baik

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.64. Perbandingan realisasi dan capaian Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2020	4	4	100	Baik
Tahun 2021	12	12	100	Baik
Tahun 2022	19	19	100	Baik
Tahun 2023	25	25	100	Baik

Capaian kinerja indikator Jumlah desa pangan aman BBPOM Makassar untuk tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah sama pada angka 100 kategori "Baik", sementara terdapat kenaikan relisasi Jumlah desa pangan aman BBPOM Makassar tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Target inidikator Jumlah desa pangan aman memang ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.69. Perbandingan realisasi Indikator Jumlah desa pangan aman Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Jumlah desa pangan aman	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Target 2024 Renstra	25	32	25	76,92	Akan Tercapai
Target 2024 Reviu (Rorenkeu/Unit Pengampu)		31		79,03	Akan Tercapai

Realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2023 **tidak dapat dibandingkan** dengan target Renstra tahun 2024, baik pada target Renstra awal maupun setelah direviu oleh Biro Perencanaan dan Keuangan bersama Unit Pengmpu Tahun 2024 dengan kategori Akan Tercapai. Target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode renstra Tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Jumlah desa pangan aman BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Jumlah desa pangan BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

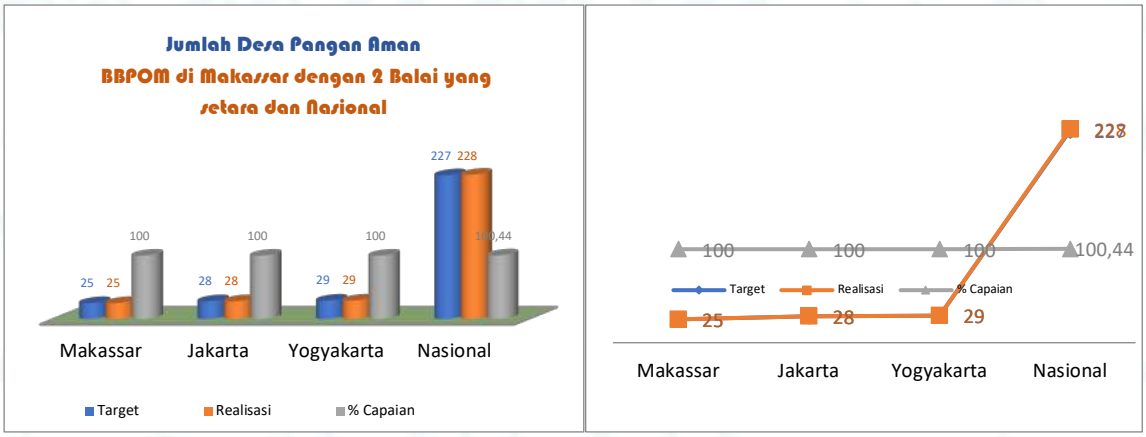
Tabel 3.7
Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta, dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023

Indikator Kinerja Jumlah desa pangan aman	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	25	25	100	Baik
BBPOM di Jakarta	28	28	100	Baik
BBPOM di Yogyakarta	29	29	100	Baik
Nasional	227	228	100,44	Sangat Baik

Target indikator Jumlah desa pangan aman BBPOM Makassar, BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta pada angka yang berbeda, sementara target BBPOM Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan dengan 2 Balai lainnya. Persentase hasil capaian Jumlah desa pangan aman BBPOM Makassar, BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta seluruhnya telah

mencapai target yaitu 100 % kategori "Baik". Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Jumlah desa pangan aman di wilayah BBPOM Makassar, BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 3.3
Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta, dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Jumlah desa pangan aman Tahun 2023 dengan target IKU Badan POM

Indikator	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Indikator
Jumlah desa pangan aman	25	227	25	-	-

Realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2023 BBPOM di Makassar tidak dapat dibandingkan dengan target IKU Badan POM secara nasional karena merupakan target komulatif jumlah desa pangan aman seluruh unit kerja di Badan POM.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja jumlah Desa Pangan Aman disebabkan oleh :

Tahapan pelaksanaan kagiatan Desa Pangan Tahun 2023 terlaksana sesuai dengan perencanaan, Jumlah desa pangan aman adalah 25 sudah terlaksana dengan realisasi 100% Pencapain kinerja 100% pada Tahun 2023 karena tahapan kegiatan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan

Jumlah desa pangan aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023 dilaksanakan di 5 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bantaeng. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 30 sekolah, 6 desa dan 5 pasar yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Makassar akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirmya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll.

Program Desa Pangan Aman yang merupakan Prog. Priotas BBPOM di Makassar 2023 untuk mendukung salah satu arah kebijakan Badan POM yaitu Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui pemberdayaan masyarakat.

terdiri atas beberapa tahapan :

1. Advokasi Kelembagaan Desa
   - Kegiatan berupa pertemuan dengan Pemda, Perangkat Desa dan calon KKPD yang mewakili Komunitas Desa target tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pemetaan kegiatan yang dapat diintegrasikan di masing-masing lintas sektor di daerah
   - Pertemuan ini diintegrasikan juga dengan pelaksanaan advokasi untuk kegiatan PJAS dan Pasar Aman Berbasis Komunitas
2. Pengambilan data/survei pre dan post intervensi desa pangan aman

   Survei ini dilakukan untuk memperoleh data profil keamanan pangan di desa/kelurahan sebelum dan sesudah desa diintervensi. Data ini akan menjadi salah satu acuan untuk melakukan intervensi. Selain itu, data ini akan menjadi acuan untuk mengevaluasi program desa pangan aman yaitu evaluasi pre dan post intervensi keamanan pangan
3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)

   Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melakukan pendampingan kepada komunitas desa untuk membangun budaya keamanan pangan agar dapat mengimplementasikan keamanan pangan secara mandiri.
4. Bimtek Komunitas Desa

   Kegiatan ini untuk meningkatkan kepedulian dan kemampuan komunitas desa dan usaha pangan desa agar mampu secara mandiri menyediakan dan memilih pangan yang aman, sehingga masyarakat desa mampu melindungi desanya sendiri dari produk pangan yang tidak aman
5. Fasilitasi Keamanan Pangan Bagi Komunitas Desa dan Pelaku Usaha Pangan Desa

Kegiatan ini dilakukan setelah mendapatkan bimtek, komunitas desa dan usaha pangan desa didampingi/difasilitasi langsung di sarana yang dimilikinya agar mampu menerapkan praktek keamanan pangan yang baik di tingkat rumah tangga dan tingkat IRTP, PKL dan Ritel, sehingga masyarakat desa lebih paham dan mampu menerapkan keamanan pangan secara mandiri

6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa

   Intensifikasi pengawasan yang dilakukan adalah pengambilan sampel dan pengujian sampel menggunakan rapid test kit, pada kegiatan ini juga dilakukan pengawasan label pangan produk IRTP yang ada di desa/kelurahan. Hasil pengawasan ini keberhasilan program keamanan pangan di desa

7. Lomba Desa PAMAN

   Pemberian penghargaan kepada desa yang memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk memberikan motivasi kepada aparat dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya dalam mewujudkan pangan aman serta menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas, dan partisipasi masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya mewujudkan pangan aman di desa

8. Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman

   Kegiatan monev dilaksanakan untuk

   - melihat proses maupun kemajuan program,
   - mengidentifikasi hal-hal yang mendukung atau menghambat program,
   - mengukur ketercapaian target
   - memperoleh rekomendasi untuk pengembangan program selanjutnya
   - memberikan solusi terhadap permasalahan dan atau penyimpangan yang terjadi
   - menyiapapapapkn dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan program keamanan pangan pada tahun berikutnya.

9. Pengawalan di Desa yang sudah diintervensi keamanan pangan tahun sebelumnya

   Kegiatan pengawalan dilakukan untuk:

   - memastikan bahwa desa/kelurahan yang sudah diintervensi melanjutkan program-program keamanan pangan.
   - mengetahui tindak lanjut dokumen rencana aksi yang telah disusun tahun sebelumnya oleh desa/kelurahan yang telah mendapat intervensi.
   - menjaga kompetensi Kader Keamanan Pangan yang telah dilatih

Kegiatan intervensi desa pangan aman yang telah dilakukan sampai pada akhir Tahun 2023 adalah audiensi dan advokasi secara daring kepada lintas sektor dan Organisasi Perangkat Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, Bimtek Komunitas, Fasilitasi I dan IV, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan, Pengawalan desa terintervensi Tahun sebelumnya serta Monitoring dan Evaluasi.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya :

1. Perjalanan ke lokasi intervensi yang cukup jauh sehingga memakan waktu yang cukup lama;
2. Tidak adanya kordinator lapangan yang dapat memantau jalannya program di desa yang dIVntervensi;
3. Meningkatkan pemahman pemerintah daerah / lintas sektor terhadap tujuan kegiatan

i. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Jumlah desa pangan aman diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 25 dengan capaian 100 % pada tahun 2023. Indikator Jumlah desa pangan aman kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,01) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 100 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 98,99 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Jumlah desa pangan aman Tahun 2023

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
100	847.722.000	839.133.815	98,99	1,01	0,01	Efisien

j. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Target dan capaian intervensi Kab/Kota dan Desa Tahun 2023 di BBPOM Makassar adalah target 4 Kakb/Kota dan capaian adalah 4 Kab/Kota : Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur,
- Target 6 desa (1 desa stanting ; 5 desa non stunting) sementara capaian adalah 6 desa (2 desa stanting ; 4 desa non stunting) berdasarkan penilaian dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk Waktu Pelaksanaan Advokasi: Januari - April Batas Waktu Pelaporan: maksimal 1 bulan, BBPOM di Makassar termasuk dalam kriteria Balai dengan 100 % Ketepatan Waktu Pelaksanaan dan 100 % Ketepatan Waktu Pelaporan

Tabel : Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan

Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Desa	Desa Stunting/Non Stunting
Kab. Pangkep	Labanang	Kanaungan	Stunting
Kab. Pangkep	Labanang	Taraweang	Non Stunting
Kab. Bantaeng	Eremerasa	Ulugalung	Non Stunting
Kab. Bantaeng	Bissapu	Bontojai	Non Stunting
Kab. Luwu Timur	Wasuponda	Tabarano	Non Stunting
Kab. Luwu Utara	Sukamaju Selatan	Wonokerto	Stunting

- komitmen dari Kepala Desa/Lurah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat sebagai Ketua Tim Keamanan Pangan sangat dibutuhkan agar program dan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan di Desa Pangan Aman yang dilakukan secara mandiri dapat terus berlanjut dan berkesinambungan.

- Kader Keamanan Pangan Desa sebagai fasilitator dan penggerak kegiatan memiliki tugas yang penting agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara berkelanjutan. Komunitas desa sebagai pelaku keamanan pangan menerapkan praktek keamanan pangan dalam kehidupan sehari hari
- Melakukan pendampingan dan pengawalan kepada Desa Pangan Aman dalam memperluas cakupan intervensi di komunitasnya.
- Kegiatan intervensi desa pangan aman yang telah dilakukan sampai pada Tahun 2023 adalah audiensi dan advokasi kepada lintas sektor dan Organisasi Perangkat Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, Bimtek Komunitas, Fasilitasi I dan IV, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan, Pengawalan desa terintervensi Tahun sebelumnya serta Monitoring dan Evaluasi
- Evaluasi Pelaksanaan Prgram Desa Pangan Aman meliputi :
  - Capaian desa/kelurahan yang diintervensi (stunting/non stunting)
  - Jumlah Desa yang menyusunr encana aksi keamanan pangan
  - Capaian kader yang dilatih dan komunitas yang dibimtek
  - Ketepatan waktu pelaksanaan dan waktu pelaporan untuk setiap tahap kegiatan
- Jumlah KKPD pada desa yang diintervensi sesuai dengan target serta Jumlah Komunitas pada desa yang diintervensi sesuai dengan target
- Pelatihan Kader

  BBPOM Makassar termasuk dalam 28 BB/BPOM pelaporan kegiatan Pelatihan Kader tepat waktu, Waktu Pelaksanaan Pelatihan Kader: April – Juli ; Batas Waktu Pelaporan: maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan
- Bimtek Komunitas

  BBPOM Makassar termasuk dalam 27 BB/BPOM yang capaian waktu pelaksanaan dan capaian waktu pelaporan kegiatan Bimtek Komunitas tepat waktu,

  Waktu Pelaksanaan Bimtek Komunitas: Mei – September Batas Waktu Pelaporan: maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan
- Monitoring dan Evaluasi

  BBPOM Makassar termasuk dalam 33 BB/BPOM yang ketepatan waktu pelaksanaan dan ketepatan waktu pelaporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi

  Waktu Pelaksanaan Monitooring dan Evaluasi : November - Desember Batas Waktu Pelaporan: maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan
- Pengawalan Desa Pangan Aman

  seluruh Balai POM tepat waktu pelaksanaan dan tepat waktu pelaporan kegiatan Pengawalan Desa Pangan Aman

  Waktu Pelaksanaan Monitooring dan Evaluasi : Juni - Desember Batas Waktu Pelaporan: maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan

Sebagai upaya pencapaian indikator Desa Pangan Aman di lakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Adanya komitmen seluruh unsur masyarakat dan pemerintah, mulai dari pemerintahan desa sampai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kader keamanan pangan desa memegang peran yang sangat penting

untuk menggerakkan aktifitas penerapan keamanan pangan di desa. Komitmen berkontribusi secara positif pada pencapaian target Desa pangan aman.

- Komitmen dari Kepala Desa, aparat desa dan kader keamanan pangan desa sehingga semua tahapan pelaksanakan kegiatan berjalan lancar
- Peran serta dari lintas sektor dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas, sebagai pendamping desa dan yang memiliki wilayah, sehingga bisa mengajak warga desa untuk berperan aktif dalam penerapan keamanan pangan.
- Melakukan replikasi gerakan keamanan desa secara mandiri
- Meningkatkan komitment terkait kemandirian perangkat desa untuk menghidupkan UMKM yang ada dipedesaan agar dapat berdaya saing sehingga memperkuat ekonomi desa

a. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai *	Belum **			
				Rencana Aksi	Timeline		
	Pada tahapan survey post intervensi komunitas Desa yang disurvey kadang kala tidak berada di tempat sehingga pengisian survey disusulkan	Untuk terlaksananya capaian sesuai target yang sudah ditetapkan dari tahapan program Desa pangan Aman yaitu Advokasi Survey Pre dan Post Intervensi ,Pelatihan Kader, Bimtek Komunitas,Fasilitasi,intensifikasi keamanan pangan,monev .pengawalan desa yang sudah diintervensi ,diperlukan Komitmen Kepala Desa dan Koordinasi yang harus berjalan dengan baik	Capaian sesuai target yang sudah ditetapkan tahapan kegiatan terlaksana ,Monev kegiatan yang terintegrasi dengan Program PJAS dan PPABK dlaksanakan di 4 Kabupaten yang diintervensidi tahun 2023			Pemerintah daerah yang diintervesni kurang memahami tujuan program	Pemerintah daerah yang diintervensi lebih m,emahami tujuan program dengan dilaksanakannya tahapan pra advokasi untuk mengkomunikasikan tujuan dari program prioritas nasional ini
	Berdasarkan Hasil Evaluasi Indikator Desa Pangan Aman Tahu 2023 dan rekomendasi dari	BBPOM Makassar akan menyesuaikan kegiatan desa pangan aman dengan Juknis yang baru		Menyampaikan perubahan Juknis Juknis Desa Pangan Aman terbaru pada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa)	Tahun 2024		

	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan akan ada Revisi Juknis Desa Pangan Aman (Juknis untuk UPT BPOM dan Juknis Untuk Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa)			Melakukan sosialisasi juknis desa pangan aman kepada pemerintah daerah untuk melakukan replikasi menginformasikan ke Pemda/PemDes untuk pelaporan melalui GKPD Online Rencana Sinergi Program untuk Perluasan cakupan intervensi Desa Pangan Aman -Kementerian Kesehatan ⟶ Program Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal - BKKB ⟶ Kampung Keluarga Berkualitas - Kemendesa PDTT ⟶ Rumah Desa Sehat - Kemendikbud/Perguruan Tinggi ⟶ Program KKN, Program Pengabdian Masyarakat dll			

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Jumlah desa pangan aman telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Jumlah desa pangan aman dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator Jumlah desa pangan aman pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional

- Telah dilakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran tahun 2023 untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Penacapain kinerja untuk indicator Jumlah desa pangan aman serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.



4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya.).

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.

Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan

peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada Tahun berikutnya Pasar yang dIVntervensi meliputi pasar baru yang belum pernah dIVntervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Kategori Pasar Aman meliputi :

1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
3. Mempunyai rencana program pengawalan pada Tahun berikutnya.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya adalah :

1. Survei Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Survei Pasar dilaksanakan untuk identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya merupakan tahap kegiatan lanjutan yang harus segera dilaksanakan setelah suatu pasar tradisional ditetapkan sebagai pasar yang akan dikendalikan sebagai pasar aman dari bahan berbahaya. Kegiatan identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya ini bertujuan untuk:

1. Melakukan pendataan identitas pedagang di pasar yang diduga menjual produk bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya.
2. Inventarisasi produk yang dijual oleh setiap pedagang pasar yang diduga sebagai bahan berbahaya dan/atau pangan yang mengandung bahan berbahaya.
3. Memudahkan fasilitator/petugas yang berwenang

2. Advokasi

Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain pemerintah, wakil rakyat, masyarakat maupun media massa. Kampanye Pasar Aman dari Bahan Berbahaya merupakan salah satu bentuk advokasi kepada masyarakat sebagai bagian dari komunitas pasar.

3. Bimtek dan Fasilitasi Pasar aman dari bahan berbahaya kepada petugas pasar.

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya kepada komunitas pasar, khususnya pedagang pasar; meningkatkan kesadaran pedagang pasar agar tidak menjual bahan yang dilarang untuk pangan ataupun produk produk yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan.

4. Penyuluhan komunitas pasar

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan. Tujuannya adalah melakukan sosialisasi aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya kepada komunitas pasar, khususnya pedagang pasar; meningkatkan kesadaran pedagang pasar agar tidak menjual bahan yang dilarang untuk pangan ataupun produk-produk yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan.

5. Kampanye Pasar

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan komunitas pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan kampanye kepada komunitas pasar, khususnya masyarakat sebagai konsumen. Dengan demikian diharapkan dapat terjadi peningkatan pemahaman sekaligus kesadaran bagi masyarakat sebagai konsumen untuk memilih pangan yang aman dari bahan berbahaya. Penurunan permintaan konsumen diharapkan akan menjadi salah satu langkah untuk meminimalkan kebocoran bahan berbahaya di pasar tradisional.

Metodologi yang digunakan dalam kampanye antara lain dengan penayangan iklan layanan masyarakat, pemutaran spot iklan di radio komunitas pasar, demo pengujian pangan dan bahan berbahaya dengan menggunakan lab keliling,

serta penyebaran media informasi. Kegiatan dilaksanakan oleh Petugas Balai Besar/Balai POM bekerjasama dengan petugas pengelola pasar.

Petugas Balai Besar/Balai POM membawa perlengkapan untuk kegiatan kampanye seperti mobil laboratorium keliling, media informasi berupa leaflet, poster tentang keamanan pangan dan bahan berbahaya. Petugas Balai Besar/Balai POM berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, serta

memfasilitasi masyarakat yang berbelanja di pasar untuk memeriksakan keamanan pangan yang dibeli.

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar, menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Dihitung dari Jumlah pasar yang memenuhi kategori poin F
riteria Pasar Aman meliputi :

1) *Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya*
2) *Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta*
3) *Mempunyai rencana program pengawalan pada Tahun berikutnya*

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tahun 2023 progres jumlah realisasi pasar aman dari bahan berbahaya adalah sebanyak 18 pasar dari target 18 Pasar. Capaian Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya telah mencapai target yaitu 100 % dengan kategori “Baik”.

Tabel 3.71

Target Kinerja Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja BBPOM di Makassar	18	18	100	Baik

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.72. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya BBPOM di Makassar Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2020	2	2	100	Baik
Tahun 2021	8	8	100	Baik
Tahun 2022	13	13	100	Baik
Tahun 2023	18	18	100	Baik

Capaian kinerja indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas BBPOM Makassar untuk tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah sama pada angka 100 kategori "Baik", sementara terdapat kenaikan realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas BBPOM Makassar tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Target inidikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.73. Perbandingan realisasi Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Target 2024 Renstra	18	23	18	78,26	Akan Tercapai
Target 2024 Reviu (Rorenkeu/Unit Pengampu)		22		81,82	Akan Tercapai

Realisasi Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya Tahun 2023 **tidak dapat dibandingkan** dengan target Renstra tahun 2024, baik pada target Renstra awal maupun setelah direviu oleh Biro Perencanaan dan Keuangan bersama Unit Pengmpu Tahun 2024 dengan kategori Akan Tercapai. Target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode renstra Tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

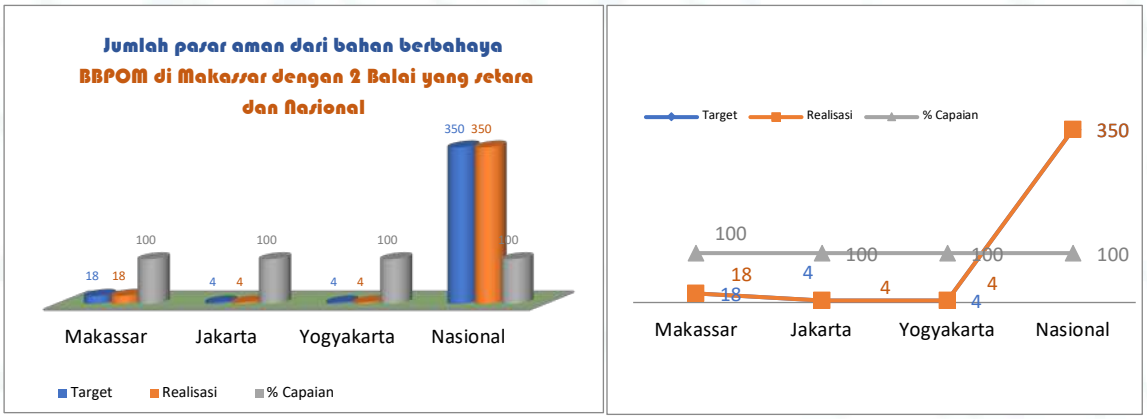
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta, dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	18	18	100	Baik
BBPOM di Jakarta	4	4	100	Baik
BBPOM di Yogyakarta	4	4	100	Baik
Nasional	350	350	100	Baik

Target indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta pada angka yang sama, sementara target BBPOM Makassar lebih tinggi dibandingkan dengan 2 Balai lainnya. Persentase hasil capaian Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas BBPOM Makassar, BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta seluruhnya telah mencapai target yaitu 100 % kategori "Baik". Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta, dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja IKU BPOM atau capaian nasional

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2023 dengan target IKU Badan POM

Indikator	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Indikator
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	18	350	18	-	-

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2023 BBPOM di Makassar tidak dapat dibandingkandengan target IKU Badan POM secara nasional karena merupakan target komulatif Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya seluruh unit kerja di Badan POM.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Pencapaian indikator ini ditunjang oleh terlaksananya tahapan survei pasar, advokasi, sampling tahap 1 dan tahap 2, bimtek pengelola pasar dan penyuluhan pedagang pasar serta monitoring dan evaluasi

- Target dan capaian Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2023 di BBPOM Makassar adalah target 4 Kak/Kota dan capaian adalah 4 Kab/Kota : Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur
- Target 4 Pasar (Pasar Kassi Kabupaten Pangkep; Pasar Lambocca Kabupaten Bantaeng; Pasar Malindungi Kabupaten Luwu Timur dan Pasar Kapidi Kabupaten Luwu Utara) berdasarkan penilaian dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebanyak 34 UPT BPOM termasuk BBPOM di Makassar sudah melakukan seluruh tahapan pasar pangan aman berbasis komunitas dengan persentasr capaian 100 %.

  Program Pasar pangan aman berbasis komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023 dilaksanakan di 4 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bantaeng Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 30 sekolah, 6 desa dan 4 pasar yang tersebar di 4 Kabupaten/Kota. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Makassar telah melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirmya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya.
- Evaluasi Pelaksanaan Prgram Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas meliputi :
  - Advokasi (Forum Advokasi komitmen Pemda dan lintas sector Pasar)

    Forum Advokasi Komitmen Pemda Dan Lintas Sektor Pasar dilakukan untuk melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan di daerah serta menumbuhkan komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan program bersama. .Serta meningkatkan koordinasi secara sinergis dan kontinu antar instansi dalam pelaksanaan program di daerah.
  - Survei

    Survei pasar dilakukan untuk melakukan identifikasi pasar tradisional yang memenuhi persyaratan pasar sehat sebagai prioritas pasar yang akan diintervensi
  - Bimtek Petugas Pengelola Pasar

    Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar dilakukan untuk melatih petugas pengelola pasar agar dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui pengambilan contoh dan pengujian cepat menggunakan test kit serta meningkatkan partisipasi pengelola pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik di pasar rakyat. Serta melatih pengelola pasar untuk membuat pelaporan hasil pengawasan yang akan disampaikan ke Balai BesarPOM di Makassar
    Apabila pelaksanaan Pelatihan Fasilitator Pasar digabung dengan Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar dilaksanakan selama satu hari dan materi yang disampaikan pada saat Bimtek adalah materi Modul 1

Pengetahuan Bahan Berbahaya, Modul 2 Identifikasi Pasar Untuk Pengendalian Bahan Berbahaya, Modul 3 Identifikasi Pedagang Pasar dan Inventarisasi, Modul 4 Pengambilan Contoh Sampling, Modul 5 Pengujian Bahan Berbahaya Modul 6 Monev Pengawasan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

- Pelatihan Fasilitator Pasar

  Pelatihan Fasilitator Pasar bertujuan memberdayakan petugas Dinas yang membawahi pasar untuk dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya.

  Pelaksanaan pelatihan dapat digabung dengan pelaksanaan Bimtek Pengelola Pasar. Dimana Bimtek Pengelola Pasar dilaksanakan selama satu hari dan materi yang disampaikan pada saat Bimtek adalah materi Modul 1 Pengetahuan Bahan Berbahaya, Modul 2 Identifikasi Pasar Untuk Pengendalian Bahan Berbahaya, Modul 3 Identifikasi Pedagang Pasar dan Inventarisasi, Modul 4 Pengambilan Contoh Sampling, Modul 5 Pengujian Bahan Berbahaya Modul 6 Monev Pengawasan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

  Kegiatan Bimtek pengelola pasar juga dilaksanakan secara online di pasar pengawalan

- Sampling dan pengujian Tahap 1

  Sampling dan Pengujian Sampel di Pasar bertujuan memberdayakan petugas pengelola pasar untuk dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan, maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui pengambilan contoh dan pengujian cepat menggunakan test kit kimia, pengujian mikrobiologi.

  tahap I di bulan April - Mei 2024 dimana pelaporan paling lambat bulan Mei 2024

  Tabel. Jumlah sampel yang diambil dengan Tipe Pasar.

Tipe pasar	Sampel
Pasar Tipe A Merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m_2	100 (95 kimia, 5 mikro)
Pasar Tipe B Merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 hari dalam 1minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 orang,dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m_2	80 (75 kimia, 5 mikro)
Pasar Tipe C Merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 kali dalam 1 minggu jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m_2	60 (55kimia, 5 mikro)
Pasar Tipe D Merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 kali dalam 1 minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m_2	40 (35 kimia, 5 mikro)

- Penyuluhan Pedagang Pasar

  Penyuluhan pedagang pasar bertujuan untuk melakukan sosialisasi kegiatan kepada pedagang pasar, meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan dan kemandirian pedagang pasar tentang keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan serta meningkatkan partisipasi pengelola pasar dan pedagang pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik di pasar rakyat.

- Kampanye Keamanan Pangan di Pasar

  Kampanye keamanan pangan bertujuan melakukan sosialisasi keamanan pangan, meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan, dan kemandirian komunitas pasar tentang keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan serta meningkatkan partisipasi pengelola pasar dan pedagang pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik di pasar rakyat.
- Sampling dan pengujian Tahap 2

  Sampling dan Pengujian Sampel di Pasar bertujuan memberdayakan petugas pengelola pasar untuk dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan, maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui pengambilan contoh dan pengujian cepat menggunakan test kit kimia, pengujian mikrobiologi.

  tahap II di bulan September - Oktober 2024 dimana pelaporan paling lambat bulan Oktober 2024.

  pembelian sampel untuk 2 (dua) tahap sesuai Tipe pasar, misal masing-masing 100 sampel untuk pasar intervensi tipe A dan 1 tahap sebanyak 50 sampel untuk pasar pengawalan (pasar yang diintervensi pada tahun sebelumnya),

Alternatif Solusi

- Mengidentifikasi program Dinas Kesehatan yang melibatkan petugas puskesmas di pasar yang dlintervensi untuk menggantikan peran kordinator lapangan;
- diperlukan komitmen lebih lanjut dari petugas dan kepala pasar serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat agar program dan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan di Pasar Aman yang dilakukan secara mandiri dapat terus berlanjut dan berkesinambungan.
- Advokasi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- Penandatanganan MOU antara Balai POM, Bupati dan Walikota.
- Melakukan Monev secara Luring dengan dihadiri Pemerintah Daerah yang terkait.
- Meningkatkan pemahman pemerintah daerah / lintas sektor terhadap tujuan kegiatan

f. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 18 dengan capaian 100 % pada tahun 2023. Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,06) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 100 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 94,76 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman Tahun 2022

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
100	469.133.000	444.536.731	94,76	1,06	0,06	Efisien

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

- Pencapaian indikator ini karena tahapan advokasi dan monitoring evaluasi dilaksanakan terintegrasi dengan program PJAS dan Desa Pangan Aman
- Program intervensi pasar telah dilaksanakan sampai 100% target 18 pasar yang diintervensi telah diselesaikan di Bulan Oktober di awal triwulan ke IV lebih cepat dari yang ditargetkan semula selesai di akhir tahun. Upaya percepatan dengan menggabung ketiga progrram PN sangat efektif sehingga intervensi pasar dapat diselesaikan terlebih dahulu. Selain itu adanya koordinasi dengan lintas sector yang sangat baik merupakan salah satu keberhasilan penyelesaian program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pada umumnya masing masing Pemerintah Daerah telah membentuk Satgas pengawasan yang bertugas memantau kegiatan perdagangan dan ekonomi secara umum. Satgas ini dimanfaatkan sebagai Tim Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sehingga semua tahapan kegiatan dapat dilaksanakan lebih cepat dari jadwal
- Pelaksanaan program Pasar Aman Bahan Berbahaya relative lebih sulit dibandingkan dengan program PJAS dan Desa Pangan Aman. Hal ini diakibatkan oleh latar belakang komunitas pasar yang sangat beragam dan kepentingan ekonomi yang terkait di dalamnya. Merubah perilaku komunitas pasar untuk menerapkan prinsip prinsip keamanan pangan di pasar bukan merupakan pekerjaan yang ringan. Namun demikian, BBPOM di Makassar telah berupaya semaksimal mungkin agar komunitas pasar yang telah dIintervensi tetap konsisten melaksanakan program Pasar Aman Bahan Berbahaya. Upaya pengawalan dilakukan melalui pembentukan wa group agar komunitas pasar dapat saling berbagi dan meniru keberhasilan pasar pasar lain
- Dukungan penuh dari Pemerindah Daerah dan OPD yang terkait
- Partisipasi aktif dari Pengelola Pasar yang dIintervensi serta Perencanaan Pelaksaan seluruh tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang di tetapkan.
- Meningkatkan pemahman pemerintah daerah / lintas sektor terhadap tujuan kegiatan sehingga pemerintah daerah dapat lebih berperan untuk mendukung keberhasilan program

f. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai *	Belum **			
				Rencana Aksi	Timeline		
	Pemerintah daerah yang diintervesi kurang support dalam pelaksanaan program prioritas nasional ini	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pasar yang diintervensi melalui sampling dan pengujian tahap 2 .Melakukan advokasi kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dapat mewujudkan pasar sehat di pasar yang diintervensi -Pemerintah Daerah mereplikasi program Pasar Aman Bahan Berbahaya ke pasar pasar lain. Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya untuk pelaksanaan tahapan monitoring dan evaluasi program PPAB (pasar pangan aman berbasis komunitas)	telah dilaksanakan pada bulan november 2023 di 4 kabupaten yang diintervensi tahun 2023			Pemerintah daerah yang diintervesni kurang memahami tujuan program	Pemerintah daerah yang diintervensi lebih m,emahami tujuan program dengan dilaksanakannya tahapan pra advokasi untuk mengkomunikasikan tujuan dari program prioritas nasional ini

k. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja. serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Telah dilakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran tahun 2023 untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Penacapain kinerja untuk indicator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya



Sasaran 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BBPOM di Makassar

Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan BBPOM di Makassar yang optimal di Provinsi Sulawesi Selatan diukur dengan 2 Indikator sebagai berikut

1. **Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**
2. **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

Pada sasaran strategis keenam Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan dua indikator tersebut semua indikator tersebut mencapai target yang diperjanjikan untuk Tahun 2023.



1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Standar adalah : Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP .

Tools

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Pada Tahun 2023 BBPOM di Makassar telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 100 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%
B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2023 adalah 100 % dengan realisasi sebesar `100 % Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Tabel 3.35

Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standard Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 1.607 sampel terhadap Jumlah target sampel Obat diperiksa selama Tahun 2023 sebesar 1.607 dan Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar sebanyak 1.613 terhadap Jumlah sampel Obat masuk ke Laboratorium selama Tahun 2023 sebesar 2.121 Sampel Obat mencakup (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik)

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A + B / 2

A = (Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar terdiri dari komoditi Obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.36

Jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2023

Komoditi	diperiksa	diuji
Obat	450	565
Obat Tradisional	338	469
Obat Kuasi	23	30
Suplemen Kesehatan	90	106
Kosmetik	700	951
Rokok	4	-
Total	**1.607**	**2.121**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.37. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Makassar Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	85	95,21	112,01	Sangat Baik
Tahun 2021	100	100	100	Baik
Tahun 2022	100	100	100	Baik
Tahun 2023	100	100	100	Baik

Terdapat kenaikan Capaian kinerja indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari tahun 2020 ke tahun 2021 sementara untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah sama pada angka 100 kategori "Sangat Baik". Kenaikan realisasi indikator dipengaruhi oleh adanya pengecualian bila kendala dalam pemenuhan timeline pengujian adalah kendala terkait alat, reagen, baku pembanding dan metode.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.38 Perbandingan realisasi Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	100	Sangat Baik

indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2023 **dibandingkan** dengan target Renstra Tahun 2024 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan ketegori "Sangat Baik". Masih tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra Tahun 2024 tetap dapat memenuhi target Renstra tahun 2024 pemenuhan sarana prasarana pengujian agar pengujian dapat diuji sesuai timeline.

d. Perbandingan Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022 dengan target IKU Badan POM

Indikator	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Indikator
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	100	Baik

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2023 BBPOM di Makassar **mencapai** target IKU Badan POM secara nasional, sama dengan rata-rata Nasional Badan POM, dengan nilai 100 % dengan kategori "Baik".

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar kategori tidak dapat disimpulkan antara lain :

- Realisasi Sampling sesuai target yang ditetapkan
- Sampel Komoditi obat yang diuji hanya kelas terapi sesuai penugasan Regionalisasi laboratorium, sehingga pengujian lebih cepat
- Koordinasi yang baik antara Bagian Inspeksi dan pengujian dalam memeriksa dan menguji sampel Obat
- Tersedianya peralatan dan instrumen yang mendukung pelaksanaan pengujian
- 1Pengaturan jadwal pengujian unggul di Region Makassar untuk semua komoditi
- Sampling dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan Pedoman Sampling dan sesuai Renlak
- 3. Proses transfer alat dan peningkatan kompetensi telah selesai awal Desember, sehingga tidak ada pengujian sampel carry over

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dilakukan dengan pemenuhan baku pembanding, reagensia/media, ketersediaan metode analisa, dan pengaturan jadwal pengujian mengingat saat ini masih dalam masa pandemi
- Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat meningkat
- Meningkatkan Koordinasi antara Bagian Inspeksi dan pengujian dalam memeriksa dan menguji sampel Obat
- Bimtek daring Validasi Metode dan Penjaminan Mutu Analisis Kimia. Dan Mikrobiologi, OT, Obat, dan Kosmetik

- Monitoring dan evaluasi yang lebih intens dilaksanakan sehingga penyelesaian pengujian sampel tidak carry over.
- Realisasi Sampling yang dilaksanakan lebih besar di awal bertujuan untuk meniadakan penyelesaian pengujian yang carry over ke Tahun berikutnya

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM Makassar untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- Proses transfer alat dan pengadaan alat pengujian unggul untuk pemenuhan standar peralatan dan standar kompetensi Balai regional tuntas bulan Desember 2023
- Input hasil uji di SIPT cukup tertib sehingga pelaporan kinerja sesuai
- Peningkatan kompetensi personel pengujian
- Pemenuhan kebutuhan reagen dan perawatan peralatan
- Memastikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dilakukan dengan Verifikasi Metode Analisa
- Upaya penjaminan peralatan/instrumen yang digunakan dalam uji memberikan hasil pengukuran sesuai telah dilakukan dengan kalibrasi baik internal oleh P3OMN maupun oleh pihak eksternal
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 merupakan pengakuan terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian, pada Tahun 2022 telah dilaksanakan audit pemenuhan ISO 9001:2015 dan reakreditasi ISO 17025:2017
- Peningkatan kompetensi untuk penguji untuk dapat melakukan pengujian dengan metode terbaru
- Meningkatkan Koordinasi baik internal yaitu antara Bagian Inspeksi dan pengujian dalam memeriksa dan menguji sampel Obat, maupun eksternal yaitu bersama Balai anggota Region Makassar
- Monitoring dan evaluasi yang lebih intens dilaksanakan sehingga penyelesaian pengujian sampel tidak carry over.

g. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Sebagai upaya perbaikan pelayanan publik BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :
Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan usaha :

- Melakukan monev internal dan dalam Region Makassar, untuk memastikan seluruh sampel diuji on track, mengupadate kemampuan uji, dan menyelesaikan pelaporan melalui SIPT real time
- Mengoptimalkan pelaksanaan perawatan/kalibrasi peralatan;
- Meningkatkan koordinasi antara substansi pemeriksaan dan pengujian dalam perencanaan sampling;
- Menerapkan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium pengujian secara konsisten;
- Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan pengujian melalui pelatihan teknis internal maupun eksternal;
- Pemenuhan Standar Ruang Lingkup sesuai Roadmap yang telah ditetapkan

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	melakukan proses perecanaan sampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling dan Monitoring dan Evaluasi terhadap IKU Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	- pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang ada, - Meningkatkan Koordinasi internal antara Bagian Inspeksi dan pengujian dalam memeriksa dan menguji sampel Obat dan koordinasi eksternal bersama Balai anggota Region Makassar - Monitoring dan evaluasi yang lebih intens dilaksanakan sehingga penyelesaian pengujian sampel tidak carry over. - Peningkatan kompetensi personel pengujian - Pemenuhan kebutuhan reagen dan perawatan peralatan Koordinasi yang intens dengan Balai lain dalam Region Wilayah Makassar				
2.	-Bimtek Pendampingan Pengujian Unggul LCMSMS Lab Kosmetik terlaksana minggu	Bimtek Pendampingan Pengujian Unggul LCMSMS Lab Kosmetik terlaksana 4-8 Desember	Bimtek Pendampingan Pengujian	Penyusunan Renlak Sampling dan Pengujian	Masing-masing UPT membuat Renlak tanpa mempertimbangkan	Sampling dan pengujian berjalan tertib dan

	pertama Desember 2023 -Monev Regional Makassar untuk mengevaluasi implementasi konsep baru Regionalisasi dilaksanakan minggu kedua Desember 2023	2023 Monev Regional Makassar untuk mengevaluasi implementasi konsep baru Regionalisasi dan menyusun Perencanaan Sampling dan Pengujian 2024 dilaksanakan 13-14 Desember 2023	Unggul LCMSMS Lab Kosmetik terlaksana 4-8 Desember 2023 Monev Regional Makassar untuk mengevaluasi implementasi konsep baru Regionalisasi dan menyusun Perencanaan Sampling dan Pengujian 2024 dilaksanakan 13-14 Desember 2023	semua komoditi untuk seluruh UPT anggota Region makassar untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja masing-masing UPT, utamanya terkait pengujian unggula sesuai Konsep baru Regionalisasi Laboratorium	load Balai penguji sehingga sampel tidak dapat diuji tepat waktu	sesuai rencana



2. Persentase Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Standar adalah : Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP .

Tools

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Pada Tahun 2023 BBPOM di Makassar telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 99,37 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan Diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

A = (Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel makanan) x 100%
B = (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel makanan) x 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi. Tahun 2023

Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2023 adalah 100 % dengan realisasi sebesar 100 % Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Tabel 3.39
Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard Tahun 2023.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	99,37	99,37	Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 826 sampel terhadap Jumlah target sampel Makanan diperiksa selama Tahun 2023 sebesar 835 dan Jumlah sampel

Makanan yang diuji sesuai standar sebanyak 1.040 terhadap Jumlah target sampel Makanan masuk ke Laboratorium selama Tahun 2022 sebesar 1.042 Sampel Makanan mencakup (segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman)

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A + B / 2

A = (Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

Makanan yang dimaksud mencakup Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, serta Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium
Jumlah sampel Makanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.40
Jumlah sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2023

Komoditi	diperiksa	Diuji
Makanan	826	1.040
Total	**826**	**1.040**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun 2020

Tabel 3.41. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standa BBPOM di Makassar Tahun 2022 dengan triwulan selanjutnya

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	75	92,57	123,43	Memuaskan
Tahun 2021	100	100	100	Baik
Tahun 2022	100	100	100	Baik
Tahun 2023	100	99,37	99,37	Cukup

Terdapat penurunan Capaian kinerja indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari tahun 2020 ke tahun 2021 sementara untuk tahun 2021 dan 2022 adalah sama pada angka 100 kategori "Sangat Baik", selanjutnya terjadi penurunan kembali dari tahun 2022 dibandingkan tahun 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.42. Perbandingan realisasi Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	99,37	99,37	Cukup

indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2023 **dibandingkan** dengan target Renstra Tahun 2024, berada pada ketegori "Cukup". Masih tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra Tahun 2024 dapat tetap dicapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Target BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Badan POM Tahun 2023

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2023 dengan target IKU Badan POM

Indikator	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Indikator
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	99,37	99,37	Cukup

Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022 BBPOM di Makassar **mencapai** target IKU Badan POM secara nasional, atau sama dengan rata-rata Nasional Badan POM, dengan nilai 100 dengan kategori "Sangat Baik".

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar kategori tidak dapat disimpulkan antara lain :

- Monitoring dan evaluasi yang rutin dilaksanakan sehingga penyelesaian pengujian sampel tidak carry over.

- Realisasi Sampling sesuai target yang ditetapkan
- Koordinasi yang baik antara Bagian Inspeksi dan pengujian dalam memeriksa dan menguji sampel Makanan
- Tersedianya peralatan dan instrumen yang mendukung pelaksanaan pengujian
- Kerjasama anggota tim yang solid
- Sampling yang sesuai renlak dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan Pedoman Sampling
- Alat yang ditransfer sempat mengalami trouble namun dapat segera diatasi dan dilakukan pengujian dengan cepat serta menggunakan sisa waktu yang ada sebelum timeline
  Sampel pangan tersampling 740 item, yang teruji di laboratorium 734 item, sebanyak 6 item tidak masuk laboratorium/tidak diuji (2 item TIE, 4 Item Kedaluarsa)

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dilakukan dengan pemenuhan baku pembanding, reagensia/media, ketersediaan metode analisa, dan pengaturan jadwal pengujian mengingat saat ini masih dalam masa pandemi
- Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian makanan meningkat.
- Realisasi Sampling yang dilaksanakan lebih besar di awal bertujuan untuk meniadakan penyelesaian pengujian yang carry over ke Tahun berikutnya

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM Makassar untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- Program evaluasi kinerja laboratorium melalui Program Uji Profisiensi, Uji Kolaborasi dan Uji Banding baik dari provider internal oleh P3OMN Badan POM RI maupun dari eksternal telah dilaksanakan oleh Laboratorium BBPOM di Makassar. Uji Profisiensi telah dIVkuti oleh seluruh laboratorium Bidang Pengujian dengan hasil inlier (memuaskan).
- Memastikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dilakukan dengan Verifikasi Metode Analisa
- Upaya penjaminan peralatan/instrumen yang digunakan dalam uji memberikan hasil pengukuran sesuai telah dilakukan dengan kalibrasi baik internal oleh P3OMN maupun oleh pihak eksternal
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 merupakan pengakuan terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian, pada Tahun 2022 telah dilaksanakan audit pemenuhan ISO 9001:2015 dan reakreditasi ISO 17025:2017
- Peningkatan kompetensi untuk penguji untuk dapat melakukan pengujian dengan metode terbaru

- Meningkatkan Koordinasi antara Bagian Inspeksi dan pengujian dalam memeriksa dan menguji sampel Makanan
- Monitoring dan evaluasi yang lebih intens dilaksanakan sehingga penyelesaian pengujian sampel tidak carry over.
- Pemenuhan kebutuhan reagen dan perawatan peralatan
- Proses transfer alat untuk pengujian unggul untuk penyelesaian pengujian lab unggulan serta pemenuhan standar peralatan dan standar kompetensi Balai regional tuntas bulan Desember 2023
- Input hasil uji di SIPT cukup tertib sehingga pelaporan kinerja sesuai
- Pelaksanaan sampling sesuai perencanaan dan pedoman sampling

i. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	melakukan proses perecanaan sampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling dan Monitoring dan Evaluasi terhadap IKU Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	- pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang ada, - Meningkatkan Koordinasi internal antara Bagian Inspeksi dan pengujian dalam memeriksa dan menguji sampel Makanan - Monitoring dan evaluasi yang lebih intens dilaksanakan sehingga penyelesaian pengujian sampel tidak carry over. - Peningkatan kompetensi personel pengujian - Pemenuhan kebutuhan				

		reagen dan perawatan peralatan - Koordinasi yang intens dengan Balai lain dalam Region Wilayah Makassar				
2.	1. Bimtek dan Pendampingan Pengujian Unggul LCMSMS terlaksana dengan baik 3. Koordinasi yang tetap . 2. Monev Regional Makassar untuk mengevaluasi implementasi konsep baru Regionalisasi dilaksanakan minggu kedua Desember 2023	1. Pelatihan Pendampingan Pengujian Unggul LCMSMS terlaksana tanggal 30 oktober sp 3 november 2023 2. Monev Regional Makassar untuk mengevaluasi implementasi konsep baru Regionalisasi dan menyusun Perencanaan Sampling dan Pengujian 2024 dilaksanakan 13-14 Desember 2023	. Penyusunan Renlak Sampling dan Pengujian semua komoditi untuk seluruh UPT anggota Region makassar untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja masing-masing UPT, utamanya terkait pengujian unggula sesuai Konsep baru Regionalisasi Laboratorium	Desember 2023	Renlak yang dibuat oleh masing-masing UPT masih selalu diubah tanpa mempertimbangkan load Balai penguji	Sampling dan pengujian berjalan tertib dan sesuai rencana





Sasaran 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Tools → **Dihitung berdasarkan nilai tingkat keberhasilan**

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Makanan dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))

c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Pada Tahun 2023 BBPOM di Makassar belum berhasil meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Makanan dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan karena belum tercapainya indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan dengan capaian 80,86 %, menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a. **SPDP** sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
b. **Tahap I** sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
c. **P21** sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
d. **Tahap 2** sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan OM =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{Jumlah\ capaian}{Target\ perkara}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan Tahun 2023 adalah 92,91 % dengan realisasi 87,33 % perkara yang diselesaikanI di wilayah kerja BBPOM di Makassar dibawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 94 % % dengan kategori "Cukup"

Tabel 3.43

Capaian Kinerja Indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan	94,00	87,33	92,91	Cukup

Hasil perhitungan diperoleh dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara pada tabel berikut :

Tabel 3.44

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2023

Tahapan	Desember										
	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
SPDP	10	4	0		1,00		0,15	15,00%	87,33%	100,00%	87,33%
Tahap I			2	0	1,00	0,29	0,4	40,00%			
P21			2	4	0,80	0,29	0,3	25,33%			
Tahap II			6	0	0,60	0,00	0,15	7,00%			
Total	10	4	10	4							

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.45. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Makassar Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tahun 2020	67	98,04	146,33	Tidak dapat disimpulkan
Tahun 2021	88,00	90,33	102,65	Sangat Baik
Tahun 2022	91,00	97,27	106,89	Sangat Baik
Tahun 2023	94,00	87,33	92,91	Cukup

Terjadi perubahan target untuk indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM Makassar sesuai dengan hasil reviu Renstra dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Makassar dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024, dimana realisasi tahun 2020 sebesar 98,04 dijadikan sebagai baseline baru dengan perubahan target tahun 2021 dari 73 menjadi 88.

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM Makassar untuk tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Tahun 2021 berada pada angka 102,65 ketegori "Sangat Baik" lebih rendah apabila dibandingkan tahun 2020 dengan nilai 146,33 ketegori "Tidak dapat disimpulkan". .Terdapat penurunan realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Makassar sebesar 43,68 point, Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM Makassar untuk Tahun 2022 berada pada angka 106,89 lebih tinggi apabila dibandingkan tahun 2021 dengan nilai 102,65 % ketegori "Sangat Baik". Terdapat peningkatan realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dari tahun 2021 ke Tahun 2022 sebesar 4,24 point, serta dibandingkan tahun 2022 maka tahun 2023 kembali mengalami penurunan realisasi serta persentase capaian hanya 92,91 Kategori "Cukup".

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.46. Perbandingan realisasi Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2022 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94	97	87,33	92,90	Cukup

indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra Tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori "Cutup". Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan dan sistematis agar target Renstra Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

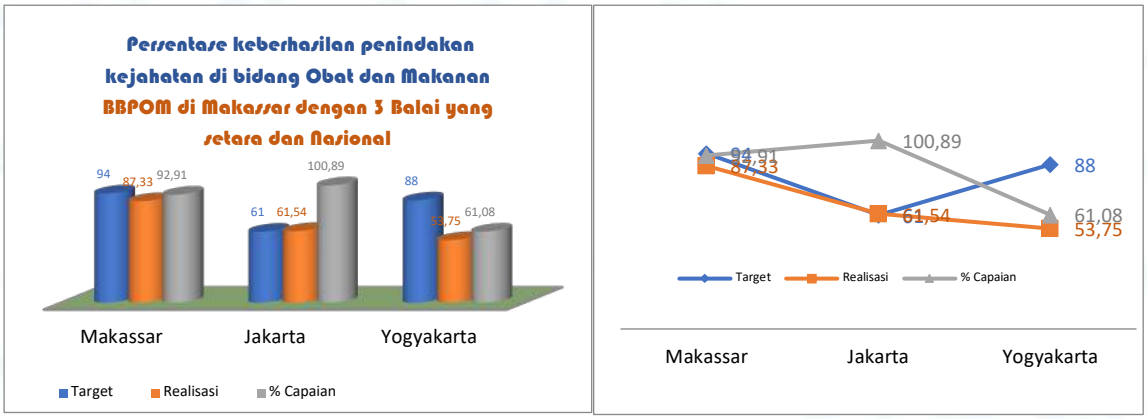
Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta dan BBPOM Yogyakarta Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta, dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023

Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	94,00	87,33	92,91	Cukup
BBPOM di Jakarta	61,00	61,54	100,89	Sangat Baik
BBPOM di Yogyakarta	88,00	53,75	61,08	Kurang

Target indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM Makassar, lebih tinggi dibandingkan. BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta. Hasil capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM Makassar yaitu 92,91 lebih tingg dibandingkan BBPOM Yogyakarta namun BBPOM Jakarta dengan kategori Sangat Baik lebih tinggi dibandingkan BBPOM Makassar kategori Cutup.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta dan BBPOM Yogyakarta Tahun 2023

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

f.

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada tahun 2023 belum mencapai target, hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah :

- Penyidik PPNS Kelompok Substansi Penindakan di Balai Besar POM di Makassar melaksanakan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Pengadilan Negeri Makassar, mulai per Januari 2023 terdaftar untuk memiliki akun E-Berpadu.
- Sejak Januari 2023 diterapkan aplikasi E-Berpadu milik Mahkamah Agung dimana masing-masing penyidik harus memiliki akun karena permohonan persetujuan penyitaan (e-sita) dan berkas perkara yang telah P21 (e-pelimpahan) harus dikirimkan secara online menggunakan aplikasi E-Berpadu untuk keperluan persidangan. Dilakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Pengadilan Negeri Makassar sehingga per Januari 2023 penyidik BBPOM di Makassar sudah memiliki akun.
- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui kegiatan intelijen, patroli siber dan onsite. Berdasarkan hasil dari pendalaman informasi tersebut maka pada Tahun 2023 telah dilakukan operasi penindakan sebanyak 10 perkara, dengan progress tahapan sebagai berikut :
    - Tahap 1 sebanyak 2 perkara (distribusi Obat TIE, 1 Perkara dan distribusi kosmetik TIE sebanyak 1 Perkara)

- P21 sebanyak 2 perkara (distribusi Suplemen Kesehatan TIE, 1 Perkara dan distribusi kosmetik TIE sebanyak 1 Perkara)
- Tahap 2 sebanyak 6 perkara (distribusi kosmetik TIE sebanyak 2 perkara, distribusi OT TIE sebanyak 3 perkara dan distribusi Obat TIE sebanyak 1 perkara)

- Membuat laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri setempat segera setelah dilakukan penyitaan barang bukti oleh penyidik dan melakukan pengajuan penetapan penyitaan melalui e-berpadu.
- Melakukan pemanggilan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tambahan saksi-saksi dalam rangka penyelesaian pemberkasan.
- Selama tahun 2023 telah dilakukan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka untuk 10 perkara yaitu 3 perkara mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar, 4 perkara mengedarkan kosmetik tanpa izin edar, 2 perkara mengedarkan obat tanpa izin edar dan 1 perkara mengedarkan suplemen kesehatan tanpa izin edar. Gelar perkara tersebut dihadiri oleh Korwas Polda Sulawesi Selatan untuk memberikan arahan upaya tindak lanjut yang harus dilakukan oleh penyidik dan rekomendasi hasil gelar. Dari hasil gelar tersebut telah dilakukan penetapan tersangka untuk 10 perkara yang ditindaklanjuti dengan pengiriman pemberitahuan penetapan tersangka kepada yang bersangkutan dan Korwas Polda Sulawesi Selatan. Dengan ditetapkannya sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara maka dilakukan pemanggilan tersangka serta melakukan pemeriksaan tersangka.
- Kendala yang terjadi antara lain pada saat pemanggilan saksi/tersangka tidak hadir sesuai tanggal yang ditentukan karena ada kepentingan lain sehingga berpengaruh dalam penyelesaian pemberkasan, dari 6 tersangka pada saat pelaksanaan Tahap 2 semuanya kooperatif sehingga tahap 2 dapat dilaksanakan dengan baik pada tahun 2023.
- Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Korwas Polda Sulawesi Selatan.
- Melakukan patroli siber setiap bulan untuk mengidentifikasi akun yang akan direkomendasikan untuk dilakukan take down. Intensifikasi patroli siber dengan rekomendasi takedown produk kosmetik sebanyak 352 link di tahun 2023.
- Melakukan update peta rawan kasus setiap bulan dengan mengambil data dari hasil pendalaman informasi / kegiatan penindakan / pengawasan / informasi masyarakat / media / temuan kasus dari kepolisian.
- Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi antara lain sosialisasi Patroli Siber secara daring diselenggarakan oleh Direktorat Siber, Diklat Analis Dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan di Pusdik Intelijen Soreang diselenggarakan oleh Direktorat Cegah Tangkal, Bimtek e-berpadu secara daring, sosialisasi aplikasi dashboard penindakan secara daring diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Penindakan, Bimtek Penanganan Pertama BB Elektronik di BBPOM Makassar yang diselenggarakan oleh Direktorat Siber, Rakor PPNS dari Korwas Polda Sulawesi Selatan, mengikuti Forkom PPNS di Bandung diselenggarakan oleh Direktorat Penyidikan.
- Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Bali diselenggarakan oleh Direktorat Cegah Tangkal, Sosialisasi dan pelatihan penerbitan administrasi penanganan perkara tindak pidana

berbasis teknologi informasi (SPDP Online) kepada PPNS Kementerian/Lembaga diselenggarakan oleh Biro Korwas PPNS Mabes Polri, FGD "Mekanisme dan Kewenangan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang atau Uang dalam Proses Penyidikan" diselenggarakan oleh BBPOM di Pekanbaru secara online, In House Training Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan" diselenggarakan oleh Dit. Cegah Tangkal secara daring, Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penyidikan Obat dan Makanan dengan tema "Perkuatan Koordinasi Integrated Criminal Justice System (ICJS) dalam Dinamika Penegakan Hukum Obat dan Makanan" diselenggarakan oleh Direktorat Penyidikan, mengikuti Forkom Intelijen di Kupang, pelatihan secara daring sertifikasi drone diselenggarakan oleh Direktorat Intelijen, kegiatan serah terima dan pengenalan alat taktis ke UPT dan sertifikasi drone petugas intelijen pusat dan UPT diselenggarakan oleh Direktorat Intelijen, pelatihan *Dark web Investigatigation* yang diselenggarakan oleh PPSDM Bdan Siber dan Sandi Negara kerja sama Badan Pengawas Obat dan Makanan secara luring di Jakarta, Bimtek pendukung tugas PPNS diselenggarakan oleh PPSDM.

- Dalam rangka meningkatkan kerjasama dan penggalangan dengan stake holder dilakukan kegiatan antara lain pemberian keterangan ahli kepada Penyidik Polri, sebagai tindak lanjut permohonan keterangan ahli dari Polri, sebagai Narasumber kegiatan Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan, menghadiri pemusnahan Barang Bukti dan barang rampasan di BNN.
- Telah dilakukan kegiatan "Sarasehan Pelaku Industri Kosmetik sebagai Upaya Penggalangan & Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan Di Sulawesi Selatan" dengan mengundang pelaku usaha produksi kosmetik, lintas sektor (Aparat Penegak Hukum, Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Selatan, dan SKPD terkait lainnya), Organisasi Profesi IAI & PAFI, Organisasi Masyarakat seperti Asperindo, IWAPI, Akademisi dari UMI, Unhas, UIN Alaudin, dimana kegiatan ini merupakan bentuk penggalangan dalam pencegahan kejahatan kosmetik di Sulawesi Selatan.

g. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 87,33 dengan capaian 92,91 % pada tahun 2023. Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan kategori tidak efisen dengan tingkat efisiensi (-0,03) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 92,91 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 95,62 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2023

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
92,00	1.250.972.000	1.196.222.729	95,62	0,97	-0,03	Tidak Efisien

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator adalah kegiatan penindakan dengan target 10 perkara dan realisasi sebanyak 10 perkara, 6 Perkara selesai di Tahap 2 dan 4 Perkara Carry Over dengan posisi 2 berada di P21 dan 2 Perkara di Tahap 1, namun terdapat perkara carry over tahun 2019-2022 sebanyak 4 perkara yang masih memerlukan tindak lanjut. Untuk menunjang keberhasilan telah dilakukan upaya antara lain:

- Pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli siber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan.
- Melakukan pemanggilan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tambahan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka dalam rangka penyelesaian pemberkasan.
- Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Korwas Polda Sulawesi Selatan dalam rangka penyelesaian pemberkasan terkait upaya yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan P19 dan terkait pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (tahap 2), akan dibuka kooprdinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan terkait permohonan data kendaraan bermotor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar terkait verifikasi data NIK, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK dan Bank Indonesia serta Bank Konvensional lain terkait permintaan izin untuk mendapatkan informasi transaksi keuangan, Provider Indosat dan Provider Telkomsel terkait permintaan data pendaftar.
- Akan dilakukan kegiatan FGD Cegah Tangkal antara BBPOM Di Makassar bersama dengan pihak Asperindo Sulawesi Selatan, untuk memberikan sosialisasi terkait pencegahan dan pemberantasan kejahatan obat dan makanan kepada para anggota Asperindo Sulawesi Selatan serta stakeholder terkait lainnya yang direncanakan dilakukan pada tahun 2024 di kota Makassar.

i. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Untuk melaksanakan pemenuhan pencapaian target dapat tercapai Tim Subtansi Penindakan akan menerapkan rekomendasi berupa : - Analisis penjejakan digital dan penajaman trend	Terhadap pencapaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang telah di selesaiakn di wilayah kerja BBPOM Makassar diperoleh 87.33 %	Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kedepan tercapai Tim Subtansi Penindakan	Diharapkan 8 perkara dapat selesai Tahap II pada Bulan Desember 2023 dan	- 6 Perkara berada di Posisi Tahap 2, 4 Perkara di Posisi Tahap 1. Sehingga total Persentase Keberhasillan penindakan	- 6 Perkara berada di Posisi Tahap 2, 2 Perkara berada di Posisi P.21 dan

	dan meningkatkan pelaksanaan intelijen di wilayah Sul Sel - koordinasi hingga tahap Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum	(tidak memenuhi target) adapun Program / kegiatan yang telah berupaya dilakukan sd Bulan Desember 2023 al. : 1. Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan (operasi Intel sebanyak 4 kegiatan) 2. Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan dan skenario Penindakan 3. Operasi Penindakan (6 Perkara : 3 Pro Justicia masih berada di posisi Tahap 2, 1 yang berada di tahap p21 dan 2 berada di posisi Tahap 1) 4. Gelar Kasus dan Pelaporan 5. Pemberkasan (saat ini Menunggu pihak kejaksaan untuk naik ke proses Tahap 2)	akan melakukan : - Pemutakhiran data terhadap beberapa kegiatan yang dapat mendukung pencapaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan - Melakukan Monev terhadap rencana aksi Data atau informasi terkait potensi kejahatan Obat dan Makanan. - Melaksanakan pemberkasan hingga sampai pada Tahap II	diharapkan pemenuhan target di bulan Desember dapat terealisasi.	sebesar 69.13 %, hal ini menyebabkan target sebesat 94 % tidak tercapai terhadap target perkara tahun 2023, hal ini disebabkan karena 4 perkara yang telah Pro Justisia berada pada Tahap 1	2 Perkara di Posisi Tahap 1 Sehingga total Persentase Keberhasillan penindakan sebesar 87.33 %, hal ini menyebabkan target sebesat 94 % tidak tercapai terhadap target perkara tahun 2023, hal ini disebabkan karena 4 perkara yang telah Pro Justisia berada pada Proses P21 : 2 perkara dan Tahap 1 juga 2 Perkara.

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja ersentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait ersentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id

- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja ersentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Telah dilakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran tahun 2022 untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Penacapain kinerja untuk indicator ersentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya





Sasaran 8

Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal

1. Indeks RB BBPOM di Makassar

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Acuan

Peratuan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 perubahan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2023, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

Tabel 3.47
Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM :

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	8 %
2	Penataan Tatalaksana	7 %
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10 %

4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10 %
5	Penguatan Pengawasan	15 %
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10 %

Tabel 3.48

Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (40%)
1	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50 %
2	Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50 %

A.	**PENGUNGKIT**			**60,00**
	I.	**PEMENUHAN**		**30,00**
		1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
		2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50
		3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
		4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
		5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
		6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00
	II.	**REFORM**		**30,00**
		1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
		2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50
		3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
		4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
		5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
		6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00
TOTAL PENGUNGKIT				
B.	**HASIL**			**40,00**
	I.	**BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL**		**22,50**
		a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50
		b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00
	II.	**PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA**		**17,50**
		a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50
TOTAL HASIL				

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian persentase Indeks RB BBPOM di Makassar Tahun 2023 adalah 111,60 % dengan realisasi sebesar 89,06 % **diatas dari target** yang dietentukan dengan kategori **"Sangat Baik" .**

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Indeks RB BBPOM di Makassar Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Indeks RB BBPOM di Makassar	81,80	90,51	110,65	Sangat Baik

hasil evaluasi berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal Inspektorat :

1. Pada tahun 2022 telah mendapatkan predikat WBK.
2. Balai Besar POM di Makassar telah melakukan berbagai upaya dan/atau inovasi yang dilakukan untuk memberikan dampak pada perbaikan pelayanan publik yang prima (Cepat dan mudah), inovasi yang dilakukan antara lain:
   a. Molkika plus : Mobil laboratorium kosmetika keliling plus pangan
   b. Pedang Puang Baso : Pendampingan Pelaku UMKM Pangan, Obat
   b. Tradisional dan Kosmetik
   c. Seppulo : Sistem pelayanan publik online
   d. Parellui : Penyebaran inforamsi melalui infografis
3. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi dan telah melakukan inovasi yaitu SAPPAI (Searching Tahapan Pengujian Sampel Pihak Ketiga): aplikasi SAPPAI merupakan aplikasi terkait data pelanggan, produk, parameter uji, tarif, hasil uji, hingga pengunduhan sertifikat, sistem ini memudahkan pelanggan untuk menelusur (tracking) posisi/status sampel yang diujikan, serta memungkinkan konsumen mengunduh Sertifikat Hasil uji secara mandiri tanpa harus datang ke kantor Balai Besar POM di Makassar.
4. Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,74 (syarat 3,2) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,82 (syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.
5. Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 3,75 (syarat 2,5) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks RB BBPOM di Makassar Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Indeks RB BBPOM di Makassar	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	85	50,45	59,35	Sangat Baik
Tahun 2021	77,80	77,81	100,01	Sangat Baik
Tahun 2022	79,80	89,06	111,60	Sangat Baik
Tahun 2023	81,80	90,51	110,65	Sangat Baik

Terjadi perubahan target untuk indikator Indeks RB Balai Besar POM di Makassar sesuai dengan hasil reviu Renstra dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Makassar dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024, dimana realisasi tahun 2020 yaitu 50,45 dijadikan sebagai baseline baru dengan perubahan target tahun 2021 dari 89,00 menjadi 77,80.

Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks RB Balai Besar POM di Makassar untuk tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Tahun 2021 berada pada angka 100,01 ketegori "Sangat Baik" lebih tinggi apabila dibandingkan tahun 2020 dengan nilai 59.35 kategori "Tidak Memenuhi Ekspektasi" .Terdapat peningkatan realisasi Indeks RB untuk tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 berada pada angka 111,60 lebih tinggi apabila dibandingkan tahun 2021 dengan nilai 100,01 kategori "Sangat Baik". Terdapat peningkatan realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Makassar sebesar 11,59 point.

Terdapat peningkatan realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Makassar untuk tahun 2023 adalah 90,51 dibandingkan tahun 2022 yaitu 89,06. sebesar 1,45 point; persentase capaian Tahun 2023 berada pada angka 110,60 dibandingkan tahun 2021 dengan nilai 111,60 kedua tahun ini berada pada kategori "Sangat Baik".

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Indeks RB BBPOM di Makassar Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024 Renstra Awal	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks RB BBPOM di Makassar	81,80	83,80	90,51	108,00	Tercapai/ Melampaui

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024 (Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks RB BBPOM di Makassar	81,80	91,51	90,51	98,90	Akan Tercapai

Realisasi indeks RB BBPOM di Makassara tahun 2023 dibandingkan target Renstra sebelum direviu masuk kategori Tercapai/Melampaui. Namun jika dibandingkan dengan Target Renstra setelah direviu masuk dalam kategori Akan Tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks RB BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Indeks RB BBPOM di Jakarta dan BBPOM Yogyakarta Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

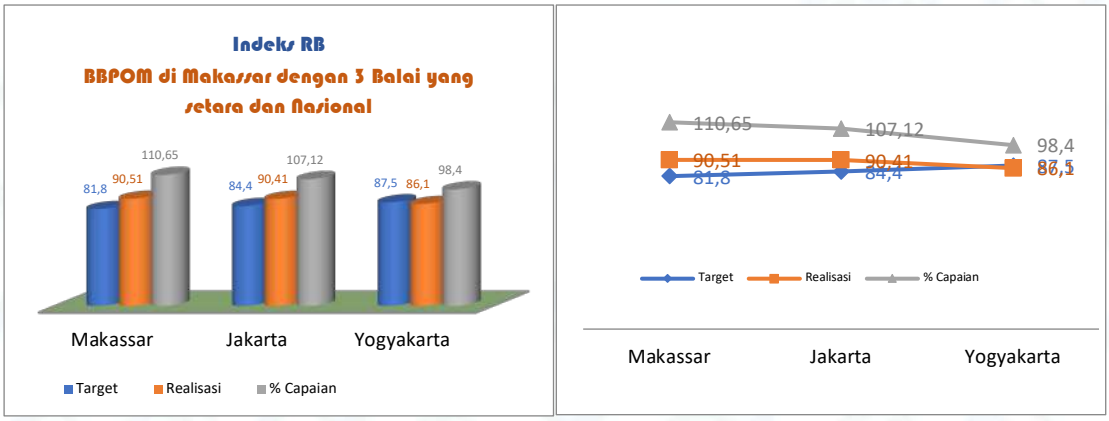
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Indeks RB BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM Yogyakarta dan BBPOM Bandung tahun 2023

Indikator Kinerja Indeks RB	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	81,80	90,51	110,65	Sangat Baik
BBPOM di Jakarta	84,40	90,41	107,12	Sangat Baik
BBPOM di Yogyakarta	87,50	86,10	98,40	Cukup

Target indikator Indeks RB BBPOM Makassar yaitu 81,80 dibawah dari target BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta. Realisasi teringgi nilai Indeks RB adalah BBPOM di Makassar hal yang sama persentase capaian tertinggi nilai indeks RB juga adalah BBPOM di Makassar dengan capaian 110,65 % apabila dibandingkan BBPOM Jakarta telah mencapai target dengan kategori "Sangat Baik", sementara persentase capaian BBPOM Yogyakarta adalah 98,40 kategori "Cutup".

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Indeks RB di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Indeks BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM Yogyakarta Tahun 2023

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Indeks RB BBPOM di Makassar Tahun 2023 dengan target Nasional Badan POM

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks RB BBPOM di Makassar	81,80	85	90,51	110,64	Sangat Baik

Realisasi Indeks RB BBPOM di Makassar Tahun 2023 **telah mencapai** target Badan POM secara nasional, dengan nilai 110,64 dengan kategori "Sangat Baik".

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks RB BBPOM di Makassar kategori "Sangat Baik" antara lain:

1. hasil evaluasi berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal Inspektorat :
   - BBPOM di Makassar telah membangun ZI sejak Tahun 2019 dan pada Tahun 2022 telah memenuhi persayaratan minimal pengajuan predikat WBK pada komponen pengungkit dan komponen hasil.
   - BBPOM Makassar telah berhasil mengimplementasikan inovasi:
     a. MOLKIKA (Mobil Laboratorium Keliling Kosmetika aman) merupakan kegiatan pengujian bahan berbahaya pada kosmetik menggunakan test kit dengan parameter uji rhodamin B, logam mercury dan hidroquinon menggunakan mobil laboratorium keliling secara gratis. Kelebihan dibandingkan dengan unit kerja lain adalah belum ada yang melakukan pengujian bahan berbahaya pada kosmetik menggunakan mobil laboratorium keliling. Dampak adanya inovasi ini adalah lebih dekat dengan masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat terkait kosmetik aman
     b. Pedang Puang Baso (Pendampingan Pelaku UMKM Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetik) yaitu kegiatan pendampingan dengan memberikan fasilitas dan informasi yang tajam kepada UMKM sehingga dapat mengangkat dan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan dengan adanya legalitas berupa nomor izin edar produk. Keberhasilan inovasi tersebut dapat digambarkan melalui peningkatan jumlah pendampingan UMKM, dimana hingga bulan Mei Tahun 2022 sudah terdapat 30 UMKM, dibandingkan Tahun 2021 secara total dilakukan pendampingan terhadap 50 UMKM.
   - Agen perubahan telah mampu melakukan beberapa inovasi melalui penerapan digitalisasi dengan pemanfaatan teknologi infomasi sehingga dapat memberikan dampak pelayanan lebih cepat dan tepat.
2. Area Penguatan Tata Laksana, penyebab keberhasilan a.l: membuat perencanaan tim dengan membagi habis pekerjaan, dan setiap dakung dikerja secara tim untuk lebih memudahkan, dan setiap anggota tim telah memahami tugas masing-masing, dan sudah memahami core value ASN BerAKHLAK, sehingga lebih memudahkan dalam menyelesaikan LKE ZI dan data dukungnya
3. Area Penguatan Manajemen SDM : penyebab kegagalan, perencanaan kerja tim telah dibuat, namun dalam penyiapan dakung, masih perlu peningkatan pemahaman tim dalam penyiapan data dukung

4. Area Penguatan Akuntabilitas : Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 2,5 (syarat 2,5) sesuai persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB pada komponen Peengungkit pada area Akuntabilitas
5. Area Penguatan Akuntabilitas penilaian pada Komponen Hasil untuk kategori "Capaian Kinerja Lebih Baik" dengan bobot tertinggi 5 dan min sebagai syarat adalah 2,5 (syarat 2,5) di mana hasil yang diperoleh BBPOM Makassar adalah memenuhi syarat l3,75) sesuai persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPAN RB .
6. Area Penguatan Pengawasan : Berdasarkan evaluasi Badan POM untuk pokja penguatan pengawasan untuk komponen pengungkit 14,19 dengan kategori memenuhi syarat, hal ini karena : 1. pembagian tugas dan tanggungjawab pada setiap fungsi pokja pengawasan jelas untuk dilaksanakan, 2. Konsisten dalam menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, 3. Dapat menyediakan data dukung yang dibutuhkan.
7. Area Pelayanan Publik : Berdasarkan evaluasi Badan POM untuk pokja penguatan kualitas pelayanan public untuk komponen pengungkit 9,49 dan reform 16,35 dengan kategori memenuhi syarat

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Indeks RB BBPOM di Makassar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun analisis dampak pada inovasi yang baru terimplementasi pada Tahun 2023 sehingga dapat terlihat analisis dampaknya.
2. Melakukan pengawalan terhadap capaian kinerja Tahun 2023 agar lebih baik dari capaian kinerja Tahun sebelumnya..
3. Peningkatan peran agen perubahan dalam percepatan perubahan pola pikir untuk mendorong kinerja yang lebih baik.
4. Melaksanakan pengelolaan media/aktivitas interaktif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integrita secara berkala dan menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut, serta menindaklanjuti Rencana Aksi yang telah ditetapkan.
6. Peningkatan peran agen perubahan dalam percepatan perubahan pola pikir untuk mendorong kinerja yang lebih baik.
7. Melakukan perencanaan pengembangan kompetensi pada setiap pegawai.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi dalam upaya perbaikan terhadap kinerja unit kerja.
9. Menggunakan hasil assessment pegawai sebagai dasar pelaksanaan mutasi pegawai.
10. Menuangkan budaya kerja dan nilai-nilai organisasi BerAKHLAK ke dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas.
11. Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan. Inovasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain.
12. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

f. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Indeks RB BBPOM di Makassar diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 90,51 dengan capaian 110,65 % pada tahun 2023. Indikator Indeks RB BBPOM di Makassar kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,11 hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 110,65 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 99,61 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Indeks RB BBPOM di MakassarTahun 2023

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
110,65	25.761.586.000	25.304.975.514	99,61	1,11	0,11	Efisien

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Indeks RB BBPOM di Makassar kategori Memenuhi Ekspektasi antara lain :

- Terus melakukan pengembangan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan stakeholder disertai analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja sehingga diharapkan dapat direplikasi oleh unit kerja lain maupun instansi diluar BPOM.
- Berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja agar lebih baik dari Tahun sebelumnya.
- Meningkatkan peran Agen Perubahan dalam percepatan perubahan pola pikir kinerja yang lebih baik melalui implementasi rencana aksi yang berprinsip spesifik, terukur, logis dan dapat dilaksanakan dalam periode waktu yang jelas
- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode keempat yaitu tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Di samping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya.
- Dalam kurun waktu tahun 2023, BBPOM di Makassar sebagai salah satu UPT yang telah meraik predikat WBK juga menjadi salah satu tujuan UPT dari seluruh Indonesia untuk sharing terkait keberhasilan pencapaian predikat WBM, dari kegiatan tersebut juga telah dilakukan sharing apa saja yang sudah dilakukan di UPT tersebut, sehingga bisa menjadi masukan perbaikan untuk BBPOM di Makassar. Seluruh rencana aksi RB yang telah direncanakan di tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan penunjang yang juga dilaksanakan sepanjang tahun 2023 antara lain : Pemeliharaan dan Peningkatan QMS, Dukungan Kegiatan Agent Of Change, Pelatihan Lead Auditor, Internalisasi Reformasi Birokrasi Mempertahankan WBK, Capacity Building untuk

peninngkatan kompetensi ASN berakhlak, Operasional dukungan kegiatan inovasi Pokja RB dalam rangka pembangun ZI dan WBK, Belamja Pegawai dan semua kegiatan operasional perkantoran.

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Terus melakukan pengembangan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan stakeholder disertai analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja sehingga diharapkan dapat direplikasi oleh unit kerja lain maupun instansi diluar BPOM.		Pokja Manajemen perubahan akan mengagendakan untuk pengembangan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, disertai analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja	Ditindaklanjuti pada Tahun 2023		
2.	Berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja agar lebih baik dari Tahun sebelumnya.	Melakukan pengawalan dengan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Indikator Kinerja Utama disertai tindak lanjut rekomendasi untuk seluruh IKU				
3	1. Area Penguatan Manajeman Perubahan : .... 2. Area Penguatan Tata Laksana, Konsistensi penyiapan data dukung dipertahankan dan ditingkatkan, pengembangan SPBE yang memberikan dampak kepada masyarakat di reviu untuk pengembangan 3. Area Penguatan	1. Area Penguatan Manajeman Perubahan : .... 2. Area Penguatan Tata Laksana, selesai Tw4 3. Area Penguatan Manajemen SDM : selesai Tw4 4. Area Penguatan Akuntabilitas : Monitoring dan Evaluasi Rencana kerja	1. Area Penguatan Manajeman Perubahan : .... 2. Area Penguatan Tata Laksana, selesai Tw4 3. Area Penguatan Manajemen	1. Area Penguatan Manajeman Perubahan : .... 2. Area Penguatan Tata Laksana, selesai Tw4 3. Area Penguatan Manajemen	1. Area Penguatan Manajeman Perubahan : .... 2. Area Penguatan Tata Laksana, tidak ada kendala 3. Area Penguatan Manajemen SDM : kendala akan di upayakan perbaikan di tahun selanjutnya	1. Area Penguatan Manajeman Perubahan : .... 2. Area Penguatan Tata Laksana, selesai Tw4 3. Area Penguatan Manajemen

	Manajemen SDM : Memperbaiki konsistensi penyiapan data dukung, dan melakukan monitoring berkala, sehingga data dukung yang seharusnya ada pada area ini dapat tersedia 4. Area Penguatan Akuntabilitas : Melakukan pengawalan dengan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Indikator Kinerja Utama disertai tindak lanjut rekomendasi untuk seluruh IKU 5. Area Penguatan Pengawasan : peningkatan inovasi pengawasan yang berkelanjutan 6. Area Pelayanan Publik : pelaksanaan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan	Pembangunan ZI menuju WBBM pada area Akuntabilitas setiap bulan selama setahun terkait keterlibatan Pimpinan dan pengelolaan Akuntabilitas kinerja 5. Area Penguatan Pengawasan : Talapa dan Masirika 6. Area Pelayanan Publik : Malkika plus, pedang puang basok	SDM : selesai Tw4 4. Area Penguatan Akuntabilitas : pada aspek Reform Capaian persentase kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2022 sebesar 103,11 berada pada kategori Memenuhi Ekspektasi dengan rincian 9 Sasaran kinerja dengan capaian 100 % atau lebih terhadap 11 Sasaran kinerja sehingga nilai pada kategori ini 1,64 dari bobot 2 5. Area Penguatan Pengawasan : TW1 6. Area Pelayanan Publik :	SDM : selesai Tw4 4. Area Penguatan Akuntabilitas : Triwulan IV 5. Area Penguatan Pengawasan : selesai tw4 6. Area Pelayanan Publik :	4. Area Penguatan Akuntabilitas : - Penerapan konsep efektifitas, efisiensi dan ekonomis - Difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil) - Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik - Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi 5. Area Penguatan Pengawasan : 6. Area Pelayanan Publik : peningkatan pemahaman budaya pelayanan prima	SDM : selesai Tw4 4. Area Penguatan Akuntabilitas : terdapat peningkatan 0, 1 poin pada aspek Reform Capaian Tahun 2023 penilaian aspek pemenuhan = 5,00 dan Aspek reform = 4,64 5. Area Penguatan Pengawasan : Personel semakin peduli sehingga mendukung tercapainya nilai penguatan pengawasan untuk komponen pengungkit 14,19 6. Area Pelayanan Publik : nilai pokja penguatan pelayanan publik memenuhi syarat berdasarkan evaluasi

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Indeks RB BBPOM di Makassar telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Indeks RB BBPOM di Makassar dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Indeks RB BBPOM di Makassar pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Telah dilakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran tahun 2023 untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Penacapain kinerja untuk indicator Indeks RB BBPOM di Makassar serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya



2. Nilai AKIP BBPOM di Makassar

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Komponen

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja
5. Capaian Kinerja

Capaian indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar diperoleh berdasarkan hasil penilaian oleh Inspektorat Badan POM Pusat dengan menggunakan Lembar Kerja Elektronik terhadap dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM Tahun n-1.

Penilaian AKIP terdiri dari 5 komponen penilaian, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
   - Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%)
   - Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2. Pengukuran Kinerja (25%), meliputi aspek:
   a. Pemenuhan pengukuran (5%)
   b. Kualitas Pengukuran (12,5%)
   c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%), meliputi aspek:
   a. Pemenuhan pelaporan (3%)
   b. Kualitas pelaporan (7,5%)
   c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal Kinerja (15%), meliputi aspek:
   a. Pemenuhan evaluasi (2%);
   b. Kualitas evaluasi (5%);
   c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
5. Pencapaian Kinerja (20%), meliputi aspek:
   - Kinerja yang dilaporkan (output) (5%);

- Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%);
- Kinerja Tahun berjalan (benchmark) (5%)..

a) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian persentase Nilai AKIP BBPOM di Makassar Tahun 2023 adalah 100,93 % dengan realisasi sebesar 81,05 % **diatas dari target** yang dietentukan dengan kategori **"Sangat Baik" .**

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Nilai AKIP BBPOM di Makassar	80,30	81,05	100,93	Sangat Baik

b) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Nilai AKIP BBPOM di Makassar	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	81	77,27	95,40	Cukup
Tahun 2021	78,3	78,13	99,78	Cukup
Tahun 2022	79,30	79,21	99,89	Cukup
Tahun 2022	80,30	81,05	100,93	Sangat Baik

Terjadi perubahan target untuk indikator Nilai AKIP BBPOM Makassar sesuai dengan hasil reviu Renstra dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Makassar dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024, dimana realisasi tahun 2020 sebesar 77,27 dijadikan sebagai baseline baru dengan perubahan target tahun 2021 dari 85,00 menjadi 78,30.

Terdapat peningkatan realisasi indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Makassar tahun 2021 dibanding tahun 2020 dari nilai 77,27 menjadi 78,13, capaian mengalami peningkatan 0,86 point, berada pada kategori "Cukup"; tahun 2022 dibanding tahun 2021 dari nilai 78,13 menjadi 79,21, capaian mengalami peningkatan 1,08 point, berada pada kategori "Cutup" ; serta mengalami peningkatan tahun 2023 dibanding tahun 2022 dari nilai 79,21 menjadi 82,34, capaian mengalami peningkatan 1,84 point, berada pada kategori "Sangat Baik"

- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024 Renstra Awal	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Nilai AKIP BBPOM di Makassar	80,30	81,30	81,05	99,69	Akan Tercapai

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024 (Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Nilai AKIP BBPOM di Makassar	80,30	82,45	81,05	98,30	Akan Tercapai

Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Makassara tahun 2023 dibandingkan target Renstra sebelum direviu dan setelah direviu Dimana Reviu Target Indikator Nilai SAKIP Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan menggunakan metode statistika, asas keadilan bagi Satuan Kerja (fairness), pertimbangan dukungan Satuan Kerja terhadap capaian BPOM, realisasi Nilai SAKIP dari tahun 2019 s.d. 2022, serta upaya yang perlu dicapai oleh Satuan Kerja berdasarkan kemampuan di tingkatan masing-masing maka dengan membandingkan kedua target ini maka masuk **kategori akan tercapai**

- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Nilai AKIP BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

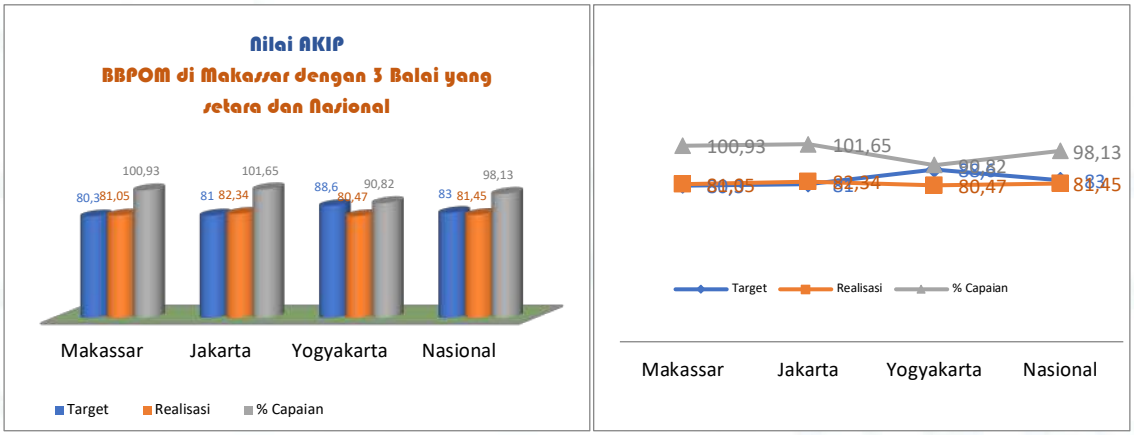
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023

Indikator Kinerja Nilai AKIP	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	80,30	81,05	100,93	Sangat Baik
BBPOM di Jakarta	81,00	82,34	101,65	Sangat Baik
BBPOM di Yogyakarta	88,60	80,47	90,82	Cukup
Nasional	83,00	81,45	98,13	Cukup

Target indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar, BBPOM Jakarta, BBPOM Yogyakarta dan BBPOM di Bandung pada angka yang berbeda,. Hasil capaian Nilai AKIP BBPOM Makassar telah mencapai target dengan nilai 81,05 lebih rendah apabila dibandingkan dengan BBPOM Jakarta namun BBPOM Makassar lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Yogyakarta sementara persentase capaian tertinggi adalah BBPOM di Jakarta dengan capaian 101,65 lebih tinggi dibandingkan BBPOM Makassar Kategori "Sangat Baik" dan BBPOM Yogyakarta kategori "Cukup",

Berikut ini perbandingan capaian realisasi indikator Nilai AKIP di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta, dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Nialia AKIP BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta,, BBPOM di Yogyakarta dan Nasional Tahun 2023

– Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Target BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Nasional Tahun 2022

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar Tahun 2022 dengan target Nasional Badan POM

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Nilai AKIP BBPOM di Makassar	80,3	83	81,05	97,65	Cukup

Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Makassar Tahun 2023 BBPOM di Makassar **belum mencapai** target Badan POM secara nasional, dengan nilai 96,59 dengan kategori "Cukup".

- Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Nilai AKIP diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 100,93 % dengan capaian 99,99 % pada tahun 2023. Indikator Nilai AKIP kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,01) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 100,93 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 99,99 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2023

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
100,93	140.815.000	140.802.697	99,99	1,01	0,01	Efisien

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks RB BBPOM di Makassar kategori "Sangat Baik" antara lain:

hasil evaluasi berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal Inspektorat :

1. BPOM telah memiliki sistem, pedoman/panduan dalam rangka pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja internal antara lain melalui aplikasi perencanaan dan pengukuran kinerja melalui e-performace (e-planning dan SIMETRIS), aplikasi perencanaan dan pengukuran kinerja individu melalui SIMAKIN, dan implementasi pedoman penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPOM. Namun demikian terdapat hal yang menyebabkan hasil penilaian tidak optimal yaitu belum seluruh Satuan Kerja mengimplementasikan sistem maupun pedoman/panduan dengan memadai dan konsisten, pengisian data oleh Satuan Kerja pada aplikasi yang dibangun di BPOM tidak lengkap, tidak berkala, maupun isian data tidak selaras antar laporan..
2. Pemanfaatan aplikasi SIMETRIS (e-planning dan e-performance) dalam menginput data kinerja balai setiap bulan sehingga dapat terlihat capaian indikator kinerja sasaran kegiatan Balai Besar POM di Makassar serta dapat dilakukan langkah perbaikan terhadap capaian yang tidak memenuhi target kinerja;
3. Laporan Kinerja interim yang disusun setiap triwulan telah menyajikan informasi kinerja dan telah dilakukan monitoring pencapaiannya per triwulan;
4. Balai Besar POM di Makassar melakukan evaluasi internal setiap triwulan yang membahas realisasi capaian kinerja dan anggaran. Hasil evaluasi kegiatan telah memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja.
5. Komitmen pimpinan dan staf Balai Besar POM di Makassar. Pimpinan beserta staf tetap berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan dari berbagai aspek.
6. telah dilakukan upaya penyusunan SKP berdasarkan permenpan 8 tahun 2020 melalui aplikasi simakin yaitu cascading kinerja dari eselon 2 dalam hal ini Kepala Balai ke ketua tim hingga ke anggota tim kerja. Pada SKP tersebut sudah terdapat indikator individu yang selaras dengan indikator kinerja ketua tim. Hal ini sudah sesuai dengan

rekomendasi APIP di tahun 2021 untuk menyempurnakan pemetaan cascading indikator kinerja sampai level individu.

7. Semua rekomendasi APIP terhadap pelaksanaan SAKIP tahun 2021 telah ditindaklanjuti. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dan telah memiliki inovasi Dasikuka (Pengendalian Sistem Keuangan atas Kinerja Akuntabilitas) dengan mengakses Manajemen File BBPOM di Makassar (berupa Dokumen Perencanaan, Dokumen Anggaran, Standar Operasional Prosedur, capaian kinerja dan monitoring evaluasi kinerja) yang digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien serta sebagai dasar pemberian Reward dan Punishment dengan judul program/inovasi "K-4 (Kinerjaku, Kinerjamu, Kinerja Kita)".
8. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. Telah diterapkan mekanisme reward dan punishment kepada individu di BBPOM di Makassar, berupa penurunan ataupun kenaikan nilai SKP yang kemudian berpengaruh kepada besaran tunjangan kinerja yang diterima.
9. BBPOM di Makassar pada tahun 2023 menggunakan tools baru berdasarkan Permenpan 88 tahun 2023 dengan hasil penilaian yang mengalami peningkatan tahun 2023 dibanding tahun 2022 dari nilai 79,21 menjadi 82,34, yaitu 1,84 point, berada pada kategori "Sangat Baik" dengan hasil penilaian perkomponen sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	24	20.88	20.16
2.	Pengukuran Kinerja	24	19.20	19.20
3.	Pelaporan Kinerja	12	9.00	10.08
4.	Evaluasi Internal	20	16.00	16.20
5.	Capaian Kinerja	20	14.13	15.41
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	79.21	**81.05**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**BB**	**A**

Seluruh Komponen terdiri atas perencanaan Kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja belum mendapat nilai maksimal sehingga perlu dilakukan perbaikan berkelanjutan. Rekomendasi dari APIP berdasarkan hasil audit sakip tahun 2023 antara lain : menciptakan inovasi terkait pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi; Pada laporan kinerja menambahkan penjelasan mengenai perubahan anggaran dan dikaitkan dengan capaian kinerja serta menciptakan inovasi terkait pelaporan kinerja; menambahkan penjelasan progres rencana aksi periode sebelumnyapada Laporan Kinerja Interim; menambahkan penjelasan terkait upaya efisiensi tingkat sasaran dan kegiatan pada Laporan Kinerja Interim; menciptakan inovasi terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal; memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang belum tercapai pada tahun berjalan dengan memberikan alternatif

perbaikan guna perbaikan kinerja serta mempertahankan upaya perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*).

Alternatif Solusi

Kedepan agar hasil pengukuran Indeks RB BBPOM di Makassar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

2. Penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang baru memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan LKE yang sebelumnya. Untuk mendapatkan nilai AA maupun A pada setiap sub-komponen, diantaranya harus terdapat inovasi per komponen maupun adanya penghargaan/pengakuan/apresiasi dari Unit Kerja maupun instansi lain.
3. Komponen capaian kinerja mempunyai bobot 20% dari total komponen dan berpengaruh pada penilaian komponen yang lain, sehingga kenaikan dan penurunan nilai capaian kinerja akan berpengaruh besar pada nilai total hasil evaluasi SAKIP

Terhadap kelemahan yang masih ada, direkomendasikan kepada Balai Besar POM di Makassar sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
   - Menyusun Analisis SWOT dikaitkan dengan isu strategis yang diidentifikasi serta identifikasi isu strategis secara komprehensif dan mempertimbangkan kondisi daerah setempat;
   - Menyajikan capaian indikator sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
   - Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan dan memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan target kinerja;
   - Menyusun kertas kerja penetapan/perubahan target indikator kinerja berdasarkan basis data yang memadai, perhitungan data/justifikasi yang komprehensif dan mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya.
2. Pengukuran Kinerja
   - Mendokumentasikan dengan baik keterlibatan dan peran aktif pimpinan terkait kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja pada rapat monitoring dan evaluasi;
   - Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan mekanisme yang memadai dalam menangani perubahan/perbedaan data realisasi kinerja;
   - Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik dan dapat diandalkan sehingga adanya keselarasan data pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.

3. Pelaporan Kinerja

Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan informasi terkait:

- Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis;
- Upaya efisiensi yang telah dilakukan maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya;
- Pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator, definisi operasional, target, dan perubahan kegiatan.

4. Evaluasi Kinerja Internal

a. Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan informasi:
   - Upaya dan/atau kendala dalam pencapaian indikator kinerja secara memadai;
   - Data monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi pada periode sebelumnya;
   - Kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja.

b. Berita Acara evaluasi internal agar ditandatangani oleh ketua tim evaluasi internal.

5. Capaian Kinerja

Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya

b) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Indeks RB BBPOM di Makassar kategori Sangat Baik antara lain :

1. BBPOM Makassar telah mengimplementasikan sistem maupun pedoman/panduan dengan memadai dan konsisten namun pengisian data pada aplikasi yang dibangun di BPOM masih belum sepenuhnya dilengkapi dan masih terdapat isian data tidak selaras antar laporan.
2. Telah melakukan Penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang baru namun karena penilaian pada LKE memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan LKE yang sebelumnya. Dimana BBPOM Makassar masih minim dalam melakukan inovasi per komponen maupun adanya penghargaan/pengakuan/apresiasi dari Unit Kerja maupun instansi lain.
3. Komponen capaian kinerja mempunyai bobot 20% dari total komponen dan berpengaruh pada penilaian komponen yang lain, sehingga kenaikan dan penurunan nilai capaian kinerja akan berpengaruh besar pada nilai total hasil evaluasi SAKIP.
4. Berdasarkan hasil evaluasi, maka implementasi atas SAKIP Balai Besar POM di Makassar tahun 2023 dapat dikategorikan A (Memuaskan) yaitu Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil

   a. Perencanaan Kinerja

   Balai Besar POM di Makassar telah menyusun dokumen perencanaan kinerja antara lain Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dengan penyelarasan (cascading) indikator kinerja hingga setiap level serta telah dilakukan reviu renstra dalam rangka upaya perbaikan perencanaan kinerja.

   Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

   - Analisis SWOT belum sepenuhnya dikaitkan dengan isu strategis yang diidentifikasi antara lain isu pandemi Covid-19 dan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta isu strategis belum komprehensif dan mempertimbangkan kondisi daerah setempat;
   - Pada beberapa indikator dengan capaian lebih dari 120% tidak disajikan sesuai kondisi yang sebenarnya (dilakukan penyesuaian)
   - Belum terdapat indikator Pasar Pangan Aman berbasis komunitas pada dokumen kinerja RAPK, RHPK, Laporan evaluasi internal dan Laporan kinerja interim sesuai dengan reviu renstra (2021-2024) dan PK 2022;

- Terdapat perbedaan target indikator kinerja tahun 2022 pada dokumen Reviu Renstra, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
- Terdapat capaian indikator tahun 2022 dengan kategori tidak dapat disimpulkan namun belum dilakukan reviu target, yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yg optimal dengan target 2,25 dan realisasi 2,88 serta target tahun 2023 sebesar 2,5 (dibawah realisasi tahun 2022)

b. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka pengukuran kinerja, Balai Besar POM di Makassar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan RAPK, dan dilakukan pengukuran target kinerja setiap bulan. Telah terdapat manual IKU dan telah menyusun mekanisme/SOP dalam rangka pengumpulan data kinerja serta pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang setiap bulan dan triwulan.

Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- Notulen rapat monitoring dan evaluasi belum menunjukkan keterlibatan dan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas atas kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja;
- SOP pengumpulan data kinerja telah disusun namun belum memadai dalam penanganan kesalahan data atau perubahan/perbedaan data realisasi kinerja;
- Data kinerja belum dapat diandalkan terlihat dari adanya perbedaan realisasi kinerja tahun 2022 pada dokumen RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.

c. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja telah disusun dengan menyajikan pembandingan data kinerja antara realisasi tahun berjalan, dengan target jangka menengah, standar nasional dan capaian BBPOM yang setara, serta menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja maupun hambatannya.

Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- Belum menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis;
- Belum menjelaskan upaya efisiensi yang telah dilakukan maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya;
- Belum menjelaskan pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator, definisi operasional, target, dan perubahan kegiatan.

d. Evaluasi Kinerja Internal

BBPOM di Makassar telah melaksanakan evaluasi internal atas kinerja setiap triwulanan dengan menyajikan data realisasi dan capaian kinerja serta kendala hambatan yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja.

Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

1) Laporan Evaluasi Internal

- Belum menyajikan upaya dan/atau kendala dalam pencapaian indikator kinerja secara memadai;
- Belum menyajikan data monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi pada periode sebelumnya;
- Belum dilengkapi kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja.

3) Berita Acara evaluasi internal belum ditandatangani oleh ketua tim evaluasi internal;

e. Capaian Kinerja

1) Output

- Realisasi kinerja output tahun 2022 sebanyak 22 (100%) indikator kinerja tercapai;
- Perbandingan capaian kinerja untuk indikator yang sama pada tahun 2022 dan 2021 dengan hasil capaian kinerja tahun 2022 sebanyak 18 (100%) indikator kinerja lebih baik dibanding tahun 2021.

2) Outcome

- Realisasi kinerja outcome tahun 2022 sebanyak 8 (29%) indikator kinerja tidak tercapai;
- Perbandingan capaian kinerja untuk indikator yang sama pada tahun 2022 dan 2021 dengan hasil capaian kinerja tahun 2022 sebanyak 11 (45%) indikator kinerja tidak lebih baik dibanding tahun 2021.

Kondisi tersebut menunjukan bahwa pemanfaatan evaluasi internal dalam proses monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja belum dilaksanakan secara optimal.

c) Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	BBPOM Makassar telah mengimplementasikan sistem maupun pedoman/panduan dengan memadai dan konsisten namun pengisian data pada aplikasi yang dibangun di BPOM masih belum sepenuhnya dilengkapi dan masih terdapat isian data tidak selaras antar	Telah dilaksanaan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja triwulanan dengan analisa yang komprehensif terhadap hambatan dan RATL dan monitoring tindak lanjut pada periode sebelumnya	Mengaktifkan secara optimal Tim Monev BBPOM di Makassar serta setiap Triwulan setiap Ketua Tim menyusn Laporan Kinerja Triwulanan dilengkapi data dukung yang			

	laporan.		memadai dan valid serta Rencana Tindak Lanjut Dengan analisa yang komprehensif terhadap hambatan, RATL dan monitoring tindak lanjut pada periode sebelumnya			
2.	Berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja agar lebih baik dari Tahun sebelumnya.	Melakukan pengawalan dengan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Indikator Kinerja Utama disertai tindak lanjut rekomendasi untuk seluruh IKU				
3	'-BBPOM Makassar telah mengimplementasikan sistem maupun pedoman/panduan dengan memadai dan konsisten namun pengisian data pada aplikasi yang dibangun di BPOM masih belum sepenuhnya dilengkapi dan masih terdapat isian data tidak selaras antar laporan. - Berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja agar lebih baik dari Tahun sebelumnya.	'- Telah dilaksanaan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja triwulanan dengan analisa yang komprehensif terhadap hambatan dan RATL dan monitoring tindak lanjut pada periode sebelumnya - Melakukan pengawalan dengan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Indikator Kinerja Utama disertai tindak lanjut rekomendasi untuk seluruh IKU	'- Mengaktifkan secara optimal Tim Monev BBPOM di Makassar serta setiap Triwulan setiap Ketua Tim menyusun Laporan Kinerja Triwulanan dilengkapi data dukung yang memadai dan valid serta Rencana Tindak Lanjut Dengan analisa yang komprehensif terhadap hambatan, RATL dan	'- RTL dibuat Bualanan serta Pemenuhan pengisian LKE Tahun 2024 dalam tautan Dasikuka - Menindaklanjuti seluruh rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal dan melakukan monitoring secara memadaipada periode selanjutnya;	"- Nilai SAKIP BBPOM Makassar Tahun 2022 = 79,21	"- Nilai SAKIP BBPOM Makassar Tahun 2023 81,05

			monitoring tindak lanjut pada periode sebelumnya - Mengupayakan target kinerja tercapai dan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya, dengan cara memanfaatkan hasil evaluasi internal triwulan.			

m. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Nilai AKIP BBPOM di Makassar telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Persentase obat yang memenuhi syarat dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Nilai AKIP BBPOM di Makassar pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Penacapain kinerja untuk indicator Nilai AKIP BBPOM di Makassar serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya

Sasaran 9





Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal

1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan

Acuan

Peratuan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatusr Sipil Negara

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Form Survei dian survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);

b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);

c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).
Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :
a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah. Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :
a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :
a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	77	89,63	116,42	Sangat Baik

a) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	75	73,49	97,99	Cukup

Tahun 2021	75	85,44	113,92	Sangat Baik
Tahun 2022	76	81,14	106,76	Sangat Baik
Tahun 2023	77	89,63	116,42	Sangat Baik

Terjadi perubahan target untuk indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM Makassar sesuai dengan hasil reviu Renstra dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Makassar dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024, dimana realisasi tahun 2020 sebesar 73,49 dijadikan sebagai baseline baru dengan perubahan target tahun 2021 dari 77,00 menjadi 75.

Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM Makassar untuk tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Tahun 2021 berada pada angka 113,92 ketegori " Sangat Baik " lebih tinggi apabila dibandingkan tahun 2020 dengan nilai 97,99 kategori "Cukup". Terdapat peningkatan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar sebesar 15,93 point

tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 berada pada angka 106,76 lebih rendah apabila dibandingkan tahun 2021 dengan nilai 113,92 kategori "Sangat Baik", Terdapat penurunan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar sebesar 7,16 point.

tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, tahun 2023 berada pada angka 116,42 lebih tinggi apabila dibandingkan tahun 2022 dengan nilai 106,76 kategori "Sangat Baik .Terdapat peningkatan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar sebesar 8,49 point.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024 Renstra Awal	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	77	78	89,63	116,42	Tercapai/ Melampaui

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024 (Reviu Rorenkeu dan Unit Pengampu)	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	77	78	86,45	112,27	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar tahun 2023 dibandingkan target Renstra sebelum direviu dan setelah direviu

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar tahun 2023 dibandingkan target Renstra sebelum direviu dan setelah direviu Dimana Reviu Target Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar tahun 2023,Berdasarkan pada nilai rata-rata yang memenuhi kategori Sesuai dengan peraturan BKN No 8 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 006/B- BM.02.01./SD/C/2003 perihal pengukuran Indeks Profesional ASN Tahun 2022

terdapat 4 dimensi pengukuran pada IP ASN yaitu

1. Dimensi Kualifikasi (Bobot 21,6 %)
2. Dimensi Kinerja (Bobot 24,9 %)
3. Dimensi Kompetensi (Bobot 38,76 %)
4. Dimensi Disiplin (Bobot 4,95 %)

Sehingga dengan membandingkan kedua target ini maka masuk **kategori akan tercapai**

c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

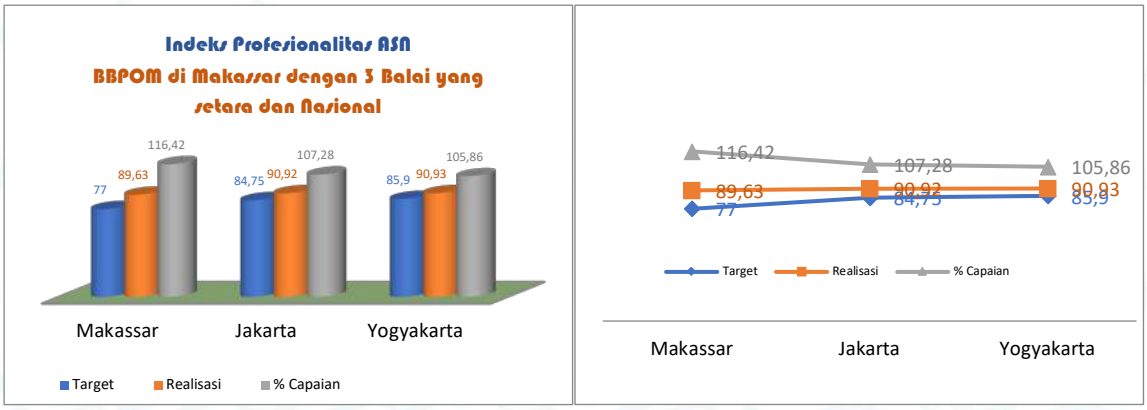
Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta dan BBPOM Yogyakarta Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM Yogyakarta tahun 2023

Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	77	89,63	116,42	Sangat Baik
BBPOM di Jakarta	84,75	90,92	107,28	Sangat Baik
BBPOM di Yogyakarta	85,90	90,93	105,86	Sangat Baik

Target indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM Makassar yaitu 77 dan target tertinggi adalah BBPOM di Yogyakarta dengan nilai 85,90 serta hasil realisasi Indeks Profesionalitas ASN tertinggi 90,93 adalah BBPOM di Jakarta , sementara persentase hasil capaian Indeks Profesionalitas ASN tertinggi adalah BBPOM di Makassar yaitu 116,42 kategori “Sangat Baik”.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta,, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakartag Tahun 2022

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar Tahun 2023 dengan target Nasional Badan POM

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	77	81,6	89,63	109,84	Sangat Baik

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar Tahun 2023 BBPOM di Makassar **mencapai** target Badan POM secara nasional, dengan nilai 109,84 dengan kategori "Sangat Baik".

d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Kendala /Keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar disebabkan oleh :

Faktor pendukung ketercapaian, karena Biro SDM dan PPSDM memberikan dukungan penuh, serta pendampingan dan arahan, sehingga Balai-balai utamanya Bagian TU BBPOM Makassar, dapat meneruskan dan memberikan petunjuk kepada seluruh pegawai, hal-hal dan tahapan yang harus di lakukan oleh tiap pegawai, sehingga IP ASN BBPOM di Makassar dapat tercapai.

Melampaui target 77, sebesar 89,64.

Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala setiap tahun.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, terdapat perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN untuk 4 Dimensi menjadi sebagai berikut:

a) Dimensi Kualifikasi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan bobot kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki, dengan bobot sebesar 25%;
b) Dimensi Kinerja, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kinerja berdasarkan predikat kinerja dengan bobot sebesar 30%;
c) Dimensi Kompetensi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kompetensi dinilai secara proporsional yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%; dan
d) Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS paling kurang 1 (satu) tahun terakhir, dengan bobot sebesar 5%.

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar di peroleh dari aplikasi IP ASN BPOM yang masing-masing dimensi mengambil data dari :

a) Dimensi Kualifikasi mengambil data dari Riwayat Pendidikan Terakhir pada Aplikasi SIAP, untuk proses pengukuran disesuaikan dengan syarat minimum pendidikan pada jabatan terakhir Pegawai;
   Hanya ada 1 orang pegawai yang seharusnya sudah diberhentikan tapi masih terdata karena menunggu SK Pemberhentian. Selain itu masih ada 5 orang yang belum terdata (1 akan pensiun januari 2024, 2 PFM, 2 JFT)
b) Dimensi Kompetensi mengambil data dari Riwayat Pengembangan Kompetensi pada Aplikasi SIAP dimana data Riwayat Kompetensi di Aplikasi SIAP terintegrasi pada Aplikasi Pengembangan Kompetensi (PPSDM);
c) Dimensi Kinerja mengambil data dari Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja yang sudah dilaporkan melalui SIASN BKN;
d) Dimensi Kinerja mengambil data dari Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja yang sudah dilaporkan melalui SIASN BKN.

Pada tahun 2023 telah diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar sesuai aplikasi IP ASN BPOM sebesar 89,63. Capaian Indeks Profesionalitas ASN BB:POM di Makassar sudah berhasil mencapai target yaitu 116,42 dengan kategori “Sangat Baik”

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh :

- Dimensi Kualifikasi (pendidikan) pegawai yang disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki dengan bobot 25%, hasil capaian BBPOM Makassar adalah 21,25
- Dimensi Kompetensi yang dinilai secara proporsional yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan dengan bobot sebesar 40%, , hasil capaian BBPOM Makassar adalah 38,65 %
- Dimensi Kinerja berdasarkan predikat kinerja dengan bobot sebesar 30%, , hasil capaian BBPOM Makassar adalah 24,77

- Dimensi Disiplin yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS paling kurang 1 tahun, %, , hasil capaian BBPOM Makassar adalah 4,97 %
- Rencana aksi yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain : pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti upacara, penerapan inovasi PINSIL (pemberian pin kepada 3 orang pegawai dengan jumlah keterlambatan paling banyak) dan penilaian SKP setiap triwulan. Dengan adanya target peningkatan kompetensi teknis sebanyak 20 JP, setiap bulan di buat rekap capaian JP pengembangan kompetensi untuk mengingatkan masing-masing pegawai yang capaian JP kompetensi teknisnya belum tercapai, agar berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pengembangan kompetensi teknis (pelatihan teknis, manajerial, bimbingan teknis dan workshop) baik yang diselenggarakan oleh PPSDM melalui ideas atau pengembangan kompetensi mandiri, sehingga pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran IP ASN 2023 masih terdapat pegawai dengan nilai dibawah rata-rata, hal ini dikarenakan masih pejabat fungsional yang belum mengikuti diklat fungsional. Upaya yang telah dilakukan adalah bersurat ke PPSDM agar pegawai tersebut didaftarkan/diikutkan diklat kepemimpinan untuk pejabat struktural dan diklat struktural untuk pejabat fungsional.

Alternatif Solusi

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar adalah :

Rencana tindak lanjut untuk mempertahankan dan meningkatkan IP ASN, adalah komitmen Bagian Tata Usaha terutama yang terkait baik dari tim IT maupun anpeg untuk selalu mengingatkan, membantu, mendampingi dan mengarahkan pegawai melakukan tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen secara tepat waktu, dan mengikuti kegiatan pelatihan, bimtek, workshop, sosialisasi, coaching mentoring dsb yang telah direncanakan dan yang belum, baik secara mandiri maupun secara kolektif, terutama pemenuhan unsur kompetensi 20 JP minimal per individu, diklat teknis, diklat fungsional, diklat kepemimpinan dan kehadiraan tepat waktu sesuai jam masuk dan jam pulang yang ditetapkan.

a) Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 95,87 dengan capaian 116,40 % pada tahun 2023. Indikator Indeks Profesionalitas ASN kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,21) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 116,40 % sedangkan realisasi anggarannya 95,87 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Indeks Profesionalitas ASN Tahun 20223

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
116,40	810.071.000	776.584.137	95,87	1,21	0,21	Efisien

b) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar kategori Memenuhi Ekspektasi antara lain :

- Komitmen pimpinan dalam mengingatkan pegawai baik secara langsung atau saat rapat, atau melalui kegiatan apel pagi, ataupun di media sosial, sehingga membuat pegawai cukup patuh dalam melaksaanakan tugasnya.
- pegawai secara mandiri melakukan pengembangan kompetensi baik melalui SIASN / IDEAS/ Undangan Bimtek yang terjadwal dan Undangan workshop/ sosialisasi / bimtek, pelatihan dari instansi terkait tugas dan jabatan fungsional pegawai.
- Dengan adanya inovasi dari pokja SDM terkait rewards dan punishment, meskipun belum berjaalan efektif, tetapi cukup memberikan dampak kepada pegawai, untuk lebih disiplin dalam kehadiran.
- Petunjuk yang berkelanjutan (Continous improvement) dari bagian tata usaha, sehingga pegawai memahami, apa yang harus dikerjakan dan disiapkan.

c) Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan pengawalan terhadap indicator kinerja Utama Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar dengan Meningkatkan kualifikasi akademik pegawai melaluiprogram tugas belajar/ijin belajar	Saat ini telah ditingkatkan Kualifikasi akademis melalui Tugas belajar untuk 4 pegawai yaitu 1 orang S1 dan 3 orang S2				
2.	Meningkatkan kompetensi pegawai melalui Diklat kepemimpinan, Diklat fungsional, Diklat teknis dengan menyesuaikan dengan jabatan fungsional	Seluruh Pegawai telah mengikuti Diklat teknis sebanyak 20 Jam Pelajaran baik secara luring maupun melalui DEAS dan saluran lainnya sesuai dengan jabatan fungsional	.			
3	Terus berupaya, menggenjot pencapaian 4	Telah selesai pelaksanaan pencapaian indeks	Melaporkan 1 orang yang		Sudah melampaui target	Sudah melampaui

	kategori penilaian IP ASN (kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin), dan memberikan informasi yang berkelanjutan kepada seluruh ASN	profesionalitas ASN di bulan desember dengan nilai akhir 89,64, dengan melaksanakan pengawalan terhadap pencapaian nilai IP ASN tersebut	terdata telah pensiun per tgl 1 Januari 2024, dan menyampaikan ke 2 ASN fungsional PFM dan 2 ASN fungsional JFT untuk mengejar kekurangannya pelatihan fungsiona di tahun 2024			target

d) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Indeks Profesionalitas ASN dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas reviuw Rencana Strategis tahun 2020-2024, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Telah dilakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran tahun 2022 untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Penacapain kinerja untuk indicator Indeks Profesionalitas ASN serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya



Sasaran 10

Birokrasi Bersih & Melayani

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan





1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Acuan

Perhitungan Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembanagan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Kategori yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Standar Ruang Lingkup > 65,
2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
3. Standar Alat Laboratorium > 70.

Tahun 2022 belum ada target untuk indicator ini

e) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2023 adalah 98,14 % dengan realisasi sebesar 84,40 **dibawah dari target** yang dietentukan sebesar 86 dengan kategori **"Cukup" .**

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86,00	84,40	98,14	Cukup

f) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2022	81,00	78,80	97,28	Belum Sangat Baik
Tahun 2023	86,00	84,40	98,14	Cukup

Realisasi dan capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Realisasi tahun 2023 dengan nilai 84,40 dan capaian 98,14 kategori "Cukup" lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan nilai realisasi 78,80 dan capaian 97,28 kategori "Belum Sangat Baik".

g) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86,00	91	84,40	92,74	Akan Tercapai	

Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra Tahun 2024, serta capasian yang diperoleh kategori Akan Tercapai. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra Tahun 2024 dapat mencapai kategori Tercapai/ Melampaui.

h) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target, realisasi, capaian kinerja indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini.

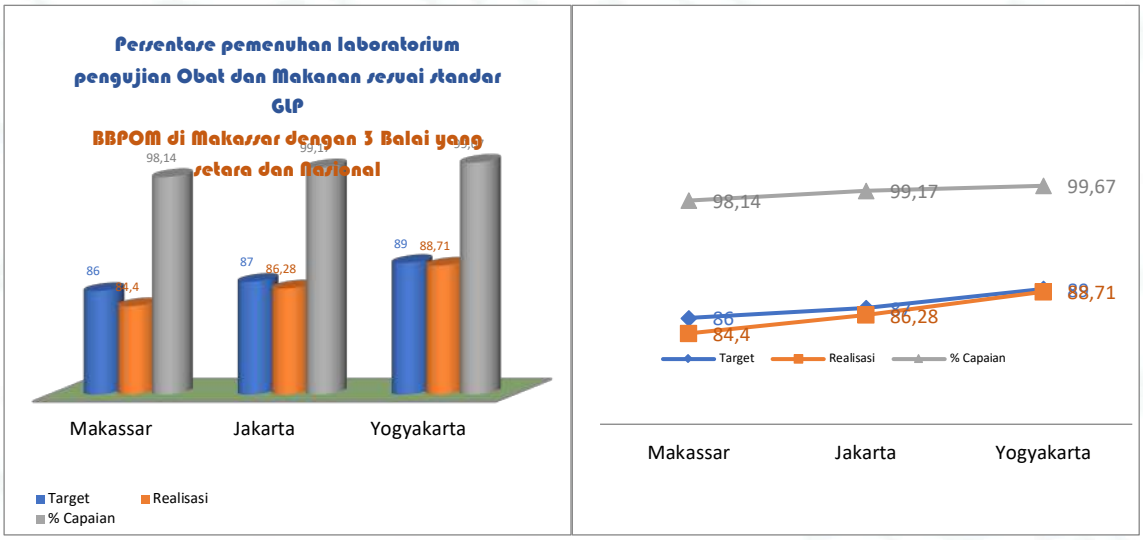
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023

Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	86,00	84,40	98,14	Cukup
BBPOM di Jakarta	87,00	86,28	99,17	Cukup
BBPOM di Yogyakarta	89,00	88,71	99,67	Cukup

Target indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BBPOM Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM Yogyakarta berada pada angka yang berbeda. Hasil realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BBPOM Makassar, BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta belum mencapai target. Persentase capaian tertinggi adalah BBPOM di Yogyakarta dengan capaian 99,67 % lebih tinggi dibandingkan BBPOM Jakarta dan BBPOM Makassar dengan kategori “Sangat Baik”.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023

i) Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Target BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2023 dengan target Nasional Badan POM

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86,00	86	84,40	98,14	Cukup

Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2023 BBPOM di Makassar **belum mencapai** target Badan POM secara nasional, dengan nilai 84,40 dan capaian 98,14 % dengan kategori "Cukup".

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP kategori "Cukup" antara lain:

Ruang Lingkup :

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023, nilai capaian persentase pemenuhan SKL adalah 84,4%. Dengan komponen :

1. Persentase Pemenuhan Ruang Lingkup : 84,9%;
2. Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi : 84,3%;
3. Persentase Pemenuhan Standar Peralatan : 84,3%.

Terdapat beberapa kendala terkait pemenuhan target SKL antara lain :

1. Keterbatasan jenis baku pembanding yang tersedia di Infalabs, sementara anggaran untuk pengadaan baku pembanding eksternal sangat terbatas;
2. Keterbatasan sampel obat yang beredar di wilayah regional Makassar yang sesuai dengan penugasan pengujian kelas terapi BBPOM Makassar pada SRL
3. Peningkatan ruang lingkup yang menggunakan alat GCMS, IC, turbidimeter, KCKT ELSD belum dapat dilaksanakan karena karena alat belum tersedia
4. Media dan reagen untuk parameter pada penguian antibiotik Vancomycin dan suplemen kesehatan probiotik belum tersedia, dan baru akan diadakan tahun 2024
5. Pengadaan suku cadang yang kurang tiap tahunnya disebabkan keterbatasan anggaran
6. Jumlah SDM yang tidak sebanding dengan jumlah parameter uji yang harus diverifikasi untuk dimasukkan ke dalam capaian SRL
7. Kompetensi belum bisa dikembangkan karena belum memiliki alat yang ada pada syarat kompetensi keterampilan (GCMS, Spektrofluorometer, DUSA)
8. Terdapat personel pindahan dari fungsi lain (ahli muda) yang masih butuh pendampingan terkait parameter uji dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, sehingga belum dapat diberikan penugasan mengerjakan sampel sendiri
9. Mainboard Spektrofluorometer yang dikirimkan dari BBPOM Jayapura mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan.
10. Anggaran untuk pengadaan DUSA tahun 2024 hanya cukup untuk yang manual, hasil uji presisi yang dihasilkan tidak memenuhi syarat. Diharapkan tambahan anggaran untuk pengadaan DUSA otomatis
11. Tidak terdapat pemenuhan alat penunjang tahun 2023 di laboratorium mikrobiologi karena anggaran yang tersedia dialokasikan untuk pengadaan isolator

Alternatif Solusi

Dari kendala yang diuraikan tersebut diatas, langkah tindak lanjut yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan ruang lingkup menggunakan alat GCMS akan dilakukan setelah pengadaan alat GCMS pada TW2 tahun 2024.
2. Melakukan koordinasi dengan bagian Inspeksi untuk memperoleh sampel obat yang sesuai dengan penugasan pengujian kelas terapi BBPOM Makassar pada SRL
3. Melakukan penambahan ruang lingkup terhadap parameter uji yang ada pada SRL jika baku pembanding, reagen, dan media sudah tersedia tahun 2024
4. Penambahan SDM Magang dari Balai POM Palopo tahun 2024 diharapkan dapat membantu meningkatkan pemenuhan RL

5. Berkomunikasi dengan PPPOMN atau BBPOM/BPOM yang telah melakukan pengembangan ruang lingkup tertentu untuk sharing baku pembanding/pereaksi apabila anggaran pengadaan terbatas atau membuat permintaan pengembangan baku pembanding ke Laboratorium Baku Pembanding PPPOMN apabila memungkinkan untuk dikembangkan
6. Melakukan pelatihan (bimbingan teknis) untuk personel laboratorium sesuai dengan kebutuhan
7. Menyusun rencana percepatan peningkatan kompetensi untuk personel pindahan dari fungsi/lab lain (supervisi atau magang)
8. Pengadaan GCMS direncanakan akan dilakukan pada tahun 2024 TW 2
9. Pengadaan mainboard Spektrofluorometer direncanakan tahun 2024 dari anggaran pemeliharaan.
10. Peralatan (utama dan penunjang) akan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan Balai dan disesuaikan dengan anggaran yang diperoleh

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP kategori Cukup antara lain :

- Telah dilakukan kegiatan Verifikasi Metode Analisa di laboratorium, sehingga dapat menunjang peningkatan nilai pemenuhan ruang lingkup
- Telah dilaksanakan pelatihan dan magang penguji sehingga dapat menunjang peningkatan nilai kompetensi
- Proses transfer alat dari balai anggota region makassar telah tuntas dilaksanakan sehingga meningkatkan nilai pemenuhan peralatan

- Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sebelum Rencana Aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Percepatan proses transfer alat untuk pengujian unggul dari balai anggota region makassar.	Percepatan proses transfer alat untuk pengujian unggul dari balai anggota region makassar telah dilaksanakan.	1. Permintaan bahan baku pembanding dan reagen untuk melakukan verifikasi metode. 2. Pemenuhan peralatan utama dan penunjang.	TW IV 2024	Lambatnya proses transfer alat untuk pengujian unggul dari balai anggota region makassar.	Lebih cepatnya proses transfer alat untuk pengujian unggul dari balai anggota region makassar.
2.	Akan dilakukan	Pelaksanaan			Belum optimalnya	Meningkatnya

	pelatihan untuk tiap personel laboratorium sesuai dengan kebutuhan (pelatihan internal, pelatihan dari eksternal, diseminasi pelatihan atau *on the job training*).	pelatihan teknis terkait pengujian unggul untuk peningkatan kompetensi penguji telah dilaksanakan.			pengetahuan dan keterampilan petugas laboratorium.	pengetahuan dan keterampilan petugas laboratorium.
3.	Melakukan verifikasi metode untuk peningkatan ruang lingkup.	Pelaksanaan verifikasi metode untuk peningkatan ruang lingkup.			Persentase pemenuhan SKL TW 3 : 77,29%.	Persentase pemenuhan SKL TW 4 (2023) : 84,4%.
	Kendala : 1. Keterbatasan jenis baku pembanding yang tersedia di Infalabs, sementara anggaran untuk pengadaan baku pembanding eksternal sangat terbatas. 2. Pemenuhan peralatan GCMS, Spektrofluorometer, dan DUSA belum terealisasi, sehingga kompetensi penguji terkait penggunaan alat juga belum terpenuhi.					



Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal

BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

Acuan

Perhitungan Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional

Kategori yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal
1,51 – 2,25 : Cukup
0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1) Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC
   a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
   b. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
   c. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan makanan dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan makanan dan makanan oleh pimpinan
   d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
   e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut:
      a. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracuanan
      b. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/dIVmplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
   a. Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
   b. Pusat : email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Pada Tahun 2023 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Nasional sebesar 2,9. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar telah mencapai target yang ditetapkan 2,65 dengan capaian 116,00 % dengan kategori "Sangat Baik".

Tabel 3.111

Target Kinerja Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	2,90	116,00	Sangat Baik

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.112. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tahun 2022	2,25	2,88	128,00	Tidak Dapat Disimpulkan
Tahun 2023	2,5	2,90	116,00	Sangat Baik

Perbandingan target, realisasi, capaian kinerja indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal BBPOM Makassar untuk Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022. Realisasi tahun 2023 sebesar 2,90 dengan capaian 116,00 kategori "Sangat Baik" lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai tahun 2022 sebesar 2,88 dengan capaian 128,00 kategori "Tidak Dapat Disimpulkan", peningkatan realisasi indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Tahun 2022 ke 2023, yaitu sebesar 0,02 poin.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.113. Perbandingan realisasi Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	3	2,90	96,66	Akan Tercapai	

indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra Tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori "Akan Tercapai". Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target, realisasi, capaian kinerja indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini.

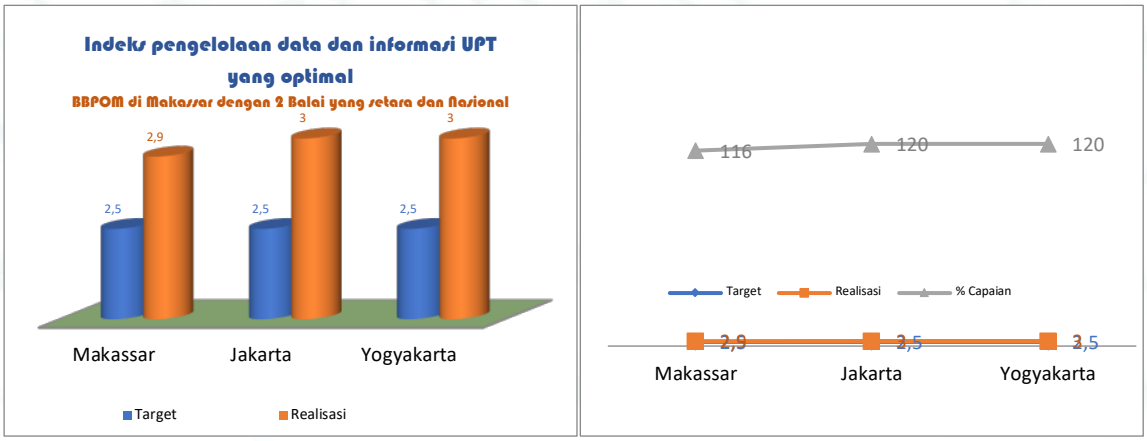
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023

Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	2,5	2,90	116,00	Sangat Baik
BBPOM di Jakarta	2,5	3,00	120,00	Sangat Baik
BBPOM di Yogyakarta	2,5	3,00	120,00	Sangat Baik

Target indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal BBPOM Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM Yogyakarta berada pada angka yang sama. Hasil realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal BBPOM Makassar, BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta sudah mencapai target. Persentase capaian tertinggi adalah BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM Jakarta dengan capaian 120,00 % kategori "Sangat Baik" lebih tinggi dibandingkan BBPOM Makassar dengan 116,00 % kategori "Sangat Baik".

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023

e. Perbandingan Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan realisasi IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimalTahun 2022 dengan target IKU Badan POM

Indikator	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Indikator
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2,5	2,5	2,90	116,00	Sangat Baik

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar Tahun 2023 BBPOM di Makassar **telah mencapai** target Badan POM secara nasional, dengan nilai 2,90 dan capaian 116,00 % dengan kategori "Sangat Baik".

f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor kendala /Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar kategori Sangat Baik, antara lain:

- Monev Tengah Bulan terkait pencapaian nilai target sementara pada bulan berjalan;
- Tim Pengelola Media Sosial dan Pengelola Subsite Balai telah bekerja dengan baik.

- Penyampaian Pelaksanaan kegiatan dari penanggung jawab kegiatan kepada tim pengelola media sosial belum maksimal (belum semua fungsi melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan).

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Sosialisasi berkala / periodik untuk pemutakhiran data dan informasi di SIPT, SPIMKER , dan Data Keracunan oleh Bidang terkait (Infokom, Inspeksi, Pengujian dan TU), didampingi oleh tim IT.
- Pemanfaatan data dan informasi melalui SIPT, SPIMKER dan Data Keracunan.
- Melakukan akses rutin, berkala/periodik untuk aplikasi SIPT, SPIMKER dan Data Keracunan. 4 Sosialisasi dan monev berkala/periodik oleh tim IT untuk: pemanfaatan email coorporate terutama di level individu, bagian/bidang dan unit kerja; pemanfaatan sharing folder oleh seksi inspeksi; akses Dashboard BOC di level pimpinan; dan pemanfaatan berita aktual di subsite balai

g. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Upaya-upaya program/kegiatan untuk pencapaian indeks pengeloaan data dan informasi capaian kinerja di atas, antara lain :

- Konsistensi pemutakhiran data di SIPT, SPIMKER dan Data Keracunan belum optimal.
- Konsistensi akses berkala/periodik dan pemanfaatan email dan sharing folder belum optimal.
- Akses dashboard BOC belum rutin dan berkala.
- Pemanfaatan subsite balai untuk berita aktual belum optimal
- Telah dilakukan monev pencapaian realisasi pada pertengahan bulan setiap bulan berjalan yaitu pada tanggal 20-25 bulan berjalan
- Telah dilakukan Sosialisasi terkait Juknis Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal, untuk meningkatkan pemahaman pegawai terkait pengelolaan media sosial khususnya

Analisis yang akan menunjang keberhasilan:

1. Kerjasama seluruh pegawai untuk konsisten dalam pemanfaatan akses email coorporate dan sharing folder.
2. informasi dari bidang terkait untuk kegiatan bidang dapat ditayangkan di berita aktual subsite balai, dengan berkoordinasi dengan tim IT.
3. Tim IT dan bidang terkait untuk saling berkoordinasi terkait pemutakhiran data berkala di SIPT, SPIMKER dan Data Keracunan

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

- Untuk mencapai target indeks pengelolaan data dan informasi perlu memperhatikan kategori nilai ASESMEN dari PUSDATIN , yaitu

  2,26 – 3 : Optimal

  1,51 – 2,25 : Cukup

  0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

  0 – 0,75 : Sangat Kurang;

  serta memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan penilaian asesmen pengelolaan data baik pemutakhiran maupun pemanfaatan

Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Monitoring penggunaan email corporate pegawai secara rutin, untuk pegawai yang belum aktif menggunakan email corporate.	Pengawalan terhadap penggunaan email corporate pegawai setiap bulannya dan dilakukan teguran untuk pegawai yang belum aktif yaitu Memastikan pegawai untuk memanfaatkan email corporate sebagai wadah pertukaran informasi dalam rangka pemenuhan nilai indeks pengelolaan data dan informasi.			Belum terbiasa/aktifnya pegawai dalam menggunakan email coorporate secara rutin.	Meningkatnya penggunaan email coorporate pegawai sebagai wadah pertukaran informasi.
2.	Mengoptimalkan akses sharing folder untuk petugas di Seksi Pemeriksaan dalam memperoleh informasi Obat dan Makanan yang terkini.	Mengoptimalkan pemanfaatan sharing folder dalam melakukan pengawasan obat dan makanan antara lain Petugas pemeriksaan telah aktif untuk mengakses sharing folder untuk			Kurang optimalnya petugas di seksi pemeriksaan dalam penggunaan sharing folder dalam memperoleh informasi Obat dan Makanan yang terkini.	Meningkatnya penggunaan sharing folder dalam memperoleh informasi Obat dan Makanan yang terkini.

		memperoleh informasi Obat dan Makanan yang terkini.				
3.	Meningkatkan jumlah login dan akses ke dashboard BOC	Memastikan pemanfaatan aplikasi BOC lebih optimal dan rutin secara berkala, yaitu Login dan akses ke dashboard BOC dilakukan setiap hari kerja.			Kurang rutinnya login akses ke dashboard BOC untuk pemanfaatannya.	Meningkatnya jumlah login akses ke dashboard BOC untuk pemanfaatannya setiap hari kerja.
4.	Meningkatkan kesadaran dari penanggung jawab kegiatan untuk mempublikasikan kegiatannya di Media Sosial, dengan cara : a. Berdiskusi dengan penanggung jawab kegiatan dan ketua tim yang terkait; b. melibatkan Tim AOC untuk mengawal kegiatan di fungsi masing-masing.	Melakukan pengawalan terhadap semua kegiatan balai yang bisa dipublikasikan dengan melakukan komunikasi yg intensif dengan para ketua Tim dan penanggung jawab kegiatan.	Mengaktifkan dan Memaksimalkan kinerja Tim Pengelola Media Sosial dan Pengelola Subsite Balai.	2024	Rata-rata pencapain realisasi triwulan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Makassar adalah kurang dari 2,5.	Realisasi Pencapaian Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi secara nasional mencapai 2,9.





Sasaran 11

Birokrasi Bersih & Melayani

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel



1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/ UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Acuan

Hasil perhitungan diperoleh dari penjumlahan nilai (EKA) bobot 60 % dengan Nilai (IKPA) bobot 40 %

a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/ UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluas iKinerja Anggaran (EKA).

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

c. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

   a. Revisi DIPA
   b. DeviasiHalaman III DIPA
   c. Penyerapan anggaran
   d. Belanja Kontraktual
   e. PenyelesaianTagihan
   f. Pengelolaan UP dan TUP
   g. Dispensasi SPM
   h. Capaian Output

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar Tahun 2023 adalah 93,30 % dengan realisasi sebesar 89,48 dibawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 95,90 dengan kategori Belum Sangat Baik

Tabel 3.54

Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	96,20	89,92	93,47	Cukup

Hasil perhitungan diperoleh dari penjumlahan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 60 % dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40 %

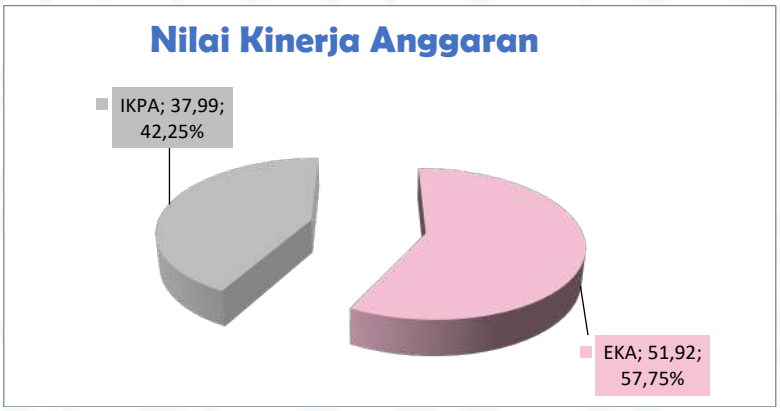
Tabel 3.55

Jumlah Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar Tahun 2023

Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	Bobot	Hasil
EKA	86,54	60%	51,92
IKPA	94,99	40%	37,99
Total		100%	**89,92**

Jumlah Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar Tahun 2023 sebesar 89,92 terdiri atas :

- Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 60 % = 51,92
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40 % = 37,99



Gambar 3.36

Nilai Kinerja Anggaran pada Tahun 2023

a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

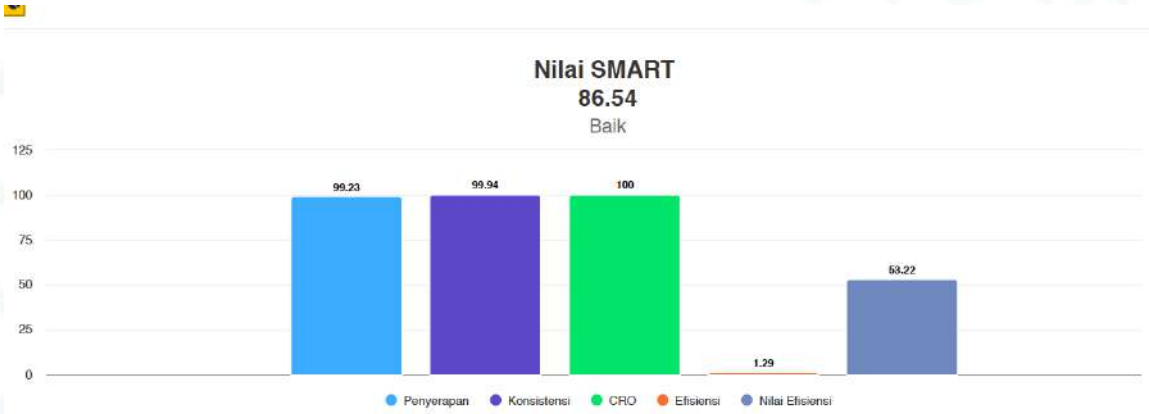
Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk IKPA, antara lain :

revisi DIPA, deviasi halaman IVI DIPA, penyerapan anggaran, retur SP2D, penyerapan anggaran, Belanja kontraktual, Penyelesaian tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dispensasi penyampaian SPM dan capaian *output*.

Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 pada Aplikasi OM-SPAN sebesar 94,99

b. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi.



Gambar 3.37

Dashboard BBPOM Makassar Monev DJA Tahun 2023

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BBPOM di Makassar Tahun 2023 yaitu pada angka 86,54

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM Yogyakarta tahun 2023

Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	96,20	89,92	93,47	Cukup
BBPOM di Jakarta	93,5	90,71	97,02	Cukup
BBPOM di Yogyakarta	94	90,95	96,76	Cukup

Target tertinggi indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM Makassar pada angka 95,90 dan target terendah adalah BBPOM di Jakarta Realisasi teringgi Nilai Kinerja Anggaran adalah BBPOM di Yogyakarta dengan nilai 90,71 serta hasil capaian Nilai Kinerja Anggaran tertinggia adalah BBPOM di Jakarta 97,02, hasil Nilai Kinerja Anggaran terendah adalah BBPOM di Makassar yaitu 93,30 dan persentase capain keempat Balai masih tergolong kategori "Cukup". Dari ketiga balai yang diperbandingkan, BBPOM di Makasar, BBPOM Jakarta dan BBPOM Yogyakarta realisasinya berada di bawah capaian nasional BPOM yaitu 94,83.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.58. Perbandingan realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2022	Target 2024	Realisasi 2021	% Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran	95,90	96,5	89,48	92,72	Belum Sangat Baik

indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra Tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori "Cutup", Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra Tahun 2024 dapat lebih meningkat menjadi kategori "Sangat Baik"..

d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan Target BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Nasional Tahun 2023

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023 dengan target IKU Badan POM

Indikator	Target 2023	Target Nasional	Realisasi 2023	% Capaian	Indikator
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Makassar	95,90	93,50	89,48	95,70	Cukup

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Makassar Tahun 2022 **belum mencapai** target IKU Badan POM secara nasional, atau dibawah dari rata-rata Nasional Badan POM, dengan nilai 96,70 dengan kategori "Cukup".

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Faktor penyebab tidak tercapainya indicator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar disebabkan oleh :

- Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BBPOM di Makassar Tahun 2023 sebesar 86,63 ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 5 indikator yaitu Realisasi anggaran = 99,12

Konsistensi RPD = 99,93
Capaian Realisasi Output = 100
Efisiensi = 1,43
Nilai Efisiensi = 53,58

Terhadap 5 indikator pada penilaian Nilai Kinerja Anggaran dengan total nilai 86,63 yaitu variabel Capaian Realisasi Output hasilnya berada pada nilai 100 dimana dari 5 variabel pembentuk Nilai Kinerja Anggaran variabel CRO yang memiliki bobot paling tinggi yaitu 43,5 % serta variabel penyerapan anggaran yang merupakan persentase realisasi anggaran dibandingkan dengan total alokasi anggaran pada DIPA Petikan dengan capaian 99,12 untuk Triwulan IV Tahun 2022.Selanjutnya yatu untuk variabel konsistensi Rencana Penarikan Dana cukup tinggi yaitu 99,93 dan variabel Efisiensi dengan capaian 1,43

- Nilai IKPA dengan total nilai 93,75 dengan 8 indikator terdapat capaian yang masih kurang optimal yaitu antara lain : Revisi DIPA = 100, Deviasi Halaman III DIPA = 73,70, Penyerapan anggaran = 87,12, Belanja Kontraktual = 94,75, Penyelesaian Tagihan = 100. Pengelolaan UP dan TUP 94,85 , Dispensasi SPM = 100, dan Capaian Output = 100.

  Total Nilai Kinerja Anggaran 89,48 yang diperoleh dari Nilai EKA bobot 60 % = 51,97 dan Nilai IKPA bobot 40 % = 37,50, dimana target IKU ini pada TW IV adalah 75,90, target tidak tercapai dengan persentase capaian 89,48 Berada pada kategori (Belum Sangat Baik)

- Masih rendahnya capaian Nilai EKA pada aplikasi SMART DJA yaitu 86,63 salah satu yang menjadi penyebab masih belum optimalnya Nilai EKA pada aplikasi SMART DJA adalah rendahnya Efisiensi yaitu 1,43 dri nill Mksimum 20 dan Nilai Efisiensi yaitu 53,58
- Penyerapan anggaran BBPOM di Makassar pada Tahun 2022 sebesar Rp 54.079.932.000,- (99,12%) terhadap pagu anggaran sebesar Rp. 53.609.262.970,-

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar adalah :

- Menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman IVI DIPA serta meningkatkan capaian output kegiatan BBPOM di Makassar.
- Meningkatkan serapan anggaran melalui monitoring kegiatan dan anggaran secara lebih intens;
- Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D;
- Melakukan ralat dokumen realisasi belanja (SPM) sebagai akibat adanya kesalahan penggunaan akun;
- Memaksimalkan capaian output kegiatan dan capaian indikator kinerja kegiatan Balai Besar POM di Makassar;.
- Melakukan perhitungan kebutuhan anggaran dalam mencapai kinerja untuk periode Tahun ketiga Renstra 2020-2024
- Meminimalisasi angka revisi POK/DIPA dengan melakukan perencanaan penggunaan anggaran dengan baik;

- Meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) terutama untuk IKK yang tidak mencapai 100% dari target.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Terhadap variabel pembentuk Nilai IKPA 4 dari 8 variabel pembentuk yaiitu Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan dan Dispensasi SPM dan Capaian Output dengan nilai 100 namun pada variabel Deviasi Halaman IV DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual dan Pengelolaan UP dan TUP, BBPOM di Makassa rata rata capaian dengan nilai dibawah 95,90
- Telah adanya aktivitas relevan yang dilakukan pada setiap Rincian output dalam mencapai output terkait.
- Perencanaan kegiatan dan proyeksi pencairan dana telah disusun lebih akurat dibandingkan triwulan sebelumnya
- Koordinasi yang lebih optimal terkait penjadwalan revisi DIPA sehingga dapat melakukan revisi hal III DIPA di awal triwulan.
- Kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun 2022 untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai kinerja anggaran adalah pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan koordinasi serta konsultasi secara internal maupun stakeholder eksternal dalam hal ini adalah KPPN Makassar IV dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan adanya kerja sama yang baik dengan stakeholder, maka permasalahan permasalahan keuangan yang dihadapi dapat segera diselesaikan dengan baik.
- Mengikuti Sosialisasi terkait IKPA dan EKA oleh DJPB dan KPPN
- Mengikuti Sosialisasi Peraturan Revisi Tahun 2023 oleh DJP

g. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai *	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Nilai Kinerja Anggaran tidak mencapai target sebesar 95,60 karena nilai EKA 86,63 dan Nilai IKPA 93,75	• Melakukan reviu pelaksanaan kegiatan serta prognosis penyerapan anggaran secara periodik, setidaknya 1 kali dalam 1 triwulan • Tetap melakukan koordinasi dan komunikasi yang optimal antara pusat				

		dengan BBPOM di Makassar dalam rangka menghimpun kebutuhan revisi halaman IV DIPA, ● Untuk triwulan ke IV mengajukan revisi hal IV DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan. ● Untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran dan capaian realisasi output agar pada triwulan ke IV dilakukan Percepatan realisasi belanja modal serta proses kontrak pengadaanbarang dan jasa lainnya ● Percepatan proses pencairan kontrak pengadaan barang dan jasa				
2.	Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana.	Pengawalan penyerapan anggaran secara proporsional Berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana	.			

3.2. Realisasi Anggaran

Sesuai Surat Pengesahan DIPA No. SP DIPA - 063.01.2.432923/2023, Pagu anggaran pada DIPA awal yang diterbitkan per 30 Nopember 2022 sebesar **Rp. 61,103,863,000**. dimana mengalami

- Revisi 1 (Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 Tanggal 9 Desember 2022 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023, melalui Surat Sestama Nomor B-PR.03.01.2.21.12.22.957 tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyampaian Data Pemblokiran Mandiri (Selfblocking) Dalam Rangka Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) TA 2023 terdapat *Automatic Adjustment* TA 2023) tanggal 27 Desember 2022 dengan pagu 61.103.863.000 jumlah yang ditidak dapat dicairkan 6.779.103.000

  51 Belanja Pegawai Rp. 2.340.003.000

52 Belanja Barang Rp. 4.439.100.000

- Revisi 2 (revisi Kanwil Perbendaharaan dalam rangka mengajukan revisi hal III DIPA) tanggal 16 Februari 2023 dengan pagu 61.103.863.000 jumlah yang ditidak dapat dicairkan 6.779.103.000
  - Belanja Pegawai Rp. 2.340.003.000
  - Belanja Barang Rp. 4.439.100.000
- Revisi 3 (revisi Kanwil Perbendaharaan dalam rangka mengajukan revisi hal III DIPA) tanggal 17 April 2023 dengan pagu 61.103.863.000 jumlah yang ditidak dapat dicairkan 6.779.103.000
  - Belanja Pegawai Rp. 2.340.003.000
  - Belanja Barang Rp. 4.439.100.000
- Revisi 4 (Usulan revisi anggaran berupa revisi pergeseran anggaran dari Satker BBPOM Makassar ke Satker BBPOM Yogyakarta sebesar Rp4.439.100.000 yaitu adanya perubahan lokasi penyelenggaraan KIE Bersama Tokoh Masyarakat)

  tanggal 20 Juni 2023 dengan pagu 56.664.763.000 jumlah yang ditidak dapat dicairkan 4.559.553.000

  51 Belanja Pegawai Rp. 2.340.003.000

  52 Belanja Barang Rp. 2.219.550.00
- Revisi DIPA 5 Revisi Anggaran dalam Rangka Revisi Anggaran Badan POM Buka Blokir Anggaran Automatic Adjusment TA 2023 pengesahan pada tanggal 14 Juli 2023 kewenangan Direktur Jenderal Anggaran
- Revisi DIPA 6 Revisi Anggaran dalam Rangka Realokasi Anggaran Belanja Pegawai Badan POM TA 2023 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

  pengajuan tanggal 14 Juli 2023 melalui aplikasi SAKTI ke Approvel Unit Badan POM dan pengesahan pada tanggal 22 Juli 2023 kewenangan Direktur Jenderal Anggaran
- Revisi DIPA 7 PRevisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah sesua iSurat Sekretaris Utama Badan POM RI Nomor B-PR.05.03.2.21.08.23.579 tentang Revisi Anggaran Redistribusi Alat Laboratorium TA 2023 pengajuan tanggal 8 Agustus 2023 melalui aplikasi SAKTI ke Approvel Unit Badan POM dan pengesahan pada tanggal 31 Agustus 2023 kewenangan DJA (DIPA 7)
- Revisi DIPA 8 Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM RI Nomor B-PR.05.03.2.21.09.23.679 tentang Usulan Revisi Pemenuhan Anggaran Belanja Pegawai TA 2023 dari Optimalisasi Anggaran pada DIPA Badan POM dan tambahan anggaran dari BA BUN, untuk BBPOM Makassar tambahan anggran pada belanja Pegawai adalah sebesar = 486,699,000

  pengajuan tanggal 10 Oktober 2023 melalui aplikasi SAKTI ke Approvel Unit Badan POM dan pengesahan pada tanggal 17 Oktober 2023 kewenangan DJA (DIPA 7)
- Revisi DIPA 9 Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sesuai Surat Kepala Balai POM Makassar Nomor B-PR.05.03.26A.26A5.12.23.953 tentang Usulan Revisi Anggaran DIPA TA 2023 kapada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di - Makassar

  pengajuan tanggal 6 Desember 2023 melalui aplikasi SAKTI ke Kanwil Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

  dan pengesahan pada tanggal 7 Desember 2023 kewenangan Kanwil Perbendaharaan (DIPA 9)

- Revisi DIPA 10 Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sesuai Surat Kepala Balai POM Makassar Nomor B-PR.05.03.26A.26A5.12.23.1031 tentang Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan kapada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di - Makassar
  pengajuan tanggal 27 Desember 2023 melalui aplikasi SAKTI ke Kanwil Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan pengesahan pada tanggal 28 Desember 2023 kewenangan Kanwil Perbendaharaan (DIPA 10)
- Revisi DIPA 11 Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sesuai Surat Kepala Balai POM Makassar Nomor B-PR.05.03.20A.20A5.01.24.38 tentang P Usulan Revisi Anggaran DIPA TA 2023 dalam rangka Revisi Anggaran memenuhi Belanja Operasional (Belanja Pegawai) kapada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di - Makassar
  pengajuan tanggal 17 Januari 2024 melalui aplikasi SAKTI ke Kanwil Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan pengesahan pada tanggal 18 Januari 2024 kewenangan Kanwil Perbendaharaan (DIPA 11).

Realisasi anggaran tahun 2023 adalah Rp. 55.081.318.876,- atau 99,23 %,. Jumlah Pagu Anggaan per jenis belanja beserta realisasinya tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.63
Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Makassar tahun 2023

NO	KODE | NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER	
1	432923 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	PAGU	18,587,496,000	27,818,929,000	9,099,685,000	0	0	0	0	0	0	55,506,110,000
		REALISASI	18,541,394,447 (99.75%)	27,446,730,367 (98.66%)	9,093,194,062 (99.93%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	55,081,318,876 (99.23%)
		SISA	46,101,553	372,198,633	6,490,938	0	0	0	0	0	0	424,791,124
GRAND TOTAL		PAGU	18,587,496,000	27,818,929,000	9,099,685,000	0	0	0	0	0	0	55,506,110,000
		REALISASI	18,541,394,447 (99.75%)	27,446,730,367 (98.66%)	9,093,194,062 (99.93%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	55,081,318,876 (99.23%)
		SISA	46,101,553	372,198,633	6,490,938	0	0	0	0	0	0	424,791,124

Pengelolaan anggaran BBPOM di Makassar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Makassar dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja
c. Percepatan pengadaan barang dan jasa

3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%\ Rencana\ Capaian\ Input} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE $\geq$ SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Tingkat Efisiensi Kegiatan

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Makassar Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.65 . Nilai TE dan kategori efisiensi indikator kegiatan BBPOM Makassar Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/ Output		Rata-rata % Capaian		IE	TE	Kategori	
			Input	Output				
1.	AEA Koordinasi (kegiatan)	001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (kegiatan)	99,79	100,00	1,00	0,00	Efisien	100 %
2.	BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (dokumen)	96,26	100,98	1,05	0,05	Efisien	100 %
3.	BKB Pemantauan produk (laporan)	001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (laporan)	96,26	100,00	1,04	0,04	Efisien	100 %
4.	BMB Komunikasi Publik (layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume)	001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT (layanan)	99,90	111,76	1,12	0,12	Efisien	100 %
5.	CAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket, Unit)	002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (Unit)	99,04	100,00	1,01	0,01	Efisien	100 %
6.	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	001 Perangkat pengolah data dan komunikasi (Unit)	97,69	157,14	1,61	0,61	Efisien	90 %
7.	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	962 Layanan Umum (Layanan)	88,49	100,00	1,13	0,13	Efisien	100 %
8.	PDD Standarisasi Lembaga (Lembaga, Unit Kerja)	001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Lembaga)	99,75	100,00	1,00	0,00	Efisien	100 %
9.	QCD Perkara Hukum Badan Usaha (Perkara, Berkas Perkara)	U44 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR (Perkara)	94,56	100,00	1,06	0,06	Efisien	100 %

10.	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga, Unit Kerja, Tim)	001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (Lembaga)	99,33	100,00	1,01	0,01	Efisien	100 %
11.	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga, Unit Kerja, Tim)	002 Desa Pangan Aman (Lembaga)	98,99	100,00	1,01	0,01	Efisien	100 %
12.	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga, Unit Kerja, Tim)	003 Pasar aman dari bahan berbahaya (Lembaga)	94,76	100,00	1,06	0,06	Efisien	100 %
13.	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT (Orang)	99,60	102,10	1,03	0,03	Efisien	100 %
14.	QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (UMKM)	001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (UMKM)	93,23	100,00	1,07	0,07	Efisien	100 %
15	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk, Laporan, Keputusan)	001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Produk)	99,07	100,00	1,01	0,01	Efisien	100 %
16.	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk, Laporan, Keputusan)	005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Produk)	98,87	100,13	1,01	0,01	Efisien	100 %
17.	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk, Laporan, Keputusan)	008 Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT (Produk)	90,28	100,00	1,11	0,11	Efisien	100 %
18.	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan)	001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Lembaga)	91,76	105,85	1,15	0,15	Efisien	100 %
19.	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan)	004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Lembaga)	98,51	100,18	1,02	0,02	Efisien	100 %

20.	RAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket, Unit)	001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Paket)	99,97	100,00	1,00	0,00	Efisien	100 %
21.	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	99,76	100,00	1,00	0,00	Efisien	100 %

Pada Tahun 2023 BBPOM di Makassar melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil seluruh kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 – 0,29 . Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT; Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice; Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice dan Layanan Perkantoran mempunyai TE terendah sementara Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM TE tertinggI karena output melampaui 100 % dari target dengan persentase penyerapan anggaran lebih rendah dibandingkan dengan persentase output.

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dengan sumber daya (dana) yang dimiliki BBPOM di Makassar telah mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Tingkat Efisiensi Indikator Kinerja

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

1) 0 - 0,2 : 100% à Efisien
2) 0,21 - 0,4 : 95% à Efisien
3) 0,41 - 0,6 : 92% à Efisien
4) 0,61 - 0,8 : 90% à Efisien
5) 0,81 - 1,0 : 88% à Efisien
6) 1,01 - 1,2 : 86% à Tidak Efisien
7) 1,21 - 1,4 : 84% à Tidak Efisien
8) 1,41 - 1,6 : 80% à Tidak Efisien
9) 1,61 - 1,8 : 78% à Tidak Efisien
10) > 1,81 : 75% à Tidak Efisien

Pada Tahun 2023, berdasarkan Tabel 5.66 terdapat 25 (dua puluh lima) indikator kinerja Tahun 2023 yang Efisien serta ada 4 indikator yang tidak Efisien dengan Nilai TE yang diperoleh bervariasi antara 0,00 sampai 0,34. Nilai TE tertinggi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan (TE = 0,34) dan Nilai TE terendah adalah Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (TE = 0,00. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Indikator Kinerja Utama Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat TE tertinggi karena efisiensi penggunaan anggaran jauh lebih kecil dibandingkan capaian output.

Tabel 3.66. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk pencapaian Indikator Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
				INPUT	OUTPUT				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,87	107,89	1,09	1	EFISIEN	0,09
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	99,07	105,40	1,06	1	EFISIEN	0,06
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98,87	104,17	1,05	1	EFISIEN	0,05
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,07	119,31	1,20	1	EFISIEN	0,20
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90,28	114,83	1,27	1	EFISIEN	0,27
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	100,00	101,02	1,01	1	EFISIEN	0,01
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,75	114,02	1,20	1	EFISIEN	0,20
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74,35	99,31	1,34	1	EFISIEN	0,34

		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	99,77	101,50	1,02	1	EFISIEN	0,02
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	102,41	1,02	1	EFISIEN	0,02
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	99,43	83,46	0,84	1	TIDAK EFISIEN	-0,16
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,78	98,40	1,01	1	EFISIEN	0,01
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	91,60	109,42	1,19	1	EFISIEN	0,19
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	99,00	100,32	1,01	1	EFISIEN	0,01
		15	Indeks Pelayanan Publik	98,10	104,77	1,07	1	EFISIEN	0,07
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	93,23	100,47	1,08	1	EFISIEN	0,08
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	99,73	100,89	1,01	1	EFISIEN	0,01
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	99,33	100,00	1,01	1	EFISIEN	0,01
		19	Jumlah desa pangan aman	98,99	100,00	1,01	1	EFISIEN	0,01
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	94,76	100,00	1,06	1	EFISIEN	0,06
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,75	100,00	1,00	1	EFISIEN	0,00
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,75	99,37	1,00	1	EFISIEN	0,00

7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	95,62	92,90	0,97	1	TIDAK EFISIEN	-0,03
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB BBPOM di Makassar	99,61	110,65	1,11	1	EFISIEN	0,11
		25	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	99,99	100,93	1,01	1	EFISIEN	0,01
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	95,87	116,40	1,21	1	EFISIEN	0,21
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	99,97	98,14	0,98	1	TIDAK EFISIEN	-0,02
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	96,46	116,00	1,20	1	EFISIEN	0,20
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	98,89	93,47	0,95	1	TIDAK EFISIEN	-0,05
	Total			**97,00**	**103,29**	1,06	**1**	EFISIEN	0,06

Tabel 129. Pencapaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	% Capaian	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	110,32	Sangat Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	101,02	Sangat Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	104,94	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	99,89	Cukup
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	100,22	Sangat Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	99,69	Cukup
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	92,90	Cukup
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	105,79	Sangat Baik

9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	116,42	Sangat Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	107,07	Sangat Baik
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	93,47	Cukup



Pohon Lontar dikenal sebagai pohon serbaguna karena nyaris semua bagian pohon ini bisa digunakan.
Manusia zaman dahulu menggunakan daun lontar untuk mendokumentasikan kehidupannya, dengan menuliskan atau menggambarkan sesuatu.
Lontar dijadikan sebagai flora identitas Sulawesi Selatan, karena dari segi sosial budaya keaksarahannya sebagai huruf penulisan lontara yang dipergunakan di dalam bahasa sehari-hari di Sulawesi Selatan.

BAB IV

Penutup



Bab IV

Penutup

Laporan Kinerja Tahun 2023 BBPOM di Makassar merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi melalui pencapaian sasaran strategis/kegiatan yang telah ditetapkan dan sepenuhnya mengacu pada Reviu Rencana Strategis BBPOM di Makassar tahun 2020-2024.

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan capaian sasaran, pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BBPOM di Makassar tahun 2023 telah dapat dicapai secara maksimal. Capaian kinerja organisasi sesuai penilaian 11 sasaran strategis yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Laporan Kinerja Tahun 2023 BBPOM di Makassar merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi melalui pencapaian sasaran strategis/kegiatan yang telah ditetapkan dan sepenuhnya mengacu pada Reviu Rencana Strategis BBPOM di Makassar tahun 2020-2024.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari periode Rencana Strategis 2020-2024, serta evaluasi didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra BBPOM di Makassar tahun 2020-2024 dan DIPA tahun 2023 Untuk menunjang pencapaian 11 sasaran strategis dan 29 indikator tersebut, telah dilakukan 21 kegiatan utama.

1. 11 sasaran strategis tahun 2023, diperoleh 7 sasaran strategis kategori “Sangat Baiki”; 4 sasaran strategis kategori “Cukup”.

2. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :
   - Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 110,32 % dengan kriteria “Sangat Baik”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Makassar pada Tahun 2023.
   - Capaian Indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 101,02 % dengan kriteria “Sangat Baik”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada Tahun 2023.
   - Capaian Indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 104,94 % dengan kriteria “Sangat Baik”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada Tahun 2023.
   - Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keempat sebesar 99,89 % dengan kriteria “Cukup”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar, namun masih dibutuhkan tindak lanjut terhadap rekomendasi pada BBPOM di Makassar dalam pemeriksaan sarana obat dan makanan pada Tahun 2023.

- Capaian Indikator pada. sasaran strategis kelima sebesar 100,22 % dengan kriteria “Sangat Baik”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada Tahun 2023.
- Capaian Indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 99,69 % dengan kriteria “Cukup”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, namun masih dibutuhkan tindak lanjut terhadap rekomendasi pada BBPOM di Makassar dalam pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada Tahun 2023.
- Capaian Indikator pada sasaran strategis ketujuh sebesar 92,90 % dengan kriteria “Cukup”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan pada wilayah kerja BBPOM di Makassar, namun masih dibutuhkan tindak lanjut terhadap rekomendasi pada BBPOM di Makassar dalam penindakan kejahatan Tahun 2023.
- Capaian Indikator pada sasaran strategis delapan sebesar 105,79 % dengan kriteria “Sangat Baik”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan UPT yang optimal pada Tahun 2023.
- Capaian Indikator pada sasaran strategis sembilan sebesar 116,40 % dengan kriteria “Sangat Baik”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam mewujudkan SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal pada Tahun 2023.
- Capaian Indikator pada sasaran strategis sepuluh sebesar 107,07 % dengan kriteria “Sangat Baik”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan pada Tahun 2023.
- Capaian Indikator pada sasaran strategis kesebelas sebesar 93,47 % dengan kriteria “Cukup” menunjukkan masih dibutuhkan tindak lanjut terhadap rekomendasi oleh BBPOM di Makassar dalam mengelola Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel pada pada Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 BBPOM di Makassar melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil empat belas kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 – 0,13 . Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. TE tertinggi karena output melampaui 100 % dari target dengan persentase penyerapan anggaran lebih rendah dibandingkan dengan persentase output. 21 kegiatan utama termasuk kategori efisien.

4.2. SARAN

Sehubungan dengan capaian kinerja tersebut, BBPOM di Makassar terus melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan demi peningkatan kinerja BBPOM di Makassar untuk masa mendatang :

- Memperhatikan rekomendasi Inspektur Utama tentang hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 dengan memanfaatkan pengukuran data kinerja sebagai acuan dalam memberikan *reward* dan *punishment* hingga tataran indidu pegawai.
- Menyajikan narasi pada renstra selanjutnya bahwa indikator tujuan sama dengan sasaran strategis.

- Menyajikan narasi mengenai latar belakang terjadinya perubahan anggaran serta upaya yang telah dilakukan dalam efisiensi sumber daya/anggaran pada Laporan Kinerja
- Menuangkan pembahasan terkait perubahan lingkungan internal dan eksternal yang menyebabkan perubahan target dan/atau indikator kinerja pada laporan evaluasi internal dan Laporan Kinerja Interim.
- Memanfaatkan evaluasi internal secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang belum tercapai pada tahun berjalan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja sertamempertahankan upaya perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*).

Lampiran

Lakip 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Makassar
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Sriyani Rasyid, Apt
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar POM di Makassar
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar,20 Desember 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. Penny K. Lukito, MCP	Dra. Sriyani Rasyid, Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Makassar

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	77
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85.60
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78.5
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	93.50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.40
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	98
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	81.80

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.30
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	96.20
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	18

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp. 61,103,863,000.00

Makassar,20 Desember 2022

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Dra. Sriyani Rasyid, Apt

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Makassar
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	582.588.600, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	493.374.600, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	388.392.400, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	328.916.400, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	53.596.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												83	94.986.000, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												85.60	280.391.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												78.5	135.040.000, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												93.50	29.696.000, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	38.240.000, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	80.080.000, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	148.424.000, 00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	335.711.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Makanan yang memenuhi ketentuan													
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	1.765.256.000, 00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	396.710.000, 00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	79	93.917.000, 00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	12.641.240.000, 00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5	20	30	35	40	45	60	70	80	90	95	98	971.911.000, 00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	20	20	25	40	50	65	70	70	85	95	25	847.722.000, 00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	5	15	20	25	40	50	60	70	80	90	100	1.577.359.800, 00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	5	15	20	25	40	50	60	70	80	90	100	1.051.573.200, 00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	10	25	35	40	45	50	60	70	75	80	94	1.250.972.000, 00
23.	Indeks RB UPT												81.80	26.479.942.000, 00
24.	Nilai AKIP UPT												80.30	251.207.000, 00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												77	847.624.000, 00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												86	8.899.165.000, 00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	280.820.000, 00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		10	20	30	40	50	55	65	75	80	87	96.20	289.875.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	25	25	35	55	65	75	75	80	95	98	18	469.133.000, 00
Total														61.103.863.000, 00

Makassar, 20 Desember 2022

Plt. Kepala Balai Besar POM di Makassar



Dra. Sriyani Rasyid, Apt

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
Jl. Baji Minasa No.2 Makassar 90126, Telp. (0411) 872021, Fax. (0411) 873496
Email : bbpomdimakassar@gmail.com, Email : bpom_makassar@pom.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
NOMOR PR.04.01.26A.26A5.07.22.221 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Nomor T-HK.02.02.26A.26A5.12.21.3039 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR TAHUN 2023.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

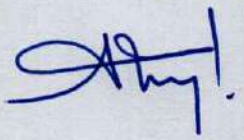
Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 13 Juli 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR



(HARDANINGSIH)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
NOMOR NOMOR PR.04.01.26A.26A5.07.22.221 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR TAHUN 2023

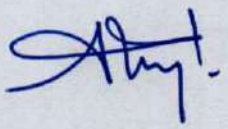
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	77
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan	85,6

	masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	93,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
		Indeks Pelayanan Publik	4,40
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79

5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	98
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	18
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	81,8
		Nilai AKIP UPT	80,3
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86

	Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	96,2

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR



(HARDANINGSIH)

2023

logo -, bpom48-staf

Peta Strategis

Bulan

B12

Cari Data | Kembali

Unit Kerja : BBPOM di Makassar
Nama Pejabat : Dra. Hariani, Apt
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Makassar

NPSS : 103,84 %
Pagu : Rp. 0.00
Realisasi Anggaran : Rp. 0.00
Realisasi Anggaran (%) : nan %

Stakeholder

(105,43 %)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat 110,32 (%)	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan 101,02 (%)	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan 104,94 (%)

Internal Process

(98,18 %)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik 99.89 %	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan 100.22 %	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan 99.69 %	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan 92.90 %

Learning & Growth

(107,92 %)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal 105,79 %	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal 116,42 %	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan 116,00 %	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel 93,47 %

UKE2

No.	Kode Unit	Deskripsi	Jumlah IKU
1.	26A	BBPOM di Makassar	29

Kategori Capaian Periode **Januari - Agustus 2023**

Warna	Keterangan
○	Belum Ada Capaian
🔴	Tidak Memenuhi Ekspektasi (Capaian < 80%)
🟡	Belum Memenuhi Ekspektasi (80% <= Capaian < 100%)
🟢	Memenuhi Ekspektasi (100% <= Capaian < 120%)
⚪	Tidak Dapat Disimpulkan (Capaian=>120)

Kategori Capaian Periode **September - Desember 2023**

Warna	Keterangan
○	Belum Ada Capaian
🔴	Kurang (Capaian < 70%)
🟡	Cukup (70%>= Capaian < 100%)
🟢	Baik (Capaian = 100%)
🔵	Sangat Baik (100% > Capaian <= 120%)
⚪	Tidak Dapat Disimpulkan (Capaian > 120%)

Lampiran 4

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2023
BBPOM DI MAKASSAR

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	% Capaian		% Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	98,18	107,89	Sangat Baik	110,32	Sangat Baik
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,5	93,28	105,40	Sangat Baik		
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	92,71	104,17	Sangat Baik		
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	95,45	119,31	Sangat Baik		
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	77	88,42	114,83	Sangat Baik		
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83	83,85	101,02	Sangat Baik	101,02	Sangat Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,6	97,60	114,02	Sangat Baik	104,94	Sangat Baik
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,5	77,96	99,31	Sangat Baik		
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	93,5	94,90	101,50	Sangat Baik		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	95,24	102,41	Sangat Baik	99,89	Cukup
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	58,42	83,46	Sangat Baik		
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	97,42	98,40	Sangat Baik		
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	71,12	109,42	Sangat Baik		
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	78,25	100,32	Sangat Baik		
		15	Indeks Pelayanan Publik	4,4	4,61	104,77	Sangat Baik		
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	79,37	100,47	Sangat Baik		
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94	94,84	100,89	Sangat Baik	100,22	Sangat Baik
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	98	98,00	100,00	Sangat Baik		
		19	Jumlah desa pangan aman	25	25,00	100,00	Sangat Baik		
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	18	18,00	100,00	Sangat Baik		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,00	100,00	Sangat Baik	99,69	Cukup
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	99,37	99,37	Sangat Baik		
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94	87,33	92,90	Sangat Baik	92,90	Sangat Baik
8	Terwujudnya tatakelola	24	Indeks RB BBPOM di Makassar	81,8	90,51	110,65	Sangat Baik	105,79	Sangat Baik

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	% Capaian		% Capaian	Kriteria
	pemerintahan UPT yang optimal	25	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	80,3	81,05	100,93	Sangat Baik		
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	77	89,63	116,40	Sangat Baik	116,40	Sangat Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86	84,40	98,14	Sangat Baik	107,07	Sangat Baik
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2,5	2,900	116,00	Sangat Baik		
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	96,2	89,92	93,47	Sangat Baik	93,47	Cukup

Lampiran 5

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
TAHUN 2023

Sasaran Strategis		Indikator		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
				INPUT	OUTPUT				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,87	107,89	1,09	1	EFISIEN	0,09
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	99,07	105,40	1,06	1	EFISIEN	0,06
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98,87	104,17	1,05	1	EFISIEN	0,05
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,07	119,31	1,20	1	EFISIEN	0,20
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90,28	114,83	1,27	1	EFISIEN	0,27
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	100,00	101,02	1,01	1	EFISIEN	0,01
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,75	114,02	1,20	1	EFISIEN	0,20
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74,35	99,31	1,34	1	EFISIEN	0,34
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	99,77	101,50	1,02	1	EFISIEN	0,02
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	102,41	1,02	1	EFISIEN	0,02
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	99,43	83,46	0,84	1	TIDAK EFISIEN	-0,16
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,78	98,40	1,01	1	EFISIEN	0,01

Sasaran Strategis		Indikator	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	91,60	109,42	1,19	1	EFISIEN	0,19
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	99,00	100,32	1,01	1	EFISIEN	0,01
	15	Indeks Pelayanan Publik	98,10	104,77	1,07	1	EFISIEN	0,07
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau	93,23	100,47	1,08	1	EFISIEN	0,08
5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	99,73	100,89	1,01	1	EFISIEN	0,01
	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	99,33	100,00	1,01	1	EFISIEN	0,01
	19	Jumlah desa pangan aman	98,99	100,00	1,01	1	EFISIEN	0,01
	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	94,76	100,00	1,06	1	EFISIEN	0,06
6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,75	100,00	1,00	1	EFISIEN	0,00
	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,75	99,37	1,00	1	EFISIEN	0,00
7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	95,62	92,90	0,97	1	TIDAK EFISIEN	-0,03
8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB BBPOM di Makassar	99,61	110,65	1,11	1	EFISIEN	0,11
	25	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	99,99	100,93	1,01	1	EFISIEN	0,01
9 Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	95,87	116,40	1,21	1	EFISIEN	0,21
10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	99,97	98,14	0,98	1	TIDAK EFISIEN	-0,02
	28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	96,46	116,00	1,20	1	EFISIEN	0,20
11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	98,89	93,47	0,95	1	TIDAK EFISIEN	-0,05
Total			**97,00**	**103,29**	1,06	**1**	EFISIEN	0,06

IKU 1-5

1.Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

No	Jenis Produk	Balai Penguji	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Desember														
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
							TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS						
														MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)			
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Obat	sampel Mks diuji Mks	Mak	362	Random	367	0	0	0	5	367	367	361	6	0	0	0	6	0	367
		sampel Mks diuji balai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Mks diuji Mks				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo	Palo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
		sampel Mks diuji Mks	Mak	90	Targeted	83	0	13	1	0	69	69	69	0	0	0	0	14	0	83
		sampel Mks diuji balai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
		sampel Mks diuji Mks				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo	Palo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTA		452		450	0	13	1	5	436	436	430	6	0	0	0	20,00	0	450
2	Obat Tradisional/ Obat Bahan	sampel Mks diuji Mks	Makassar	237	Random	237	0	0	0	5	237	237	230	7	0	0	0	7	0	237
		sampel Mks diuji balai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Mks diuji Mks				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo	Palo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo uji Mks dan balai lain				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Mks diuji Mks	Mak	101	Targeted	101	0	0	0	2	101	101	94	7	0	0	0	7	0	101
		sampel Mks diuji balai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Mks diuji Mks dan balai lain				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo	Palo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo uji Mks dan balai lain				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTA		338		338	0	0	0	7	338	338	324	14	0	0	0	14	0	338
3	Obat Kuasi	sampel Mks diuji Mks	Makass	16	Random	16	0	0	0	0	16	16	16	0	0	0	0	0	0	16
		sampel Mks diuji balai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Mks diuji Mks				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo	Palo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo uji Mks dan balai lain				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Mks diuji Mks	Mak	7		7	0	0	0	0	7	7	6	1	0	0	0	1	0	7

No	Jenis Produk	Balai Penguji	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Desember														
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
							TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS						
														MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)			
		sampel Mks diuji balai			Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Mks diuji Mks dan balai lain				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo	Palo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo uji balai lain				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo uji Mks dan balai lain				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTA		23		23	0	0	0	0	23	23	22	1	0	0	0	1	0	23
4	**Suplemen Kesehatan**	sampel Mks diuji Mks	Makass	63	Random	63	0	0	0	0	63	63	59	4	0	0	0	4	0	63
		sampel Mks diuji balai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Mks diuji Mks				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo	Palo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Mks diuji Mks	Mak	27	Targeted	27	0	0	0	0	27	27	23	4	0	0	0	4	0	27
		sampel Mks diuji balai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Mks diuji Mks				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo	Palo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTA		90		90	0	0	0	0	90	90	82	8	0	0	0	8	0	90
5	**Kosmetik**	sampel Mks diuji Mks	Mak	474	Random	474	0	0	0	42	474	474	470	4	0	0	0	4	0	474
		sampel Mks diuji balai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Mks diuji Mks				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo	Palo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Mks diuji Mks	Mak	203	Targeted	203	0	0	0	17	203	203	199	4	0	0	0	4	0	203
		sampel Mks diuji balai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Mks diuji Mks				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo	Palo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTA		677		677	0	0	0	59	677	677	669	8	0	0	0	8	0	677
6	**Rokok**	sampel Mks diuji Mks	Mak		Targeted	4	0	0	0	1	4	4	3	1	0	0	0	1	0	4
		sampel Mks diuji balai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Mks diuji Mks				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo	Palo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Jenis Produk	Balai Penguji	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Desember														
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
							TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS						
														MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)			
		sampel Loka Palopo			d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sampel Loka Palopo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTA		0		4	0	0	0	1	4	4	3	1	0	0	0	1	0	4
	Total Obat			362	Random	367	0	0	0	5	367	367	361	6	0	0	0	6,00	0	367
	Total Obat Tradisional			237		237	0	0	0	5	237	237	230	7	0	0	0	7	0	237
	Total Obat Kuasi			16		16	0	0	0	0	16	16	16	0	0	0	0	0	0	16
	Total Suplemen Kesehatan			63		63	0	0	0	0	63	63	59	4	0	0	0	4	0	63
	Total Kosmetik			474		474	0	0	0	42	474	474	470	4	0	0	0	4	0	474
	Makassar			1152	Random	1157	0	0	0	52	1157	1157	1136	21	0	0	0	21	0	1157
	Palopo			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Total Random Obat, OT, Sk dan Kos			1152		1157	0	0	0	52	1157	1157	1136	21	0	0	0	21,00	0	1157
	Total Obat			90	Targeted	83	0	13	1	0	69	69	69	0	0	0	0	14,00	0	83
	Total Obat Tradisional			101		101	0	0	0	2	101	101	94	7	0	0	0	7	0	101
	Total Obat Kuasi			7		7	0	0	0	0	7	7	6	1	0	0	0	1	0	7
	Total Suplemen Kesehatan			27		27	0	0	0	0	27	27	23	4	0	0	0	4	0	27
	Total Kosmetik			203		203	0	0	0	17	203	203	199	4	0	0	0	4	0	203
	Total Rokok			0		4	0	0	0	1	4	4	3	1	0	0	0	1	0	4
	Makassar			428	Targe	425	0	13	1	20	411	411	394	17	0	0	0	31,00	0	425
	Palopo			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos			1580		1582	0	13	1	72	1568	1568	1530	38	0	0	0	52,00	0	1582
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Pangan	sampel Mks diuji Mks	Mak	599		595	1	3	0	20	591	591	555	36	0	0		40	0	595
		sampel Mks diuji balai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		sampel Mks diuji Mks			Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		sampel Loka Palopo	Palo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		sampel Loka Palopo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		sampel Loka Palopo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
1	Pangan	sampel Mks diuji Mks	Mak ass	141		132	0	0	0	23	132	132	126	6		0		6	0	132
		sampel Mks diuji balai				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
		sampel Mks diuji Mks			Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
		sampel Loka Palopo	Palo			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
		sampel Loka Palopo				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
		sampel Loka Palopo				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
	Total Pangan Balai			599	ando	595	1	3	0	20	591	591	555	36	0	0	0	40	0	595
	Total Pangan Balai			141	arget	132	0	0	0	23	132	132	126	6	0	0	0	6	0	132
2	Fortifikasi	sampel Mks uji Mks	Mak	95		95	0	0	0	0	95	95	84	11		0		11	0	95
		sampel Mks uji balai			Tar	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0

No	Jenis Produk	Balai Penguji	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Desember														
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
							TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS						
														MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)			
		sampel Mks uji Mks			Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
		sampel Loka Palopo	Palo			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
		sampel Loka Palopo				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
		sampel Loka Palopo				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
	Total Pangan			95	Targete	95	0	0	0	0	95	95	84	11	0	0	0	11	0	95
	TOTAL PANGAN			835		822	1	3	0	43	818	818	765	53	0	0	0	57	0	822

IKU 6

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar

6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT

No	Provinsi	Jumlah Sampel	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
12	Jawa Barat	539	77.00	86.68	112.58%
13	Jawa Tengah	540	81.00	80.56	99.45%
14	DI Yogyakarta	500	84.00	87.86	104.59%
15	Jawa Timur	520	81.00	84.50	104.32%
16	Banten	450	93.00	91.07	97.93%
17	Bali	560	77.00	84.31	109.50%
18	Nusa Tenggara Barat	590	82.00	79.81	97.33%
19	Nusa Tenggara Timur	530	77.00	76.89	99.86%
20	Kalimantan Barat	530	85.00	86.07	101.26%
21	Kalimantan Tengah	500	77.00	87.17	113.21%
22	Kalimantan Selatan	527	86.00	84.48	98.23%
23	Kalimantan Timur	500	89.00	88.76	99.73%
24	Kalimantan Utara	610	87.00	89.46	102.82%
25	Sulawesi Utara	500	86.00	91.79	106.73%
26	Sulawesi Tengah	570	83.00	80.87	97.44%
27	Sulawesi Selatan	550	83.00	83.85	101.03%
28	Sulawesi Tenggara	540	81.00	81.73	100.90%
29	Gorontalo	480	87.00	85.89	98.72%
30	Sulawesi Barat	600	75.00	76.91	102.55%
31	Maluku	580	82.00	71.02	86.61%
32	Maluku Utara	610	81.00	74.91	92.48%
33	Papua Barat	590	87.00	78.21	89.90%
34	Papua	637	71.00	66.56	93.75%
	Indeks Nasional	**18201**	**83.00**	**84.67**	**102.01%**

IKU 7

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 2. Capaian Indeks Balai Besar/Balai POM Tahun 2023

No	Unit Penyelenggara KBP	Target	Realisasi	Persen Capaian	Jumlah KBP	Jumlah Responden
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	93.4	96.1	102.9%	6	79
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	93.4	96.0	102.8%	3	75
3	Balai Besar POM di Bandung	93.4	97.3	104.1%	16	222
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	93.4	98.6	105.6%	9	121
5	Balai Besar POM di Denpasar	93.0	95.6	102.8%	47	1061
6	Balai Besar POM di Jakarta	88.8	97.4	109.7%	79	1215
7	Balai Besar POM di Jayapura	93.4	94.4	101.1%	8	90
8	Balai Besar POM di Makassar	85.6	97.6	114.0%	6	78
9	Balai Besar POM di Manado	92.2	99.2	107.6%	14	146
10	Balai Besar POM di Mataram	89.8	97.8	108.9%	17	186
11	Balai Besar POM di Medan	93.4	98.5	105.4%	19	140
12	Balai Besar POM di Padang	84.8	98.6	116.3%	9	83
13	Balai Besar POM di Palangkaraya	90.9	95.3	104.8%	6	117
14	Balai Besar POM di Palembang	91.0	98.3	108.1%	8	78
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	90.4	99.1	109.6%	13	297
16	Balai Besar POM di Pontianak	93.4	97.1	104.0%	17	145
17	Balai Besar POM di Samarinda	86.8	92.3	106.4%	22	249

IKU 8

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

No	Provinsi	Jumlah Sampel	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
25	Sulawesi Utara	500	81.16	85.51	105.35%
26	Sulawesi Tengah	570	72.53	71.21	98.18%
27	Sulawesi Selatan	550	78.50	77.96	99.31%
28	Sulawesi Tenggara	540	72.79	80.62	110.76%
29	Gorontalo	480	68.18	79.35	116.38%
30	Sulawesi Barat	600	78.01	67.06	85.96%
31	Maluku	580	73.29	74.78	102.03%
32	Maluku Utara	610	67.52	74.58	110.45%
33	Papua Barat	590	72.85	78.41	107.63%
34	Papua	637	68.26	72.06	105.56%
	Indeks Nasional	**18201**	**80.00**	**80.45**	**100.57%**

IKU 9

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar

9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

No.	UPP	Indeks 2022	Target 2023	Indeks 2023	Target 2024 (Baru)
BALAI BESAR POM					
20	Balai Besar POM di Mataram	99,49	94,00	98,09	98,50
21	Balai Besar POM di Manado	95,44	92,00	99,05	99,50
22	Balai Besar POM di Pekanbaru	96,84	93,50	97,44	98,00
23	Balai Besar POM di Jakarta	96,03	92,00	94,71	95,25
24	Balai Besar POM di Banda Aceh	91,93	97,00	97,80	98,25
25	Balai Besar POM di Palangka Raya	93,50	93,00	96,72	97,25
26	Balai Besar POM di Yogyakarta	91,85	90,50	96,94	97,50
27	Balai Besar POM di Bandar Lampung	95,62	93,50	95,74	96,25
28	Balai Besar POM di Denpasar	89,77	90,20	96,12	96,50
29	Balai Besar POM di Padang	91,65	91,00	95,74	96,25
30	Balai Besar POM di Banjarmasin	94,28	91,50	94,99	95,50
31	Balai Besar POM di Semarang	94,18	92,00	94,97	95,50
32	Balai Besar POM di Medan	94,64	93,00	92,42	93,00
33	Balai Besar POM di Makassar	91,90	93,50	94,90	95,50
34	Balai Besar POM di Palembang	90,93	92,50	94,45	95,00
35	Balai Besar POM di Serang	93,41	89,00	93,20	93,75
36	Balai Besar POM di Samarinda	87,65	89,00	93,30	93,75
37	Balai Besar POM di Bandung	92,37	89,00	92,26	92,75
38	Balai Besar POM di Surabaya	91,80	91,00	91,98	92,50
39	Balai Besar POM di Pontianak	91,39	91,00	90,70	91,25
40	Balai Besar POM di Jayapura	89,40	91,00	90,04	90,50

IKU 10

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH BALAI BESAR POM DI Makassar

A. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

kode 2 rekomendasi berubah dar

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Januari			Februari		
			Rekomendasi*	TL**		Rekomendasi*	TL**	
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	2	2		7	7	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		1	1	
		Kosmetik	0	0		3	3	
		Pangan	3	3		7	7	
		Total	5	5	100,00	18	18	100,00
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0	
		Pangan	0	0		1	1	
		Total	0	0	0	1	1	100,00
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0	
		Pangan	0	0		0	0	
		Total	0	0	0	0	0	0
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0	
		Pangan	0	0		0	0	
		Total	0	0	0	0	0	0
TOTAL			**5**	**5**	100,00	**19**	**19**	100,00

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG

A. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana p

ri 1 menjadi 0, perubahan karena salah penginputan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Maret			April		
			Rekomendasi*	TL**		Rekomendasi*	TL**	
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	10	10		3	3	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	12	12		3	3	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	5	5		4	4	
		Pangan	32	32		17	17	
		Total	59	59	100,00	27	27	100,00
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0	
		Pangan	0	0		1	1	
		Total	0	0	100,00	1	1	100,00
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	1	1		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0	
		Pangan	0	0		0	0	
		Total	1	1	100,00	0	0	100,00
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0	0	0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	
		Kosmetik	0	0	0	0	0	
		Pangan	0	0	0	0	0	
		Total	0	0	0	0	0	0
TOTAL			**60**	**60**	100,00	**28**	**28**	100,00

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG

A. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana p

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Mei			Juni		
			Rekomendasi*	TL**		Rekomendasi*	TL**	
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	5	5		3	3	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	9	9		4	4	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	12	12		9	9	
		Pangan	8	8		2	2	
		Total	34	34	100,00	18	18	100,00
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0	
		Pangan	0	0		0	0	
		Total	0	0	100,00	0	0	100,00
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0	
		Pangan	0	0		0	0	
		Total	0	0	100,00	0	0	100,00
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0	
		Pangan	0	0		0	0	
		Total	0	0	0	0	0	0
TOTAL			**34**	**34**	100,00	**18**	**18**	100,00

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG

A. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana p

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Juli			Agustus		
			Rekomendasi*	TL**		Rekomendasi*	TL**	
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	11	11		8	8	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	4	4		3	3	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	4	4		5	5	
		Pangan	7	7		4	4	
		Total	26	26	100,00	20	20	100,00
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	1	1		1	0	
		Pangan	0	0		0	0	
		Total	1	1	100,00	1	0	75,00
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0	
		Pangan	0	0		0	0	
		Total	0	0	100,00	0	0	100,00
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0	
		Pangan	0	0		0	0	
		Total	0	0	0	0	0	0
TOTAL			**27**	**27**	100,00	**21**	**20**	91,67

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG

A. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana p

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	September			Oktober		
			Rekomendasi*	TL**		Rekomendasi*	TL**	
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	8	8		3	3	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	5	5		1	1	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	4	4		7	7	
		Pangan	4	4		3	3	
		Total	21	21	100,00	14	14	100,00
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	1	1		0	0	
		Pangan	0	0		0	0	
		Total	1	1	80,00	0	0	80,00
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0	
		Pangan	0	0		0	0	
		Total	0	0	100,00	0	0	100,00
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0	
		Pangan	0	0		0	0	
		Total	0	0	0	0	0	0
TOTAL			**22**	**22**	93,33	**14**	**14**	93,33

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG

A. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana p

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	November			Desember		
			Rekomendasi*	TL**		Rekomendasi*	TL**	
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	11	11		2	2	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	5	5		1	1	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	13	13		5	5	
		Pangan	11	11		3	3	
		Total	40	40	100,00	11	11	100,00
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	1	1		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0	
		Pangan	0	0		1	1	
		Total	1	1	83,33	1	1	85,71
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0	
		Pangan	0	0		0	0	
		Total	0	0	100,00	0	0	100,00
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0	
		Pangan	0	0		0	0	
		Total	0	0	0	0	0	0
TOTAL			**41**	**41**	94,44	**12**	**12**	95,24

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG

A. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana p

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Total		RAPK s.d TW I (Jan - Mar)		
			Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	73	73	19	19	100
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	47	47	12	12	100
		Suplemen Kesehatan	1	1	1	1	100
		Kosmetik	71	71	8	8	100
		Pangan	101	101	42	42	100
		Total	293	293	82	82	100,00
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	1	1	0	0	#DIV/0!
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	3	2	0	0	#DIV/0!
		Pangan	3	3	1	1	100
		Total	7	6	1	1	100,00
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	1	1	1	1	100
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	0	0	0	0	#DIV/0!
		Pangan	0	0	0	0	#DIV/0!
		Total	1	1	1	1	100,00
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0	0	0	#DIV/0!
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	0	0	0	0	#DIV/0!
		Pangan	0	0	0	0	#DIV/0!
		Total	0	0	0	0	0
TOTAL			**301**	**300**			100,00

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG

A. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana p

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	RAPK s.d TW II (Jan - Juni)			RAPK s.d TW III (Jan - Sept)		
			TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	30	30	100	57	57	100
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	28	28	100	40	40	100
		Suplemen Kesehatan	1	1	100	1	1	100
		Kosmetik	33	33	100	46	46	100
		Pangan	69	69	100	84	84	100
		Total	161	161	100,00	228	228	100,00
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	0	0	#DIV/0!	2	3	66,66666667
		Pangan	2	2	100	2	2	100
		Total	2	2	100,00	4	5	80,00
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	1	1	100	1	1	100
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Pangan	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Total	1	1	100,00	1	1	100,00
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Pangan	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Total	0	0	0	0	0	0
TOTAL					100,00			93,33

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG

A. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana p

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
			TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	73	73	100
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	47	47	100
		Suplemen Kesehatan	1	1	100
		Kosmetik	71	71	100
		Pangan	101	101	100
		Total	293	293	100,00
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	1	1	100
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	2	3	66,66666667
		Pangan	3	3	100
		Total	6	7	85,71
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	1	1	100
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	0	0	#DIV/0!
		Pangan	0	0	#DIV/0!
		Total	1	1	100,00
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0	#DIV/0!
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	0	0	#DIV/0!
		Pangan	0	0	#DIV/0!
		Total	0	0	0
TOTAL					95,24

IKU 11

keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH BALAI BESAR POM DI MAKASSAR

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Januari		Februari		Maret	
			Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	2	0	7	7	10	6
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	1	0	0	0	12	12
		Suplemen Kesehatan	0	0	1	1	0	0
		Kosmetik	0	0	3	3	5	5
		Pangan	3	0	6	4	31	26
		Total	6	0	17	15	58	49
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	0	0	0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0
		Pangan	0	0	1	0	1	0
		Total	0	0	1	0	1	0
TOTAL			**6**	**0**	**18**	**15**	**59**	**49**

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YAN

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil insp

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	April		Mei		Juni	
			Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	3	3	3	2	3	2
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	3	2	0	0	4	4
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	4	4	12	12	9	9
		Pangan	17	15	8	6	2	2
		Total	27	24	23	20	18	17
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	0	0	0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0
		Pangan	0	0	1	1	0	0
		Total	0	0	1	1	0	0
TOTAL			**27**	**24**	**24**	**21**	**18**	**17**

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YAN

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil insp

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Agustus		September		Oktober
			Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	8	7	8	6	2
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	3	3	5	5	1
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0
		Kosmetik	5	5	4	4	7
		Pangan	4	3	2	2	3
		Total	20	18	19	17	13
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	5	2	4	0	1
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0	0
		Pangan	0	0	1	0	1
		Total	5	2	5	0	2
TOTAL			**25**	**20**	**24**	**17**	**15**

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YAN

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil insp

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi		November		Desember	
			TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	2	9	6	2	2
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	1	5	5	1	1
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0
		Kosmetik	7	13	13	5	5
		Pangan	3	11	11	3	3
		Total	13	38	35	11	11
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	1	0	0	0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0	0
		Pangan	0	4	2	0	0
		Total	1	4	2	0	0
TOTAL			**14**	**42**	**37**	**11**	**11**

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YAN

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil insp

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Total		RAPK s.d TW I (Jan - Mar)		
			Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	68	52	13	19	68,4210526
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	39	37	12	13	92,3076923
		Suplemen Kesehatan	1	1	1	1	100
		Kosmetik	71	71	8	8	100
		Pangan	97	81	30	40	75
		Total	276	242	64	81	79,01
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	13	3	0	0	#DIV/0!
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	0	0	0	0	#DIV/0!
		Pangan	11	4	0	2	0
		Total	24	7	0	2	0,00
TOTAL			**300**	**249**			39,51

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YAN

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil insp

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	RAPK s.d TW II (Jan - Juni)			RAPK s.d TW III (Jan - Sept)		
			TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	20	28	71,428571	42	55	76,363636
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	18	20	90	30	32	93,75
		Suplemen Kesehatan	1	1	100	1	1	100
		Kosmetik	33	33	100	46	46	100
		Pangan	53	67	79,104478	64	80	80
		Total	125	149	83,89	183	214	85,51
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	#DIV/0!	2	12	16,666667
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Pangan	1	3	33,333333	2	6	33,333333
		Total	1	3	33,33	4	18	22,22
TOTAL					58,61			53,87

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YAN

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil insp

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
			TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	52	68	76,470588
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	37	39	94,871795
		Suplemen Kesehatan	1	1	100
		Kosmetik	71	71	100
		Pangan	81	97	83,505155
		Total	242	276	87,68
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	3	13	23,076923
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	0	0	#DIV/0!
		Pangan	4	11	36,363636
		Total	7	24	29,17
TOTAL					58,42

IKU 12

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

SERTIFIKASI OBAT DAN MAKANAN

Balai Besar POM di Makassar

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	Januari			Februari			Maret			April			Mei		
			Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	2	2	2	3	3	3	2	2	2	6	6	5	9	9	9
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	19	12	12	14	14	14	16	21	21	13	10	9	10	15	15
	Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produks OT		0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
	Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk Kosmetik		4	2	2	3	3	3	2	3	3	2	0	0	1	3	3
	Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang		1	0	0	1	0	0	0	1	1	4	4	3	0	0	0
	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui e-sertifikasi.pom.go.id kepada untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang		7	3	3	2	6	6	4	4	4	2	2	2	2	3	3
	Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) terhadap Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila sarana tidak memenuhi ketentuan)		3	3	3	3	2	2	6	6	6	3	3	3	5	5	5
	Hasil pemeriksaan audit survelan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikasi pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	Januari			Februari			Maret			April			Mei		
			Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
	Hasil pemeriksaan PBF dan Evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB		4	3	3	4	3	3	3	6	6	1	1	1	1	1	1
	Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik / obat tradisional / suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	2
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	3	3	3	13	3	3	11	21	21	9	0	0	18	12	12
Total			25	18	18	30	20	20	29	44	44	29	17	14	37	36	36

SERTIFIKASI OBAT DAN MAKANAN

Balai Besar POM di Makassar

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	Juni			Juli			Agustus			September		
			Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	1	1	0	6	6	2	1	1	1	1	1	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	13	13	12	12	12	9	5	5	5	13	13	13
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	11	6	6	26	27	27	19	14	14	9	12	12
	Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produks OT		1	1	1	4	1	1	3	1	1	0	1	1
	Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk Kosmetik		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang		0	0	0	5	2	2	1	0	0	1	4	4
	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui e-sertifikasi.pom.go.id kepada untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang		8	3	3	12	18	18	5	5	5	2	2	2
	Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) terhadap Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila sarana tidak memenuhi ketentuan)		2	2	2	2	3	3	5	5	5	2	2	2
	Hasil pemeriksaan audit survelan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikasi pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	Juni			Juli			Agustus			September		
			Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
	Hasil pemeriksaan PBF dan Evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB		0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	2	2
	Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik / obat tradisional / suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	68	33	33	34	83	83	41	42	42	31	31	31
Total			93	53	51	78	128	121	66	62	62	54	57	56

SERTIFIKASI OBAT DAN MAKANAN

Balai Besar POM di Makassar

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	Oktober			November			Desember			Total		
			Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	1	1	0	1	1	1				13	13	5
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	12	12	12	11	11	11	3	3	3	91	91	86
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	17	18	18	22	22	22	28	31	31	204	202	201
	Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produks OT		2	1	1	0	1	1	0	1	1			
	Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk Kosmetik		1	2	2	1	0	0	1	2	2			
	Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang		1	1	1	2	1	1	0	1	1			
	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui e-sertifikasi.pom.go.id kepada untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang		5	6	6	6	6	6	11	12	12			
	Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) terhadap Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila sarana tidak memenuhi ketentuan)		5	5	5	13	13	13	12	12	12			
	Hasil pemeriksaan audit survelan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikasi pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran.		0	0	0	0	0	0	2	2	2			

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	Oktober			November			Desember			Total		
			Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
	Hasil pemeriksaan PBF dan Evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB		2	3	3	0	0	0	1	1	1			
	Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik / obat tradisional / suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik		1	0	0	0	1	1	1	0	0			
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	58	58	58	26	26	26	1	1	1	313	313	313
Total			88	89	88	60	60	60	32	35	35	621	619	605

SERTIFIKASI OBAT DAN MAKANAN

Balai Besar POM di Makassar

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	RAPK s.d TW I (Jan - Mar)			RAPK s.d TW II (Jan - Juni)			RAPK s.d TW III (Jan - Sept)			RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
			Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	1	1	100,00	1	3	33,33	4	11	36,36	5	13	38,46
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	7	7	100,00	33	35	94,29	60	65	92,31	86	91	94,51
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	47	49	95,92	77	83	92,77	130	137	94,89	201	204	98,53
	Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produks OT													
	Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk													
	Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk Kosmetik													
	Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang													
	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui e-sertifikasi.pom.go.id kepada untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang													
	Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) terhadap Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila sarana tidak memenuhi ketentuan)													
	Hasil pemeriksaan audit survelan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikasi pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran.													

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	RAPK s.d TW I (Jan - Mar)			RAPK s.d TW II (Jan - Juni)			RAPK s.d TW III (Jan - Sept)			RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
			Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)
	Hasil pemeriksaan PBF dan Evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB													
	Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik / obat tradisional / suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK													
	Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik													
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	27	27	100,00	72	122	59,02	228	228	100,00	313	313	100,00
Total			82	84	97,62	183	243	75,31	422	441	95,69	605	621	97,42

IKU 13

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN

Balai Besar POM di Makassar

			kunci			kunci		
No	**Sarana Produksi**	**Jumlah Sarana yang ada**	**Target sarana yang diperiks**	**Januari**			**Februari**		
				Jumlah sarana yang diperiksa	**MK**	**TMK**	**Jumlah sarana yang diperiksa**	**MK**	**TMK**
1	Industri Farmasi (IF)		1	0			0		
2	Industri Bahan Baku Obat			0			0		
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)			0			0		
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	1	14	1	0	1	0		
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) (Target gabung dengan IOT)			0			0		
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)			0			0		
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			0			0		
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Target SK)		1	0			0		
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi (Target gabung dengan IOT)			0			0		
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Masuk target SK)			0			0		
11	Industri Kosmetik	11	8	1	1	0	0		
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik (Masuk dalam target Industri Kosmetika)			0			0		
13	Industri Pangan	251	164	8	5	3	11	6	5
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)			0			1	0	1
	Makassar	263	188	10	6	4	12	6	6

IERIKSAAN SARANA PRODUKSI OB
ai Besar POM di Makassar

	kunci			kunci			kunci	
Sarana Produksi	**Maret**			**April**			**Mei**	
	Jumlah sarana yang diperiksa	**MK**	**TMK**	**Jumlah sarana yang diperiksa**	**MK**	**TMK**	**Jumlah sarana yang diperiksa**	**MK**
Industri Farmasi (IF)	0			0			0	
Industri Bahan Baku Obat	0			0			0	
Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	0			0			0	
Industri Obat Tradisional (IOT)	1	1	0	2	1	1	0	
Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) (Target gabung dengan IOT)	0			0			0	
Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	0			0			0	
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0			0			0	
Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Target SK)	0			0			0	
Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi (Target gabung dengan IOT)	0			0			0	
Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Masuk target SK)	0			0			0	
Industri Kosmetik	0			1	1	0	0	
Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik (Masuk dalam target Industri Kosmetika)	0			0			0	
Industri Pangan	15	9	6	13	7	6	22	17
Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	2	1	1	1	1	0	7	6
Makassar	18	11	7	17	10	7	29	23

IERIKSAAN SARANA PRODUKSI OB
ai Besar POM di Makassar

		kunci			kunci			kunci
Sarana Produksi		Juni			Juli			Agu
	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa
Industri Farmasi (IF)		0			0			0
Industri Bahan Baku Obat		0			0			0
Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)		0			0			0
Industri Obat Tradisional (IOT)		1	1	0	1	1	0	3
Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) (Target gabung dengan IOT)		0			0			0
Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		0			0			0
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		0			0			0
Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Target SK)		0			0			0
Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi (Target gabung dengan IOT)		0			0			0
Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Masuk target SK)		0			0			0
Industri Kosmetik		1	1	0	0			1
Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik (Masuk dalam target Industri Kosmetika)		0			0			0
Industri Pangan	5	11	10	1	18	12	6	11
Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	1	0			4	2	2	2
Makassar	6	13	12	1	23	15	8	17

IERIKSAAN SARANA PRODUKSI OB
ai Besar POM di Makassar

kunci kunci

Sarana Produksi	stus		September			Oktober		
	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
Industri Farmasi (IF)			0			0		
Industri Bahan Baku Obat			0			0		
Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)			0			0		
Industri Obat Tradisional (IOT)	3	0	0			2	2	0
Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) (Target gabung dengan IOT)			0			0		
Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)			0			0		
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			0			0		
Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Target SK)			0			1	1	0
Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi (Target gabung dengan IOT)			0			0		
Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Masuk target SK)			0			0		
Industri Kosmetik	1	0	0			3	3	0
Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik (Masuk dalam target Industri Kosmetika)			0			0		
Industri Pangan	8	3	8	8	0	9	7	2
Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	0	2	6	4	2	4	3	1
Makassar	12	5	14	12	2	19	16	3

IERIKSAAN SARANA PRODUKSI OB
ai Besar POM di Makassar

kunci kunci

Sarana Produksi	November			Desember		
	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
Industri Farmasi (IF)	0			0		
Industri Bahan Baku Obat	0			0		
Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	0			0		
Industri Obat Tradisional (IOT)	0			1	1	0
Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) (Target gabung dengan IOT)	0			0		
Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	0			0		
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0			0		
Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Target SK)	0			0		
Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi (Target gabung dengan IOT)	0			0		
Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Masuk target SK)	0			0		
Industri Kosmetik	1	1	0	1	1	0
Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik (Masuk dalam target Industri Kosmetika)	0			0		
Industri Pangan	5	4	1	0		
Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	5	1	4	2	2	0
Makassar	11	6	5	4	4	0

IKU 14

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN
Balai Besar POM di Makassar

No	Sarana Distribusi	Januari			Februari			Maret			April		
		Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	3	2	1	1	1	0	0	**0**	**0**	1	**1**	**0**
2	Apotek	1	1	0	4	**0**	**4**	9	**2**	**7**	0	**0**	**0**
3	Toko Obat	0			0			1	**1**	**0**	3	**1**	**2**
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	0			3	**3**	**0**	1	**1**	**0**	0	**0**	**0**
5	Rumah Sakit (RS)	1	1	0	6	**5**	**1**	7	**7**	**0**	2	**2**	**0**
6	Puskemas	2	2	0	8	**8**	**0**	8	**8**	**0**	3	**3**	**0**
7	Klinik	2	**1**	**1**	9	**6**	**3**	9	**6**	**3**	4	**3**	**1**
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0			0			0			0		
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0			0			0			0		
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	4	4	0	7	7	0	15	3	12	8	6	2
11	Fasilitas Distribusi suplemen kesehatan	4	4	0	3	2	1	0			5	5	0
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	8	8	0	18	15	3	22	17	5	7	3	4
13	Klinik Kecantikan (Penotifikasi dan Importir)	0			0			0			0		
14	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	0	0	0	4	4	0	59	34	25	48	37	11

PEMERIKSAAN SARANA DIST
Balai Besar POM di Makas

No	Sarana Distribusi	Mei			Juni			Juli			Agustus		
		Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	4	**4**	**0**	2	**1**	**1**	1	**1**	**0**	4	**4**	**0**
2	Apotek	13	**10**	**3**	6	**6**	**0**	15	**9**	**6**	11	**10**	**1**
3	Toko Obat	6	**5**	**1**	0	**0**	**0**	6	**1**	**5**	5	**1**	**4**
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	4	**4**	**0**	1	**1**	**0**	1	**1**	**0**	0	**0**	**0**
5	Rumah Sakit (RS)	12	**12**	**0**	3	**3**	**0**	10	**10**	**0**	6	**6**	**0**
6	Puskemas	12	**12**	**0**	9	**9**	**0**	10	**10**	**0**	16	**16**	**0**
7	Klinik	15	**14**	**1**	5	**3**	**2**	6	**6**	**0**	12	**9**	**3**
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0			0			0			0		
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0			0			0			0		
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	24	15	9	9	5	4	18	13	5	23	20	3
11	Fasilitas Distribusi suplemen kesehatan	5	5	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	24	12	12	17	8	9	19	15	4	11	6	5
13	Klinik Kecantikan (Penotifikasi dan Importir)	0			0			0			5	4	1
14	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	14	11	3	5	4	1	10	9	1	0		

PEMERIKSAAN SARANA DIST
Balai Besar POM di Makas

No	Sarana Distribusi	September			Oktober			November			Desember		
		Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	2	**1**	**1**	1	**1**	**0**	6	**4**	**2**	4	**4**	**0**
2	Apotek	12	**9**	**3**	4	**4**	**0**	15	**11**	**4**	8	**7**	**1**
3	Toko Obat	6	**4**	**2**	4	**3**	**1**	4	**1**	**3**	7	**7**	**0**
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	1	**1**	**0**	0	**0**	**0**	6	**5**	**1**	1	**1**	**0**
5	Rumah Sakit (RS)	3	**3**	**0**	19	**18**	**1**	19	**18**	**1**	7	**7**	**0**
6	Puskemas	8	**8**	**0**	6	**6**	**0**	1	**1**	**0**	0	**0**	**0**
7	Klinik	7	**5**	**2**	20	**19**	**1**	6	**6**	**0**	2	**1**	**1**
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0			0			0			0		
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0			0			0			0		
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	13	8	5	10	9	1	35	30	5	2	1	1
11	Fasilitas Distribusi suplemen kesehatan	0	0	0	1	1	0	24	24	0	2	2	0
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	10	6	4	19	12	7	59	46	13	10	5	5
13	Klinik Kecantikan (Penotifikasi dan Importir)	0			0			0			26	23	3
14	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	5	3	2	14	14	0	40	34	6	0		

PEMERIKSAAN SARANA DIST
Balai Besar POM di Makas

No	Sarana Distribusi	Total			RAPK s.d. TW 1 (Jan - Mar)				RAPK s.d. TW 2 (Jan - Juni)			
		Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	29	24	5	4	3	1		11	9	2	
2	Apotek	98	69	29	14	3	11		33	19	14	
3	Toko Obat	42	24	18	1	1	0		10	7	3	
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	18	17	1	4	4	0		9	9	0	
5	Rumah Sakit (RS)	95	92	3	14	13	1		31	30	1	
6	Puskemas	83	83	0	18	18	0		42	42	0	
7	Klinik	97	79	18	20	13	7		44	33	11	
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	168	121	47	26	14	12		67	40	27	
11	Fasilitas Distribusi suplemen kesehatan	47	46	1	7	6	1		17	16	1	
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	224	153	71	48	40	8		96	63	33	
13	Klinik Kecantikan (Penotifikasi dan Importir)	31	27	4	0	0	0		0	0	0	
14	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	199	150	49	63	38	25		130	90	40	

PEMERIKSAAN SARANA DIST
Balai Besar POM di Makas

No	Sarana Distribusi	RAPK s.d. TW 3 (Jan - Sept)				RAPK s.d. TW 4 (Jan - Des)			
		Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	18	15	3	83,33	29	24	5	
2	Apotek	71	47	24	66,20	98	69	29	
3	Toko Obat	27	13	14	48,15	42	24	18	
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	11	11	0	100,00	18	17	1	
5	Rumah Sakit (RS)	50	49	1	98,00	95	92	3	
6	Puskemas	76	76	0	100,00	83	83	0	
7	Klinik	69	53	16	76,81	97	79	18	
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	121	81	40	66,94	168	121	47	
11	Fasilitas Distribusi suplemen kesehatan	20	19	1	95,00	47	46	1	
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	136	90	46	66,18	224	153	71	
13	Klinik Kecantikan (Penotifikasi dan Importir)	5	4	1	80,00	31	27	4	
14	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	145	102	43	70,34	199	150	49	

IKU 15

Indeks Pelayanan Publik

15. Indeks Pelayanan Publik

INDEKS PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR/BALAI POM TAHUN 2023

BADAN POM

No	Unit Pelayanan Publik	IPP 2022	Target IPP 2023	IPP 2023	Keterangan
18	Balai POM di Jambi	4.17	4.25	**4.67**	Pelayanan Prima
19	Balai POM di Mamuju	4.54	4.40	**4.64**	Pelayanan Prima
20	Balai POM di Sofifi	4.12	4.25	**4.64**	Pelayanan Prima
21	Balai Besar POM di Pontianak	4.27	4.25	**4.64**	Pelayanan Prima
22	Balai Besar POM di Manado	4.10	4.25	**4.62**	Pelayanan Prima
23	Balai Besar POM di Semarang	4.65	4.40	**4.62**	Pelayanan Prima
24	Balai Besar POM di Makassar	4.56	4.40	**4.61**	Pelayanan Prima
25	Balai Besar POM di Palangka Raya	4.58	4.40	**4.59**	Pelayanan Prima
26	Balai Besar POM di Banjarmasin	4.49	4.25	**4.54**	Pelayanan Prima
27	Balai Besar POM di Samarinda	4.33	4.25	**4.54**	Pelayanan Prima
28	Balai POM di Kendari	4.69	4.40	**4.52**	Pelayanan Prima
29	Balai POM di Palu	4.39	4.25	**4.50**	Sangat Baik
30	Balai POM di Ambon	4.38	4.25	**4.42**	Sangat Baik
31	Balai Besar POM di Pekanbaru	4.11	4.25	**4.41**	Sangat Baik
32	Balai Besar POM di Banda Aceh*	4.56	4.40	**4.37**	Sangat Baik
33	Balai POM di Tarakan	3.94	3.75	**4.24**	Sangat Baik
34	Balai Besar POM di Bandung*	4.67	4.40	**4.14**	Sangat Baik

*Nilai IPP belum mencapai target

IKU 16

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Progres Pendampingan UMKM

Balai Besar POM di Makassar

Komoditi	No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Pangan	1	Seleksi UMKM Pangan	Januari-Februari	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	2	Bimtek CPPOB	Maret	20	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20
	3	Fasilitasi pendampingan	Februari - Desember	40	0	0	5	23,81	33,33	20,95	26,67	28,57	32,38	34,29	36,19	40,00
	4	PSB	Maret- Desember	20	0	0	0	0	0	0	5,71	6,67	6,67	7,62	7,62	7,62
	5	Monev	Desember	10	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10
					0,00	10,00	15,00	33,81	73,33	60,95	72,38	75,24	79,05	81,90	83,81	87,62
OT	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	Januari-Februari	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	Maret	20	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20	20
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB (Pendampingan)	Februari - Desember	40	0	0	5	5	5	0	0	20	40	40	40	40
	4	Sertifikasi	Maret - Desember	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
	5	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	April, Juli, Oktober, Desember	10	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10
					10,00	10,00	15,00	15,00	25,00	40,00	40,00	60,00	80,00	80,00	100,00	100,00
Kos	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	Januari-Februari	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	Februari - Desember	40	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40
	3	Pelaksanaan pendampingan	Februari - Desember	40	0	0	0	0,00	0	0	20	40	40	40	40	40
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Roren	November	10	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10
		Total			10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	60,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		%Progress			6,67	10,00	13,33	19,60	39,44	53,65	64,13	78,41	86,35	87,30	94,60	95,87

Komoditi	Kegiatan	Target Sampling	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Pangan	Pengambilan Sampel UMKM	21												21	21
OT	Pengambilan Sampel UMKM	2												2	2
Kos	Pengambilan Sampel UMKM	2												2	2
JUMLAH			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25

IKU 17

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

	Target	Ragam Kegiatan	Pemahaman	Manfaat	Minat	INDEKS EFF KIE	Capaian Target	Jumlah Responden
REGIONAL KALIMANTAN		94,34	96,52	95,79	91,12	95,05		2138
Balai Besar POM Banjarmasin	93,6	94,3	99,81	96,48	87,59	95,68	102.22 %	135
Balai Besar POM Palangkaraya	95,7	95,36	96,53	96,21	93,32	95,72	100.02 %	277
Balai Besar POM Pontianak	93,8	93,93	94,58	95,39	91,92	94,42	100.66 %	1107
Balai Besar POM Samarinda	96,5	96,34	98,56	96,97	96,82	97,33	100.86 %	165
Balai POM Tarakan	92,3	91,77	93,14	93,89	85,96	92,11	99.79 %	454
REGIONAL SULAM PAPUA		95,70	97,59	96,41	92,73	96,04		3174
Balai Besar POM Jayapura	94,1	96,18	98,43	94,41	90,21	94,99	100.95 %	143
Balai Besar POM Makassar	94	93,9	97,35	94,78	91,41	94,84	100.89 %	230
Balai Besar POM Manado	95,7	97,12	98,19	97,78	96,05	97,53	101.91 %	462
Balai POM Ambon	96,8	96,53	96,97	97,56	94,79	96,82	100.02 %	614
Balai POM Gorontalo	98,5	97,79	99,35	99,41	97,46	98,9	100.41 %	128
Balai POM Kendari	96,3	97,46	98,44	99,51	97,44	98,65	102.44 %	205
Balai POM Mamuju	93,1	94,59	92,9	94,1	91,03	93,29	100.20 %	390
Balai POM Manokwari	92,1	91,76	100	94,06	88,91	94,62	102.74 %	345
Balai POM Palu	94,5	94,31	95,66	96,07	92,14	95,11	100.65 %	496
Balai POM Sofifi	96,2	97,38	98,65	96,43	87,89	95,69	99.47 %	161

IKU 18

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s.d Tahun N				
						Januari	s,d Februari	s.d Maret	s.d April
1	Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00	Jan - April			0,00	10,00	20,00	20,00
2	Sosialisasi keamanan pangan	10,00	Maret - April			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bimbingan teknis keamanan pangan	15,00	April - Juni			0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pemberian Paket Edukasi/Produk	10,00	April - Nov			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Monitoring Pemberdayaan Kader	15,00	Juli - Sept			0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah								
	- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah			28,00	98,00				
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20,00	Agustus - Nov			0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pengawalan	10,00	Okt - Des			0,00	0,00	0,00	0,00
	Total skor (Tahun N)	**100,00**		**28,00**	**98,00**	**0,00**	**10,00**	**20,00**	**20,00**

Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Se

Kegiatan		Progres (Capaian DJA)						
		s.d Mei	s.d Juni	s.d Juli	s.d Agustus	s.d September	s.d Oktober	s.d November
1	Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Sosialisasi keamanan pangan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Bimbingan teknis keamanan pangan	7,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Pemberian Paket Edukasi/Produk	2,67	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5	Monitoring Pemberdayaan Kader	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah							
	- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah							
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
7	Pengawalan	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	10,00	10,00
	Total skor (Tahun N)	**40,17**	**55,00**	**55,00**	**75,00**	**80,00**	**100,00**	**100,00**

Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Se

Kegiatan		s.d Desember	Realisasi Jumlah Sekolah Tahun N : 1. Capaian RAPK akhir tahun 2. Capaian RO pada SMART DJA dan Bappenas akhir tahun
1	Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00	98
2	Sosialisasi keamanan pangan	10,00	
3	Bimbingan teknis keamanan pangan	15,00	
4	Pemberian Paket Edukasi/Produk	10,00	
5	Monitoring Pemberdayaan Kader	15,00	
	- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah		
	- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah		
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20,00	
7	Pengawalan	10,00	
	Total skor (Tahun N)	**100,00**	**98**

IKU 19

Jumlah desa pangan aman

Desa Pangan Aman

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s.d Tahun N
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20,00	Januari-April	6	25
2	Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5,00	TW1-TW2		
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00	April-Juli		
4	Bimtek Komunitas	15,00	Mei-Oktober		
5	Fasilitas Keamanan Pangan	10,00	Juni-November		
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00	· Pre: Mei-Oktober - Post November		
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10,00	November-Desember		
8	Lomba Desa Pangan Aman	5,00	Desember		
9	Pengawalan	10,00	Juni-Desember		
	Total	**100,00**		**6,00**	**25,00**

Desa Pangan Aman

	Kegiatan	Progres (Capaian						
		Januari	s.d Februari	sd Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni	s.d Juli
1	Advokasi Kelembagaan Desa	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Pengadaan gimmick, rapid test, dll	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	15,00	15,00
4	Bimtek Komunitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
5	Fasilitas Keamanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Lomba Desa Pangan Aman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pengawalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**10,00**	**20,00**	**20,00**	**32,50**	**40,00**	**63,34**

Desa Pangan Aman

	Kegiatan	DJA) (%)				
		s.d Agustus	s.d September	s.d Oktober	s.d November	s.d Desember
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Bimtek Komunitas	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5	Fasilitas Keamanan Pangan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
8	Lomba Desa Pangan Aman	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
9	Pengawalan	5,71	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total	**80,71**	**85,00**	**85,00**	**95,00**	**100,00**

Desa Pangan Aman

	Kegiatan	Realisasi Jumlah Desa Tahun N : 1. Capaian RAPK akhir tahun 2. Capaian RO pada SMART DJA dan Bappenas akhir tahun
1	Advokasi Kelembagaan Desa	25
2	Pengadaan gimmick, rapid test, dll	
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	
4	Bimtek Komunitas	
5	Fasilitas Keamanan Pangan	
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	
8	Lomba Desa Pangan Aman	
9	Pengawalan	
	Total	**25,00**

IKU 20

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

No	UPT		Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s.d Tahun N			
								Januari	s.d Februari	sd Maret
20	Makassar	1	Advokasi	20,00	Januari-April	4	18	0,00	10,00	20,00
		2	Survei Pasar	5,00	Januari-April			0,00	2,50	5,00
		3	Bimtek Pengelola Pasar	15,00	April-Mei			0,00	0,00	0,00
		4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15,00	April-Mei			0,00	0,00	0,00
		5	Penyuluhan	10,00	Juni-Juli			0,00	0,00	0,00
		6	Kampanye	10,00	Juni-Juli			0,00	0,00	0,00
		7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15,00	September- Oktobe			0,00	0,00	0,00
		8	Pengawalan	10,00	Februari-Oktober			0,00	0,00	0,00
			Total	**100,00**		**4,00**	**18,00**	**0,00**	**12,50**	**25,00**

han Berbahaya

Kegiatan		Progres (Capaian DJA)								
		s.d April	s.d Mei	s.d Juni	s.d Juli	s.d Agustus	s.d September	s.d Oktober	s.d November	s.d Desember
1	Advokasi	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Survei Pasar	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Bimtek Pengelola Pasar	0,00	7,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	5,00	11,67	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5	Penyuluhan	0,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Kampanye	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
8	Pengawalan	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total	**30,00**	**49,17**	**65,00**	**75,00**	**81,00**	**85,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

han Berbahaya

Kegiatan		Realisasi Jumlah Pasar Tahun N : 1. Capaian RAPK akhir tahun 2. Capaian RO pada SMART DJA dan Bappenas akhir
1	Advokasi	18
2	Survei Pasar	
3	Bimtek Pengelola Pasar	
4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	
5	Penyuluhan	
6	Kampanye	
7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	
8	Pengawalan	
	Total	**18,00**

IKU 21

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

No	Bulan	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
1	Januari	1580	61	**Benar**	1580	11	**Benar**	2,28
2	Pebruari	1580	216	**Benar**	1580	82	**Benar**	9,43
3	Maret	1580	351	**Benar**	1580	225	**Benar**	18,23
4	April	1580	525	**Benar**	1580	382	**Benar**	28,70
5	Mei	1580	701	**Benar**	1580	575	**Benar**	40,38
6	Juni	1580	884	**Benar**	1580	811	**Benar**	53,64
7	Juli	1580	1.058	**Benar**	1580	1.032	**Benar**	66,14
8	Agustus	1580	1.224	**Benar**	1580	1.247	**Benar**	78,20
9	September	1580	1.383	**Benar**	1580	1.461	**Benar**	90,00
10	Oktober	1580	1.546	**Benar**	1927	1.728	**Benar**	93,76
11	November	1580	1.592	**Salah**	2.121	1.982	**Benar**	97,10
12	Desember	1.607	1.607	**Benar**	2.121	2.121	**Benar**	100,00

IKU 22

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

No	Bulan	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
1	Januari	835	74	**Benar**	835	3	**Benar**	4,61
2	Pebruari	835	175	**Benar**	835	54	**Benar**	13,71
3	Maret	835	224	**Benar**	835	207	**Benar**	25,81
4	April	835	268	**Benar**	835	222	**Benar**	29,34
5	Mei	835	402	**Benar**	835	356	**Benar**	45,39
6	Juni	835	508	**Benar**	835	531	**Benar**	62,22
7	Juli	835	538	**Benar**	835	681	**Benar**	72,99
8	Agustus	835	638	**Benar**	835	825	**Benar**	87,60
9	September	835	726	**Benar**	940	917	**Benar**	92,25
10	Oktober	835	763	**Benar**	940	940	**Benar**	95,69
11	Nopember	835	781	**Benar**	1042	1.018	**Benar**	95,61
12	Desember	835	826	**Benar**	1042	1.040	**Benar**	99,37

IKU 23

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
Balai Besar POM di Makassar

Keterangan Warna :

: diisi angka sesuai realisasi

TIDAK PERLU DIISI

CAPAIAN RAPK BALAI DAN LOKA (TIDAK PERLU DIISI)

UPT		Tahapan	Januari										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10	4	2		1,00		0,15	15,00%	43,00%	42,86%	18,43%
		Tahap I					0,00	0,67	0,4	16,00%			
		P21				4	0,00	0,67	0,3	12,00%			
		Tahap II					0,00	0,00	0,15	0,00%			
		Total	10	4	2	4							

UPT		Tahapan	Juli										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10	4	0		1,00		0,15	15,00%	83,21%	71,43%	59,44%
		Tahap I			2	0	1,00	0,40	0,4	40,00%			
		P21			1	4	0,67	0,40	0,3	22,86%			
		Tahap II			3	0	0,50	0,00	0,15	5,36%			
		Total	10	4	6	4							

Persentase keberhasilan p
Balai Besar POM di Ma

Keterangan Warna :

UPT		Tahapan	Pebruari										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10	4	1		1,00		0,15	15,00%	55,00%	42,86%	23,57%
		Tahap I			1		0,50	0,67	0,4	28,00%			
		P21				4	0,00	0,67	0,3	12,00%			
		Tahap II					0,00	0,00	0,15	0,00%			
		Total	10	4	2	4							

UPT		Tahapan	Agustus										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10	4	0		1,00		0,15	15,00%	88,57%	71,43%	63,27%
		Tahap I			1	0	1,00	0,40	0,4	40,00%			
		P21			1	4	0,83	0,40	0,3	26,43%			
		Tahap II			4	0	0,67	0,00	0,15	7,14%			
		Total	10	4	6	4							

Persentase keberhasilan p
Balai Besar POM di Ma

Keterangan Warna :

UPT		Tahapan	Maret										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10	4	2		1,00		0,15	15,00%	48,94%	50,00%	24,47%
		Tahap I			1		0,33	0,57	0,4	23,03%			
		P21				4	0,00	0,57	0,3	10,91%			
		Tahap II					0,00	0,00	0,15	0,00%			
		Total	10	4	3	4							

UPT		Tahapan	September										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10	4	0		1,00		0,15	15,00%	92,14%	71,43%	65,82%
		Tahap I			0	0	1,00	0,40	0,4	40,00%			
		P21			2	4	1,00	0,40	0,3	30,00%			
		Tahap II			4	0	0,67	0,00	0,15	7,14%			
		Total	10	4	6	4							

Persentase keberhasilan p
Balai Besar POM di Ma

Keterangan Warna :

UPT		Tahapan	April											
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10				1,00		0,15	15,00%	65,00%	61,54%	40,00%
		Tahap I			4		1,00	0,50	0,4	40,00%			
		P21				4	0,00	0,50	0,3	10,00%			
		Tahap II					0,00	0,00	0,15	0,00%			
		Total	10	3	4	4							

UPT		Tahapan	Oktober											
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP			0		1,00		0,15	15,00%	86,41%	80,00%	69,13%
		Tahap I			2		1,00	0,33	0,4	40,00%			
		P21			1	4	0,75	0,33	0,3	24,38%			
		Tahap II			5		0,63	0,00	0,15	7,03%			
		Total	11	4	8	4							

Persentase keberhasilan p
Balai Besar POM di Ma

Keterangan Warna :

UPT		Tahapan	Mei										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10	4	0		1,00		0,15	15,00%	65,00%	57,14%	37,14%
		Tahap I			4	0	1,00	0,50	0,4	40,00%			
		P21			0	4	0,00	0,50	0,3	10,00%			
		Tahap II			0	0	0,00	0,00	0,15	0,00%			
		Total	10	4	4	4							

UPT		Tahapan	Nopember										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10	4	2		1,00		0,15	15,00%	76,44%	100,00%	76,44%
		Tahap I			2		0,80	0,29	0,4	33,78%			
		P21			0	4	0,60	0,29	0,3	20,67%			
		Tahap II			6		0,60	0,00	0,15	7,00%			
		Total	10	4	10	4							

Persentase keberhasilan p
Balai Besar POM di Ma

Keterangan Warna :

UPT		Tahapan	Juni											
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10	4	2		1,00		0,15	15,00%	64,76%	71,43%	46,26%
		Tahap I			1	0	0,67	0,40	0,4	30,48%			
		P21			3	4	0,50	0,40	0,3	19,29%			
		Tahap II			0	0	0,00	0,00	0,15	0,00%			
		Total	10	4	6	4							

UPT		Tahapan	Desember										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10	4	0		1,00		0,15	15,00%	87,33%	100,00%	87,33%
		Tahap I			2	0	1,00	0,29	0,4	40,00%			
		P21			2	4	0,80	0,29	0,3	25,33%			
		Tahap II			6	0	0,60	0,00	0,15	7,00%			
		Total	10	4	10	4							

IKU 24

Indeks RB BBPOM di Makassar

BADAN POM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726
Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

Nomor : B-PI.06.06.7.72.08.23.486 Jakarta, 10 Agustus 2023
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2023

Yth. Kepala Balai Besar POM di Makassar
di Tempat

Berdasarkan
1. PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2023;

Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Balai Besar POM di Makassar.

Tujuan evaluasi dimaksud adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja **yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas** kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Balai Besar POM di Makassar sebesar **90,51** dengan rincian sebagai berikut**:**

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
A.	**Komponen Pengungkit**		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	2,96	3,67	6,63	**MS**
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	3,00	3,00	6,00	**MS**
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,23	3,50	7,73	**MS**
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	5,00	4,64	9,64	**MS**
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	6,69	7,50	14,19	**MS**
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,90	4,59	9,49	**MS**
TOTAL PENGUNGKIT						**53,68**	
B.	**Komponen Hasil**		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			**20,48**	**MS**
		1. Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	17,50			16,73	**MS**
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			3,75	**MS**
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			**16,35**	**MS**
		Nilai Survei Persepsi Kualitas	17,50			16,35	**MS**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PENILAIAN	Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
Pelayanan (SPKP)					
TOTAL HASIL				36,83	
NILAI PMPZI				**90,51**	

Secara ringkas hasil evaluasi dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022 telah mendapatkan predikat WBK.
2. Balai Besar POM di Makassar telah melakukan berbagai upaya dan/atau inovasi yang dilakukan untuk memberikan dampak pada perbaikan pelayanan publik yang prima (Cepat dan mudah), inovasi yang dilakukan antara lain:
   a. Molkika plus : Mobil laboratorium kosmetika keliling plus pangan
   b. Pedang Puang Baso : Pendampingan Pelaku UMKM Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetik
   c. Seppulo : Sistem pelayanan publik online
   d. Parellui : Penyebaran inforamsi melalui infografis
3. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi dan telah melakukan inovasi yaitu SAPPAI (Searching Tahapan Pengujian Sampel Pihak Ketiga): aplikasi SAPPAI merupakan aplikasi terkait data pelanggan, produk, parameter uji, tarif, hasil uji, hingga pengunduhan sertifikat, sistem ini memudahkan pelanggan untuk menelusur (tracking) posisi/status sampel yang diujikan, serta memungkinkan konsumen mengunduh Sertifikat Hasil uji secara mandiri tanpa harus datang ke kantor Balai Besar POM di Makassar.

Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,74 (syarat 3,2) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,82 (syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 3,75 (syarat 2,5) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Pengelolaan media/aktivitas interaktif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder belum dilakukan secara berkala.
2. Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas belum dilakukan secara berkala dan belum ada Rencana Aksi Tindak Lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi.
3. Belum terdapat data dukung yang menunjukkan agen perubahan telah melakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan.
4. Belum terdapat data dukung dokumen perencanaan pengembangan kompetensi setiap pegawai.
5. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi yang menunjukkan telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Belum terdapat data dukung pola mutasi dan assessment kompetensi pegawai sebagai dasar mutasi.
7. Belum menuangkan budaya kerja dan nilai-nilai organisasi BerAKHLAK dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas.

Saran yang dapat kami sampaikan atas beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengelolaan media/aktivitas interaktif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan *stakeholder* secara berkala.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas secara berkala dan menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut, serta menindaklanjuti Rencana Aksi yang telah ditetapkan.
3. Peningkatan peran agen perubahan dalam percepatan perubahan pola pikir untuk mendorong kinerja yang lebih baik.
4. Melakukan perencanaan pengembangan kompetensi pada setiap pegawai.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi dalam upaya perbaikan terhadap kinerja unit kerja.
6. Menggunakan hasil assessment pegawai sebagai dasar pelaksanaan mutasi pegawai.
7. Menuangkan budaya kerja dan nilai-nilai organisasi BerAKHLAK ke dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas.
8. Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan. Inovasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan *stakeholder*, dan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain.
9. Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Demikian laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan Pembangunan ZI pada Balai Besar POM di Makassar. Selanjutnya kami harapkan Balai Besar POM di Makassar dapat melaksanakan Pembangunan ZI secara berkelanjutan. Kami menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan dalam Pembangunan ZI di lingkungan Balai Besar POM di Makassar.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Inspektur Utama,



Dra. Elin Herlina, Apt., M.P

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tembusan:
1. Kepala BPOM
2. Sekretaris Utama
3. Plt. Deputi Bidang Penindakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

IKU 25

Nilai AKIP BBPOM di Makassar

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726
Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

Nomor	:	B-PI.04.7.72.01.24.60	Jakarta, 16 Januari 2024
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	Nilai Per Komponen Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	

Yth.
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis

di Tempat

Sehubungan dengan Surat Plt. Inspektur Utama nomor B-PI.04.7.01.24.05 tanggal 10 Januari 2024 perihal Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan rincian nilai per komponen hasil evaluasi SAKIP Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM Tahun 2023 yang meliputi 5 komponen penilaian yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja Internal dan Capaian Kinerja sebagaimana terlampir.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akan kami sampaikan kemudian untuk selanjutnya Satuan Kerja dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur Utama,

Elin Herlina

Tembusan:
Plt. Kepala BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN
Surat Dinas Inspektur II
Nomor : B-PI.04.7.72.01.24.60
Tanggal : 16 Januari 2024

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Kerja BPOM Tahun 2023

1. Satuan Kerja Eselon I

No	Nama Satker/Unit	Nilai Final Evaluasi 2023	Komponen Evaluasi				
			Perencanaan Kinerja (24)	Pengukuran Kinerja (24)	Pelaporan Kinerja (12)	Evaluasi Internal (20)	Capaian Kinerja (20)
1	Inspektorat Utama	**81,50**	20,88	20,88	10,44	16,80	12,50
2	Sekretariat Utama	**80,73**	19,68	19,68	9,84	16,80	14,73
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	**80,69**	20,16	19,20	10,08	16,80	14,45
4	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	**80,38**	18,96	19,20	11,04	15,00	16,18
5	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	**79,73**	19,44	19,20	9,24	15,20	16,65
6	Deputi Bidang Penindakan	**77,41**	19,68	17,28	8,64	15,40	16,41

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Satuan Kerja Eselon II Mandiri

No	Nama Satker/Unit	Nilai Final Evaluasi 2023	Komponen Evaluasi				
			Perencanaan Kinerja (24)	Pengukuran Kinerja (24)	Pelaporan Kinerja (12)	Evaluasi Internal (20)	Capaian Kinerja (20)
1	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	**77,72**	18,24	18,00	9,24	15,20	17,04
2	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	**84,40**	20,16	18,96	10,08	16,20	19,00
3	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	**80,61**	19,44	18,00	9,84	16,80	16,53
4	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	**83,80**	20,16	19,20	10,08	16,80	17,56

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Balai Besar POM

No	Nama Satker/Unit	Nilai Final Evaluasi 2023	Komponen Evaluasi				
			Perencanaan Kinerja (24)	Pengukuran Kinerja (24)	Pelaporan Kinerja (12)	Evaluasi Internal (20)	Capaian Kinerja (20)
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	**79,48**	20,16	18,00	9,48	16,80	15,04
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	**79,12**	18,96	19,20	9,24	15,80	15,92
3	Balai Besar POM di Bandung	**82,34**	19,68	19,68	9,84	16,20	16,94
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	**79,16**	18,24	19,44	9,24	15,20	17,04
5	Balai Besar POM di Denpasar	**76,42**	18,24	18,00	9,60	16,40	14,18
6	Balai Besar POM di Jakarta	**82,34**	18,96	19,20	10,08	15,80	18,30
7	Balai Besar POM di Jayapura	**78,50**	18,96	18,00	9,48	16,00	16,06
8	Balai Besar POM di Makassar	**81,05**	20,16	19,20	10,08	16,20	15,41
9	Balai Besar POM di Manado	**82,70**	20,88	20,40	10,44	16,40	14,58
10	Balai Besar POM di Mataram	**83,81**	20,88	20,16	10,08	16,80	15,89
11	Balai Besar POM di Medan	**78,87**	18,96	18,24	9,48	16,40	15,79
12	Balai Besar POM di Padang	**80,38**	20,16	18,48	9,48	16,40	15,86
13	Balai Besar POM di Palangkaraya	**82,91**	20,16	20,16	10,20	15,80	16,59
14	Balai Besar POM di Palembang	**79,43**	18,24	19,68	10,44	16,80	14,27
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	**83,44**	19,68	19,68	9,84	16,80	17,44
16	Balai Besar POM di Pontianak	**80,02**	19,68	19,68	10,08	16,80	13,78
17	Balai Besar POM di Samarinda	**81,98**	20,16	19,68	10,44	16,20	15,50
18	Balai Besar POM di	**80,56**	20,64	18,96	9,48	15,80	15,68

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Satker/Unit Semarang	Nilai Final Evaluasi 2023	Komponen Evaluasi				
			Perencanaan Kinerja (24)	Pengukuran Kinerja (24)	Pelaporan Kinerja (12)	Evaluasi Internal (20)	Capaian Kinerja (20)
19	Balai Besar POM di Serang	**80,17**	19,44	19,44	9,48	16,80	15,01
20	Balai Besar POM di Surabaya	**85,20**	24,00	17,76	10,08	16,80	16,56
21	Balai Besar POM di Yogyakarta	**80,47**	19,68	21,60	10,44	16,40	12,35

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Balai POM

No	Nama Satker/Unit	Nilai Final Evaluasi 2023	Komponen Evaluasi				
			Perencanaan Kinerja (24)	Pengukuran Kinerja (24)	Pelaporan Kinerja (12)	Evaluasi Internal (20)	Capaian Kinerja (20)
1	Balai POM di Ambon	**79,07**	19,20	19,20	10,44	15,20	15,03
2	Balai POM di Batam	**80,26**	18,96	19,20	10,20	17,80	14,10
3	Balai POM di Bengkulu	**75,54**	18,00	18,00	9,36	13,40	16,78
4	Balai POM di Gorontalo	**78,99**	19,44	17,28	9,48	16,40	16,39
5	Balai POM di Jambi	**81,51**	20,16	19,20	9,84	16,00	16,31
6	Balai POM di Kendari	**79,80**	20,88	17,28	9,24	15,40	17,00
7	Balai POM di Kupang	**79,35**	20,88	18,00	9,36	15,80	15,31
8	Balai POM di Mamuju	**79,66**	20,88	17,76	10,20	15,80	15,02
9	Balai POM di Manokwari	**80,95**	18,96	19,68	9,84	16,40	16,07
10	Balai POM di Palu	**80,77**	18,96	19,68	10,08	15,80	16,25
11	Balai POM di Pangkalpinang	**80,05**	18,96	19,20	10,08	15,80	16,01
12	Balai POM di Sofifi	**71,74**	20,16	16,80	8,76	15,60	10,42

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Satker/Unit	Nilai Final Evaluasi 2023	Komponen Evaluasi				
			Perencanaan Kinerja (24)	Pengukuran Kinerja (24)	Pelaporan Kinerja (12)	Evaluasi Internal (20)	Capaian Kinerja (20)
13	Balai POM di Tarakan	**77,38**	18,96	17,28	9,84	15,80	15,50
14	Balai POM di Bogor	**77,57**	18,48	18,00	9,24	15,40	16,45
15	Balai POM di Kediri	**75,46**	18,48	18,00	9,24	15,40	14,34
16	Balai POM di Jember	**76,19**	18,48	18,00	9,24	16,40	14,07
17	Balai POM di Surakarta	**71,15**	17,76	17,28	8,64	14,80	12,67
18	Balai POM di Tangerang	**71,79**	17,28	18,48	8,64	14,80	12,59
19	Balai POM di Tasikmalaya	**75,65**	18,96	18,00	9,24	15,20	14,25
20	Balai POM di Palopo	**79,81**	19,20	18,00	9,24	15,80	17,57
21	Balai POM di Payakumbuh	**73,44**	18,48	18,00	8,40	15,80	12,76

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Loka POM

No	Nama Satker/Unit	Nilai Final Evaluasi 2023	Komponen Evaluasi				
			Perencanaan Kinerja (24)	Pengukuran Kinerja (24)	Pelaporan Kinerja (12)	Evaluasi Internal (20)	Capaian Kinerja (20)
1	Loka POM di Banyumas	**74,71**	17,76	17,28	9,48	16,40	13,79
2	Loka POM di Mimika	**76,01**	17,28	17,52	9,00	16,00	16,21
3	Loka POM di Tanimbar	**76,74**	17,76	19,20	9,84	14,80	15,14
4	Loka POM di Baubau	**76,79**	18,96	17,28	9,48	15,40	15,67
5	Loka POM Lubuklinggau	**74,96**	18,48	18,48	8,64	14,40	14,96
6	Loka POM Ende	**76,17**	18,48	18,00	9,84	15,40	14,45
7	Loka POM Dumai	**76,23**	18,48	18,00	8,88	15,80	15,07
8	Loka POM di Kab. Aceh Selatan	**73,45**	17,80	16,80	9,00	13,80	16,05
9	Loka POM di Kab. Aceh Tengah	**75,08**	17,76	17,30	9,00	13,80	17,22
10	Loka POM di Kab. Banggai	**75,27**	18,48	16,80	8,88	14,40	16,71
11	Loka POM di Kab. Belitung	**75,00**	17,76	17,52	8,76	13,80	17,16
12	Loka POM di Kab. Bima	**74,67**	18,00	17,28	9,00	15,00	15,39

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Satker/Unit	Nilai Final Evaluasi 2023	Komponen Evaluasi				
			Perencanaan Kinerja (24)	Pengukuran Kinerja (24)	Pelaporan Kinerja (12)	Evaluasi Internal (20)	Capaian Kinerja (20)
13	Loka POM di Kab. Buleleng	**70,78**	17,28	15,84	8,52	14,40	14,74
14	Loka POM di Kab. Dharmasraya	**73,14**	17,76	17,28	9,24	14,40	14,46
15	Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara (Loka POM di Kab. Tabalong)	**75,73**	17,28	16,80	8,64	14,40	18,61
16	Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	**76,88**	18,00	16,80	9,00	14,40	18,68
17	Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	**67,10**	15,36	16,32	9,00	13,00	13,42
18	Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	**74,45**	17,76	16,80	9,24	14,40	16,25
19	Loka POM di Kab. Manggarai Barat	**73,66**	18,00	18,00	9,240	15,00	13,42
20	Loka POM di Kab. Merauke	**71,33**	17,28	15,60	8,64	14,20	15,61
21	Loka POM di Kab. Pulai Morotai	**75,32**	19,68	14,16	8,40	14,40	18,68
22	Loka POM di Kab. Rejang Lebong	**73,930**	16,56	17,28	8,04	16,00	16,05
23	Loka POM di Kab. Sanggau	**71,81**	17,76	15,60	7,68	13,40	17,37
24	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	**75,52**	17,28	16,80	8,64	12,80	20,00
25	Loka POM di Kab. Toba Samosir	**73,22**	18,00	17,52	9,00	14,40	14,30
26	Loka POM di Kab. Tulang Bawang	**74,15**	17,76	16,80	9,00	15,20	15,39

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Satker/Unit	Nilai Final Evaluasi 2023	Komponen Evaluasi				
			Perencanaan Kinerja (24)	Pengukuran Kinerja (24)	Pelaporan Kinerja (12)	Evaluasi Internal (20)	Capaian Kinerja (20)
27	Loka POM di Kota Balikpapan	**76,27**	18,96	17,28	9,84	14,80	15,39
28	Loka POM di Kota Sorong	**75,49**	16,80	18,00	9,36	14,40	16,93
29	Loka POM di Kota Sungai Penuh (Loka POM di Kab Bungo)	**76,35**	17,28	18,00	8,64	14,40	18,03
30	Loka POM di Kota Tanjungbalai	**70,52**	17,28	16,56	8,64	13,40	14,64
31	Loka POM di Kota Tanjungpinang	**70,67**	17,28	16,80	8,64	15,00	12,95

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

IKU 26

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar

Data Hasil Pengukuran IP ASN BPOM

No	Unit Kerja	Nilai IP ASN						
		Kualifikasi	Kopetensi	Kinerja	Disiplin	Total	Target Data Roren	Gap (Target - Total)
1	Inspektorat Utama	21	34,69	27,31	5	88	82	+6
2	Inspektorat I	21	38,83	25	5	89,83	87,2	+2.63
3	Inspektorat II	21,15	39,84	28,48	5	94,48	86,25	+8.23
4	Biro Perencanaan dan Keuangan	20,94	35,52	24,48	5	85,93	83	+2.93
5	Biro Hukum dan Organisasi	21,11	36,28	25,11	5	87,49	86	+1.49
6	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	21,12	32,83	25,47	5	84,41	83	+1.41
7	Biro Sumber Daya Manusia	20,63	39,2	25	5	89,82	80	+9.82
8	Biro Umum	20,56	37,06	24,31	5	86,93	76	+10.93
9	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	22,44	38,47	24,31	5	90,22	83	+7.22
10	Direktorat Registrasi Obat	22,67	39,72	25,16	5	92,55	89,3	+3.25
11	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	22,08	38,67	24,53	5	90,27	88	+2.27
12	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	21,9	35,53	25	4,88	87,31	80	+7.31
13	Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	22,27	39,36	24,63	5	91,26	80	+11.26
14	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	21,89	39,13	25	5	91,01	88,5	+2.51
15	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	22,01	40	25,27	5	92,28	87	+5.28
16	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	22,18	38,57	25	5	90,74	83	+7.74
17	Direktorat Pengawasan Kosmetik	21,81	39,42	23,84	5	90,08	83	+7.08
18	Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	21,79	38,85	24,49	5	90,13	86	+4.13
19	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	21,95	40	25	5	91,95	87	+4.95
20	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	21,41	39,24	25,27	5	90,92	81	+9.92
21	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	21,24	39,72	25	5	90,96	85,25	+5.71
22	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	21,6	39,09	24,17	5	89,86	87,25	+2.61
23	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	22	39,27	25	5	91,27	86,75	+4.52
24	Nasional	21,55	38,52	25	5	90,06	86,5	+3.56
25	Balai Pengujian Produk Biologi	22,03	36,9	24,83	5	88,76	0	+88.76
26	Balai Kalibrasi	21,85	35,19	25	4,46	86,5	0	+86.5
27	Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	21,29	35,79	25	5	87,07	0	+87.07
28	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	21,1	37,63	23,44	5	87,17	86	+1.17
29	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	21,85	40	26,03	5	92,88	86,9	+5.98
30	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	20,48	37,28	25	5	87,75	79	+8.75
31	Direktorat Cegah Tangkal	21,48	39,52	25	5	91	85	+6
32	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	21,4	35,28	25	5	86,68	85	+1.68
33	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	21,16	38,75	24,22	5	89,13	85	+4.13
34	Direktorat Siber Obat dan Makanan	21,37	38,67	25	5	90,03	86,9	+3.13
35	Balai Besar POM di Banda Aceh	21,37	38,98	24,67	5	90,02	83	+7.02

No	Unit Kerja	Nilai IP ASN						
		Kualifikasi	Kopetensi	Kinerja	Disiplin	Total	Target Data Roren	Gap (Target - Total)
36	Balai Besar POM di Medan	20,88	37,82	25	4,98	88,68	84	+4.68
37	Balai Besar POM di Padang	20,95	39,42	24,51	5	89,88	84,3	+5.58
38	Balai Besar POM di Pekanbaru	20,37	39,31	25	5	89,68	80	+9.68
39	Balai POM di Jambi	21,2	39,36	25	5	90,56	85,3	+5.26
40	Balai Besar POM di Palembang	20,94	39,19	24,57	5	89,7	85	+4.7
41	Balai POM di Bengkulu	20,4	38,45	25	5	88,85	84,5	+4.35
42	Balai Besar POM di Bandar Lampung	20,93	37,99	24,12	5	88,03	79	+9.03
43	Balai POM di Batam	21,05	35,52	25	5	86,57	85,75	+0.819
44	Balai POM di Pangkalpinang	21,43	39,41	25	5	90,84	84,75	+6.09
45	Balai Besar POM di Jakarta	21,31	39,61	25	5	90,92	84,75	+6.17
46	Balai Besar POM di Bandung	21,63	38,26	24,83	5	89,72	81	+8.72
47	Balai Besar POM di Semarang	21,31	39,56	25,04	5	90,9	86	+4.9
48	Balai Besar POM di Yogyakarta	21,4	39,16	24,74	5	90,3	85,9	+4.4
49	Balai Besar POM di Surabaya	21,24	39	25	4,97	90,21	85,5	+4.71
50	Balai Besar POM di Serang	21,22	37,86	25	4,97	89,05	84	+5.05
51	Balai Besar POM di Denpasar	20,9	39,44	24,78	5	90,13	85,4	+4.73
52	Balai Besar POM di Mataram	21,22	38,89	24,86	5	89,96	84	+5.96
53	Balai POM di Kupang	21,19	38,83	25	5	90,02	86	+4.02
54	Balai Besar POM di Pontianak	21,03	39,11	25	5	90,14	83,5	+6.64
55	Balai Besar POM di Palangkaraya	20,47	39,04	24,91	5	89,42	83	+6.42
56	Balai Besar POM di Banjarmasin	21,06	38,01	25	4,94	89,01	83	+6.01
57	Balai Besar POM di Samarinda	21,17	39,77	25	5	90,94	85	+5.94
58	Balai Besar POM di Manado	21,07	38,87	25	5	89,94	85,25	+4.69
59	Balai POM di Palu	21,23	39,3	25	5	90,53	84,2	+6.33
60	Balai Besar POM di Makassar	21,25	38,65	24,77	4,97	89,64	77	+12.64
61	Balai POM di Kendari	20,94	38,25	25	4,97	89,16	84	+5.16
62	Balai POM di Gorontalo	21,08	37,81	25	4,94	88,83	84,5	+4.33
63	Balai POM di Ambon	21,14	39,58	25,16	4,92	90,81	83	+7.81
64	Balai Besar POM di Jayapura	21,15	39,55	25	5	90,7	84,8	+5.9
65	Balai POM di Manokwari	21,46	37,37	25	4,95	88,78	86	+2.78
66	Balai POM di Sofifi	21,42	38,58	25	5	90	86	+4
67	Balai POM di Mamuju	21,41	36,94	25	4,95	88,3	83	+5.3

IKU 27

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

LAPORAN RINGKAS PENILAIAN KEMAMPUAN LABORATORIUM
BBPOM MAKASSAR TAHUN 2023

Unit Kerja : Balai Besar POM di Makassar

Tanggal Penilaian : 27 Desember 2023

Nama Tim Penilai : 1. Bertha Lolo Lukita, S.Si, Apt.,M.Farm

2. Susy Affrini Hutapea,S.Si.,Apt.,M.Si

Hasil Penilaian :

No	Komponen Nilai SKL	Persentase (%)
1.	Persentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (%)	84,9
2.	Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi (%)	84,3
3.	Persentase Pemenuhan Standar Peralatan (%)	84,3
Persentase Pemenuhan SKL (%)		84,4

Kendala Pemenuhan :

1. Ruang Lingkup

- Keterbatasan jenis baku pembanding yang tersedia di Infalabs, sementara anggaran untuk pengadaan baku pembanding eksternal sangat terbatas.
- Keterbatasan sampel obat yang beredar di wilayah regional Makassar yang sesuai dengan penugasan pengujian kelas terapi BBPOM Makassar pada SRL.
- Peningkatan ruang lingkup yang menggunakan alat GCMS, IC, turbidimeter, KCKT ELSD belum dapat dilaksanakan karena karena alat belum tersedia.
- Media dan reagen untuk parameter pada penguian antibiotik Vancomycin dan suplemen kesehatan probiotik belum tersedia, dan baru akan diadakan tahun 2024.
- Pengadaan suku cadang yang kurang tiap tahunnya disebabkan keterbatasan anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Jumlah SDM yang tidak sebanding dengan jumlah parameter uji yang harus diverifikasi untuk dimasukkan ke dalam capaian SRL.

2. Kompetensi

- Kompetensi belum bisa dikembangkan karena belum memiliki alat yang ada pada syarat kompetensi keterampilan (GCMS, Spektrofluorometer, DUSA).
- Terdapat personel pindahan dari fungsi lain (ahli muda) yang masih butuh pendampingan terkait parameter uji dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, sehingga belum dapat diberikan penugasan mengerjakan sampel sendiri.

3. Peralatan

- Mainboard Spektrofluorometer yang dikirimkan dari BBPOM Jayapura mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan.
- Anggaran untuk pengadaan DUSA tahun 2024 hanya cukup untuk yang manual, hasil uji presisi yang dihasilkan tidak memenuhi syarat. Diharapkan tambahan anggaran untuk pengadaan DUSA otomatis
- Tidak terdapat pemenuhan alat penunjang tahun 2023 di laboratorium mikrobiologi karena anggaran yang tersedia dialokasikan untuk pengadaan isolator.

Rencana Tindak Lanjut

1. Ruang Lingkup

- Peningkatan ruang lingkup menggunakan alat GCMS akan dilakukan setelah pengadaan alat GCMS pada TW2 tahun 2024.
- Melakukan koordinasi dengan bagian Inspeksi untuk memperoleh sampel obat yang sesuai dengan penugasan pengujian kelas terapi BBPOM Makassar pada SRL.
- Melakukan penambahan ruang lingkup terhadap parameter uji yang ada pada SRL jika baku pembanding, reagen, dan media sudah tersedia tahun 2024
- Melakukan penambahan ruang lingkup untuk parameter uji yang terdapat pada SRL melalui pelatihan internal/bimbingan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

teknis khususnya untuk parameter uji yang sulit untuk dioptimasi.

- Penambahan SDM Magang dari Balai POM Palopo tahun 2024 diharapkan dapat membantu meningkatkan pemenuhan RL.
- Berkomunikasi dengan PPPOMN atau BBPOM/BPOM yang telah melakukan pengembangan ruang lingkup tertentu untuk sharing baku pembanding/pereaksi apabila anggaran pengadaan terbatas atau membuat permintaan pengembangan baku pembanding ke Laboratorium Baku Pembanding PPPOMN apabila memungkinkan untuk dikembangkan.

2. Kompetensi

- Melakukan pelatihan (bimbingan teknis) untuk personel laboratorium sesuai dengan kebutuhan.
- Menyusun rencana percepatan peningkatan kompetensi untuk personel pindahan dari fungsi/lab lain (supervisi atau magang)

3. Peralatan

- Pengadaan GCMS direncanakan akan dilakukan pada tahun 2024 TW 2.
- Pengadaan mainboard Spektrofluorometer direncanakan tahun 2024 dari anggaran pemeliharaan.
- Peralatan (utama dan penunjang) akan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan Balai dan disesuaikan dengan anggaran yang diperoleh.

Tim Penilai	Tim Penilai	Kepala BBPOM di Makassar
Bertha Lolo Lukita, S.Si., Apt., M. Farm	Susy Affrini Hutapea, S.Si., Apt., M.Si	Dra. Hariani, Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

IKU 28

Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email

	TW I			TW II			TW III			TW IV		
	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
total_akun_individu	112	109	109	104	105	105	104	104	106	106	105	105
total_akun_unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
total_individu_login	107	107	102	102	94	103	101	103	101	102	100	102
total_individu_aktif	107	107	102	102	94	103	101	103	101	102	100	102
total_unitbalai_aktif	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aspek Login (%)	28,66	29,45	28,07	29,42	26,86	29,43	29,13	29,71	28,58	28,87	28,57	29,14
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	28,66	29,45	28,07	29,42	26,86	29,43	29,13	29,71	28,58	28,87	28,57	29,14
Perhitungan (%)	97,32	98,9	96,14	98,84	93,72	98,86	98,26	99,42	97,16	97,74	97,14	98,28
Perhitungan per TW	97,32	98,11	97,45	97,8	96,98	97,3	97,43	97,68	97,62	97,64	97,59	97,65
Nilai Indeks	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC

	TW I			TW II			TW III			TW IV		
Aktifitas	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Login BOC	40	40	40	40	40	40	0	40	20	40	40	40
Akses BCC	60	60	60	60	60	60	0	60	60	30	60	60
Total	100	100	100	100	100	100	0	100	80	70	100	100
Perhitungan per TW	100	100	100	100	100	100	85,71	87,5	86,67	85	86,36	87,5
Nilai Indeks Per TW	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Sharing Folder

	TW I			TW II			TW III			TW IV		
Aktifitas	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah Akses	85	277	114	202	172	310	319	265	211	269	152	98
Perhitungan	85	181	158,67	169,5	170	193,33	211,29	218	217,22	222,4	216	206,17
Nilai Indeks	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Berita Aktual

	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah Upload	9	10	15	6	11	11	11	8	9	9	8	7
Jumlah Viewer	140	410	1362	425	563	534	905	295	2558	1462	2680	1766

Perhitungan Rata2 Berita	9	9,5	11,33	10	10,2	10,33	10,43	10,13	10	9,9	9,73	9,5
Perhitungan Rata2 Pengunjung	15,56	28,95	56,24	58,43	56,86	55,39	59,44	57,21	79,91	87,41	105,93	114,91
Indeks Per TW	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SPIMKER

	TW I			TW II			TW III			TW IV		
Aktifitas	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah Entry	11	4	6	4	5	6	4	12	1		3	
Jumlah Verifikasi	11	4	6	4	5	6	4	4	0		1	
Perhitungan	100	100	100	100	100	100	100	33,33	0	85	33,33	85
Perhitungan per TW	100	100	100	100	100	100	100	91,67	81,48	81,83	77,42	78,06
Nilai Indeks per TW	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
Komposit SPIMKER (20%)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT

Penilaian	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
% Sarana	20,91	15,45	51,67	71,3	70,49	77,75	71,85	71,98	72,08	71,07	83,66	91,42
% Sampling	27,36	66,25	101,49	103,85	105,37	102,19	112,23	119,07	114,29	115,73	114,24	106,38
% Pengujian				48,71	47,61	53,42	53,9	46,61	54,81	76,08	69,09	93,3
Rata-Rata	24,14	40,85	76,58	74,62	74,49	77,79	79,33	79,22	80,39	87,63	89	97,03
Indeks per Bulan	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Komposit SIPT	0,8	0,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2,4

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indeks	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Indeks Pemanfaatan	2,5	2,75	3	3	3	3	2,75	3	3	2,5	3	3
Indeks Pemutakhiran	1,4	1,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2	2	2	2,8
Indeks Pengelolaan Data dan	1,95	2,08	2,6	2,6	2,6	2,6	2,48	2,6	2,5	2,25	2,5	2,9

IKU 29

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

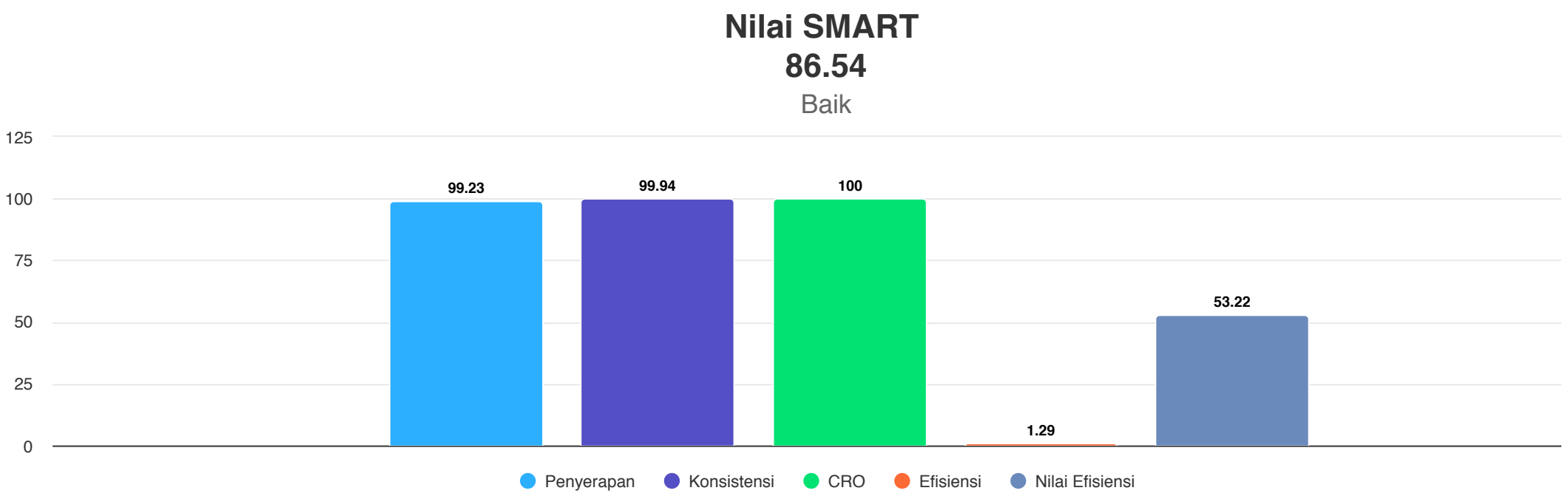
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

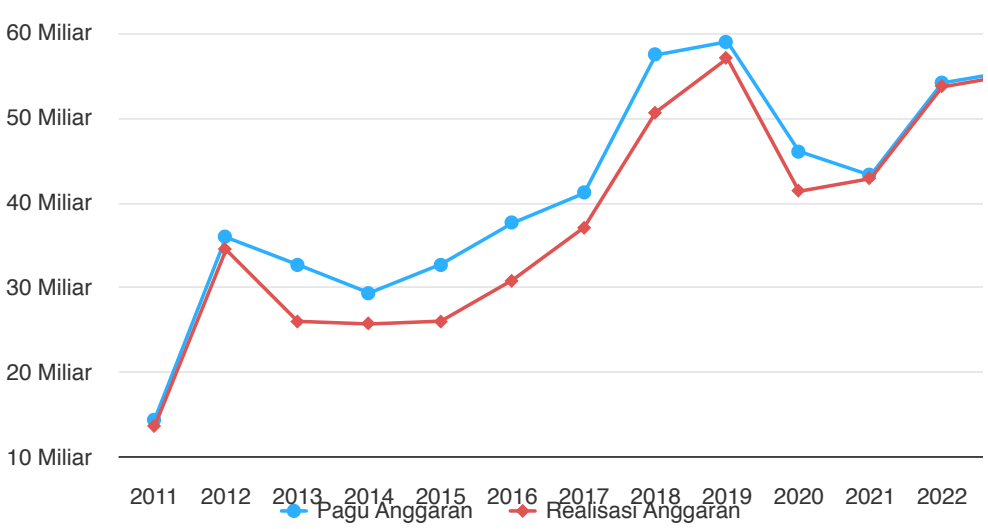
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	136	063	432923	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	Nilai	100.00	83.09	89.69	92.50	100.00	94.93	100.00	100.00	94.99	100%	94.99
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.31	17.94	9.25	10.00	9.49	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	91.55		95.42					100.00			

tanggal cetak : 07-01-24 11:49:25 oleh : 432923

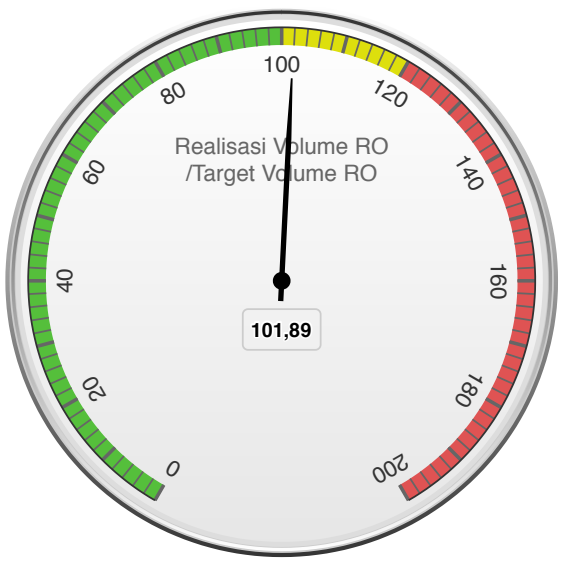


Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2023



Persentase Volume RO



Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	18.587.496.000	18.541.394.447	99.75 %
52 Belanja Barang	27.818.929.000	27.446.730.367	98.66 %
53 Belanja Modal	9.099.685.000	9.093.194.062	99.93 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Komposisi Alokasi Anggaran

Komposisi Realisasi Anggaran

Partisipasi Satuan Kerja

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	432923	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2021 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

